

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2025-2029







INDONESIA EMAS 2045

Bekerja Bersama Merangkul Semua

BAPPERIDA

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 tahun yang selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Visi dengan memperhatikan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
15. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
16. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *Cascading* kinerja.
17. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran / *output*, hasil/*outcome*, dan dampak/ *impact*).
18. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari hasil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

BARITO SELATAN

BAB II
SISTEMATIKA DAN FUNGSI RPJMD

Pasal 2

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:
    a. Bab I : PENDAHULUAN;
    b. Bab II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
    c. Bab III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
    d. Bab IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
    e. Bab V : PENUTUP.
(2) Isi dan rincian penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

DAHANI DAHANA
TUNTUNG TULUS

Pasal 3

(1) RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan :
    a. RKPD;
    b. Renstra Perangkat Daerah;
    c. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
    d. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya,
    pada periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(3) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN dan EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Bapperida bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;
    b. capaian target indikator kinerja daerah;
    c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan
    d. efektivitas program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.
(4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pasal 5

(1) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
    a. Pemantauan;dan
    b. Supervisi.
(2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
    a. RKPD dengan RPJMD; dan
    b. Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
(3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, adanya perubahan kebijakan Nasional atau pemekaran daerah.

(2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(3) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah per tahun digunakan sebagai ukuran capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
(2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. hasil pengendalian dan evaluasi;
b. kondisi strategis daerah; atau
c. fiskal daerah.
(3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ITA MINARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 05, 49 /2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Barito Selatan diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun yang disebut Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi landasan bagi seluruh kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Barito Selatan selama periode 5 (lima) tahun. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Periode terpilih, dan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Perda tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 terdiri dari 6 bab dan 10 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barito Selatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, Serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4

KATA PENGANTAR

Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang

Adil Ka'talino Bacuramin Ka'saruga, Basengat Ka'jubata

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Tim Bapperida Kabupaten Barito Selatan telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045.

RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai wujud penerjemahan arah pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan sebagai upaya pencapaian 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Proyek Hasil Terbaik Cepat. Penyusunan dokumen ini menggunakan pendekatan teknokratis dengan memperhatikan prinsip-prinsip analisis yang strategis, logis, dinamis, dan sistematis. Dokumen ini ditujukan untuk menjadi bahan awal perumusan dan bahan penyusunan Renstra PD.

Akhir kata, semoga dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman strategis bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan pembangunan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Diharapkan pula, dokumen ini mampu mendukung terwujudnya visi Kabupaten Barito Selatan yang Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045.

Buntok, Juli 2025

Tim Penyusun

Bapperida Kabupaten Barito Selatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR XI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 8
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029 9
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 11
1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 12
1.4. Maksud dan Tujuan 13
1.5. Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029 14

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 17

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 17
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah 17
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam 27
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 30
2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 39
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas 47
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 51
2.1.7. Demografi 54
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 64
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 64

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua 78
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata 81
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif 95
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 96
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 97
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 102
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia 102
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 105
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau 110
2.3.4. Transformasi Digital 111
2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 113
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 117
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro 120
2.3.8. Daya Saing Iklim Berinvestasi 121
2.4. Aspek Pelayanan Umum 123
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 123
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 130
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 135
2.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah 136
2.5.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 137
2.5.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 148
2.5.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 169
2.5.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan 176
2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 185
2.7. Gambaran Keuangan Daerah 189
2.7.1. Realisasi APBD 190
2.7.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan 209
2.8. Permasalahan dan Isu Strategis 216

2.8.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 216
2.8.2. Isu Strategis Kewilayahan 253
2.8.3. Isu Strategis 262

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 283

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 283
3.1.1. Visi 283
3.1.2. Misi 285
3.1.3. Tujuan dan Sasaran 295
3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 309
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan 311
3.2.2. Lokus Pembangunan 333
3.2.3. Program Prioritas 339

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 384

4.1. Program Perangkat Daerah 384
4.2. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 436
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 447
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) 448
4.2.3 Standar Pelayanan Minimum 475

BAB V PENUTUP 481

5.1. Kaidah Pelaksanaan 481
5.2. Skema Monitoring dan Evaluasi 483

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 *Highlight* Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 11
Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan, 2024 18
Tabel 2.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota, 2024 21
Tabel 2.3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan, 2024 21
Tabel 2.4 Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan, 2024 22
Tabel 2.5 Luas Masing-Masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan, 2024 25
Tabel 2.6 Rata-rata Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, dan Tekanan Udara, 2024 27
Tabel 2.7 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Rata-data Menurut Bulan, 2024 27
Tabel 2.8 Volume Sampah TPS dan Sampah Lingkungan, 2020—2024 50
Tabel 2.9 Jumlah Kejadian Bencana, 2020—2024 53
Tabel 2.10 Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2020–2024 55
Tabel 2.11 Rasio Jenis Kelamin Penduduk, 2020–2024 55
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2020–202456
Tabel 2.13 Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 ... 58
Tabel 2.14 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2025–2029 . 61
Tabel 2.15 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2025–2029 61
Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan, 2025–2029 63
Tabel 2.17 PDRB Atas Harga Konstan (ADHK), 2020—2024 66
Tabel 2.18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), 2020—2024 67
Tabel 2.19 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2020—2024 70
Tabel 2.20 Indikator Komponen IPM, 2020–2024 74

Tabel 2.21 Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan, 2020—2024 78
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Kemampuan Literasi dan Numerasi Tahun 2023 85
Tabel 2.23 Persentase Kompetensi Pendidik, 2020–2022 91
Tabel 2.24 Rapor Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, 2024 93
Tabel 2.25 Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan, 2020-2023 96
Tabel 2.26 Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA, 2022-2023..... 98
Tabel 2.27 i-Bangga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 99
Tabel 2.28 Angka Ketergantungan, 2020–2024..... 103
Tabel 2.29 Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024..... 104
Tabel 2.30 Bukan Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024..... 104
Tabel 2.31 Kondisi Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2024 109
Tabel 2.32 Indeks Inovasi Daerah 110
Tabel 2.33 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2020 – 2021 112
Tabel 2.34 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah Tahun 2024 120
Tabel 2.35 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2020-2024 120
Tabel 2.36 Jumlah Investor dan Nilai Investasi, 2020-2023..... 123
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Demokrasi, 2020–2024..... 132
Tabel 2.38 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana, 2020–2024 133
Tabel 2.39 Kondisi Capaian Pendidikan, 2021–2023 137
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan, 2020—2024..... 139
Tabel 2.41 Jumlah Rasio Dokter, 2021–2023 141
Tabel 2.42 Kondisi Perkembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Per 1.000 Penduduk, 2020–2024 142
Tabel 2.43 Area Irigasi, 2020 – 2022 144

Tabel 2.44 Sebaran Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 145
Tabel 2.45 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 2020–2024 146
Tabel 2.46 Capaian Indikator Bidang Sosial, 2020–2024 147
Tabel 2.47 Capaian Indikator Bidang Sosial, 2020–2024 147
Tabel 2.48 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024 148
Tabel 2.49 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020–2024 149
Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan, 2020 – 2022..... 150
Tabel 2.51 Jumlah Program Kampung Iklim, 2020–2024 152
Tabel 2.52 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020–2024..... 153
Tabel 2.53 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021–2023 155
Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020–2024..... 156
Tabel 2.55 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor, 2020—2022 157
Tabel 2.56 Data Penumpang Angkutan Umum, 2020—2021 157
Tabel 2.57 Jumlah Kendaraan Umum yang Berangkat dan Datang Menurut Trayek dan Jenis Pelayanan Angkutan, 2022..... 158
Tabel 2.58 Perkembangan Urusan Koperasi, 2020-2023 160
Tabel 2.59 Jumlah Koperasi Menurut Bidang Usaha, 2020-2023 ... 161
Tabel 2.60 Perkembangan Usaha Mikro, 2020-2023..... 161
Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Statistik 2020 – 2024..... 164
Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Persandian, 2020-2021..... 165
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Perpustakaan, 2020–2024..... 166
Tabel 2.64 Capaian Kinerja Kearsipan, 2020–2024..... 167
Tabel 2.65 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga, 2021–2022 168
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Pelayanan Kebudayaan, 2021–2023 168
Tabel 2.67 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap, 2020—2024 169

Tabel 2.68 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, 2020—2024 169
Tabel 2.69 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Barito Selatan, 2020—2024 170
Tabel 2.70 Jumlah Restoran, Hotel, dan Objek Wisata, 2020—2024 171
Tabel 2.71 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Barito Selatan, 2020—2024 172
Tabel 2.72 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kalimantan Tengah, 2020—2024 172
Tabel 2.73 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit, 2020—2024 172
Tabel 2.74 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Kopra, 2020—2024 173
Tabel 2.75 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Karet, 2020—2024 173
Tabel 2.76 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kopi, 2020—2024 173
Tabel 2.77 Jumlah Sarana Perdagangan, 2020—2024..... 174
Tabel 2.78 Capaian Kinerja Perindustrian, 2020—2024 175
Tabel 2.79 Capaian Kinerja Transmigrasi, 2020–2022 176
Tabel 2.80 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, 2020–2024 177
Tabel 2.81 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD, 2020–2024 178
Tabel 2.82 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan, 2020–2024 179
Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Keuangan, 2021–2022 180
Tabel 2.84 Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian, 2020–2024 181
Tabel 2.85 Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan, 2020–2024 182
Tabel 2.86 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan, 2020–2024 184
Tabel 2.87 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020–2024 185
Tabel 2.88 Persentase Realisasi Capaian SPM, 2021—2024..... 186
Tabel 2.89 Permasalahan Penerapan SPM, 2021—2024 188

Tabel 2.90 Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM, 2021—2024 188
Tabel 2.91 Gambaran Kondisi Realisasi APBD, 2020—2024 190
Tabel 2.92 Gambaran Kondisi Pagu Anggaran APBD, 2020—2024 . 191
Tabel 2.93 Gambaran Capaian Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Terhadap Pagu APBD Kabupaten Barito Selatan 191
Tabel 2.94 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 193
Tabel 2.95 Gambaran Ringkas Capaian Pendapatan Daerah 194
Tabel 2.96 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan 195
Tabel 2.97 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah..... 195
Tabel 2.98 Gambaran Ringkas Capaian Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan 198
Tabel 2.99 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan 200
Tabel 2.100 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan..... 200
Tabel 2.101 Gambaran Ringkas Capaian Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan 204
Tabel 2.102 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan 205
Tabel 2.103 Proporsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan 205
Tabel 2.104 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Waktu Berjalan Kabupaten Barito Selatan 206
Tabel 2.105 Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan 208
Tabel 2.106 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan 208
Tabel 2.107 Gambaran Ringkas Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan 214
Tabel 2.108 Isu Strategis Daerah 275
Tabel 3.1 Keselarasan Visi Nasional, Kalimantan Tengah, dan Barito Selatan 285
Tabel 3.2 Keselarasan Asta Cita, Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029, dan Misi RPJMD Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 292

Tabel 3.3 Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 -2029 300
Tabel 3.4 Keselarasan Tahap dan Tema Pembangunan terhadap Misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (Tahun Rencana 2026 – 2030) 313
Tabel 3.5 Sasaran Pembangunan Makro Klaster Buntok 315
Tabel 3.6 Kontribusi PDRB Skenario *Big push* Setiap Kluster di Provinsi Kalimantan Tengah 317
Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 (Tahun Rencana 2026–2030) 322
Tabel 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 340
Tabel 3.9 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 342
Tabel 3.10 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan 347
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah 388
Tabel 4.2 Komparasi Target Capaian untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Barito Selatan 438
Tabel 4.3 Cascading Mandat Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 dengan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 439
Tabel 4.4 Cascading Mandat Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 dengan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 440
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) 447
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelengaaraan Urusan Kabupaten Barito Selatan 449
Tabel 4.7 Target Realisasi Capaian SPM (%), 2025-2030 475
Tabel 4.8 Target Realisasi Capaian SPM setiap Urusan (%), 2025-2030 476
Tabel 4.9 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan, 2025-2030 478
Tabel 4.10 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan, 2025-2030 479
Tabel 5.1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 484

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran 9
Gambar 1.2 Hubungan Visi Misi RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 10
Gambar 1.3 Periodesasi Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan 13
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan 19
Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan, 2024 20
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan 22
Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan..... 26
Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Tampung Air Bersih 31
Gambar 2.6 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 33
Gambar 2.7 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan 34
Gambar 2.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Iklim 36
Gambar 2.9 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Bahan Bakar ... 37
Gambar 2.10 Indikator IKP, 2021—2024..... 39
Gambar 2.11 Indikator PPH, 2021—2024..... 40
Gambar 2.12 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, 2020—2024 41
Gambar 2.13 Presentase Rumah Tangga dengan Sumber Listrik PLN, 2020-2023 43
Gambar 2.14 Rasio Elektrifikasi, 2020—2024 43
Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, 2020—2022..... 45
Gambar 2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2020—2023 48
Gambar 2.17 Akses Keberlanjutan Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman dan Layak, 2020—2024 48
Gambar 2.18 Nilai Indeks Risiko Bencana, 2020–2024..... 52
Gambar 2.19 Piramida Penduduk Tahun 2024..... 57

Gambar 2.20 Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029 60
Gambar 2.21 Proyeksi Proporsi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2025–2029 62
Gambar 2.22 Struktur Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020–2024 65
Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2020–2024 69
Gambar 2.24 Garis Kemiskinan, 2020–2024 69
Gambar 2.25 PDRB Per Kapita, 2020–2024 71
Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2020–2024 72
Gambar 2.27 Indeks Gini, 2020—2024 73
Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2020—2024 74
Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Inklusif, 2020-2023 75
Gambar 2.30 Nilai Tukar Petani, 2020—2024 76
Gambar 2.31 Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2020—2024 77
Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Usia Harapan Hidup (UHH), 2020–2024 79
Gambar 2.33 Perbandingan Tingkat Prevalensi Stunting, 2021–202481
Gambar 2.34 Perbadingan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, 2020–2024 82
Gambar 2.35 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS), 2020–2024 83
Gambar 2.36 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2022-2024 85
Gambar 2.37 Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2020–2024 87
Gambar 2.38 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah, 2020–2024 88
Gambar 2.39 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah, 2020–2024 89
Gambar 2.40 Indeks Kerukunan Umat Beragama 97
Gambar 2.41 Indeks Ketimpangan Gender, 2020—2024 100
Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Gender, 2020—2024 100
Gambar 2.43 Indeks Pemberdayaan Gender, 2020—2024 101
Gambar 2.44 PDRB Industri Pengolahan, 2020—2024 106

Gambar 2.45 PDRB Akomodasi Makan dan Minum, 2020—2024 ... 107
Gambar 2.46 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2020–2024 ... 108
Gambar 2.47 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 2020—2024 ... 114
Gambar 2.48 Net Ekspor Barang dan Jasa, 2020—2024 ... 115
Gambar 2.49 Jumlah Rumah Layak Huni, 2020—2021 ... 119
Gambar 2.50 Inflasi, 2020-2023 ... 121
Gambar 2.51 Incremental Capital Output Rasio, 2020-2023 ... 122
Gambar 2.52 Peta Konektivitas Transportasi Barito Selatan ... 125
Gambar 2.53 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 2021–2024 ... 127
Gambar 2.54 Persentase Penegakan Peraturan Daerah, 2021–2022 131
Gambar 2.55 Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban per Kepolisian Resort, 2020–2024 ... 134
Gambar 2.56 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, 2020–2024 ... 135
Gambar 2.57 Capaian Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, 2020–2022 ... 143
Gambar 2.58 Indeks Desa Membangun, 2021–2024 ... 154
Gambar 2.59 Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS), 2020 – 2022 159
Gambar 2.60 Persentase Pertumbuhan Investasi, 2020-2023 ... 163
Gambar 2.61 Realisasi Pendapatan dan Persentase Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Anggaran ... 197
Gambar 2.62 Proporsi Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan ... 202
Gambar 2.63 Realisasi Belanja dan Persentase Realisasi Belanja Terhadap Rencana Anggaran ... 203
Gambar 2.64 Pergerakan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Waktu Berjalan Kabupaten Barito Selatan ... 207
Gambar 3.1 Visualisasi *Cascading* Misi dengan Isu Strategis ... 294
Gambar 3.2 Periodesasi Target Pembangunan RPJPD dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD 2025–2029 ... 309
Gambar 3.3 Tahap dan Tema Pembangunan ... 314
Gambar 3.4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan Skema BAU dan *Bigh Push*, 2025-2045 ... 318

Gambar 3.5 Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Bekerja dengan Asumsi *Big push*..... 320
Gambar 3.6 Koridor Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 333
Gambar 3.7 Klasterisasi Wilayah Pembangunan..... 335
Gambar 3.8 Peta Rencana Pembangunan Konektivitas Jalan Kabupaten Barito Selatan 338
Gambar 3.9 Fokus Strategis Pembangunan..... 343
Gambar 5.1 Siklus Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi..... 486

BAB I
Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antarsektor, penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; mendorong partisipasi masyarakat; serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJMD). Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun

2023–2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta skenario *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan RPJPN Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 melalui Asta Cita; RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema "*Transposisi Pondasi Pembangunan*" serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa "*Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara*" yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta arah kebijakan yang diturunkan menjadi program perangkat daerah dalam lima tahun ke depan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga merumuskan program prioritas kepala daerah sebagai bentuk konkret dari agenda strategis yang telah dijanjikan. Dokumen ini akan dioperasionalisasikan secara teknis sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut.

(1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(4) Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran NegSara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(17) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

(18) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

(19) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

(20) Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

(21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

(22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

(23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

(24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

(25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

(26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

(27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

(28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);

(29) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

(30) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

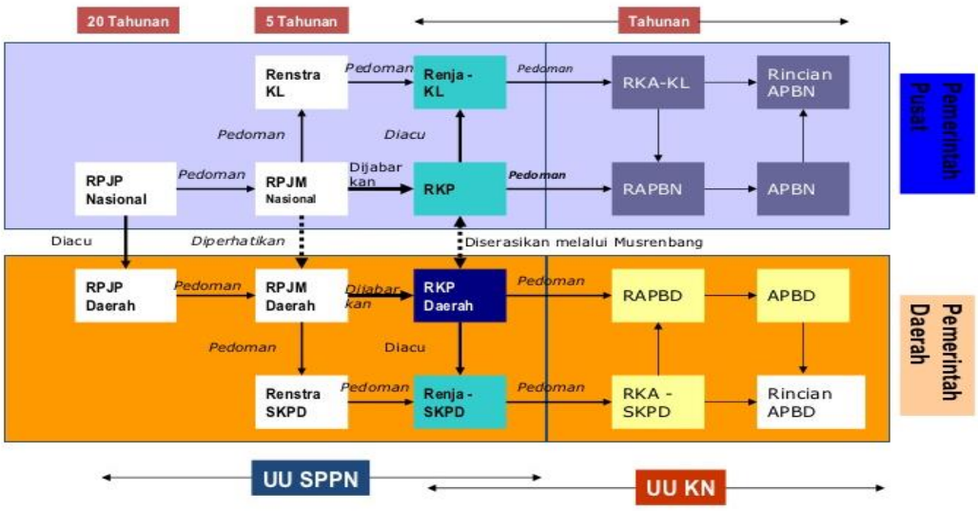
Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

(31) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Hubungan yang relevan dan kontekstual antar dokumen perencanaan daerah penting untuk menciptakan keselarasan perencanaan baik di tingkat daerah, nasional, maupun provinsi. Hal tersebut digambarkan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioal (SPPN). Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

RPJMD berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi dengan memperhatikan RPJMN sserta hasil *cascading* dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pendekatan dalam SPPN dicapai melalui implementasi perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: Bappenas, 2016

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029

Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirancang dengan memperhatikan keterkaitan arahan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Maka dari itu, untuk memastikan keterpaduan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dijabarkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut.



Gambar 1.2 Hubungan Visi Misi RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025

Penyelarasan ini dilakukan terhadap isu strategis nasional, visi dan misi Presiden/Asta Cita, 17 Program Prioritas Presiden, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kabupaten Barito Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional terutama pada sektor-sektor seperti penguatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan energi berbasis potensi lokal, serta penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Kebijakan pembangunan nasional diturunkan melalui fokus pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik.

Berdasarkan tema wilayah tahun 2025–2029 Pulau Kalimantan diarahkan sebagai "*Superhub Ekonomi Nusantara*" dengan kegiatan prioritas utama pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah. Untuk itu, Pemerintah Pusat memandatkan beberapa *highlight* intervensi untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.1 *Highlight* Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi
1	Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah
2	Penguatan infrastruktur konektivitas (jalan, darat, laut, serta udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
3	Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi elonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja
4	Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal
5	Peningkatan konektivitas tenaga listrik disertasi pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan digitalisasi
6	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan
7	Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif
8	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular
9	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan permberdayaan masyarakat yang adaptif, dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Sumber: Lampiran 4 Dokumen RPJMN 2025–2029

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 merupakan salah satu acuan utama dalam proses perumusan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan arah pembangunan antara tingkat provinsi dan kabupaten, baik dari visi, misi, arah kebijakan maupun program prioritas. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu *"Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya,*

Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal Dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045" yang diaktualisasikan melalui lima misi pembangunan.

Selain itu, berbagai program prioritas kepala daerah yang dimandatkan dalam "*Huma Betang*" juga menjadi bahan pertimbangan strategis dalam perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Penyelarasan ini tidak hanya memperkuat integrasi pembangunan antarwilayah, tetapi juga memastikan bahwa perencanaan di tingkat kabupaten turut mendukung pencapaian target pembangunan provinsi. Hal ini turut mencerminkan peran strategis pemerintah kabupaten dalam mengimplementasikan mandat pembangunan yang bersumber dari tingkat provinsi.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen induk yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kerangka pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Pada periode ini, fokus utama adalah memperkuat fondasi pembangunan dengan menekankan pada penguatan dasar-dasar pembangunan.

Tema periode pertama RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-2045 adalah "*Transformasi fondasi pembangunan*". Tema ini memandatkan bahwa pada periode tahun 2025–2029, Kabupaten Barito Selatan akan berfokus pada pemenuhan aspek-aspek dasar. Hal ini menjadi krusial sebab diperlukan dasar yang kokoh, berkelanjutan, inklusif, dan adaptif untuk mendukung tercapainya RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-2045.



Gambar 1.3 Periodesasi Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan

Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045

Pada tahap awal pembangunan (periode), fokus utama yang dilakukan pada yaitu untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia; mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai efisiensi ekonomi; reformasi demokrasi dan tata kelola birokrasi; serta peningkatan pembangunan layanan infrastruktur dasar. Selain itu, pendekatan pembangunan berbasis wilayah atau zonasi menjadi strategi penting dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten ini terbagi ke dalam empat zona wilayah, yaitu Zona Timur, Zona Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan, yang masing-masing dirancang memiliki fokus pengembangan utama. Pembagian zona ini juga mempertimbangkan tantangan pembangunan di tingkat provinsi, seperti pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pemanfaatan potensi jasa pariwisata berbasis lingkungan, serta penguatan kawasan *Food Estate*. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana dirumuskan dalam RPJPD tahap pertama, difokuskan pada pembangunan, perbaikan, dan pengembangan sektor-sektor mendasar sebagai fondasi penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :

a) Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada

mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;

b) Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan

c) Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :

a) Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas;
b) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
c) Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
d) Sebagai instrumen *cascading* untuk seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
e) Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; dan
f) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan.

1.5. Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
KALTENG TANGGUH 2045 KALTENG BERKAH KALTENG MAJU BerAKHLAK #bangga melayani bangsa INDONESIA EMAS 2045

BAB II

Gambaran


BARITO SELATAN
DAHANI DAHANAI
TUNTUNG TULUS

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara historis, Kabupaten Barito Selatan didirikan pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, administratif Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Aspek geografi dan demografis dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi geografis dan kependudukan di suatu wilayah. Kedua aspek tersebut menjadi informasi dasar yang penting untuk mengenali dan menggali berbagai potensi sumber daya alam maupun manusia untuk merencanakan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berikut dijabarkan lebih rinci terkait karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi Kabupaten Barito Selatan.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Dalam konteks pembangunan, posisi dan peran strategis suatu daerah merujuk pada letak geografis, potensi sumber daya, serta fungsi penting yang dimiliki daerah tersebut. Peran strategis daerah dapat mencakup kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, energi, keamanan, hingga pelestarian lingkungan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, Barito Selatan memiliki luas wilayah sebesar 7.020 km^2 dengan persentase terhadap keseluruhan wilayah Kalimantan Tengah sebesar 5,75 persen. Lebih lanjut, Kabupaten Barito Selatan terdiri atas 6 kecamatan, 7 kelurahan, 86 desa, 173 Rukun Warga, dan 663 Rukun Tetangga. Berdasarkan data yang ada, Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan ibukota kecamatan di Tabak Kanilan memiliki luas

wilayah terbesar yaitu 1.758 km^2 atau 25,04 persen dari total keseluruhan luas wilayah. Secara lebih rinci, luas wilayah per kecamatan beserta ibukota kecamatan di Kabupaten Barito Selatan dapat diihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

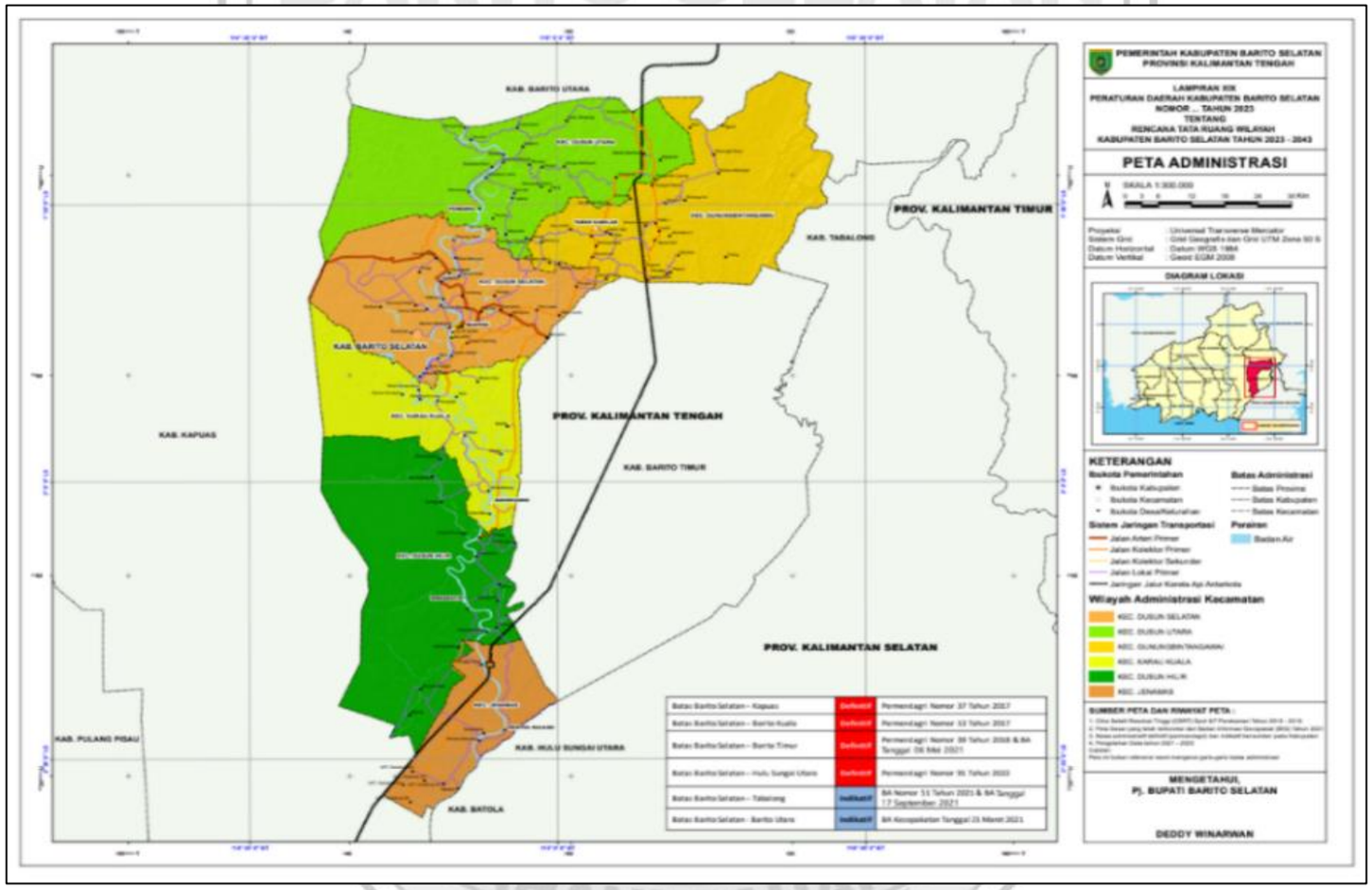
Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan, 2024

	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
1	Jenamas	Rantau Kujang	662
2	Dusun Hilir	Mengkatip	1.370
3	Karau Kuala	Bangkuang	825
4	Dusun Selatan	Buntok	1.133
5	Dusun Utara	Pendang	1.272
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	1.758
		Kabupaten Barito Selatan	7.020

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024

Berdasarkan penataan administrasi wilayah, Kabupaten Barito Selatan berbatasan dengan daerah-daerah berikut:

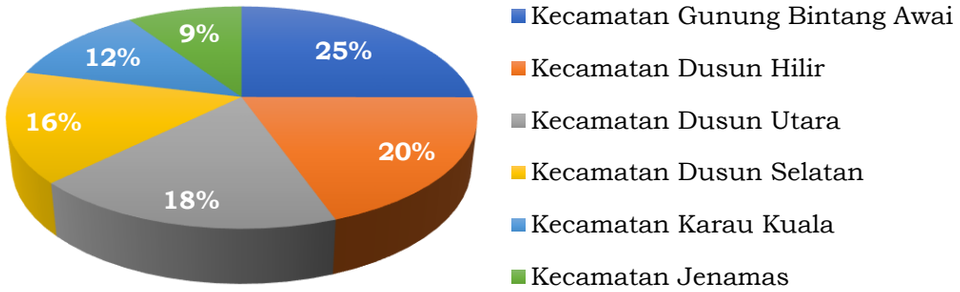
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan memiliki lokasi strategis sebagai kota transit yang menghubungkan Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Banjarmasin sehingga memiliki peran penting dalam pergerakan aktivitas perekonomian. Lebih lanjut, jika dilihat cakupan luas wilayah per kecamatan, persentase cakupan wilayah terbesar ditempati oleh Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan persentase sebesar 25,04 persen atau seluas 1.758 km^2 dan Kecamatan Jenamas menjadi wilayah terkecil dengan persentase sebesar 9,43 dengan luas sebesar 662 km^2. Persentase luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Barito Selatan dijabarkan pada Gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan, 2024

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Selatan

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis, Kabupaten Barito Selatan terletak diantara 1° 15’ 35,625”–2° 36’ 31,300 LS dan 114° 35’ 48,600”–115° 36’ 35,700 BT. Sementara itu, secara geografis Kabupaten Barito Selatan terletak di sepanjang Sungai Barito yang melewati lima dari enam kecamatan dengan panjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar 233,64 km. Dari segi jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, Kecamatan Jenamas memiliki jarak terjauh dengan Buntok dan/atau Kecamatan Dusun Selatan, yaitu sejauh 132 km. Sebaliknya, Pendang sebagai ibukota Kecamatan Dusun Utara menjadi yang paling dekat dengan Buntok dan/atau Kecamatan Dusun Selatan dengan jarak sejauh 41 km. Adapun jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten dijabarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota, 2024

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Kab (Km)
1	Jenamas	Rantau Kujang	132
2	Dusun Hilir	Mengkatip	99
3	Karau Kuala	Bangkuang	57
4	Dusun Selatan	Buntok	1
5	Dusun Utara	Pendang	41
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	42

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024

2.1.1.3. Topografi Wilayah

Karakteristik wilayah Barito Selatan secara fisik relatif serupa di tiap wilayahnya. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 0-55 mdpl. Di samping itu, sebagian wilayah pada Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki wilayah perbukitan dengan tinggi wilayahnya berada di 55 mdpl. Sementara itu, wilayah selatan tepatnya di Kecamatan Jenamas berada di ketinggian wilayah terendah, yaitu 27 mdpl.

Tabel 2.3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan, 2024

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Jenamas	Rantau Kujang	27
2	Dusun Hilir	Mengkatip	31
3	Karau Kuala	Bangkuang	33
4	Dusun Selatan	Buntok	35
5	Dusun Utara	Pendang	38
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	55

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024

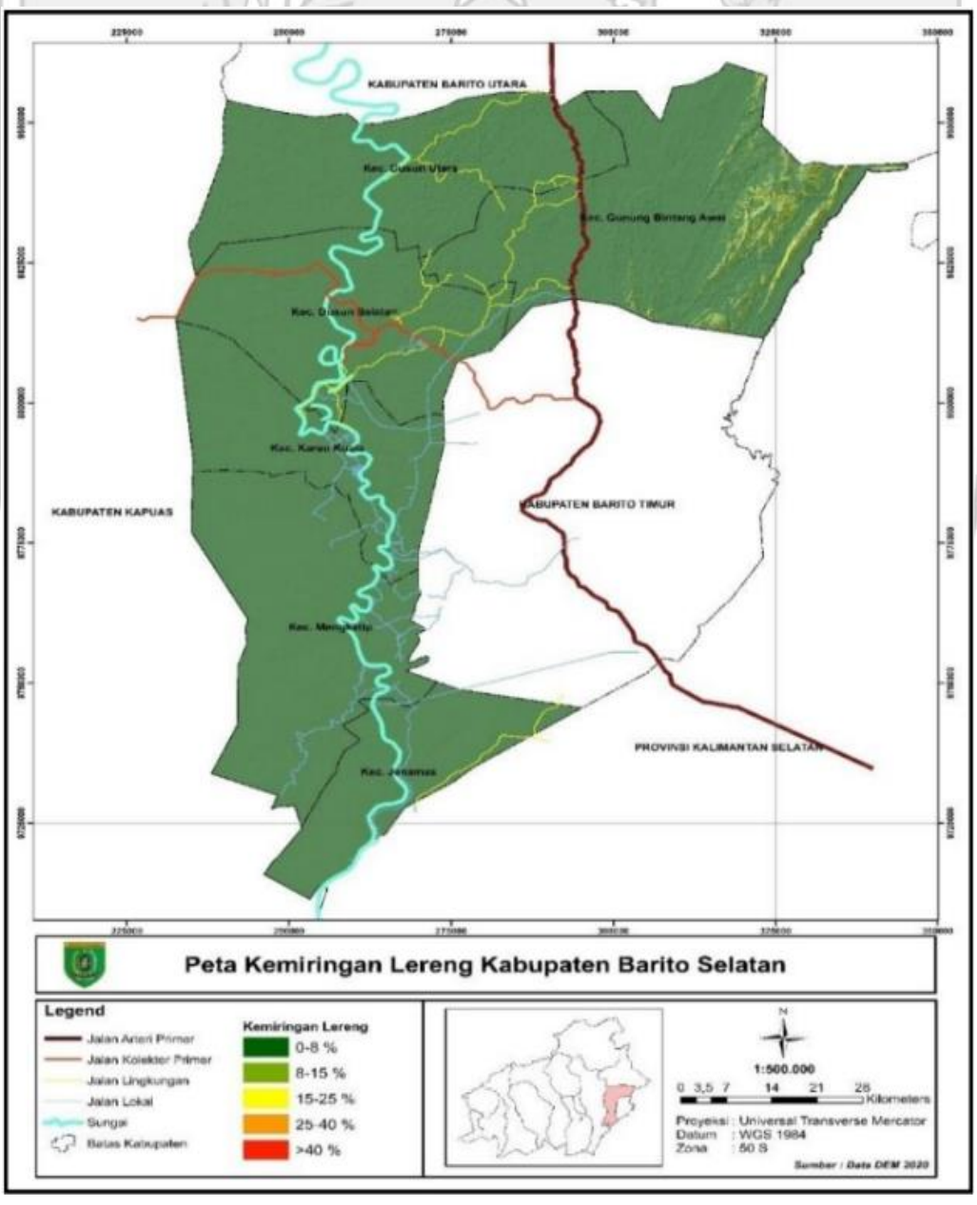
Kemiringan lahan di Barito Selatan berkisar antara 0–40 persen dengan pola dari wilayah bagian tengah ditemui variasi topografi perbukitan. Pola intensitas kemiringan lahan semakin meningkat ke arah utara dimulai dari bagian yang landai hingga miring. Bagian utara dari Barito Selatan didominasi oleh topografi kategori curam dengan rangkaian pegunungan yang memanjang dari barat daya ke timur. Dalam hal ini, luas wilayah dengan kategori curam yang berkisar antara 15–40 persen memiliki luas sebesar 85.222 hektare. Sebaliknya, area dengan kemiringan lahan datar berkisar antara 0–2 persen dengan luas sebesar 441.838 hektare yang mendominasi wilayah bagian selatan.

Tabel 2.4 Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan, 2024

No	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)
1	0 – 2%	441.838
2	2 – 15%	158.268
3	15 – 40%	85.222
4	>40%	16.682
Jumlah		**702.000**

Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024

Berdasarkan data ketinggian dan kemiringan lahan, berikut disertakan peta kemiringan lereng Kabupaten Barito Selatan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan

Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.1.1.4. Kondisi Geologi dan Tanah

Struktur geologi Kabupaten Barito Selatan terbentuk dari formasi geologis yang tergolong tua. Penyebaran formasi batuannya terdiri dari: aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; dan batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu, terdapat batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; batuan beku; batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; serta batuan metamorf. Berdasarkan formasi batuannya, potensi kesuburan lahan yang dimiliki Barito Selatan tergolong tidak tinggi. Sementara itu, berdasarkan bahan induk (geologi), iklim, dan keadaan medannya, jenis tanah di daerah bagian selatan berbeda dengan daerah hulu utara. Secara garis besar, jenis tanah dijabarkan sebagai berikut:

a. Aluvial

   Jenis tanah aluvial tersebar di sepanjang aliran Sungai Barito, mulai dari bagian selatan hingga ke utara. Tanah ini merupakan hasil endapan sungai yang membentuk tanggul alami pada dataran banjir, berasal dari bahan induk berupa liat dan pasir. Ciri khas tanah aluvial ini meliputi bentuk wilayah yang relatif datar, warna tanah berkisar antara coklat tua hingga coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase yang cenderung lambat, serta reaksi tanah yang masam. Secara keseluruhan, wilayah dengan jenis tanah aluvial di Kabupaten Barito Selatan mencakup luasan sekitar 290.993,12 hektare atau setara dengan 41,45 persen dari total luas lahan.

b. Regosol

   Jenis tanah regosol menyebar di bagian tengah Kabupaten Barito Selatan tepatnya di Kecamatan Dusun Utara. Tanah ini bersolum dalam bentuk bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik, dan reaksi tanah masam. Perbandingan luas tanah yang berjenis regosol terhadap keseluruhan lahan memiliki persentase sebesar 8,29 persen atau 58.198,62 hektare.

c. Padsolik

Jenis tanah padsolik cukup luas dan menyebar di bagian tengah hingga hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak sampai agak berbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik, dan reaksi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu yang membentang di puncak perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 meter.

d. Organosol

Jenis tanah organosol merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat disebelah Barat sungai Barito mulai dari bagian selatan hingga ke bagian utara. Ketebalan gambut umumnya memiliki kedalaman sekitar 90 cm yang terdapat pada wilayah datar dan di daerah cekungan, tanah berwarna merah kehitaman sampai coklat tua, drainase sangat terhambat, dan reaksi tanah sangat masam. Tanah organosol secara keseluruhan memiliki luas sebesar 145.847,15 hektare atau 20,78 persen dari persebaran jenis tanah di Kabupaten Barito Selatan.

e. Podsolik

Jenis tanah podsolik menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kuarsa) pada bentuk wilayah berombak dan agak berombak, tanah berwarna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, memiliki tekstur sedang, drainase agak terhambat, dan reakasi masa. Adapun persebaran jenis tanah podsolik secara keseluruhan sebesar 71.019,2 hektare atau 11,2 persen.

f. Podsol

Jenis tanah podsol terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, dan berwarna kecoklatan. Luas persebaran dengan jenis tanah podsol di Barito Selatan sebesar 78.533,08 hektare.

Secara lebih rinci luas masing-masing jenis tanah di Kabupaten Barito Selatan dapat diuraikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

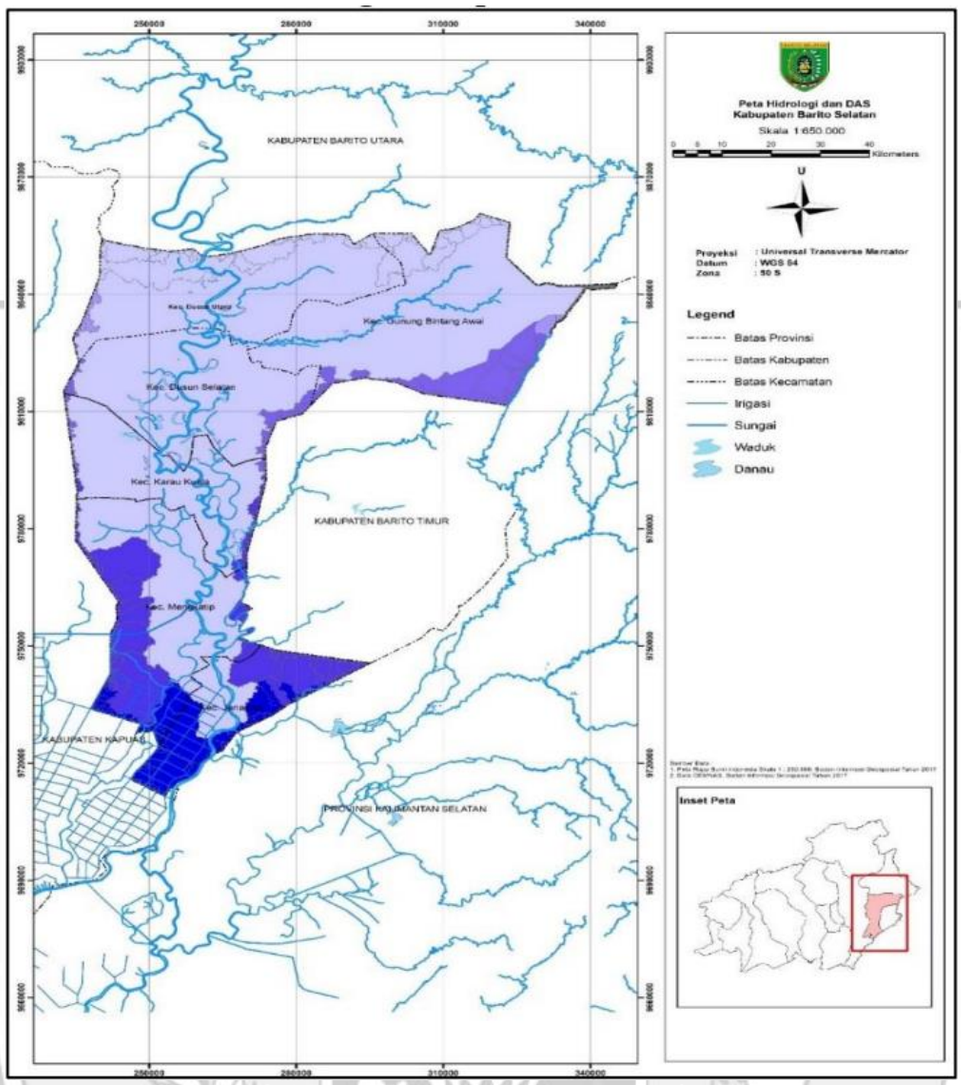
Tabel 2.5 Luas Masing-Masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan, 2024

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aluvial	290.993.12	41,45
2	Organosol	145.847,15	20,78
3	Podsolik	78.533,08	11,19
4	Podsol	54.102,07	7,71
5	Litosol	44.174,86	6,29
6	Kambisol	30.151,09	4,30
7	Regosol	58.198,62	8,29
Jumlah		**702.000**	**100**

Sumber: RPD Kabupaten Barito Selatan, 2023 – 2026

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Barito Selatan dikenal dengan keberadaan wilayah yang dilewati oleh sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, yaitu sungai Barito serta beberapa sungai kecil/ anak sungai. Wilayah hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan verval tinggi bahkan beriam. Tidak hanya sebagai sumber mata air mineral, kawasan hulu memiliki potensi yang besar pada pembangkit listrik tenaga air. Sejalan dengan kondisi fisiografisnya, sungai di Barito Selatan memiliki verval yang rendah hingga ke sektor tengah. Maka dari itu, jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh terkhusus ketika musim kemarau. Namun, ketika musim hujan tiba air sungai seringkali meluap ke wilayah sekitarnya. Pada wilayah yang berada di tengah terdapat rawa gambut dan di bagian hilir mudah ditemui rawa pasang surut. Dengan demikian, kawasan berawa berfungsi sebagai retensi ketika kelebihan air di musim hujan. Peta dari hidrologi dan DAS Kabupaten Barito Selatan yang dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut.



Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan

Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Secara umum, Kabupaten Barito Selatan beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan pada tahun 2024 antara 26,9°C hingga 28,3°C, tertinggi pada April dan terendah pada Juli. Kelembapan udara berkisar antara 82,5% hingga 87,3% dengan puncaknya terjadi pada bulan Juni dan Juli. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan total 460,6 mm dan terendah pada bulan Maret sebesar 77,8 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Agustus hingga Desember dengan 30 hingga 31 hari hujan per bulan. Secara lebih rinci, kondisi klimatologi di Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rata-rata Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, dan Tekanan Udara, 2024

Bulan	Suhu/ Temperature (°C)	Kelembaban/ Humidity (%)	Kecepatan Angin (m/sec)	Tekanan Udara (mbar)
Januari	27,6	86,2	1,2	1007,4
Februari	28,0	84,0	1,5	1008,1
Maret	28,1	84,6	1,4	1007,2
April	28,3	84,9	1,3	1005,6
Mei	28,1	86,6	1,3	1005,8
Juni	27,5	87,3	1,0	1007,3
Juli	26,9	87,3	1,1	1007,9
Agustus	27,2	86,1	1,1	1008,9
September	28,0	82,5	1,2	1008,4
Oktober	27,8	84,5	1,1	1009,0
November	27,8	85,6	1,3	1007,4
Desember	27,2	86,3	1,3	1010,4

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

Tabel 2.7 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Rata-data Menurut Bulan, 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (Jam)
Januari	460,6	24,0	2,4
Februari	185,4	16,0	4,2
Maret	77,8	14,0	3,7
April	324,3	23,0	5,1
Mei	261,5	22,0	4,3
Juni	261,5	16,0	2,4
Juli	83,1	30,0	3,9
Agustus	245,7	31,0	4,6
September	245,7	30,0	6,3
Oktober	293,2	31,0	4,0
November	200,0	30,0	3,7
Desember	377,5	31,0	3,1

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang tersebar di beberapa sektor. Potensi yang ada terdiri atas pertanian dan perkebunan; perikanan dan peternakan; kehutanan dan hasil hutan; pertambangan dan energi; dan pariwisata dan agrowisata.

1. **Sektor Pertanian dan Perkebunan**

   Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi. Tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija dibudidayakan secara luas, terutama di kawasan dataran rendah dan bantaran sungai. Program ketahanan pangan digiatkan di desa-desa, seperti di Desa Sababilah. Di sektor perkebunan, tanaman karet menjadi komoditas utama dengan luas lahan mencapai sekitar 32.000 hektar. Selain itu, terdapat pula perkebunan kelapa sawit dan kelapa rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan. Komoditas seperti rotan dan batu bata juga menjadi bagian dari usaha lokal yang menunjang perekonomian masyarakat di pedesaan. Pada tahun 2020, produksi padi mencapai 13.044 ton. Dalam hal ini, padi sawah menjadi komoditas utama dengan program cetak sawah seluas 600 hektar pada tahun 2025. Tidak hanya itu, komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan semangka juga turut menyumbang dalam sektor pertanian daerah.

2. **Sektor Perikanan dan Peternakan**

   Sektor perikanan dan peternakan memanfaatkan kekayaan ekosistem perairan sungai dan rawa. Perikanan air tawar berkembang pesat melalui budidaya ikan patin, nila, mas, toman, dan jelawat dengan sistem keramba dan kolam, seperti di Danau Sadar. Selain itu, potensi peternakan juga cukup besar terutama peternakan sapi, kerbau rawa, babi, ayam, dan itik. Kerbau rawa menjadi ikon peternakan khas daerah, dengan potensi produk turunan seperti susu dan keju. Selanjutnya, Sungai Tabuk dan danau rawa gambut di Barito Selatan menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan air tawar, termasuk ikan lais yang menunjukkan indeks keanekaragaman tinggi. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga potensi ekonomi melalui pengembangan produk herbal dan ekowisata. Pada tahun 2020, produksi perikanan budidaya menghasilkan 8.766 ton. Sementar itu, produksi ikan air tawar dan penangkapan ikan mencapai 6.657 ton.

3. **Sektor Kehutanan dan Hasil Hutan**

   Potensi kehutanan dan keanekaragaman hayati juga menjadi aset penting. Wilayah ini memiliki hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna, termasuk tumbuhan berkhasiat obat yang belum banyak didokumentasikan dan dibudidayakan, seperti di Desa Madara. Selain itu, wilayah Hulu Tampang di Kecamatan Dusun Utara memiliki keanekaragaman jenis bambu yang tumbuh di hutan sekunder dan terbuka yang menunjukkan potensi untuk pemanfaatan berkelanjutan. Kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan mencakup hutan primer dan sekunder yang luas, menghasilkan berbagai jenis kayu unggulan seperti meranti, keruing, dan ulin. Selain hasil kayu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, damar, dan gaharu. Total hutan belantara di wilayah ini mencapai lebih dari 370.000 hektar.

4. **Sektor Pertambangan dan Energi**

   Sektor pertambangan merupakan salah satu andalan utama dengan indikasi potensi minyak bumi yang cukup besar di wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Cekungan Barito, salah satu dari empat cekungan hidrokarbon utama di Indonesia yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi. Kabupaten Barito Selatan juga memiliki kekayaan tambang, terutama batu bara yang tersebar di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara dengan estimasi cadangan mencapai lebih dari 250 juta ton. Lebih lanjut, Kabupaten Barito Selatan juga menyimpan potensi tambang galian C seperti pasir kuarsa, tanah liat, dan granit. Selain itu, terdapat pula potensi bijih besi, emas, perak, aluminium (bauksit), timah hitam (galena), bijih seng, dan mineral non-logam seperti zirkon. Potensi tambang ini secara bertahap akan ditekan dalam rangka transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), sehingga diperlukan kebijakan hilirisasi dan diversifikasi produk pertambangan dan energi.

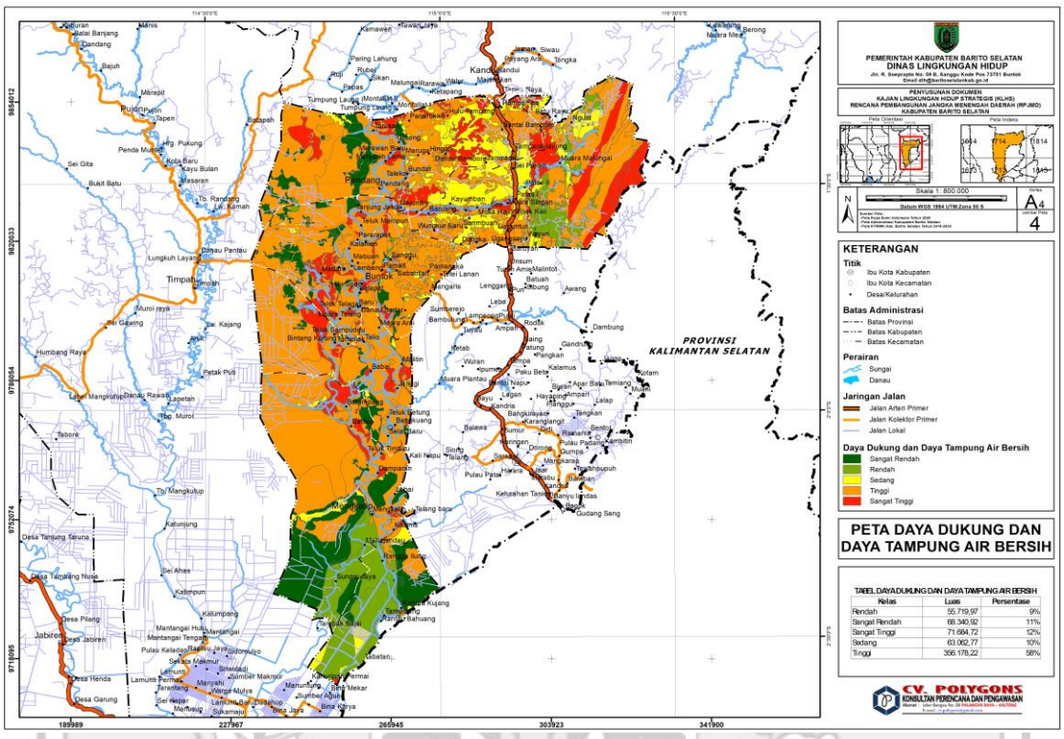
5. Sektor Pariwisata

Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi wisata yang menarik seperti Betang Nansarunai, Danau Sadar, Danau Masura, air terjun, dan pemandian Rawen (air merah). Lebih lanjut, melihat sebagian besar penduduk bermukim di sepanjang sungai, pengembangan kawasan *waterfront* menjadi potensi untuk meningkatkan daya tarik wisata, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, perhatian terhadap dinamika ekosistem seperti *oxbow lake* (danau tapal kuda) perlu diperhatikan guna menjaga kesehatan lingkungan. Di sisi lain, wisata budaya berbasis nilai adat seperti rumah adat Huma Betang juga dapat dikembangkan sebagai simbol harmoni masyarakat Dayak.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Barito Selatan memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang berkelanjutan dan bijaksana sangat diperlukan agar pemanfaatan sumber daya ini tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia diukur dengan pendekatan jasa ekosistem *(ecosystem services)* sebagaimana yang dilakukan dalam *Millenium Ecosystem Assessment–United Nation*. Pendekatan ini berasumsi semakin tinggi jasa ekosistem maka semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen, yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan *(land cover/land use)* sebagai *proxy*. Dalam hal ini, dianalisis sejumlah daya dukung wilayah yang ditinjau berdasarkan daya dukung dan daya tampung air bersih, pengaturan tata aliran air dan banjir, pangan, pengaturan iklim, serta bahan bakar.



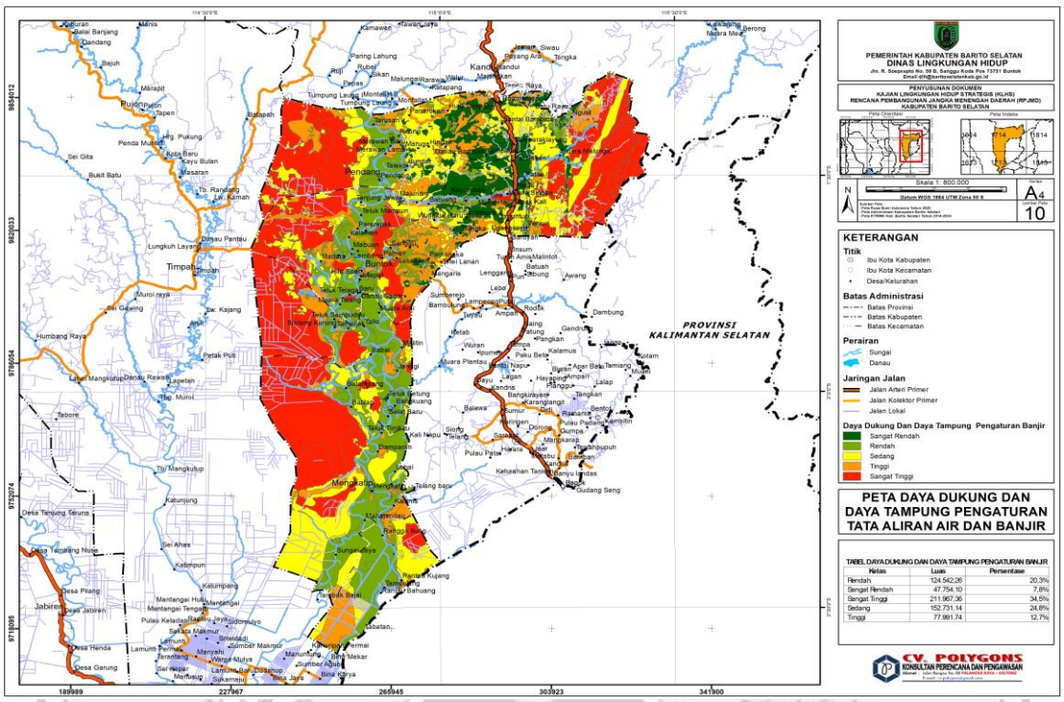
Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Tampung Air Bersih

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029

Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Bersih Kabupaten Barito Selatan mengungkapkan ketimpangan ketersediaan air bersih antarwilayah yang cukup mencolok. Wilayah di bagian utara dan timur laut Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kategori sangat rendah untuk daya tampung air bersih yang ditandai dengan warna merah Artinya, daerah-daerah ini memiliki kemampuan lingkungan yang terbatas dalam menyediakan air bersih bagi kebutuhan masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini sesuai dengan kenyataan di lapangan, di mana beberapa kecamatan seperti Dusun Selatan dan Dusun Utara sering mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, terutama pada musim kemarau. Banyak warga masih bergantung pada sumur dangkal atau sumber air permukaan yang rentan terhadap pencemaran dan kekeringan. Di beberapa desa, keberadaan sumber air bahkan harus ditunjang melalui distribusi air bersih oleh pemerintah daerah atau melalui sistem penampungan air hujan yang tidak selalu mencukupi.

Sementara itu, sebagian besar wilayah di bagian selatan dan barat daya kabupaten, yang ditandai dengan warna hijau pada peta, tergolong dalam kategori sangat tinggi untuk daya tampung air bersih. Wilayah ini umumnya memiliki topografi yang lebih tinggi, kondisi hutan yang masih relatif terjaga, serta sistem aliran sungai yang lebih stabil, seperti daerah di sekitar Kecamatan Karau Kuala dan sekitarnya. Kawasan ini memiliki banyak sumber mata air dan anak sungai yang menjadi sumber utama air bersih bagi masyarakat, termasuk untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa daya tampung air bersih sangat dipengaruhi oleh faktor tutupan lahan, keberadaan hutan, serta kualitas tata kelola sumber daya alam. Tidak hanya itu, wilayah di bagian selatan, yaitu Jenamas memiliki potensi perikanan yang melimpah sehingga mengindikasikan cadangan air yang melimpah pula.

Disparitas ini menuntut adanya strategi pengelolaan sumber daya air yang lebih merata dan berkelanjutan. Wilayah dengan daya dukung rendah perlu didorong untuk melakukan konservasi daerah tangkapan air, penghijauan lahan kritis, dan pembangunan infrastruktur air bersih yang lebih baik, termasuk teknologi pemanenan air hujan atau pengolahan air limbah menjadi air layak pakai. Sementara itu, wilayah dengan daya dukung tinggi juga harus dijaga agar tidak mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan atau eksploitasi berlebihan. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan dapat memiliki akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya air bersih yang sangat vital bagi kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.6 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

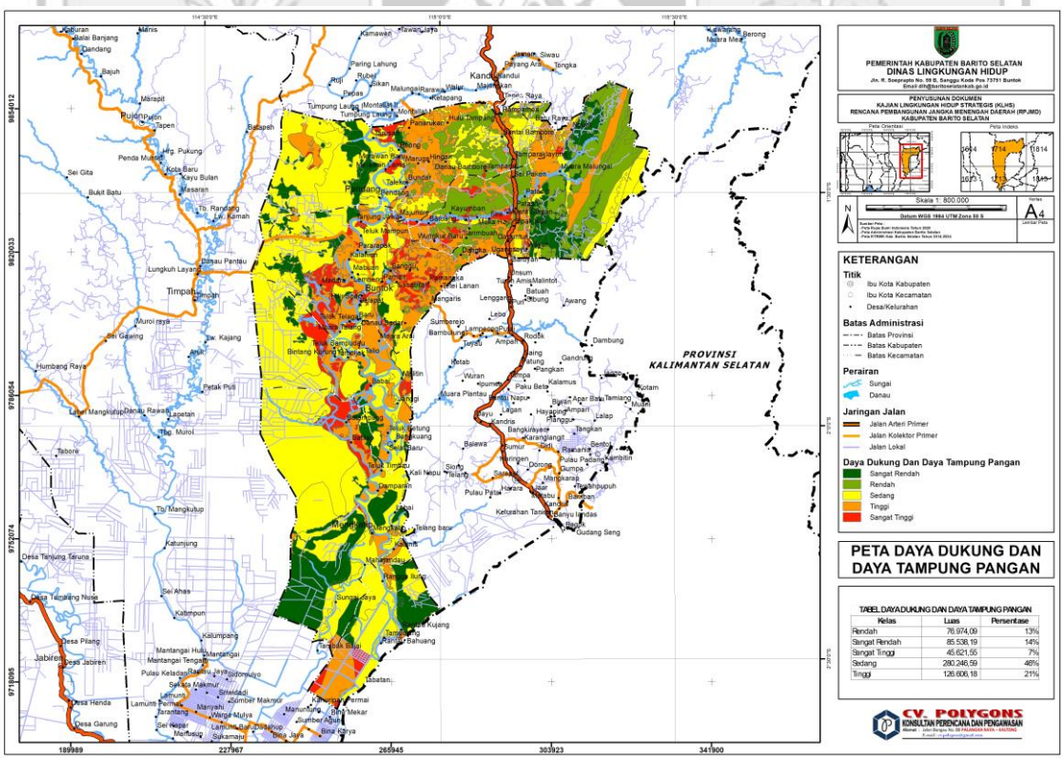
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029

Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah barat dan selatan berada dalam kategori sangat rendah hingga rendah daya tampung terhadap aliran air dan pengendalian banjir, yang ditandai dengan warna merah dan jingga. Kondisi ini merefleksikan ketidakmampuan kawasan tersebut dalam mengatur aliran air secara alami, baik karena kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan, ataupun sistem drainase dan sungai yang tidak optimal. Hal ini selaras dengan sering terjadinya genangan dan banjir musiman di daerah seperti Kecamatan Dusun Selatan dan sekitarnya, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi. Banjir di wilayah ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada infrastruktur, lahan pertanian, serta akses transportasi.

Sementara itu, wilayah utara dan timur laut tampak memiliki daya tampung dan pengaturan air yang lebih tinggi, ditandai dengan warna hijau dan kuning, yang menunjukkan bahwa daerah ini masih memiliki kemampuan lingkungan yang baik dalam menyerap dan mengalirkan air hujan. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh keberadaan kawasan hutan

yang relatif masih lestari, kemiringan lahan yang mendukung aliran air alami, serta rendahnya intensitas pembangunan yang dapat mengganggu fungsi hidrologis tanah. Namun demikian, sebagian dari wilayah ini mulai menunjukkan indikasi penurunan daya tampung akibat fragmentasi lahan dan aktivitas pertambangan serta perkebunan skala besar.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerentanan banjir tinggi membutuhkan penanganan terpadu, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir (embung, saluran air, dan sumur resapan), rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta penataan ruang yang memperhatikan fungsi ekologis daerah tangkapan air. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko banjir. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan, diharapkan kapasitas lingkungan dalam mengelola aliran air dan mencegah banjir di Barito Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



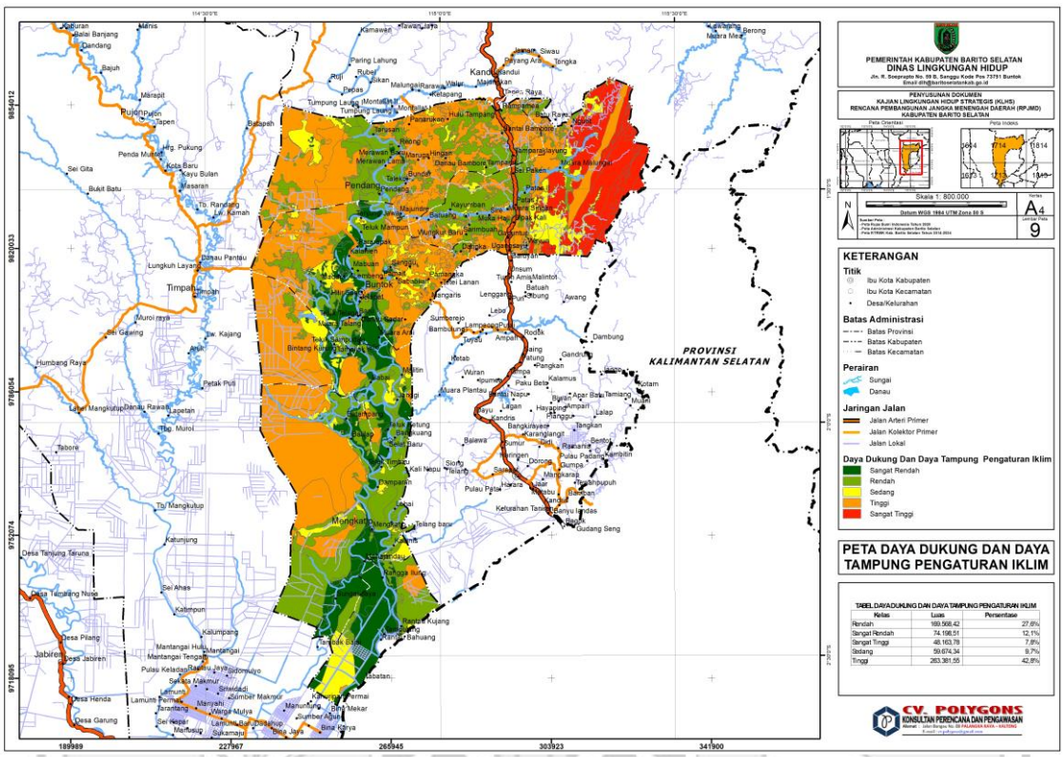
Gambar 2.7 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029

Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa wilayah dengan kategori sangat tinggi (ditandai warna hijau) tersebar luas di bagian selatan dan tenggara kabupaten. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung produksi dan ketahanan pangan, baik dari sisi kesuburan lahan, ketersediaan air, maupun luas lahan pertanian yang masih dapat diolah. Kondisi ini sesuai dengan kenyataan di lapangan, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan sekitarnya, yang dikenal memiliki areal pertanian yang cukup luas dan subur serta ditunjang oleh sistem pertanian tradisional dan modern yang berkembang.

Sebaliknya, wilayah tengah dan utara, khususnya di sekitar Kecamatan Dusun Utara dan Karau Kuala, menunjukkan beragam kategori dari sedang (kuning), rendah (jingga), hingga sangat rendah (merah). Warna merah pada peta menandakan wilayah dengan daya dukung pangan sangat rendah, yang mencerminkan kondisi keterbatasan dalam pemanfaatan lahan untuk produksi pangan. Hal ini kemungkinan terjadi akibat faktor topografi, kondisi tanah yang kurang subur, atau adanya tekanan alih fungsi lahan menjadi permukiman, tambang, atau perkebunan besar. Di lapangan, wilayah-wilayah ini juga sering kali menghadapi tantangan dalam akses distribusi pangan dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Kondisi ini mencerminkan pentingnya diferensiasi strategi pengelolaan pangan di tiap wilayah. Wilayah dengan daya dukung tinggi perlu dijaga dan ditingkatkan produktivitasnya melalui intensifikasi dan inovasi pertanian berkelanjutan, sedangkan wilayah dengan daya dukung rendah memerlukan intervensi berupa perbaikan infrastruktur, optimalisasi lahan marjinal, serta penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Dengan pengelolaan yang tepat, Barito Selatan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi risiko kerawanan pangan di masa depan.



Gambar 2.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Iklim

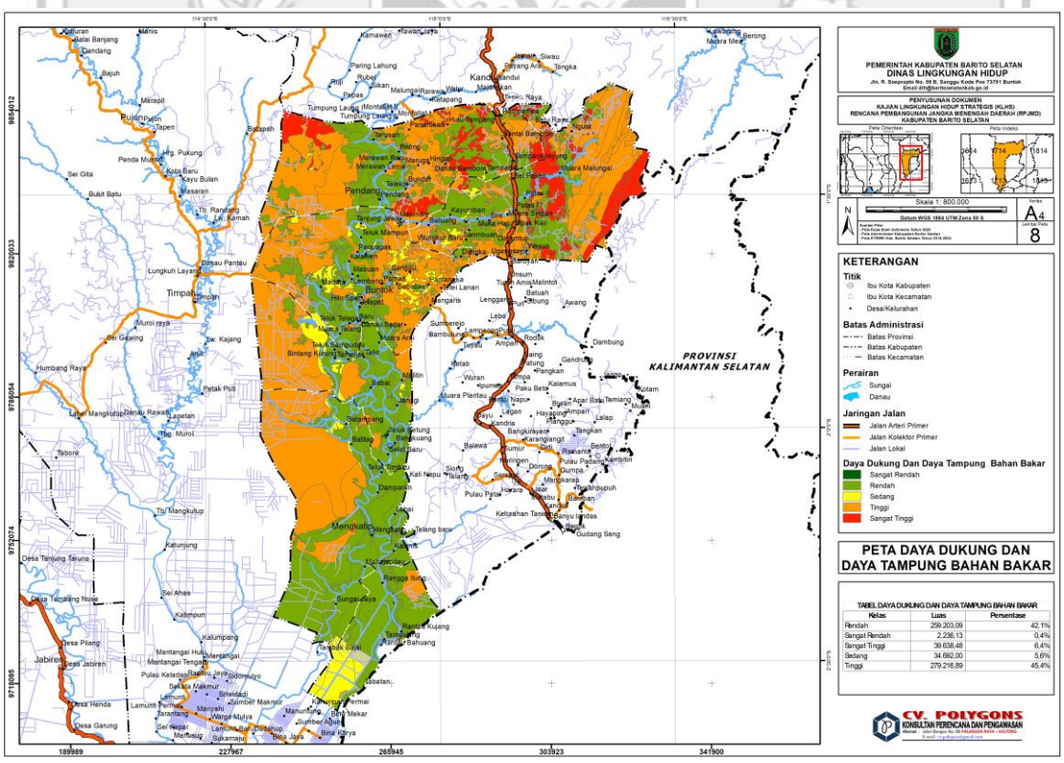
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029

Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Iklim Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan distribusi kemampuan lingkungan dalam menyerap emisi dan menstabilkan kondisi iklim lokal. Wilayah dengan kategori sangat tinggi, yang ditandai dengan warna hijau, tersebar luas di bagian selatan dan sebagian barat wilayah kabupaten. Daerah ini merupakan kawasan yang masih memiliki tutupan hutan alami, terutama di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dusun Hilir. Di lapangan, kawasan ini dikenal sebagai hutan lindung dan daerah tangkapan air yang sangat penting, dengan vegetasi lebat yang mampu menyerap karbon secara efektif, menjaga kelembaban udara, serta menurunkan suhu mikroklimat. Potensi besar dari wilayah ini menjadikannya kunci dalam menjaga stabilitas iklim daerah.

Sebaliknya, wilayah sangat rendah hingga rendah (berwarna merah dan jingga), tampak mendominasi bagian timur laut dan sebagian wilayah tengah kabupaten, termasuk sekitar Kecamatan Karau Kuala dan Dusun Utara. Wilayah ini telah mengalami konversi besar-besaran untuk aktivitas pertanian intensif, pemukiman, dan terutama aktivitas

pertambangan dan perkebunan skala besar. Di lapangan, kawasan ini mengalami tekanan lingkungan yang signifikan, yang berdampak pada peningkatan suhu, berkurangnya kemampuan lahan menyerap karbon, serta meningkatnya risiko bencana iklim seperti kekeringan atau banjir akibat berkurangnya tutupan vegetasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam fungsi pengaturan iklim antarwilayah di Barito Selatan. Wilayah dengan daya tampung rendah perlu mendapatkan perhatian khusus melalui rehabilitasi lahan, penghijauan, serta pengendalian alih fungsi kawasan hutan. Sementara itu, daerah dengan daya dukung tinggi harus dilindungi dari degradasi guna mempertahankan kemampuannya dalam mendukung kestabilan iklim lokal dan global. Dengan pendekatan berbasis data seperti ini, perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah dapat diarahkan untuk lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan secara ekologis.



Gambar 2.9 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Bahan Bakar

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029

Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Bahan Bakar memperlihatkan distribusi wilayah berdasarkan kemampuannya menyediakan atau menopang sumber daya bahan bakar, baik yang berasal dari biomassa, energi fosil, maupun energi alternatif berbasis sumber daya lokal. Wilayah berkategori sangat tinggi (berwarna hijau), yang tersebar luas di bagian selatan dan tengah wilayah di mana sumber bahan bakar minyak terdapat di Kelurahan Buntok Kota dan terdapat pula sumber bahan bakar dan LPG di Jenamas. Selain itu, wilayah lain, seperti Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dusun Hilir, menunjukkan potensi besar dalam penyediaan bahan bakar, terutama dari sumber biomassa seperti kayu bakar dan limbah pertanian. Di lapangan, kawasan ini masih memiliki tutupan hutan yang cukup baik, serta praktik pertanian dan kehutanan masyarakat yang menghasilkan limbah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, termasuk briket dan bioenergi.

Sebaliknya, wilayah di bagian timur laut dan sebagian tengah, termasuk wilayah sekitar Kecamatan Karau Kuala dan Dusun Utara, ditandai dengan warna merah hingga jingga menunjukkan kategori sangat rendah hingga rendah. Wilayah ini menghadapi keterbatasan dalam kapasitas lingkungan untuk menopang kebutuhan bahan bakar lokal, baik karena tingginya konversi lahan untuk pertambangan dan permukiman maupun menurunnya ketersediaan biomassa akibat deforestasi. Di lapangan, masyarakat di wilayah ini cenderung bergantung pada bahan bakar fosil seperti gas elpiji dan solar, yang distribusinya seringkali tidak merata dan harganya fluktuatif.

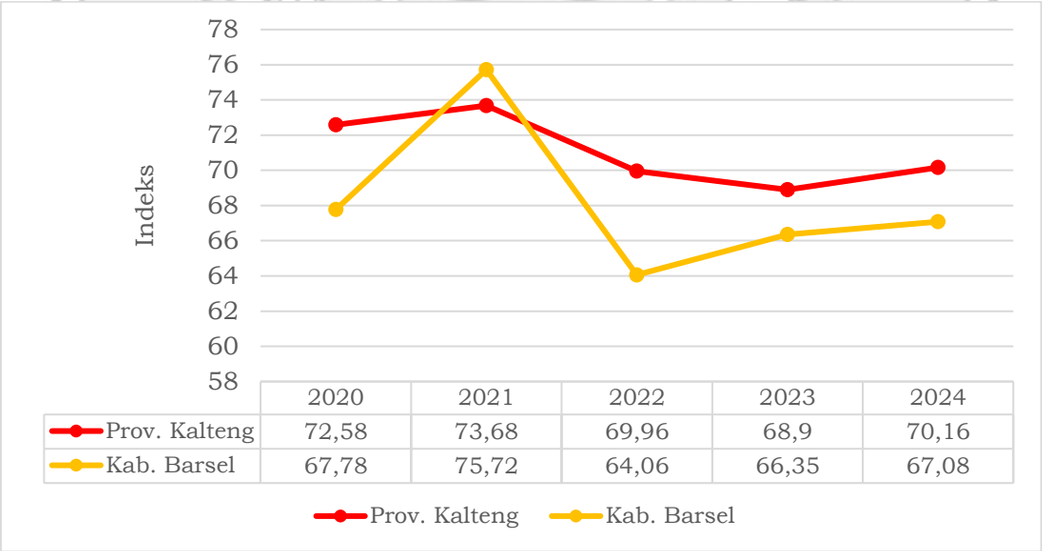
Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya strategi diversifikasi energi di Kabupaten Barito Selatan. Wilayah dengan daya dukung tinggi perlu dioptimalkan melalui pengembangan energi terbarukan berbasis sumber lokal, seperti biomassa, tenaga surya, dan mikrohidro. Sementara itu, wilayah dengan daya tampung rendah harus mendapatkan dukungan infrastruktur energi yang memadai, termasuk akses bahan bakar bersih dan program konversi energi.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, berkelanjutan, dan efisien. Ketahanan energi memastikan pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan ramah lingkungan. Ketahanan air menjamin ketersediaan sumber daya air yang cukup dan berkualitas untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Sementara itu, kemandirian pangan mencakup upaya mengembangkan sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal dan mendukung ketercapaian *food estate*.

2.1.4.1. Pangan

Indikator penting dalam hal pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Indeks Ketahanan Pangan mencerminkan ketahanan pangan suatu wilayah yang berdasarkan tiga pilar, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Semakin tinggi skor, semakin baik tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut. Skor Pola Pangan Harapan mencerminkan kondisi keragaman pangan di suatu wilayah. Skor ini digunakan untuk mengarahkan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan makanan yang optimal di suatu daerah.

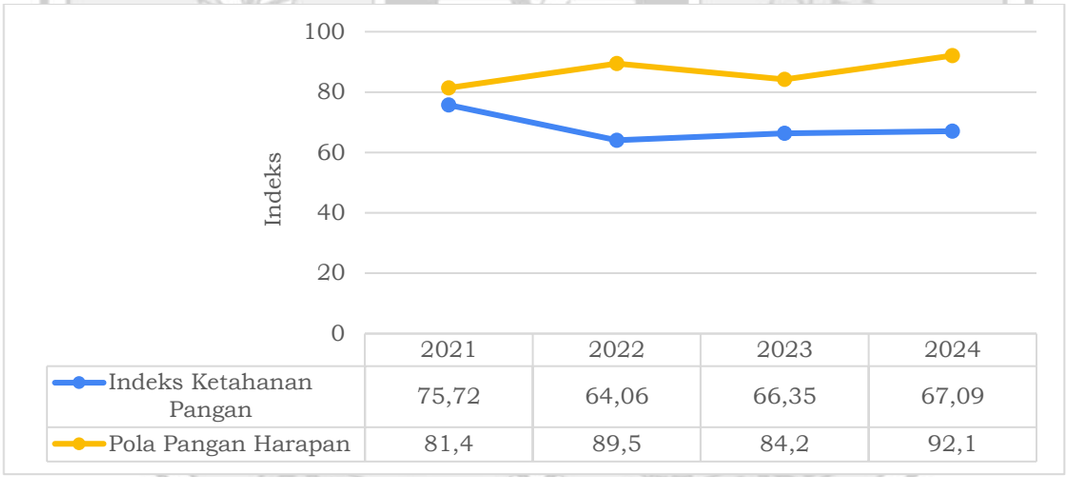


	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	72,58	73,68	69,96	68,9	70,16
Kab. Barsel	67,78	75,72	64,06	66,35	67,08

Gambar 2.10 Indikator IKP, 2021—2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan bertahap dari 64,06 pada tahun 2022 menjadi 66,35 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 67,09 pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam berbagai aspek ketahanan pangan, antara lain penguatan produksi pangan lokal, perbaikan akses pangan, serta pemanfaatan pangan yang lebih optimal. Sejalan dengan hal tersebut, skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga menunjukkan dinamika yang positif. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2022, skor PPH sempat menurun pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, skor PPH kembali naik signifikan menjadi 92,1 yang merupakan angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Peningkatan skor PPH ini mencerminkan konsumsi pangan masyarakat Barito Selatan yang semakin beragam.



	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	75,72	64,06	66,35	67,09
Pola Pangan Harapan	81,4	89,5	84,2	92,1

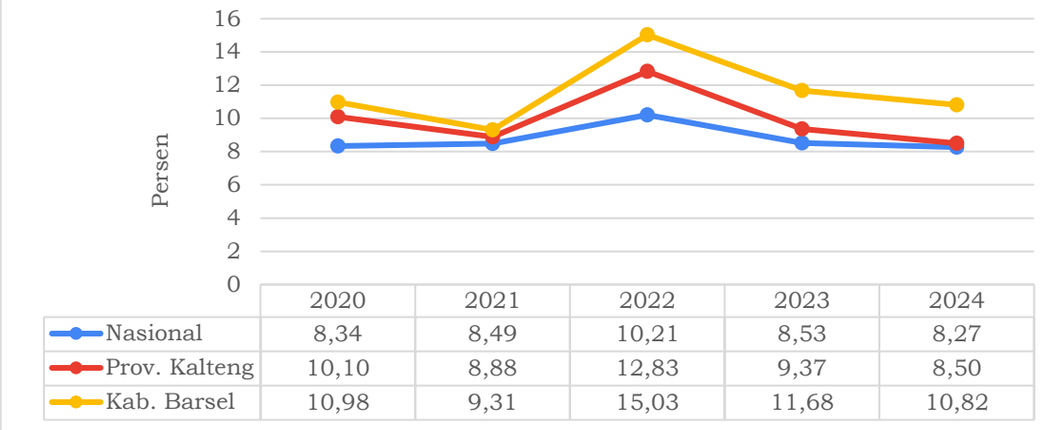
Gambar 2.11 Indikator PPH, 2021—2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Dinamika skor IKP maupun PPH menunjukkan pangan harus menjadi prioritas melalui peningkatan produksi, diversifikasi konsumsi, dan pengelolaan distribusi pangan. Pentingnya konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program pangan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga kualitas, aksesbilitas dan diversifikasi pangan guna mencapai pola konsumsi yang ideal dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2.1.4.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk yang asupannya berada di bawah kebutuhan minimum. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan di suatu wilayah. Semakin tinggi angkanya, semakin besar proporsi penduduk yang mengalami kekurangan pangan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	8,27
Prov. Kalteng	10,10	8,88	12,83	9,37	8,50
Kab. Barsel	10,98	9,31	15,03	11,68	10,82

Gambar 2.12 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, 2020—2024

Sumber: BPS Barito Selatan, 2025

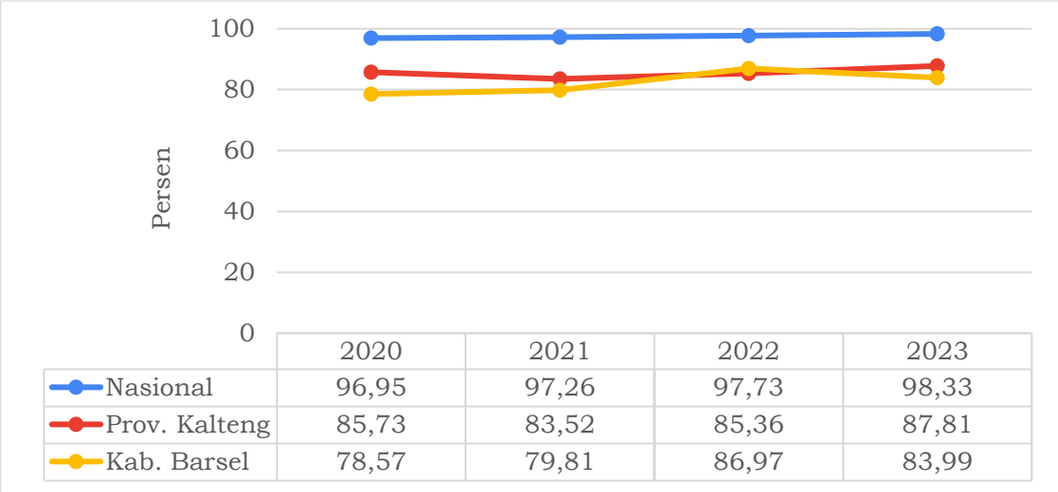
Pada periode 2020—2024, prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Barito Selatan mengalami kondisi naik-turun. Tahun 2021 mengalami penurunan angka, namun tahun 2022 naik kembali. Pada tahun 2023 angka prevalensi mengalami penurunan menjadi 11,68 dan tahun 2024 menjadi 10,82 yang menandakan adanya perbaikan dalam akses dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, angka Barito Selatan berada di posisi lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan, yang dapat diakibatkan dari keterbatasan daya beli, akses terhadap pangan berigizi, maupun distribusi pangan belum optimal. Perlu adanya penguatan sistem pangan yang tangguh, guna menurunkan ketidakcukupan konsumsi pangan.

2.1.4.3. Rasio Desa Berlistrik

Rasio Desa Berlistrik (RDB) merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana desa atau kelurahan telah memiliki akses listrik. Indikator ini menunjukkan progres pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sampai ke wilayah pelosok dan menjadi tolok ukur keadilan energi. Sampai pada tahun 2024, RDB telah mencapai hampir sempurna, yaitu 99,92%, di mana 83.693 desa dan kelurahan sudah teraliri listrik. Hal ini menjadi sebuah bukti kuat komitmen pemerintah melalui PLN dan dukungan sumber non-PLN, seperti lampu tenaga surya hemat energi dalam mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh negeri. Indikator ini secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar kelistrikan telah mencapai masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan persentase yang tinggi, RDB menjadi gambaran jelas bahwa infrastruktur ketenagalistrikan telah menyebar luas di Indonesia sehingga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.4.4. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik mencerminkan tingkat pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan kualitas infrastruktur energi di suatu daerah. Jika dilihat berdasarkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2023 yang bersumber dari PLN sebesar 83,99 persen dan Non-PLN sebesar 15,01 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Hal ini mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang mungkin masih bergantung pada sumber non-PLN seperti genset atau sumber energi lokal lain yang belum tentu stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini juga mengindikasikan masih adanya *gap* dalam kualitas dan keandalan layanan listrik, serta perlunya peningkatan distribusi listrik.



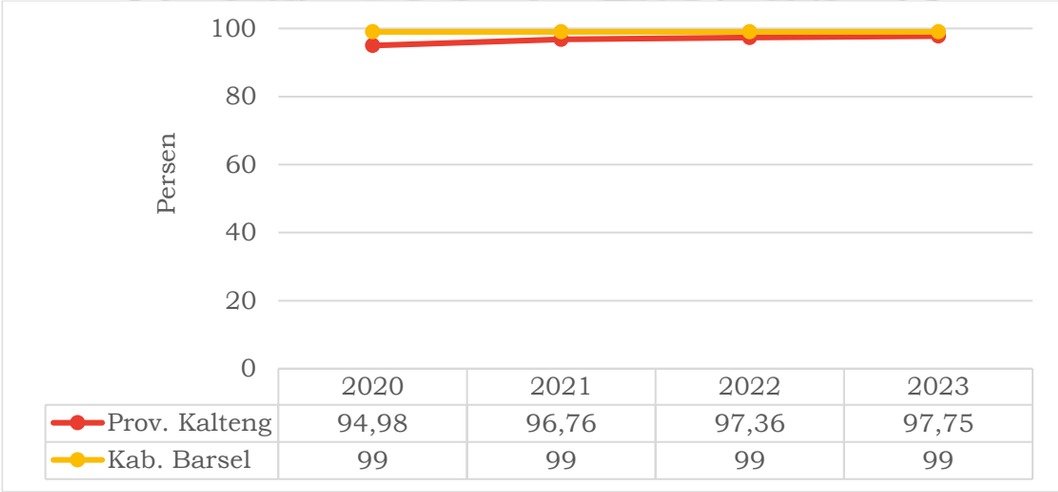
	2020	2021	2022	2023
Nasional	96,95	97,26	97,73	98,33
Prov. Kalteng	85,73	83,52	85,36	87,81
Kab. Barsel	78,57	79,81	86,97	83,99

Gambar 2.13 Presentase Rumah Tangga dengan Sumber Listrik PLN, 2020-2023

Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.1.4.5. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan rumah tangga yang teraliri listrik–baik bersumber dari dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun sumber non-PLN–terhadap total rumah tangga. Hal ini mencerminkan ketercakupan dan pemerataan akses masyarakat terhadap listrik. Selama lima tahun terakhir, rasio elektrifikasi di Kabupaten Barito Selatan mencapai 99 persen yang lebih baik daripada angka Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap energi listrik di Barito Selatan sudah relatif merata dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.



	2020	2021	2022	2023
Prov. Kalteng	94,98	96,76	97,36	97,75
Kab. Barsel	99	99	99	99

Gambar 2.14 Rasio Elektrifikasi, 2020—2024

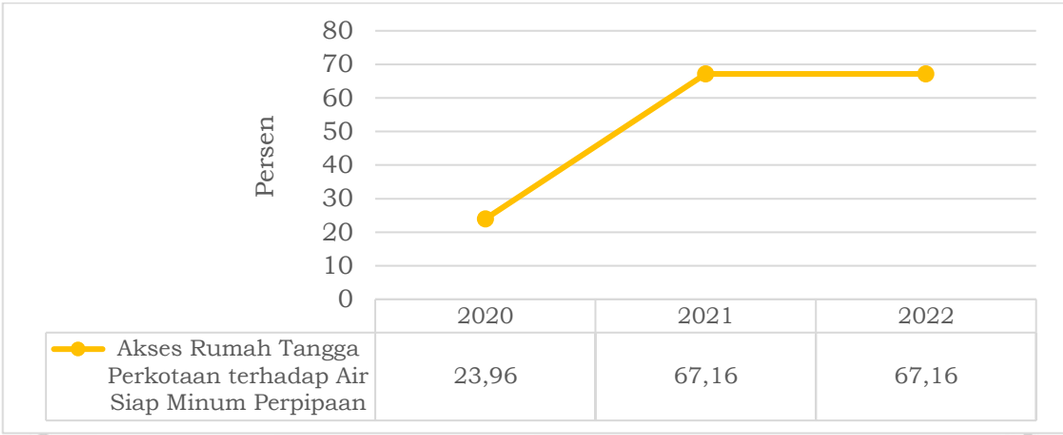
Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.1.4.6. Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku merupakan volume air yang tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih—seperti sungai, danau, waduk, mata air, air tanah, maupun air hujan—baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kepentingan industri. Namun, ketersediaan air baku saja belum cukup tanpa adanya proses pengolahan untuk menjadikannya layak konsumsi. Ketersediaan air ini akan diolah melalui sistem pengolahan air bersih/*water treatmant plan* (WTP) sebelum disalurkan ke masyarakat. Pada tahun 2021, sistem pengolahan air bersih atau WTP PDAM Tirta Barito Selatan memproduksi air baku dengan kapasitas *intake* sebesar 85 liter/detik. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan kapasitas pengelolaan air menjadi 135 liter/detik, sehingga cukup untuk melayani pelanggan di Buntok dan sekitarnya. Meskipun peningkatan kapasitas pengolahan air oleh PDAM Tirta Barito Selatan menunjukkan kemajuan, namun data ini baru merepresentasikan salah satu unit layanan di wilayah Buntok. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan distribusi air bersih perlu terus dilakukan agar seluruh wilayah dapat mengakses layanan air bersih secara cukup dan merata.

2.1.4.7. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan menilai penjaminan masyarakat dalam ketersediaan air bersih untuk mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Semakin tinggi persentase akses air minum layak, semakin baik kualitas hidup dan ketahanan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Peningkatan persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021, dari 23,96 persen pada tahun 2020 menjadi 67,16 persen, kemungkinan besar disebabkan oleh percepatan pembangunan infrastruktur air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dapat mencakup perluasan jaringan perpipaan, pembangunan instalasi pengolahan air bersih, serta program peningkatan layanan PDAM.



Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, 2020—2022

Sumber: RTRW Kab. Barito *Selatan*

Peningkatan ini juga bisa didorong oleh dukungan pendanaan dari APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap pentingnya air minum yang aman. Kondisi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak menunjukkan capaian 67,16 persen pada tahun 2022. Angka ini cenderung tetap pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, upaya perbaikan rumah tangga terhadap air minum layak harus ditingkatkan.

2.1.4.8. Intensitas Energi Primer

Intensitas energi primer adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan energi dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan besaran kebutuhan energi untuk menghasilkan satuan output ekonomi, sehingga enjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja ketahanan dan keberlanjutan energi daerah. Nilai yang lebih rendah menunjukkan penggunaan energi yang lebih efisien. Pengukuran indikator ini relevan untuk mendukung upaya pengelolaan energi yang efisien, pengembangan energi baru terbarukan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Secara historis indeks ini belum memiliki data capaian karena termasuk dalam salah satu turunan dari indikator IUP yang akan dihitung dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029.

2.1.4.9. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Porsi Energi baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi primer di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan yang telah menjadi bagian dari sistem energi daerah. Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pencapaian target transisi energi berkelanjutan. Indikator ini memiliki relevansi strategis dalam mendukung ketahanan energi, diversifikasi sumber energi, dan pencapaian komitmen pembangunan rendah karbon. Persi EBT dalam bauran energi primer di Kabupaten Barito Selatan belum memiliki data pencapaian historis, dan akan dihitung pada periode RPJMD Tahun 2025-2029.

2.1.4.10. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Perda

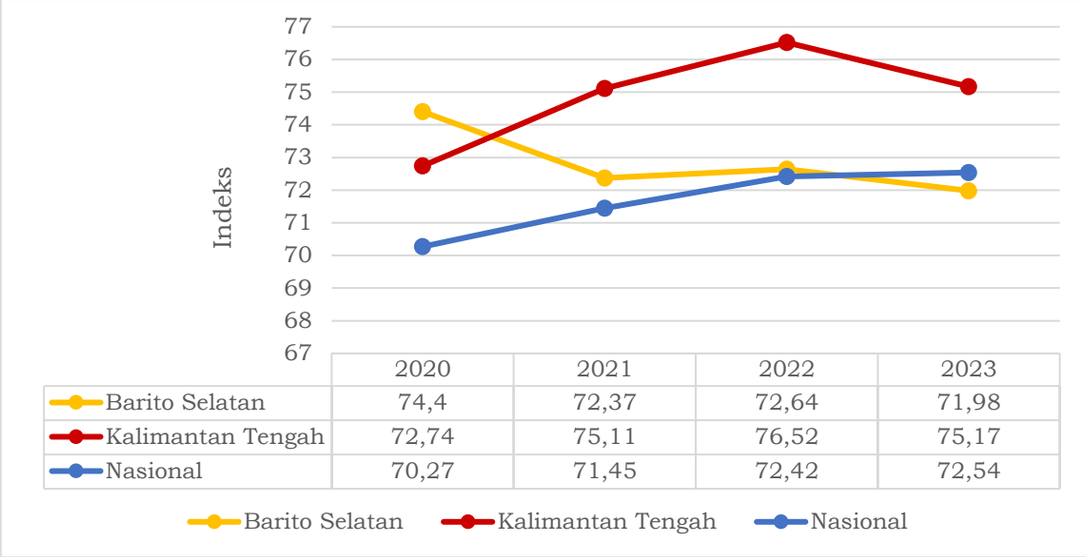
Persentase Usaha Pertambangan sesuai kewenangan peraturan daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi kegiatan usaha pertambangan di suatu wilayah yang telah beroperasi sesuai ketentuan dan perizinan yang diatur dalam peraturan daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi daerah, termasuk pemenuhan standar teknis, lingkungan, dan keselamatan kerja. Peningkatan persentase usaha pertambangan yang sesuai dengan kewenangan peraturan daerah penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan, meminimalkan dampak lingkungan, serta mendorong tata kelola sektor pertambangan yang lebih baik. Indikator ini belum memiliki data capaian historis di Kabupaten Barito Selatan dan akan dihitung pada periode RPJMD Tahun 2025-2029.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong produktivitas, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ini tercermin melalui sejumlah indikator, seperti kualitas lingkungan hidup, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, serta proporsi sampah yang terolah. Upaya perbaikan lingkungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu entitas spasial yang mencakup segala komponen energi kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia dan tindakan mereka yang saling mempengaruhi alam itu sendiri sebagai kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari tiga indikator utama, yaitu indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Berdasarkan grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 hingga 2023, terlihat bahwa Barito Selatan mengalami penurunan indeks dari 74,4 pada tahun 2020 menjadi 71,98 pada tahun 2023. Sebaliknya, Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 72,74 pada tahun 2020 hingga puncaknya di angka 76,52 pada tahun 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 75,17 di tahun 2023. Sementara itu, rata-rata nasional juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 70,27 pada tahun 2020 menjadi 72,54 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, IKLH Barito Selatan yang awalnya lebih tinggi dari Kalimantan Tengah dan nasional pada 2020, justru tertinggal pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Barito Selatan masih perlu ditingkatkan agar tidak tertinggal dari provinsi induknya maupun rata-rata nasional.

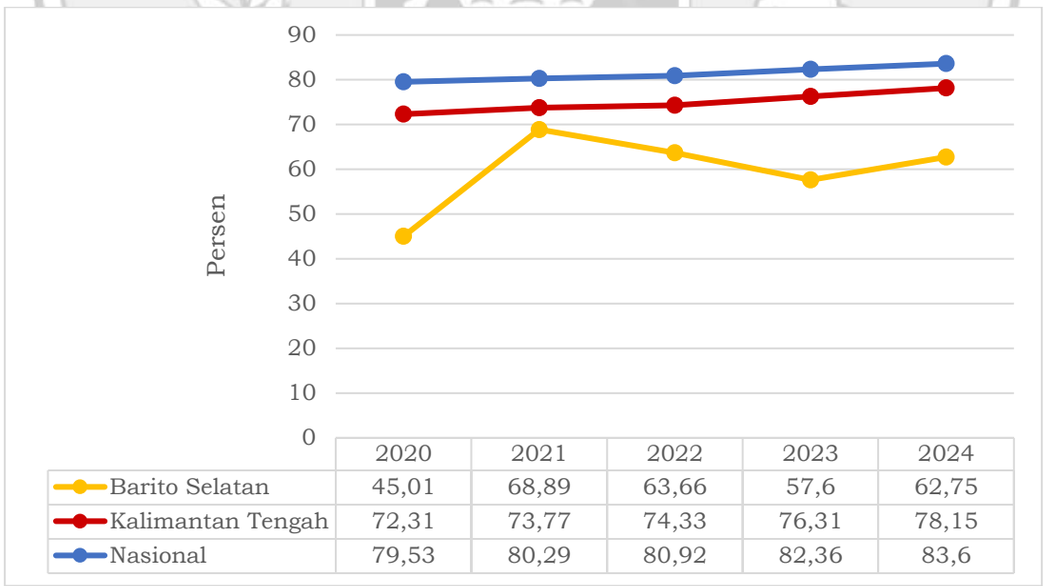


Gambar 2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2020—2023

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan 2023

2.1.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak

Permukiman yang layak adalah konsep penting dalam perencanaan dan pembangunan wilayah. Hal ini merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa penduduk di suatu wilayah memiliki akses yang berkelanjutan ke fasilitas, layanan, dan sumber daya yang mendukung.



Gambar 2.17 Akses Keberlanjutan Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman dan Layak, 2020—2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Gambar 2.17 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, terlihat bahwa capaian di Barito Selatan masih jauh tertinggal dibandingkan Kalimantan Tengah dan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, hanya 45,01 persen rumah tangga di Barito Selatan yang memiliki akses sanitasi layak, meningkat tajam menjadi 68,89 persen pada 2021, namun kemudian mengalami fluktuasi dan turun menjadi 62,75 persen pada 2024. Sementara itu, Kalimantan Tengah menunjukkan tren yang stabil dan meningkat dari 72,31 persen pada 2020 menjadi 78,15 persen pada 2024. Di sisi lain, angka nasional juga terus mengalami peningkatan dari 79,53 persen menjadi 83,6 persen dalam periode yang sama. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan sanitasi di Barito Selatan, masih banyak tantangan di lapangan seperti keterbatasan infrastruktur dasar, penyebaran penduduk di wilayah pedesaan dan pelosok yang sulit dijangkau, serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam bentuk intervensi kebijakan, pembangunan fasilitas sanitasi yang merata, serta penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai target sanitasi layak secara menyeluruh.

2.1.5.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya mendorong bertambahnya volume timbulan sampah dari aktivitas rumah tangga, komersial, dan lingkungan yang berimplikasi pada meningkatnya beban sistem pengelolaan sampah. Kabupaten Barito Selatan telah melakukan upaya pengelolaan melalui pembangunan fasilitas Tempat Penampungan Sementara *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meskipun kapasitas dan pemanfaatannya masih terbatas. Data mengenai volume sampah yang terangkut ke TPS dan dari lingkungan dapat menjadi indikator awal untuk menggambarkan kondisi pengelolaan saat ini, mengingat belum tersedianya data spesifik mengenai volume sampah yang terolah di fasilitas pengolahan.

Tabel 2.8 Volume Sampah TPS dan Sampah Lingkungan, 2020—2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume sampah di TPS	14.987	21.900	4.344	5.848	4.544
2	Sampah lingkungan (ton)	4.320	4.380	952	1.135	1.920
3	Jumlah	19.307	26.280	5.296	6.983	6.464

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2021-2025

Berdasarkan data dari Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, terjadi fluktuasi yang signifikan dalam volume sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan jumlah sampah lingkungan selama periode 2020 – 2024. Volume sampah di TPS sempat melonjak tajam dari 14.987 ton pada tahun 2020 menjadi 21.900 ton di 2021, yang kemungkinan mencerminkan peningkatan aktivitas masyarakat pasca pandemi atau belum optimalnya sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah saat itu. Namun, angka ini turun drastis di tahun 2022 menjadi hanya 4.344 ton, dan stabil di kisaran 4.500 – 5.800 ton pada tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, volume sampah lingkungan juga menunjukkan penurunan drastis di 2022 menjadi 952 ton, sebelum kembali meningkat menjadi 1.920 ton di 2024.

Fluktuasi ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam sistem manajemen sampah di Barito Selatan. Secara nyata, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan armada pengangkut sampah, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, rendahnya pemilahan sampah dari sumber, serta belum meratanya fasilitas TPS di wilayah pedesaan dan pelosok. Meskipun ada perbaikan, peningkatan kembali jumlah sampah lingkungan di 2024 menunjukkan bahwa permasalahan belum tertangani secara sistematis. Hal ini menuntut perlunya intervensi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peningkatan infrastruktur persampahan, dan edukasi publik yang berkelanjutan.

2.1.5.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Data spesifik mengenai proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara publik. Namun, secara nasional, pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan signifikan. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, sekitar 60,09 persen sampah rumah tangga dan sejenisnya di Indonesia berhasil dikelola, sementara 39,91 persen sisanya belum tertangani dengan baik. Indikator tersebut dihitung untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga di suatu wilayah telah terlayani oleh sistem pengelolaan sampah yang terorganisir, khususnya dalam hal pengumpulan hingga ke tempat pemrosesan akhir.

Layanan penuh pengumpulan sampah yang dimaksud mencakup pengumpulan sampah dari sumber (rumah tangga), pengangkutan ke tempat penampungan sementara atau *transfer station*, hingga ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Data yang digunakan biasanya berasal dari survei rumah tangga seperti SUSENAS atau laporan dari dinas lingkungan hidup setempat. Indikator ini penting untuk memantau kinerja pelayanan publik di sektor kebersihan dan lingkungan serta untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

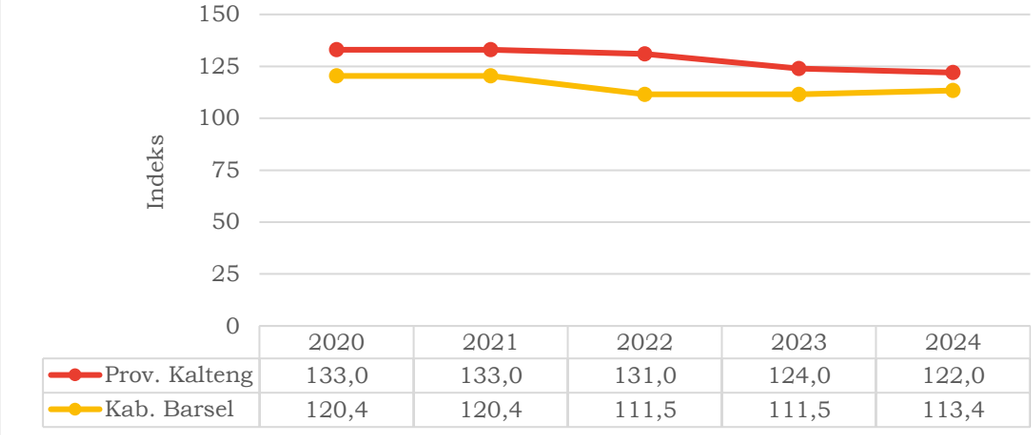
Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan untuk menghadapi, bertahan, dan pulih dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan suhu ekstrem. Resiliensi ini mencakup upaya untuk mengurangi risiko (mitigasi), kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, respons cepat saat bencana berlangsung, serta pemulihan yang efektif pascabencana. Dengan meningkatkan resiliensi, daerah tidak hanya mampu mengurangi kerugian akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

2.1.6.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Secara umum, di Indonesia, intensitas emisi GRK dihitung sebagai jumlah emisi per unit produk domestik bruto (PDB), mencerminkan efisiensi ekonomi dalam menghasilkan emisi. Sampai saat ini, data spesifik dan data capaian mengenai penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara publik. Pengukuran indikator ini direncanakan akan dilakukan dalam RPJMD Barito Selatan tahun 2025-2029 sebagai bagian dari turunan Indikator Utama Pembangunan (IUP).

2.1.6.2. Indeks Risiko Bencana

Untuk menilai potensi risiko bencana digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB menilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Dalam lima tahun terakhir, IRB Kabupaten Barito Selatan cenderung stagnan di angka 100-125. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya dengan angka 111,54. Kondisi ini stagnan hingga tahun 2023 kemudian naik di tahun 2024 menjadi 113,47 dengan kelas risiko bencana sedang menurut BNPB. Sebagai perbandingan IRB Provinsi Kalimantan Tengah berada diatas Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 di angka 122 yang juga berada di kategori sedang. Oleh karena itu, aspek kebencanaan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	133,0	133,0	131,0	124,0	122,0
Kab. Barsel	120,4	120,4	111,5	111,5	113,4

Gambar 2.18 Nilai Indeks Risiko Bencana, 2020–2024

Sumber: BNPB diolah, 2025

Kemudian berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Barito Selatan, diikuti bencana banjir sebagai terbanyak kedua. Selain disebabkan oleh faktor geografis, geometri sungai, cuaca, maupun topografi, banjir di Barito Selatan diperparah oleh adanya degradasi lahan dan penggundulan tanaman kering. Dalam kurun waktu 2020 – 2024, terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 25 kejadian dengan tahun terparah di 2023 sebanyak 19 kejadian. Bencana banjir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat sebanyak 21 kejadian.

Tabel 2.9 Jumlah Kejadian Bencana, 2020—2024

No	Tahun	Tanah Longsor	Banjir	Karhutla	Gelombang Pasang/ Abrasi	Kekeringan
1	2020	0	3	2	0	0
2	2021	0	0	0	0	0
3	2022	0	6	3	0	0
4	2023	1	9	19	2	0
5	2024	0	3	1	0	0
Jumlah		1	21	25	2	0

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

Ancaman lainnya adalah masalah kesehatan bersumber dari *oxbow lake*. *Oxbow lake* adalah danau berbentuk huruf U yang terbentuk ketika sebuah kelokan lebar *(meander)* pada sungai terpotong dan terpisah dari aliran sungai utama. Danau ini merupakan danau mati akibat tidak adanya arus sehingga dapat menjadi ancaman kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Contoh *oxbow lake* yang ada di Barito Selatan adalah Danau Limut di Desa Muara Talang dan Danau Palui di Desa Hilir Sper, keduanya berada di Kecamatan Dusun Selatan. Beberapa ancaman terkait adalah potensi penyebaran vektor penyakit nyamuk dan risiko keracunan akibat konsumsi ikan yang terkontaminasi. Perlu upaya pengelolaan yang baik untuk mengurangi risiko dan dampak yang terjadi dari adanya *oxbow lake*.

2.1.6.3. Indeks Ketahanan Daerah

Tujuan utama dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, IKD juga berfungsi sebagai salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang digunakan untuk memutakhirkan peta risiko bencana nasional. Sampai saat ini, data spesifik mengenai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara historis sehingga akan dilakukan dalam RPJMD Barito Selatan tahun 2025-2029 sebagai bagian upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan wilyah terhadap risiko bencana.

2.1.7. Demografi

Dalam konsep pembangunan, penduduk tidak hanya berperan sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan elemen kunci dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah. Penting untuk mengidentifikasi karakteristik serta dinamika pertumbuhan penduduk, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sebagai dasar perencanaan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Simdatik Kabupaten Barito Selatan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 137.914 jiwa, terdiri atas 70.622 jiwa laki-laki dan 67.292 jiwa perempuan. Dalam periode lima tahun terakhir, dinamika jumlah penduduk menunjukkan tren dinamis, dengan penurunan signifikan pada tahun 2022 yang diikuti oleh tren peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024. Adapun detail lebih rinci terhadap jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut.

Tabel 2.10 Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2020	139.771	71.792	67.979	0,78
2021	141.731	72.750	68.981	1,40
2022	133.916	68.418	65.498	-5,51
2023	135.966	69.548	66.418	1,53
2024	137.914	70.622	67.292	1,43

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.1.7.1. Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Dari tahun 2020 hingga 2024, komposisi penduduk Kabupaten Barito Selatan secara konsisten didominasi oleh penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Dominasi ini tercermin dari nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang selalu berada di atas angka 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Namun demikian, terdapat tren penurunan dalam rasio jenis kelamin selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, *sex ratio* tercatat sebesar 105, yang menunjukkan bahwa terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Mulai tahun 2022, angka ini menurun menjadi 104 dan tetap berada pada angka tersebut hingga tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan kecenderungan ke arah komposisi yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Adapun detail terhadap rasio jenis kelamin Kabupaten Barito Selatan dijabarkan pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

Tabel 2.11 Rasio Jenis Kelamin Penduduk, 2020–2024

Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	*Sex Ratio*
2020	71.792	67.979	105
2021	72.750	68.981	105
2022	68.418	65.498	104
2023	69.548	66.418	104
2024	70.622	67.292	104

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.1.7.2. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan komposisi penduduk menurut rentang umur, penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 paling banyak berada pada kelompok umur 20–24 tahun, yaitu sebanyak 13.582 jiwa. Posisi kedua ditempati oleh kelompok umur 15–19 tahun sebanyak 12.840 jiwa, disusul oleh kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 12.151 jiwa, serta kelompok umur 5–9 tahun sebanyak 10.868 jiwa. Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok 70–74 tahun sebanyak 1.975 jiwa, dan 75 tahun ke atas sebanyak 1.994 jiwa.

Dari komposisi penduduk, populasi usia produktif di Kabupaten Barito Selatan memiliki proporsi yang lebih besar. Hal ini mencerminkan adanya bonus demografi yang harus dioptimalkan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keadaan ini merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, apabila potensi produktivitas kelompok usia produktif dapat dioptimalkan melalui penyediaan lapangan kerja, pendidikan, serta keterampilan yang relevan.

Sementara itu, terjadi tren penurunan pada kelompok umur 0–35 tahun dan peningkatan pada kelompok umur diatas 35 tahun. Hal ini menunjukkan adanya awal perubahan komposisi demografi penduduk dengan bertambahnya proporsi penduduk usia produktif menuju lanjut usia. Kondisi ini memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan penuaan penduduk, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Adapun detail lebih rinci terhadap komposisi penduduk Barito Selatan berdasarkan kelompok umur dalam lima tahun terakhir dijabarkan pada Tabel 2.12 sebagai berikut.

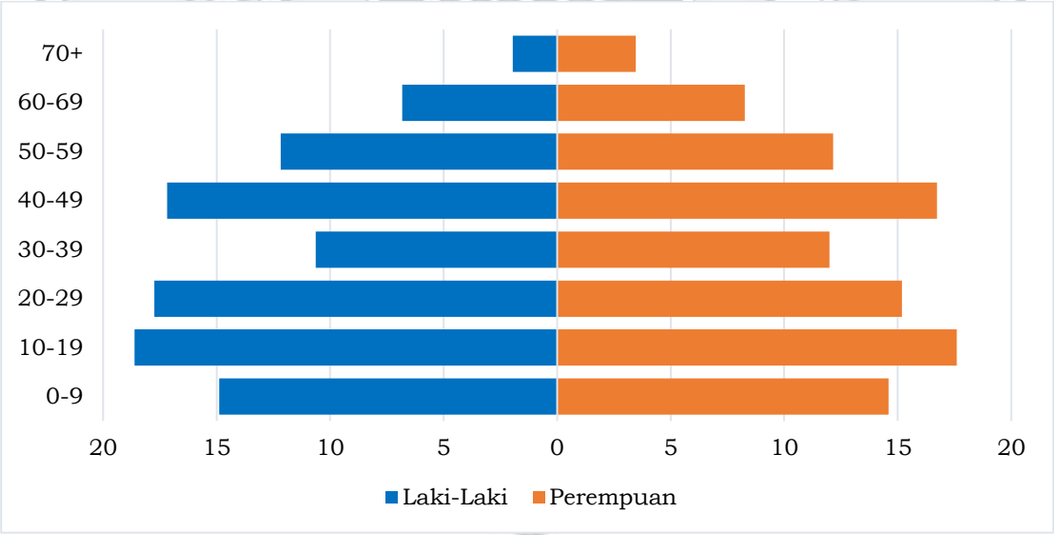
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2020–2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	9.300	9.374	9.190	8.784	8.547
5-9	11.012	11.403	11.261	11.064	10.868
10-14	11.801	12.688	12.714	12.407	12.151
15-19	13.267	13.804	11.224	12.308	12.840
20-24	11.232	12.197	12.183	12.865	13.582
25-29	10.970	10.734	9.887	9.996	10.167

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
30-34	11.259	11.004	10.004	9.814	9.756
35-39	12.109	11.931	10.589	10.360	10.313
40-44	10.925	11.429	11.175	11.428	11.356
45-49	9.588	10.234	9.972	9.923	10.180
50-54	7.808	8.318	8.456	8.695	8.763
55-59	6.082	6.463	6.151	6.549	6.957
60-64	4.368	4.943	4.862	4.994	5.097
65-69	2.757	3.014	2.895	3.118	3.368
70-74	1.694	1.774	1.645	1.803	1.975
75+	2.095	2.421	1.708	1.858	1.994
Total	139.771	141.731	133.916	135.966	137.914

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan, 2025

Jika ditinjau dari piramida penduduk, Kabupaten Barito Selatan memiliki piramida penduduk ekspansif. Kondisi ini menunjukkan bahwa angkatan kerja akan tetap tinggi dalam jangka pendek, sehingga perlu disiapkan ketersediaan lapangan kerja yang memadai di berbagai sektor unggulan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun bentuk piramida penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat Gambar 2.19 sebagai berikut.



Gambar 2.19 Piramida Penduduk Tahun 2024

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025

2.1.7.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Sebagaimana menjadi ibukota Kabupaten Barito Selatan, persebaran penduduk terpusat di Kecamatan Dusun Selatan dengan persentase terhadap penduduk secara keseluruhan di tahun 2024 sebesar 43,17 persen atau sebanyak 59.531 jiwa. Kecamatan Dusun Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 52,54 jiwa/km^2 dengan rasio jenis kelamin sebesar 103. Kemudian, persentase populasi penduduk terbesar kedua oleh Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan persentase sebesar 14,62 persen dengan kepadatan penduduk sebanyak 11,47 jiwa/km^2. Kecamatan Karau Kuala memiliki kepadatan penduduk kedua tertinggi, yaitu sebesar 19,10 jiwa/km^2 dengan rasio jenis kelamin sebesar 105. Adapun Kecamatan Dusun Utara memiliki kontribusi penduduk sebesar 12,39 persen dengan rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu sebesar 108. Sementara itu, rasio jenis kelamin tertinggi juga dimiliki oleh Kecamatan Dusun Hilir yaitu sebesar 108 dengan kontribusi penduduk sebanyak 16.461 jiwa penduduk. Kecamatan Jenamas memiliki kontribusi penduduk terkecil yaitu sebesar 6,46 persen atau sebanyak 8.810 jiwa dengan kepadatan sebesar 13,46 jiwa/km^2. Secara garis besar, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Selatan mencapai 19,65 jiwa/km^2. Adapun rincian distribusi jumlah, kepadatan, dan *sex ratio* penduduk per kecamatan secara lengkap dijabarkan Tabel 2.13 sebagai berikut.

Tabel 2.13 Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km 2)	*Sex ratio*
1	Jenamas	8.908	6,46	13,46	104
2	Dusun Selatan	59.531	43,17	52,54	103
3	Dusun Utara	17.090	12,39	13,44	108
4	Gunung Bintang Awai	20.164	14,62	11,47	106
5	Dusun Hilir	16.461	11,94	12,02	108
6	Karau Kuala	15.760	11,43	19,10	105
	Barito Selatan	137.914	100	19,65	104

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025

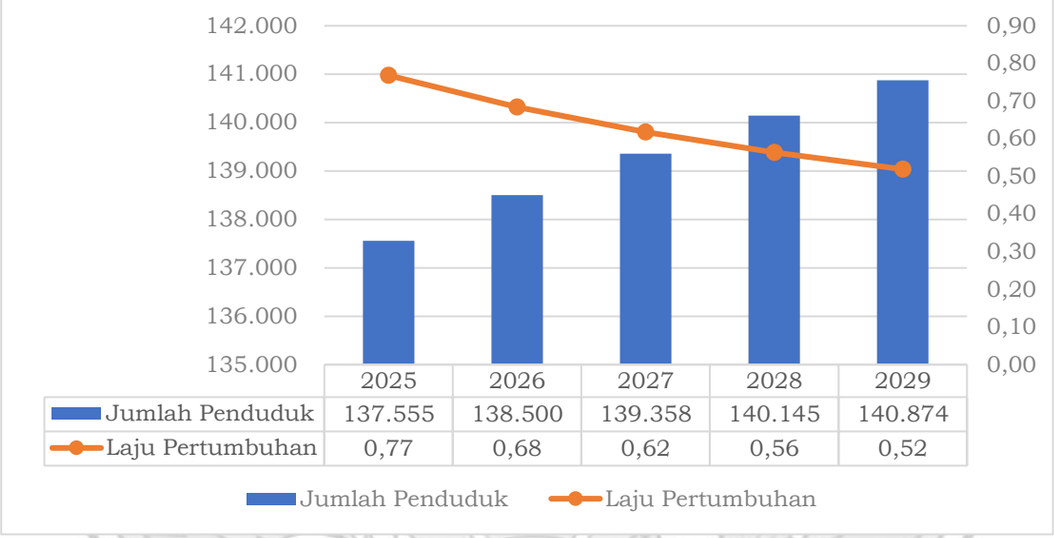
Tingginya konsentrasi penduduk di Kecamatan Dusun Selatan mengindikasikan bahwa wilayah ini menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik di Kabupaten Barito Selatan. Namun, dominasi ini juga berisiko menimbulkan ketimpangan spasial dalam hal aksesibilitas pelayanan dasar, infrastruktur, serta kualitas hidup antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerataan pembangunan antar-kecamatan, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di wilayah kabupaten, termasuk di kecamatan dengan populasi dan kepadatan lebih rendah, dapat mengakses layanan publik secara setara dan berkeadilan.

2.1.7.4. Proyeksi Demografi

Tren proyeksi merupakan komponen dasar perencanaan yang digunakan untuk memetakan perkembangan pembangunan wilayah dan kebutuhan daerah di masa mendatang. Proyeksi populasi penduduk memiliki peran strategis sebagai dasar informasi dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan ke depan. Mengingat penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan—baik sebagai pelaku, penerima manfaat, maupun kelompok yang terdampak—proyeksi demografi menjadi alat penting untuk merancang pembangunan yang lebih presisi dan responsif. Hal ini mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, beserta infrastruktur sarana prasarana penunjangnya.

Proyeksi demografi Kabupaten Barito Selatan disusun berdasarkan data historis kependudukan tahun 2012–2018 yang bersumber dari publikasi Barito Selatan Dalam Angka oleh BPS Kabupaten Barito Selatan serta data tahun 2019–2024 yang dihimpun dari Simdatik Kabupaten Barito Selatan. Adapun proyeksi demografi disusun menurut klasifikasi rentang umur, jenis kelamin, *sex ratio*, rasio ketergantungan, hingga kepadatan penduduk.

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan diperkirakan mengalami tren peningkatan moderat selama periode 2024 hingga 2029. Pada tahun 2029 jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 140.874 jiwa. Namun, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren penurunan secara bertahap, dari 0,77 persen pada tahun 2025 menjadi 0,52 persen pada tahun 2029. Pola ini mencerminkan upaya stabilisasi demografis–pertambahan jumlah penduduk tetap terjadi, tetapi dengan laju yang lebih terkendali–yang memperkuat urgensi pentingnya pemenuhan SPM untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk secara berkelanjutan. Grafik proyeksi penduduk Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2024-2029 dapat dilihat pada Gambar 2.20 sebagai berikut.



	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk	137.555	138.500	139.358	140.145	140.874
Laju Pertumbuhan	0,77	0,68	0,62	0,56	0,52

Gambar 2.20 Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025

Lebih lanjut, rasio jenis kelamin dari Kabupaten Barito Selatan diproyeksikan terus mengalami tren penurunan. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Maka dari itu, *sex ratio* Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan hingga 104 di tahun 2029. Artinya, pada tahun 2029 akan terdapat 104 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Hal ini mengindikasikan pergeseran menuju komposisi penduduk yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.14 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2025–2029

Jenis Kelamin	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	70.622	70.153	70.601	71.008	71.381	71.725
Perempuan	67.292	67.402	67.898	68.350	68.765	69.149
Rasio	104	104,08	103,98	103,89	103,80	103,73

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025

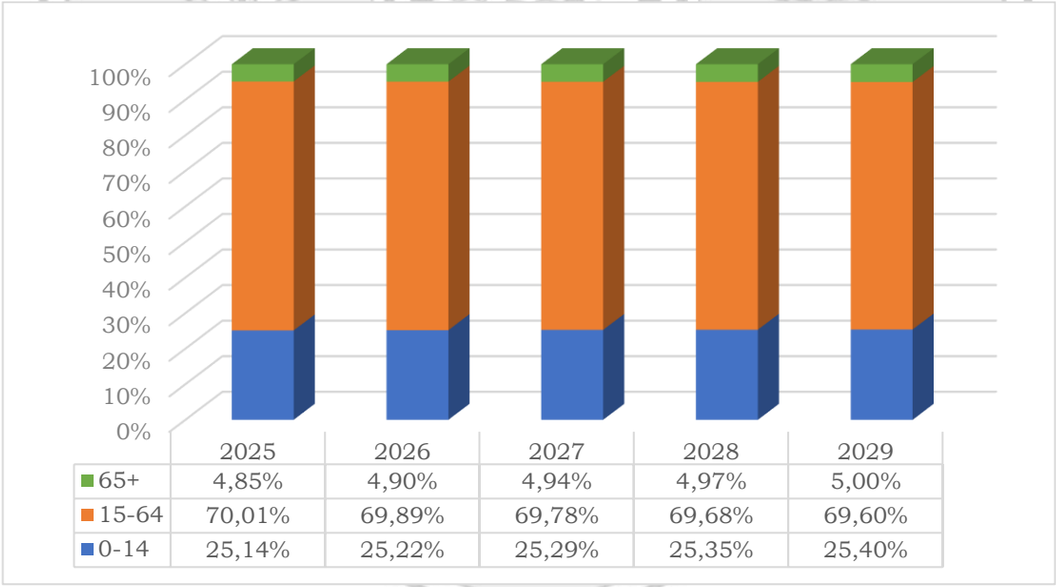
Jika dilihat berdasarkan usia produktif dan non-produktif Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2029. Jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif yang diproyeksikan sejumlah 98.048 jiwa pada tahun 2029. Angka ketergantungan turut mengalami tren peningkatan, yaitu mencapai 43,68 persen pada tahun 2029. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif yang lebih lambat daripada usia non produktif sehingga beban yang akan ditanggung oleh kelompok usia tersebut kian meningkat. Angka rasio ketergantungan yang masih berada dibawah 50 persen mengartikan bahwa Kabupaten Barito Selatan masih mendapatkan bonus demografi hingga tahun 2029 sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan potensi usia produktif sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja baru, mengendalikan angka kelahiran, serta pemberdayaan usia lanjut.

Tabel 2.15 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2025–2029

Jenis Kelamin	2025	2026	2027	2028	2029	Tren
0-14 Tahun	34,576	34,926	35,239	35,522	35,782	Meningkat
15-64 Tahun	96,304	96,792	97,241	97,658	98,048	Meningkat
> 65 Tahun	6,676	6,782	6,878	6,965	7,045	Meningkat
Angka Ketergantungan	42.83%	43.09%	43.31%	43.51%	43.68%	Meningkat
Kepadatan Penduduk	19,59	19,73	19,85	19,96	20,07	Meningkat

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025

Data proyeksi menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan hingga tahun 2029, meskipun tidak bersifat signifikan. Pada saat yang sama, penduduk usia non-produktif, menunjukkan tren peningkatan, yang menandai awal dari transisi struktur demografi menuju *ageing population*. Hal ini terlihat dari peningkatan proporsi penduduk usia non produktif rentang umur 0–14 pada tahun 2025 dengan nilai persentase sebesar 25,14 persen dan menjadi 25,40 persen pada tahun 2029. Rentang umur 65 tahun keatas pada tahun 2025 sebesar 4,95 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045 sebesar 5,00 persen. Sementara itu, usia produktif mengalami penurunan hingga 68,60 persen pada tahun 2029. Oleh karena itu, meskipun Kabupaten Barito Selatan masih menikmati bonus demografi, momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal, melalui investasi pada pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus memulai perencanaan perlindungan bagi kelompok lanjut usia dan anak-anak yang kian bertambah proporsinya.



	2025	2026	2027	2028	2029
65+	4,85%	4,90%	4,94%	4,97%	5,00%
15-64	70,01%	69,89%	69,78%	69,68%	69,60%
0-14	25,14%	25,22%	25,29%	25,35%	25,40%

Gambar 2.21 Proyeksi Proporsi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2025–2029

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025

Berdasarkan proyeksi kependudukan per kecamatan, Dusun Selatan sebagaimana menjadi ibukota kabupaten, kecamatan ini tetap mendominasi jumlah penduduk di Barito Selatan, yaitu sebanyak 61.170 jiwa pada tahun 2029. Lebih lanjut, populasi usia produktif terbesar berada di kecamatan tersebut sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk *labour intensive*. Selain itu, perlu untuk menyusun strategi pemerataan pembangunan antar kecamatan berbasis karakteristik demografi masing-masing wilayah.

Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan, 2025–2029

	2025	2026	2027	2028	2029	Tren
Jenamas						
0-14 tahun (jiwa)	2,284	2,299	2,312	2,324	2,334	Meningkat
15-64 tahun (jiwa)	6,427	6,442	6,455	6,467	6,479	Meningkat
65+ tahun (jiwa)	443	449	455	459	464	Meningkat
Total (jiwa)	9,155	9,190	9,222	9,250	9,276	Meningkat
Dependency Ratio	42.44%	42.67%	42.86%	43.03%	43.18%	Meningkat
Dusun Hilir						
0-14 tahun (jiwa)	4,209	4,250	4,287	4,321	4,351	Meningkat
15-64 tahun (jiwa)	11,631	11,675	11,715	11,753	11,788	Meningkat
65+ tahun (jiwa)	807	819	830	839	848	Meningkat
Total (jiwa)	16,647	16,745	16,832	16,913	16,987	Meningkat
Dependency Ratio	43.13%	43.42%	43.68%	43.90%	44.10%	Meningkat
Karau Kuala						
0-14 tahun (jiwa)	3,922	3,949	3,973	3,994	4,013	Meningkat
15-64 tahun (jiwa)	11,029	11,059	11,086	11,111	11,134	Meningkat
65+ tahun (jiwa)	770	781	790	799	806	Meningkat
Total (jiwa)	15,721	15,788	15,849	15,904	15,954	Meningkat
Dependency Ratio	42.54%	42.77%	42.97%	43.14%	43.29%	Meningkat
Dusun Selatan						
0-14 tahun (jiwa)	14,860	15,042	15,205	15,355	15,492	Meningkat
15-64 tahun (jiwa)	41,529	41,826	42,101	42,357	42,596	Meningkat
65+ tahun (jiwa)	2,898	2,950	2,998	3,042	3,082	Meningkat
Total (jiwa)	59,287	59,818	60,305	60,753	61,170	Meningkat
Dependency Ratio	42.76%	43.02%	43.24%	43.43%	43.61%	Meningkat
Dusun Utara						
0-14 tahun (jiwa)	4,159	4,188	4,214	4,236	4,257	Meningkat
15-64 tahun (jiwa)	11,695	11,726	11,755	11,781	11,806	Meningkat
65+ tahun (jiwa)	820	832	842	851	859	Meningkat
Total (jiwa)	16,674	16,746	16,810	16,868	16,922	Meningkat

Dependency Ratio	42.58%	42.81%	43.01%	43.18%	43.33%	Meningkat
Gunung Bintang Awai						
0-14 tahun (jiwa)	5,141	5,197	5,247	5,292	5,334	Meningkat
15-64 tahun (jiwa)	13,993	14,064	14,129	14,189	14,246	Meningkat
65+ tahun (jiwa)	937	951	964	975	986	Meningkat
Total (jiwa)	20,071	20,212	20,340	20,457	20,566	Meningkat
Dependency Ratio	43.43%	43.71%	43.96%	44.17%	44.36%	Meningkat

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan Diolah, 2025

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

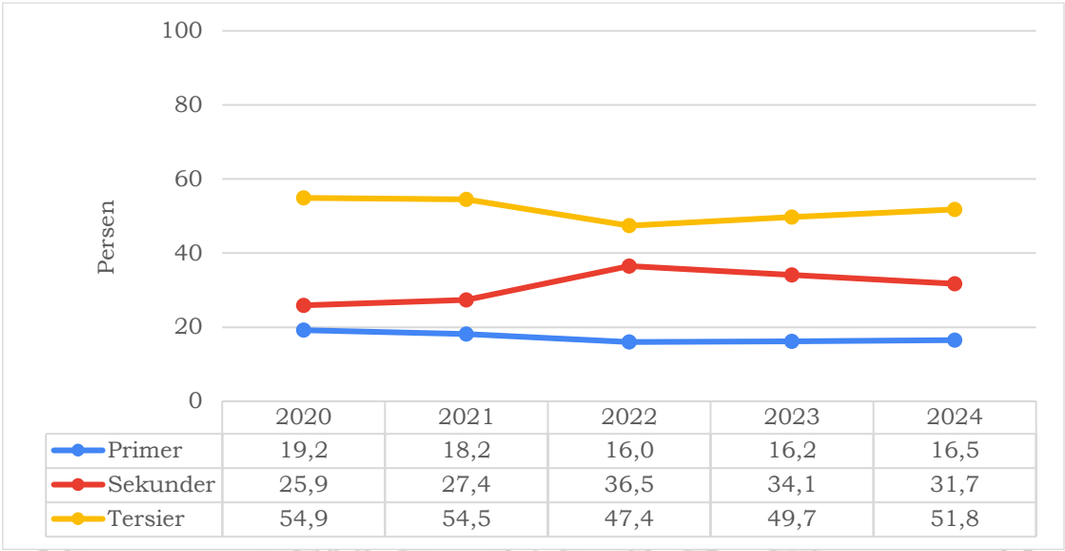
Kesejahteraan masyarakat merupakan perwujudan dari hasil upaya perencanaan terencana dan tersinergi dalam merespon dinamika kebutuhan dasar dalam mencegah dan mengatasi permasalahan serta memperkuat institusi sosial. Upaya ini tercermin melalui pemenuhan layanan publik yang merata, peningkatan akses terhadap perekonomian, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial yang inklusif. Ini perlu dibangun melalui langkah-langkah preventif dan responsif untuk terus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi ekonomi dan kesejahteraan menjadi aspek-aspek utama dalam mengukur pembangunan daerah. Kondisi pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Selatan, termasuk turunannya seperti laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Sementara itu, pemerataan kesejahteraan masyarakat tercermin dari indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, indeks Gini.

2.2.1.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan aktivitas masyarakat yang mencerminkan kondisi perekonomian dari sisi produksi. Indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi adalah distribusi persentase sektoral, yaitu kontribusi setiap sektor terhadap PDRB di suatu wilayah. Jika suatu sektor memiliki persentase yang tinggi maka sektor tersebut memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi daerah tersebut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Primer	19,2	18,2	16,0	16,2	16,5
Sekunder	25,9	27,4	36,5	34,1	31,7
Tersier	54,9	54,5	47,4	49,7	51,8

Gambar 2.22 Struktur Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Barito Selatan mengalami fluktuasi struktur ekonomi. Sektor primer mengalami penurunan kontribusi dari 19,7 persen pada tahun 2020 menjadi 16,5 persen pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan menurunnya rasio kegiatan berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian, pasca *Covid-19* sektor sekunder menunjukan adanya *bounce back* hingga mencapai angka 36,5 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 sektor sekunder kembali mengalami penurunan ke 31,7 persen yang mengindikasikan penurunan kegiatan pada sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; pengelolaan sampah; limbah dan daur ulang; dan konstruksi. Sementara itu, sektor tersier tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Barito Selatan meskipun sempat melemah pada 2022 dengan nilai 47,4 persen, tetapi kembali menguat pada 2024 dengan nilai 51,8 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan dan jasa tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu indikator makroekonomi. Menurut BPS, PDRB mencerminkan total nilai tambah produksi semua sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dibedakan menjadi Harga Konstan (ADHK) yang didasarkan pada harga tahun dasar tertentu dan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi, dan Harga Berlaku (ADHB) yang didasarkan pada harga berlaku pada tahun berjalan, mencerminkan nilai aktual dari aktivitas ekonomi.

Indikator PDRB ADHK dapat digunakan sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di masa mendatang. Data PDRB ADHK Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren kenaikan. PDRB ADHK mulai kembali menguat dan menandakan tanda *recovery* pasca Covid-19 pada tahun 2021-2023, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi. Meskipun terjadi fluktuasi PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) setiap tahun, sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai tertinggi. Sementara itu, sektor jasa perusahaan memiliki nilai terendah. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami kebangkitan ekonomi yang kuat pasca-pandemi yang ditopang oleh pemulihan aktivitas ekonomi, terutama sektor sekunder dan tersier.

Tabel 2.17 PDRB Atas Harga Konstan (ADHK), 2020—2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	782.939	770.015	803.767	797.949	792.635
B	Pertambangan dan Penggalian	905.149	959.633	1.087.948	1.162.026	1.258.079
C	Industri Pengolahan	237.875	241.271	258.500	247.303	247.667
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.459	2.607	2.622	2.760	2.919
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.108	6.551	6.801	7.152	7.022
F	Konstruksi	246.881	218.668	232.903	260.021	277.764
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	343.992	348.117	357.145	361.466	373.288
H	Transportasi dan Pergudangan	466.521	448.900	486.038	493.346	542.537
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81.232	82.613	86.784	90.031	96.289
J	Informasi dan Komunikasi	77.115	83.274	85.880	88.185	92.392

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	201.686	211.744	212.289	218.919	229.375
L	Real Estat	91.247	91.276	92.048	96.581	97.685
M,N	Jasa Perusahaan	662	610	611	675	703.7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	283.503	298.024	292.493	304.175	326.396
P	Jasa Pendidikan	297.499	309.810	318.361	332.021	332.587
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141.031	186.640	206.594	213.027	219.370
R,S,T,U	Jasa lainnya	75.712	71.275	72.167	77.859	80.029
	Jumlah Nilai	4.240.610	4.331.029	4.602.951	4.753.493	4.976.737

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

Akibat pandemi Covid-19, PDRB ADHB Kabupaten Barito Selatan sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp6.369,126 miliar. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp6.277,922 miliar yang mencerminkan dampak lanjutan pandemi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Memasuki tahun 2022-2023 kondisi mulai membaik seiring dengan proses pemulihan ekonomi. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan proyeksi mencapai Rp8.898,706 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Barito Selatan mulai pulih dan beradaptasi dengan situasi pasca pandemi. Kinerja ekonomi yang membaik ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), 2020—2024

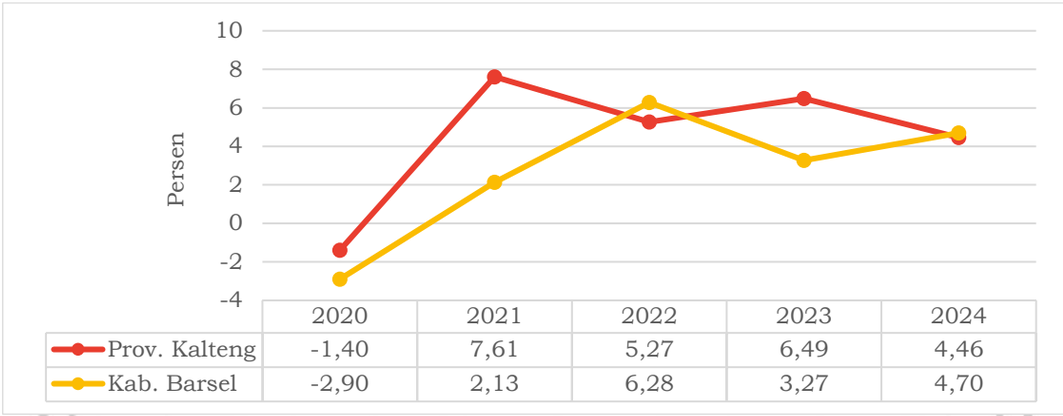
Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.207.212	1.212.789	1.305.079	1.372.955	1.470.169
B	Pertambangan dan Penggalian	837.044	1.056.495	2.123.597	2.010.384	1.864.975
C	Industri Pengolahan	372.629	390.479	433.489	418.927	437.276
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.837	4.127	4.331	4.678	4.985
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.715	11.800	12.779	14.027	14.469
F	Konstruksi	400.491	364.922	395.033	446.401	495.140
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	539.613	548.929	578.398	638.542	695.965
H	Transportasi dan Pergudangan	773.239	751.608	833.541	916.171	1.082.853

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136.047	140.638	151.569	163.160	182.455
J	Informasi dan Komunikasi	99.920	107.767	112.880	112.746	116.256
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	340.008	364.840	374.106	401.034	430.919
L	Real Estat	166.337	174.571	179.524	194.722	201.112
M,N	Jasa Perusahaan	1.145	1.088	1.129	1.310	1.407
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	503.342	536.418	535.139	578.664	639.064
P	Jasa Pendidikan	527.348	584.835	623.001	698.545	721.307
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.067	302.751	335.307	360.556	381.406
R,S,T,U	Jasa lainnya	130.932	127.077	132.727	148.419	158.948
Jumlah Nilai		6.277.922	6.681.133	8.131.627	8.481.240	8.898.706

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data dan kondisi di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki tren naik-turun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan berada di kondisi deflasi yaitu –2,9 persen, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah meskipun pada kondisi yang sama deflasi di angka –1,4 persen, akibat pandemi Covid-19. Namun, perekonomian mulai membaik pada tahun 2021 dan 2022, ditandai dengan nilai positif di seluruh sektor usaha. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 3,27 persen dan meningkat tajam menjadi 4,7 persen pada tahun 2024 lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah di angka 4,46 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi Barito Selatan sebagai bagian dari *Big Push* ekonomi di hingga tahun 2045 mendatang. Pada tahun 2025-2029 diharapakan menjadi tahapan penguatan pondasi atau persiapan hal-hal dasar kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian daerah.



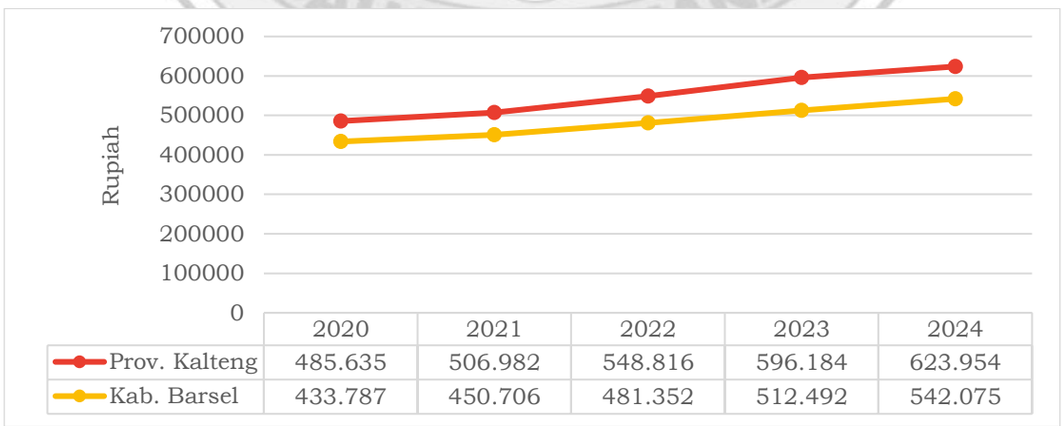
	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	-1,40	7,61	5,27	6,49	4,46
Kab. Barsel	-2,90	2,13	6,28	3,27	4,70

Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, *2025*

2.2.1.4. Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan, kemiskinan diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan. BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan dua komponen, yaitu kebutuhan makanan dan non-makanan. Pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Garis kemiskinan Barito Selatan di tahun 2024 di angka Rp 542.075 yang artinya penduduk kategori miskin memiliki pengeluaran di bawah Rp Rp 542.075 per bulan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	485.635	506.982	548.816	596.184	623.954
Kab. Barsel	433.787	450.706	481.352	512.492	542.075

Gambar 2.24 Garis Kemiskinan, 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Barito, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren yang tidak stabil dengan peningkatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks yang tinggi menandakan ketimpangan pengeluaran yang lebih besar di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2020 – 2024 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan meskipun terdapat naik-turun dalam tingkat kemiskinan (P1), distribusi pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin tidak terlalu timpang.

Tabel 2.19 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2020—2024

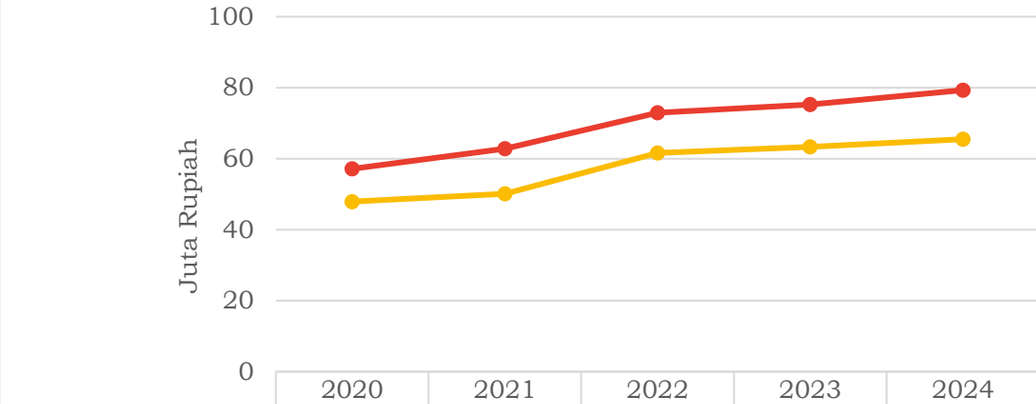
Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	4,45	0,89	0,26
2021	4,62	0,35	0,04
2022	4,88	0,58	0,10
2023	4,72	0,41	0,06
2024	4,83	0,21	0,03

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.5. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita adalah salah satu indikator untuk memantau aktivitas ekonomi. PDRB Per Kapita dihitung dengan membagi Nilai PDRB ADHB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita mencerminkan estimasi pendapatan yang seharusnya diterima oleh setiap penduduk. Selain itu, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Barito Selatan. Asumsinya adalah semakin besar PDRB per kapita, semakin tinggi kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan data PDRB Per Kapita, kondisi di Kabupaten Barito Selatan tergolong cukup baik dengan

rentang PDRB Per Kapita yang meningkat antara 47,91 juta rupiah di tahun 2020 hingga 65,48 juta rupiah di tahun 2024. Stabilitas kondisi ini harus dijaga dan ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.



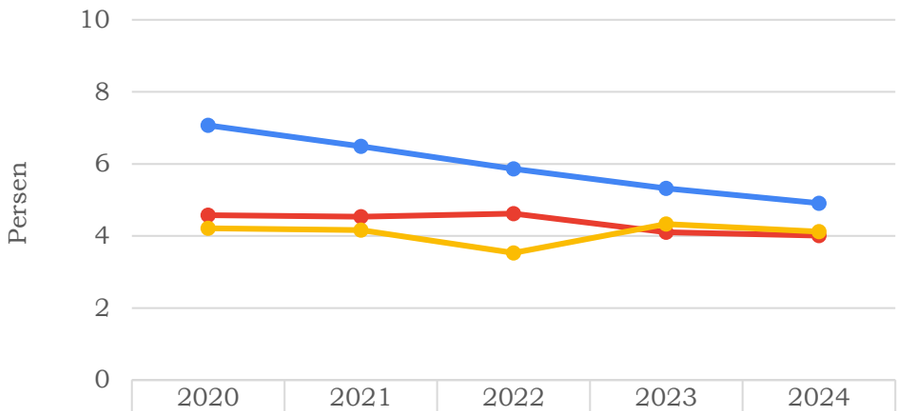
	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	57,15	62,83	72,97	75,27	79,30
Kab. Barsel	47,91	50,09	61,59	63,28	65,48

Gambar 2.25 PDRB Per Kapita, 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan proporsi jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja secara keseluruhan. Pengangguran terbuka merupakan penduduk dalam usia angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan/sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha/ tidak mencari pekerjaan dan penduduk yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja. TPT Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren moderat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Selatan menurun dari 4,21 persen pada tahun 2020 menjadi 4,12 persen pada 2024, meskipun sempat turun tajam ke 3,53 persen pada 2022 dan kembali naik ke 4,33 persen di tahun 2023. Sepanjang periode tersebut, TPT Barito Selatan cenderung lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan selalu berada di bawah angka nasional yang mencapai 4,91 persen di tahun 2024. Kondisi ini memberikan sinyal positif terhadap perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja. Namun, isu ketersediaan dan kesesuaian lapangan pekerjaan perlu menjadi perhatian penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Barito Selatan.



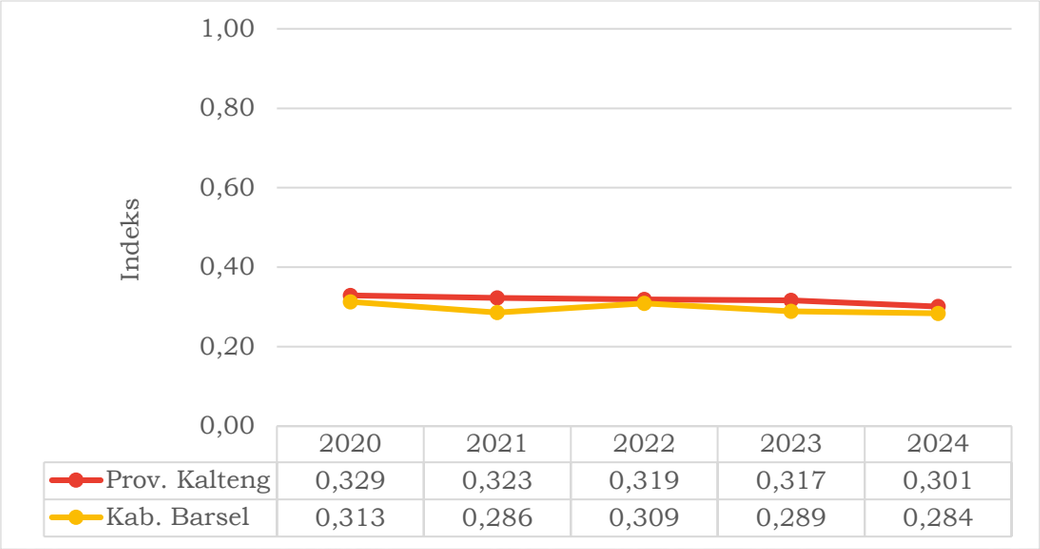
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Prov. Kalteng	4,58	4,53	4,62	4,10	4,01
Kab. Barsel	4,21	4,16	3,53	4,33	4,12

Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.1.7. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan pembangunan agar tidak menimbulkan disparitas pendapatan. Salah satu indikator untuk mengukur kesetaraan distribusi pendapatan adalah indeks gini. Selama lima tahun terakhir, indeks gini Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang cenderung stagnan. Pada tahun 2020, indeks gini Gini tercatat sebesar 0,313 menurun menjadi 0,286 pada tahun 2021, tetapi kembali naik ke 0,309 pada tahun 2022. Setelah itu, indeks gini menurun berturut-turut menjadi 0,289 di tahun 2023 dan 0,284 pada tahun 2024 yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, indeks gini Kabupaten Barito Selatan cenderung lebih rendah. Penurunan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, namun tetap diperlukan upaya yang konsisten agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar inklusif dan mampu mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.



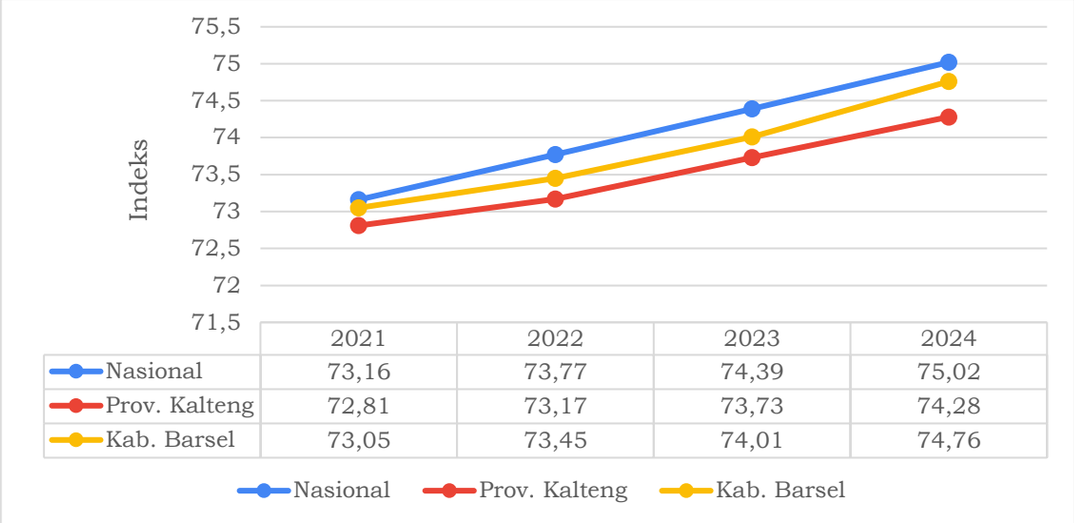
	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	0,329	0,323	0,319	0,317	0,301
Kab. Barsel	0,313	0,286	0,309	0,289	0,284

Gambar 2.27 Indeks Gini, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan daerah atas pemenuhan kebutuhan dasar kualitas hidup penduduk. Indikator IPM diukur melalui 3 tiga komponen dasar, yaitu tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi umum tingkat kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari pencapaian perkembangan IPM dari tahun ke tahun. Selama periode 2021–2024 angka IPM Kabupaten menunjukkan tren yang meningkat dengan kategori tinggi (70 ≤ IPM ≤ 80) berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini terlihat pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 74,76 di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 75,02. Selama periode 2021–2024 angka IPM Kabupaten menunjukkan tren yang meningkat dengan kategori tinggi (70 ≤ IPM ≤ 80) berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini terlihat pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 74,76 di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 75,02.



Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2020—2024

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya IPM tersebut adalah komponen kesehatan, khususnya Usia Harapan Hidup saat lahir yang masih berada di bawah rata-rata provinsi (73,73 tahun) maupun nasional (74,15 tahun). Capaian pada komponen kesehatan ini dipengaruhi oleh kondisi dan akses pelayanan kesehatan yang belum merata serta belum optimalnya infrastruktur dan sumber daya kesehatan. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan yang cukup besar juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau layanan kesehatan hingga ke wilayah-wilayah terpencil, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup penduduk harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah guna mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rincian komponen dalam indikator IPM dalam kurun waktu empat tahun terakhir dijabarkan pada Tabel 2.20 sebagai berikut.

Tabel 2.20 Indikator Komponen IPM, 2020–2024

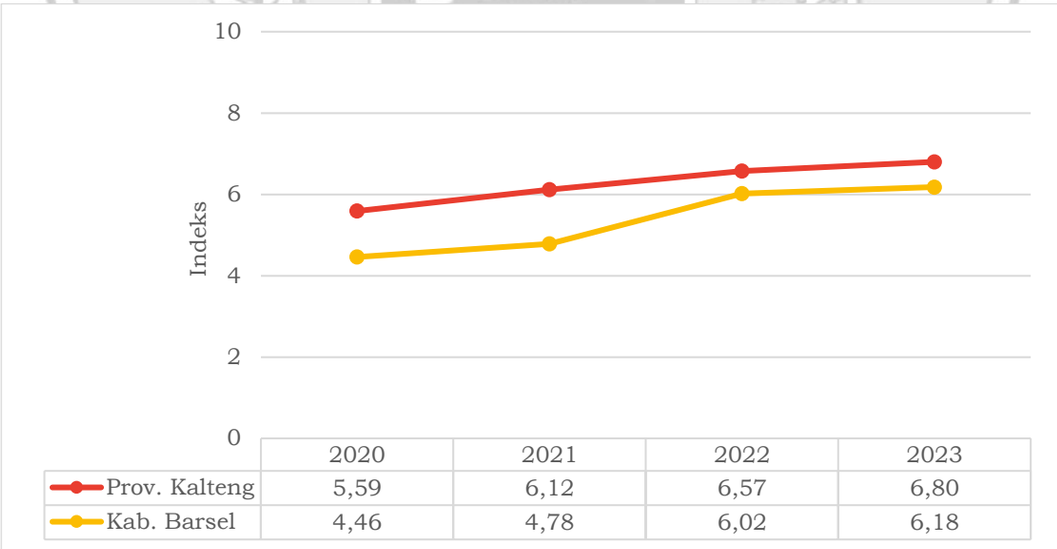
Uraian	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,41	72,54	72,63	72,79
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,66	12,67	12,80	13,00
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,95	9,01	9,13	9,22

Uraian	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran per Kapita (Rp)	11,492	11,78	12,067	12,508
Laju IPM (Persen)	0,44	0,55	0,76	1,01

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tingkat pemerataan pembangunan diukur dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang menilai aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks ini didasarkan pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan. Dari periode tahun 2020–2023, Indeks Pembangunan Inklusif Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 6,18. Namun, dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode yang sama, Kabupaten Barito Selatan memiliki nilai yang lebih rendah. Tantangan pembangunan dalam hal kesenjangan sosial, kemiskinan, dan aksesbilitas masih perlu mendapat perhatian lebih dalam pembangunan daerah.



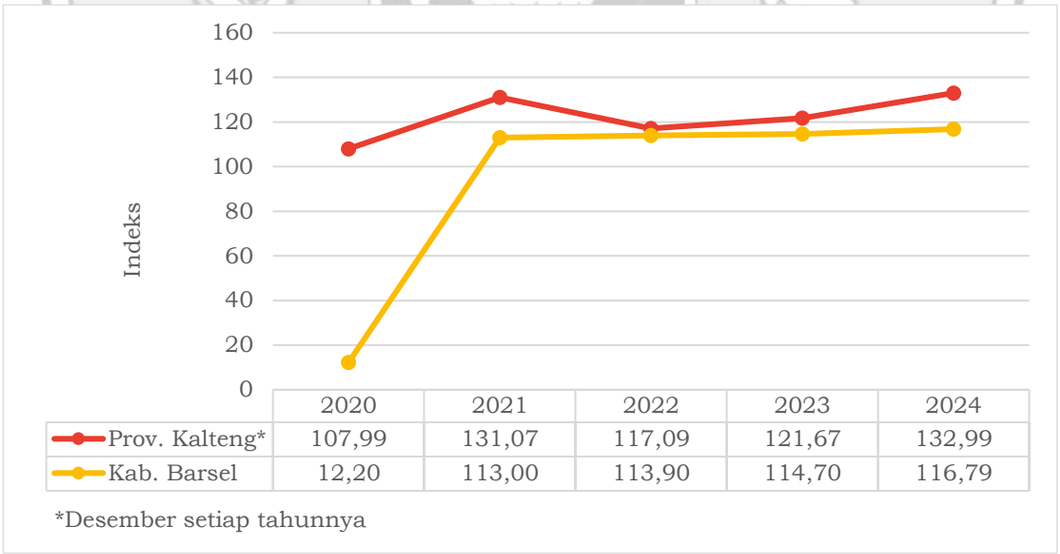
Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Inklusif, 2020-2023

Sumber: Bappenas diolah, 2024

2.2.1.10. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP dihitung dengan membandingkan pendapatan petani sebagai produsen yang menjual hasil pertanian dengan pengeluaran mereka sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya produksi. Nilai NTP di atas 100 mencerminkan keuntungan karena harga yang diterima petani lebih tinggi dari yang dibayar. Sebaliknya, NTP di bawah 100 menunjukkan kerugian, sementara NTP sama dengan 100 menandakan keseimbangan antara harga jual dan beli.

Angka NTP Barito Selatan cenderung meningkat dari tahun 2021 di angka 113 hingga bulan April tahun 2024 menjadi 116,79. Hal ini menandakan adanya peningkatan dalam daya beli dan kesejahteraan relatif petani. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Nilai NTP Barito Selatan masih berada di bawah angka provinsi. Sejalan dengan fokus pembangunan Barito Selatan yang diarahkan sebagai salah satu daerah lumbung pangan, kondisi ini mencerminkan masih perlunya peningkatan posisi tukar petani melalui penguatan daya saing dan efisiensi usaha tani.



	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng*	107,99	131,07	117,09	121,67	132,99
Kab. Barsel	12,20	113,00	113,90	114,70	116,79

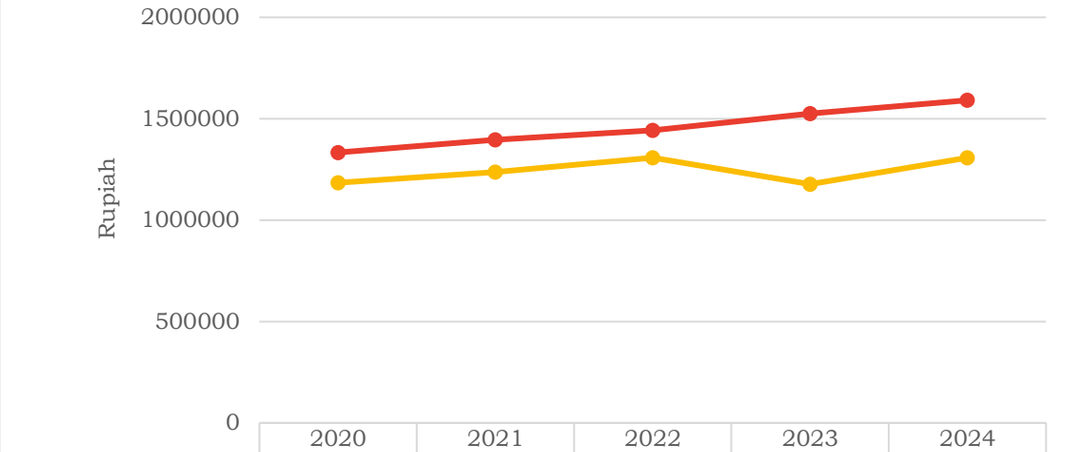
*Desember setiap tahunnya

Gambar 2.30 Nilai Tukar Petani, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025

2.2.1.11. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran konsumsi Per Kapita mencerminkan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pengeluaran. Semakin tinggi rasio semakin menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Angka ini dihitung berdasarkan total pengeluaran penduduk untuk makanan dan non-makanan dibagi dengan jumlah penduduk. Teori *Engel Law* menggambarkan bahwa dengan peningkatan pendapatan rumah tangga, proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun sementara pengeluaran untuk non-makanan cenderung meningkat. Pada tahun 2020–2022 pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan, tetapi menurun pada tahun 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024. Jika dibandingkan, angka Kabupaten Barito Selatan selalu di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah.



	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	1.333.318	1.395.826	1.442.295	1.525.785	1.590.691
Kab. Barsel	1.184.212	1.235.968	1.307.549	1.176.982	1.307.487

Gambar 2.31 Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025

Berdasarkan kategorinya, rasio pengeluaran untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan non-makanan pada periode 2020 hingga 2024 yang mencapai lebih dari 50 persen. Untuk kategori non makanan berada di rentang 43 hingga 46 persen pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih berfokus terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dasar. Secara ekonomi, kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat masih berada di tahap subsisten,

dimana pendapatan lebih banyak terserap untuk konsumsi primer dan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya berkembang ke arah kebutuhan yang lebih beragam. Perlu adanya upaya untuk peningkatan pendapatan agar konsumsi masyarakat menjadi lebih seimbang serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan beragam.

Tabel 2.21 Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan, 2020—2024

Golongan/ Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	54%	54%	57%	57%	56%
	Rp641.873	Rp665.081	Rp750.914	Rp670.988	Rp731.930
Non makanan	46%	46%	43%	43%	44%
	Rp542.339	Rp570.887	Rp556.635	Rp505.995	Rp575.556

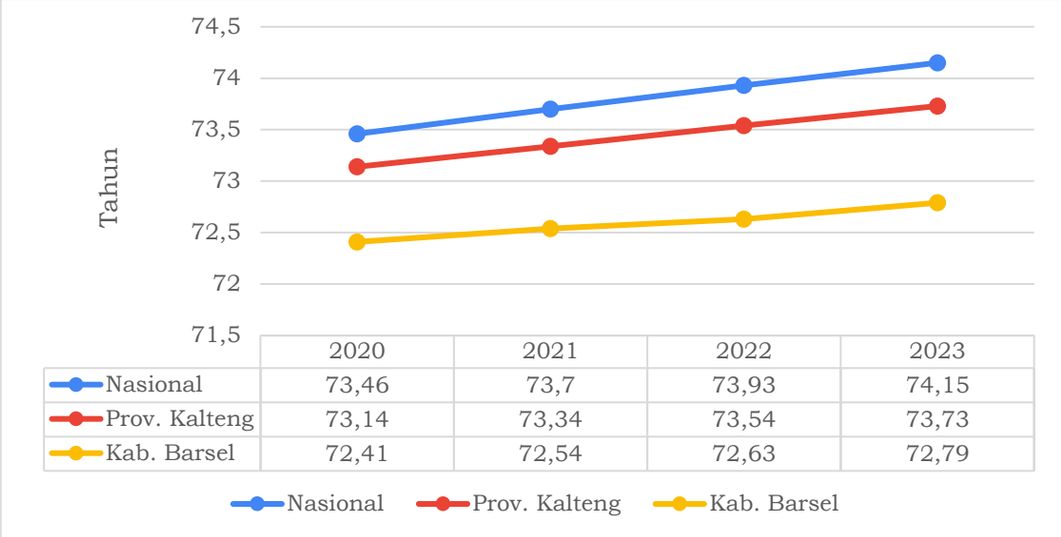
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Aspek kesehatan merupakan salah satu fondasi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Adapun fokus kesehatan untuk semua bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan merata.

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh penduduk sejak lahir. Secara umum, selama lima tahun terakhir terjadi tren peningkatan UHH di tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Barito Selatan. UHH Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dari 72,41 tahun pada 2020 menjadi 72,79 tahun pada 2024. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia di bidang kesehatan.



	2020	2021	2022	2023
Nasional	73,46	73,7	73,93	74,15
Prov. Kalteng	73,14	73,34	73,54	73,73
Kab. Barsel	72,41	72,54	72,63	72,79

Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Usia Harapan Hidup (UHH), 2020–2024

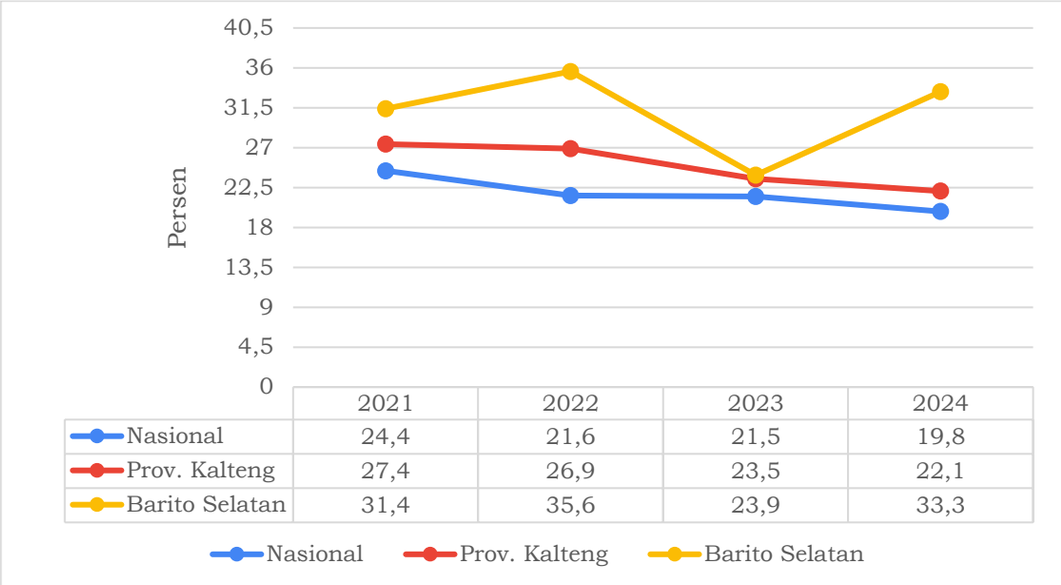
Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

Meskipun demikian, UHH di Kabupaten Barito Selatan masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan angka nasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Selatan antara lain terkait dengan distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan yang belum merata, kondisi sarana kesehatan yang kurang memadai, angka kematian ibu dan bayi, serta kondisi geografis wilayah dengan luas dan kontur yang cukup menantang menyebabkan akses ke fasilitas kesehatan primer menjadi sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya khusus untuk mempercepat perbaikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya. Hal ini ini termasuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan, gizi yang lebih baik, penempatan tenaga medis secara strategis, pemantapan sistem pelayanan kesehatan serta pendidikan dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan usia harapan hidup antara Kabupaten Barito Selatan dengan tingkat provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil.

2.2.2.2. Prevelensi Stunting

Prevelensi Stunting merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kekurangan gizi kronis pada anak balita, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi yang dialami anak stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga menghambat perkembangan otak sehingga berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas di masa dewasa. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 maupun data Dinas Kesehatan tahun 2024, tingkat pravelensi stunting di Kabupaten Barito Selatan menunjukan tren fluktuasi signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka stunting mencapai 31,4 persen, meningkat menjadi 35,6 persen pada 2022, kemudian menurun drastis ke 23,9 persen pada 2023. Namun pada tahun 2024, berdasarkan data sementara dari Dinas Kesehatan, tingkat pravelensi stunting di Kabupaten Barito Selatan sebesar 33,3 persen naik drastis atau meningkat 9,4 persen dari tahun 2023. Capaian tersebut masih berada jauh di atas rata-rata nasional maupun provinsi Kalimantan Tengah.

Tingginya prevalensi dan ketidakstabilan tren stunting di Kabupaten Barito Selatan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu antara lain masih rendahnya kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan, rendahnya tingkat kunjungan balita ke posyandu dan tingginya tingkat pernikahan dini. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar seperti intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama dalam layanan kesehatan ibu dan anak pada masa 1.000 hari pertama kehidupan, akses dan kualitas pelayanan gizi di daerah pedesaan dan terpencil yang belum merata serta kurangnya edukasi gizi pada keluarga serta masih minimnya sanitasi dan akses air bersih di beberapa wilayah.



Gambar 2.33 Perbandingan Tingkat Prevalensi Stunting, 2021–2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025

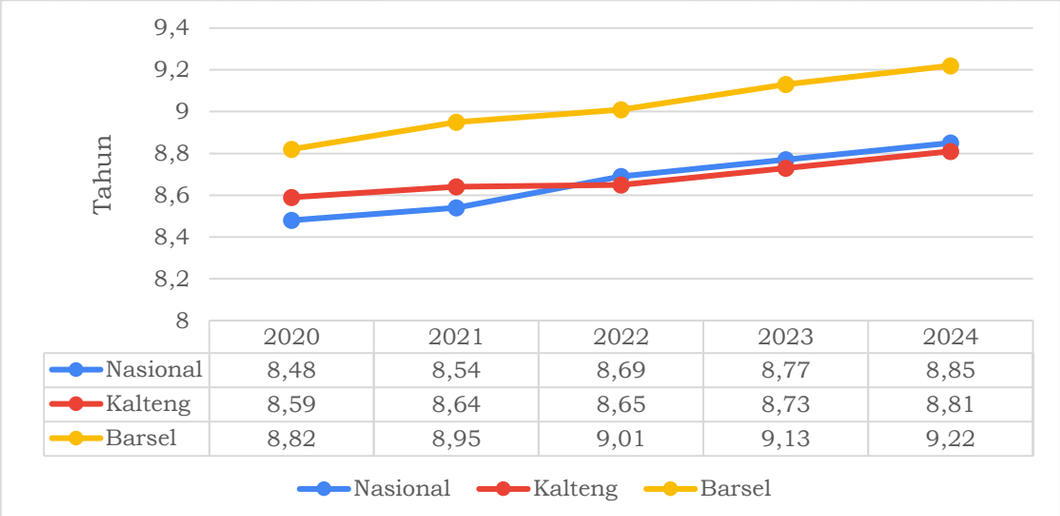
Oleh karena itu, untuk menjaga dan mempercepat penurunan angka stunting, peran pemda di Kabupaten Barito Selatan menjadi sangat krusial. Pendekatan konvergensi yang mencakup kolaborasi multisektor serta berbasis data dan bukti menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas intervensi. Selain itu, perlu untuk melanjutkan kebijakan dan program intervensi adaptif dan berkelanjutan dengan langkah konkrit yang berfokus pada peningkatan gizi, akses layanan kesehatan yang memadai, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan. Monitoring dan evaluasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan efektivitas program serta penyesuaian berdasarkan data dan kondisi lapangan.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mengurangi ketimpangan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun rata-rata pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, tanpa menghitung tahun yang diulang. Indikator ini menjadi salah satu komponen penting dalam dimensi pendidikan pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena mencerminkan capaian akses dan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, RLS di Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 8,82 tahun, dan meningkat menjadi 9,22 tahun pada tahun 2024. Capaian ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (8,81 tahun) dan nasional (8,85 tahun) pada tahun yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun terakhir sebagian besar murid mampu menempuh pendidikan selama 9,22 tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan secara signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Selatan serta mengindikasikan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya sekolah sebagai sarana pendidikan dalam menunjang peningkatan sumber daya manusia.



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Kalteng	8,59	8,64	8,65	8,73	8,81
Barsel	8,82	8,95	9,01	9,13	9,22

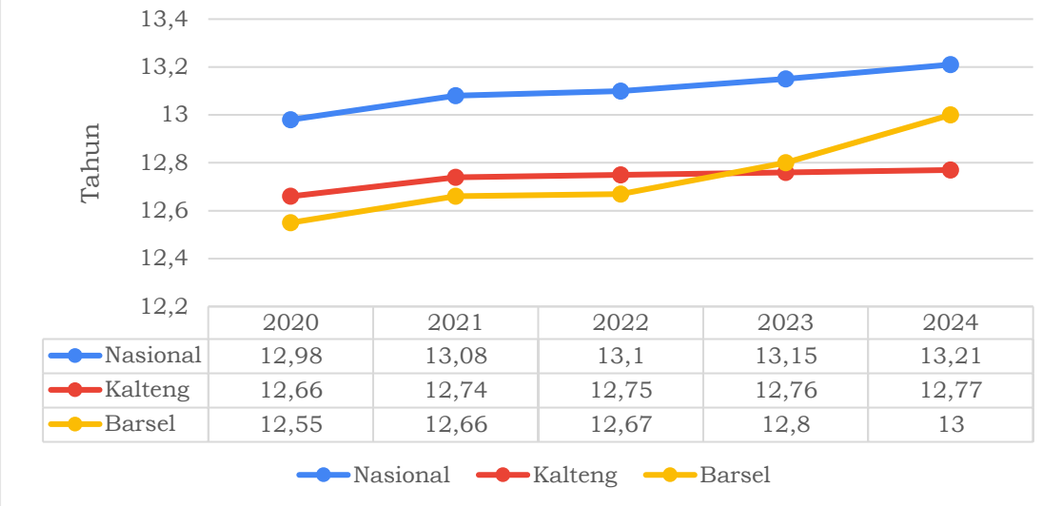
Gambar 2.34 Perbadingan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025

Meskipun demikian, tantangan tetap perlu diperhatikan, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, mengurangi angka putus sekolah, dan mendorong partisipasi penuh hingga jenjang pendidikan menengah tinggi. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan perlu terus menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan rata-rata indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas. Indikator ini memberikan gambaran mengenai peluang akses masyarakat terhadap pendidikan di masa mendatang. Angka HLS di Kabupaten Barito Selatan menunjukan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 12,55 tahun pada 2020 menjadi 13,00 tahun pada 2024. Capaian ini secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (12,77 tahun) namun masih lebih rendah dari rata-rata nasional (13,21 tahun). Secara detail uraian perbandingan tingkat HLS dapat dilihat pada Gambar 2.35 sebagai berikut:



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	12,98	13,08	13,1	13,15	13,21
Kalteng	12,66	12,74	12,75	12,76	12,77
Barsel	12,55	12,66	12,67	12,8	13

Gambar 2.35 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS), 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025

Peningkatan ini mencerminkan membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan formal hingga jenjang yang lebih tinggi, serta menunjukan adanya efektivitas kebijakan dan program pendidikan daerah dalam mendorong partisipasi sekolah. Namun demikian, kesenjangan dengan capaian nasional mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan, terutama di wilayah-wilayah terpencil, baik dari sisi keterjangkauan fasilitas pendidikan, kesiapan infrastruktur, maupun kondisi sosial ekonomi keluarga.

2.2.3.3. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap individu. Literasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk memahami informasi dan pengetahuan secara kritis sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Di sisi lain, numerasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan wilayah melalui penggunaan dan analisis angka secara objektif. Kombinasi kedua kemampuan ini membantu setiap individu mengembangkan pola pikir kritis dengan analisis deskriptif dan konsep matematis untuk memecahkan masalah secara praktis dan efektif. Penilaian kemampuan literasi dan numerasi dilakukan menggunakan indikator rata-rata kemampuan berdasarkan asesmen nasional.

Kondisi kemampuan literasi dan numerasi di Kabupaten Barito Selatan dilihat dari nilai rerata kemampuan literasi dan numerasi. Berdasarkan jenjang SD, rata-rata kemampuan literasi mencapai nilai 55,06 dan rata-rata kompetensi numerasi sebesar 43,85 pada tahun 2023. Sementara itu, rata-rata kemampuan literasi sebesar 65.82 dan rata-rata kompetensi numerasi sebesar 60,68 untuk jenjang SMP. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa SMP memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional.

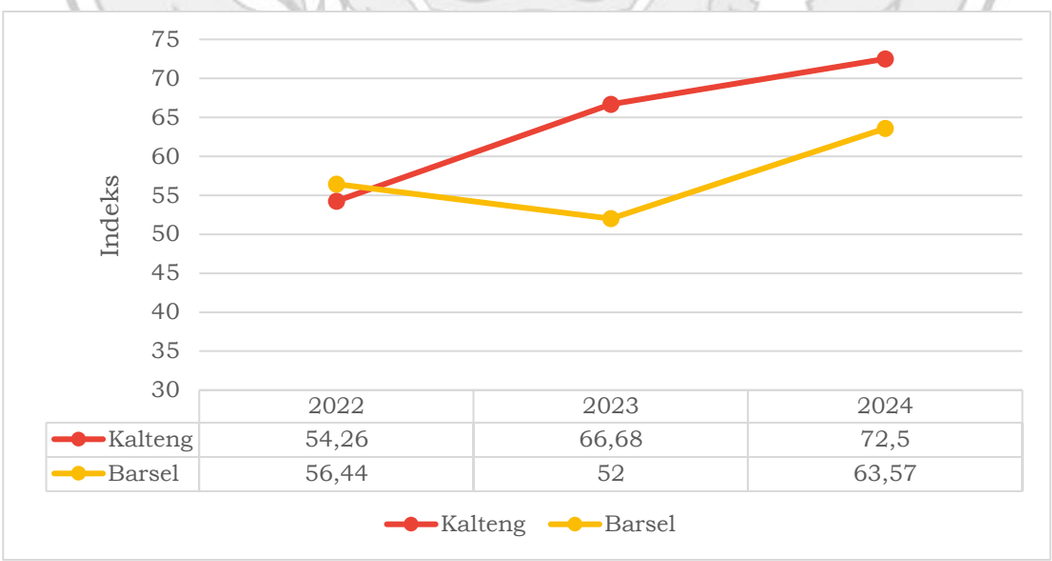
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Kemampuan Literasi dan Numerasi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Urusan	Jenjang Pendidikan	
		SD	SMP
1.	Rerata kemampuan Literasi berdasarkan Asesmen Nasional	55,06	65,82
2.	Rerata kompetensi Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional	43,85	60,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan data yang ada, IPLM mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir dan berada pada kategori sedang. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 56,44 lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 54,26. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,44 skor dibandingkan tahun sebelumnya, sementara itu capaian provinsi justru meningkat pesat menjadi 66,68 pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024, nilai IPLM di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan menjadi 63,57 meskipun masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 72,50.



Gambar 2.36 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2022-2024

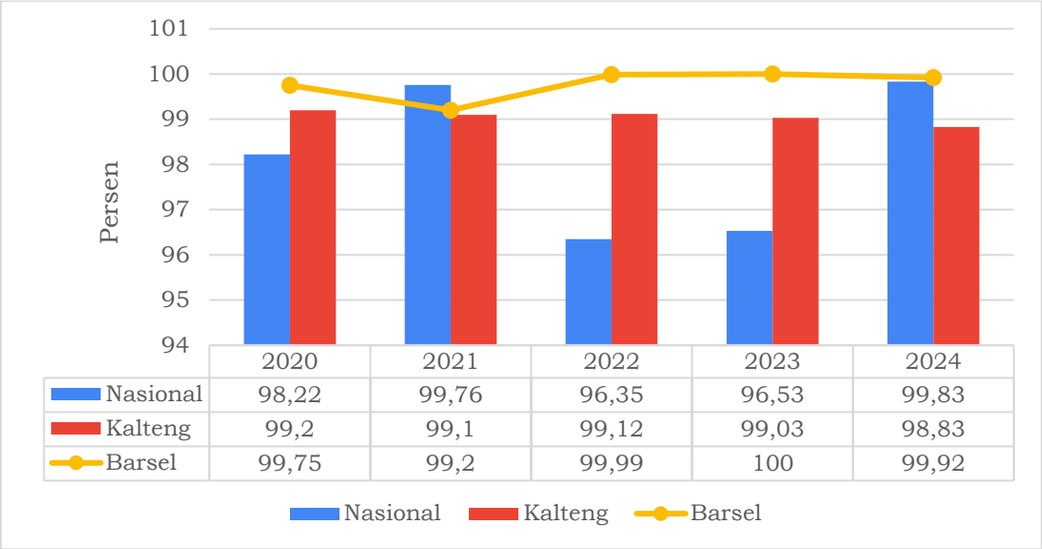
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025

Kondisi fluktuasi nilai IPLM di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam pembangunan ekosistem literasi masyarakat. Penurunan pada tahun 2023 dapat mengindikasikan kendala dalam distribusi bahan bacaan, terbatasnya aktivitas literasi di masyarakat, atau menurunnya dukungan kelembagaan yang ada. Sementara itu, peningkatan pada tahun 2024 menunjukan adanya perbaikan, baik dari sisi akses, partisipasi, maupun peran pemerintah dalam mendorong kegiatan literasi. Maka dari itu, masih diperlukan adanya peningkatan investasi pada fasilitas literasi. Skor yang tinggi dapat menjadi modal sosial dan budaya yang kuat untuk mendukung program pembangunan berbasis pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan, dan inovasi daerah.

2.2.3.5. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada aspek pendidikan. Indikator ini didasarkan pada proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan buta huruf. Tingginya jumlah penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar menjadi tantangan dalam upaya peningkatan AMH secara berkelanjutan. Selain itu, indikator AMH dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta digunakan untuk menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

AMH di Kabupaten Barito Selatan menunjukan capaian yang tinggi dan relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, AMH Kabupaten Barito Selatan berada pada angka 99,75 persen, meningkat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 99,92 persen pada tahun 2024. Capaian ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (98,83 persen) maupun nasional (99,83 persen).



Gambar 2.37 Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2020–2024

Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka diolah, 2025

Tingginya capaian AMH di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kemampuan dasar literasi penduduk, khususnya pada kelompok usia produktif dan dewasa. Hal ini juga didukung oleh keberadaan layanan pendidikan dasar yang cukup menjangkau sebagian besar wilayah serta dukungan dari program pendidikan non-formal, seperti keaksaraan fungsional dan kegiatan belajar masyarakat. Meskipun demikian, tingginya angka melek huruf belum sepenuhnya mencerminkan kualitas literasi secara menyeluruh, karena literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup pemahaman, berpikir kritis, dan keterampilan menggunakan informasi. Tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal disparitas akses pendidikan lanjutan, kualitas pengajaran, serta keterbatasan sarana pembelajaran di wilayah terpencil.

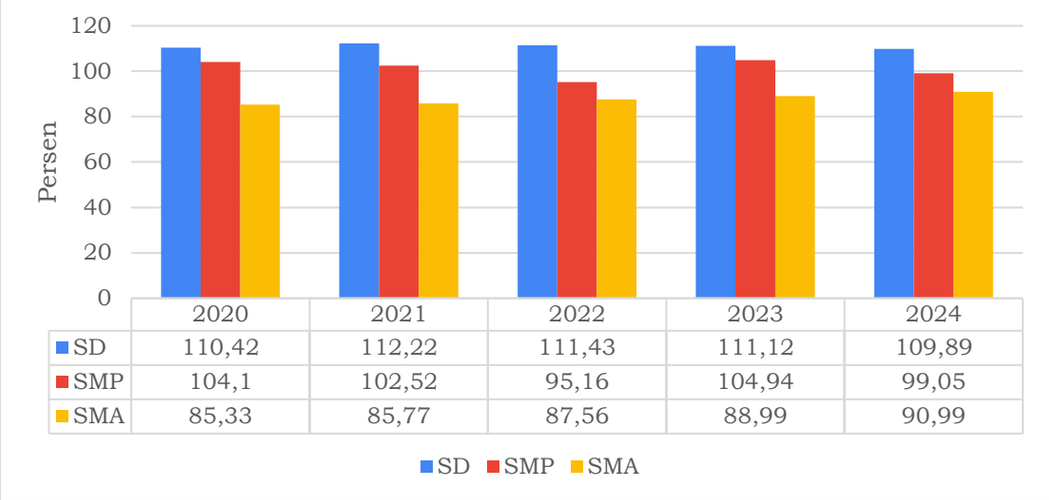
2.2.3.6. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu baik formal maupun informal. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi.

Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Adapun APS terbagi kedalam dua klasifikasi, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah murid yang bersekolah sesuai pada jenjang pendidikan yang dijalani tanpa melihat kesesuaian kelompok usia dengan jenjang pendidikan seharusnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, APK di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil pada jenjang SD. Ini menandakan adanya partisipasi siswa di luar kelompok usia sekolah dasar. Sementara itu, APK jenjang SMP mengalami tren penuruan dari 104,1 persen pada tahun 2020 menjadi 99,05 persen pada tahun 2024. Kondisi ini berarti menggambarkan adanya potensi penyempitan akses pada jenjang SMP.

Pada jenjang SMA, APK mengalami peningkatan dari 85,33 persen pada tahun 2020 menjadi 90,99 persen pada tahun 2024, tetapi capaian ini masih menunjukkan tantangan dalam menjangkau seluruh kelompok usia sekolah menengah atas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan intervensi pada jenjang SMP dan terutama SMA, baik dari sisi ketersediaan layanan pendidikan maupun strategi retensi siswa. Perkembangan APK Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 digambarkan pada Gambar 2.38 sebagai berikut:

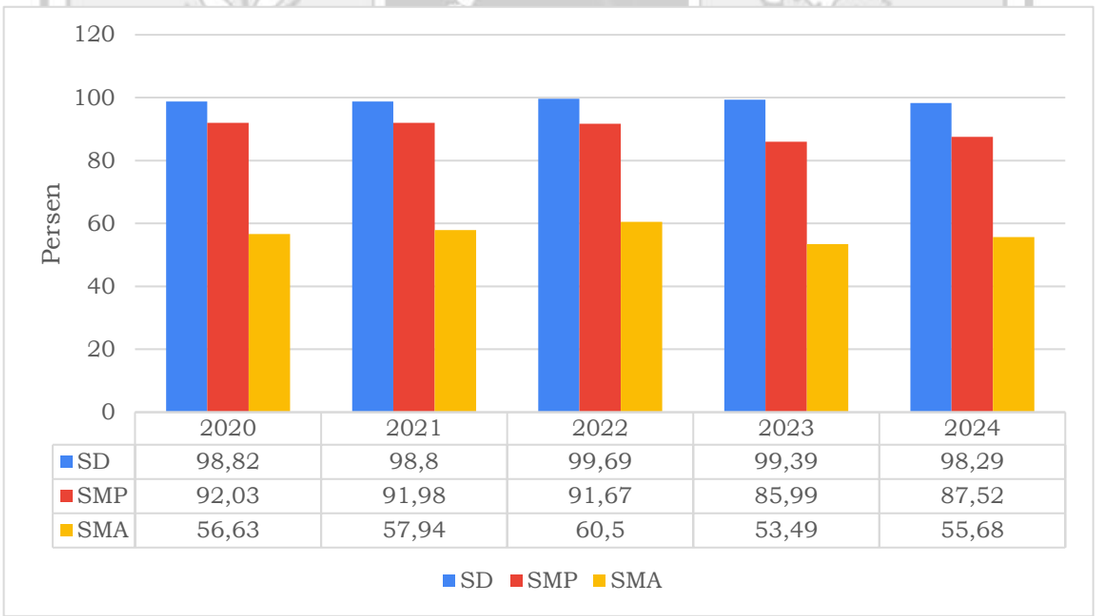


	2020	2021	2022	2023	2024
SD	110,42	112,22	111,43	111,12	109,89
SMP	104,1	102,52	95,16	104,94	99,05
SMA	85,33	85,77	87,56	88,99	90,99

Gambar 2.38 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah, 2020–2024

Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka diolah, 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu secara tepat waktu sesuai dengan kelompok usianya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, APM di Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan capaian tinggi dan relatif stabil pada jenjang SD sepanjang dengan angka di atas 98 persen yang mencerminkan efektivitas dalam menjangkau anak usia sekolah dasar sesuai kelompok umur. Namun, APM SMP menunjukkan sedikit penurunan dari 92,02 persen pada 2020 menjadi 87,52 persen pada 2024. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa usia SMP secara konsisten. Pada jenjang SMA meskipun sempat mengalami peningkatan hingga 60,5 persen pada 2022, tren menurun kembali terjadi pada 2023 sebelum sedikit membaik pada 2024. Capaian APM SMA yang masih di bawah 60 persen pada sebagian besar tahun menunjukkan kesenjangan signifikan dalam ketercapaian pendidikan menengah atas usia tepat. Strategisnya, dibutuhkan fokus kebijakan yang memperkuat transisi dan keberlanjutan pendidikan dari SMP ke SMA serta penguatan intervensi berbasis inklusivitas dan keadilan akses.



	2020	2021	2022	2023	2024
SD	98,82	98,8	99,69	99,39	98,29
SMP	92,03	91,98	91,67	85,99	87,52
SMA	56,63	57,94	60,5	53,49	55,68

Gambar 2.39 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah, 2020–2024

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka diolah, 2024

2.2.3.7. Standar Kompetensi Pendidik

Standar kompetensi pendidik bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sejalan dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, standar kompetensi pendidik dapat diukur melalui dua indikator, yaitu persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV dan persentase guru yang tersertifikasi. Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV merupakan indikator yang menunjukkan proporsi guru yang memiliki gelar Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) dibandingkan dengan jumlah total guru di suatu wilayah atau lembaga pendidikan.

Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan proporsi guru di Kabupaten Barito Selatan yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2020, hanya 36,4 persen guru SD/SDLB yang berkualifikasi S1/DIV, namun meningkat tajam menjadi 93,3 persen pada tahun 2022. Peningkatan juga terjadi pada jenjang SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMALB, yang masing-masing mencapai 94,1 persen dan 97,1 persen pada tahun 2022. Capaian ini mencerminkan upaya positif dalam memenuhi standar kompetensi akademik tenaga pendidik.

Persentase guru yang tersertifikasi merupakan indikator yang menunjukkan proporsi guru yang telah mendapatkan sertifikasi profesional sebagai guru dibandingkan dengan jumlah total guru di suatu wilayah atau lembaga pendidikan. Jika dilihat selama tiga tahun terakhir persentase guru yang tersertifikasi mengalami tren yang fluktuatif. Capaian ini masih menunjukan ketimpangan antarjenjang dan tren penurunan pada sebagian besar kategori. Secara detail kondisi kompetensi pendidik di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23 Persentase Kompetensi Pendidik, 2020–2022

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)				
1	SD/ SDLB	36,4	92,1	93,3
2	SMP/ SMPLB	90	94,3	94,1
3	SMA/ SMK/ SMALB	84,2	97,3	97,1
Guru yang tersertifikasi (%)				
1	Paud	6,1	2,4	3,2
2	SD/ Sederajat	37,9	36,0	34,1
3	SMP/ Sederajat	27,6	25,9	25,1
4	SMA	29,2	23,5	24,3
5	SMK	40,5	37,1	62,7
6	SLB	22,7	17,9	9,5

Sumber: Profil Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Kondisi kompetensi pendidik di Kabupaten Barito Selatan tersebut mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi akademik, pemenuhan kompetensi profesional melalui sertifikasi masih menjadi tantangan, terutama pada jenjang PAUD, SD, dan SLB. Rendahnya angka sertifikasi dapat memengaruhi kualitas pembelajaran dan pencapaian standar mutu pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah guru tersertifikasi melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi program PPG (Pendidikan Profesi Guru), serta penguatan manajemen sumber daya pendidikan perlu menjadi fokus dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan.

2.2.3.8. Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan merupakan instrumen penting dalam menilai kualitas layanan pendidikan, tidak hanya dari hasil belajar tetapi juga mencakup proses pembelajaran, iklim satuan pendidikan, hingga relevansi lulusan dengan dunia kerja. Secara umum, mayoritas capaian pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Barito Selatan berada dalam kategori sedang. Capaian yang menjadi catatan utama dalam rapor pendidikan Kabupaten Barito Selatan adalah angka partisipasi sekolah yang berada dalam kategori kurang, baik untuk kelompok usia 5–6 tahun, 16–18 tahun, serta 7–18 tahun kesetaraan dan anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, jika melihat pada Kemampuan Literasi, Numerasi, dan Karakter Murid menunjukkan tren menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan formal dari SD ke SMA. Temuan ini menandakan adanya degradasi kompetensi yang dapat disebabkan oleh kualitas pembelajaran yang tidak merata, ketidakterpaduan lintas jenjang, atau lemahnya peran penguatan karakter dan literasi numerasi di jenjang menengah atas. Hal ini tentu menjadi alarm bagi pemangku kebijakan dan penyelenggara pendidikan di daerah, mengingat proses pendidikan yang ideal seharusnya meningkat seiring bertambahnya jenjang.

BARITO SELATAN
DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS

Tabel 2.24 Rapor Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, 2024

Indikator	PAUD	SD Umum	SD Agama	SD Setara	SMP Umum	SMP Agama	SMP Setara	SMA Setara	SMA Umum	SMA Agama	SMK Umum	SDLB	SMPLB	SMALB
Kemampuan Literasi Murid	N/A	Sedang	Sedang	N/A	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	N/A
Kemampuan Numerasi Murid	N/A	Sedang	Sedang	N/A	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik	N/A
Karakter Murid	N/A	Baik	Baik	N/A	Baik	Sedang	Sedang	Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	N/A
Kualitas Pembelajaran	N/A	Baik	Sedang	N/A	Baik	Sedang	Baik	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	N/A
Persentase PAUD Terakreditasi minimal B	Sedang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proses Belajar yang Sesuai Bagi Anak Usia Dini	Sedang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi	Sedang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Iklim Keamanan Sekolah	Kurang	Baik	Baik	Tidak Ada	Baik	Baik	Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Sedang	Sedang	N/A
Iklim Kebinekaan Sekolah	N/A	Baik	Sedang	Tidak Ada	Baik	Sedang	Baik	Sedang	Baik	Sedang	Baik	Sedang	Kurang	N/A
Iklim Inklusivitas Sekolah	N/A	Baik	Sedang	Tidak Ada	Baik	Sedang	Baik	Sedang	Baik	Sedang	Baik	Sedang	Baik	N/A

Indikator	PAUD	SD Umum	SD Agama	SD Setara	SMP Umum	SMP Agama	SMP Setara	SMA Setara	SMA Umum	SMA Agama	SMK Umum	SDLB	SMPLB	SMALB
Iklim Inklusivitas & Kebinekaan PAUD	Sedang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyerapan Lulusan SMK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kemitraan dan Keselarasan SMK dengan Dunia Kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sedang	N/A	N/A	N/A

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Dalam pembangunan daerah, perlindungan sosial yang adaptif menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang dinamis. Perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.4.1. Kesejahteraan Sosial

Kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana akses dan kesadaran masyarakat terhadap sistem perlindungan formal yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta. Berdasarkan data pada Tabel 2.25, kepersertaan jaminan ketenagakerjaan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS terus menurun, dari 42,84 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 22,93 persen pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan turunnya perlindungan formal terhadap tenaga kerja rentan, yang dapat meningkatkan risiko sosial-ekonomi jika tidak diimbangi dengan skema perlindungan lain. Kepesertaan PBI Non-BPJS Kesehatan relatif stabil di kisaran 18–21 persen, sementara jamkesda sempat meningkat pada tahun 2022 (3,76 persen), yang mengindikasikan potensi keterbatasan alokasi atau perubahan kebijakan daerah. Kepesertaan dari sektor perusahaan dan kantor pun fluktuatif rendah, dengan capaian terendah 2,2 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan masih terbatasnya cakupan jaminan dari sektor formal.

Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa akses terhadap perlindungan sosial tenaga kerja di Kabupaten Barito Selatan masih belum merata, dan diperlukan penguatan kebijakan untuk memperluas cakupan, terutama bagi pekerja informal dan sektor usaha kecil. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperbesar kerentanan sosial dan menghambat produktivitas tenaga kerja lokal.

Tabel 2.25 Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan, 2020-2023

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan (%)	42,84	30,01	22,84	22,93
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Non BPJS Kesehatan (%)	18,88	20,03	19,06	20,92
4	Jamkesda (%)	1,61	1,86	3,76	-
5	Asuransi Swasta (%)	0,04	0	0	-
6	Perusahaan/ Kantor (%)	5,14	2,89	4,09	2,2

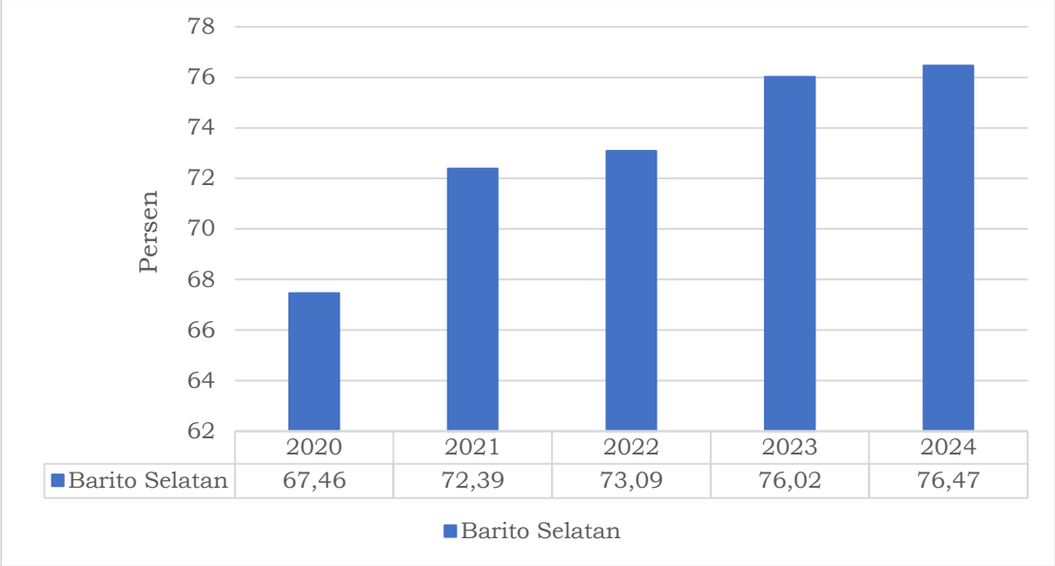
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, 2023

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat mencerminkan orientasi kehidupan beragama yang tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga memberikan kemanfaatan nyata bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang religius, tetapi terbuka, menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan moral. Sementara itu, berkebudayaan maju merujuk pada penguatan identitas lokal melalui pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.

2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kabupaten Barito Selatan secara umum dikenal memiliki iklim sosial yang harmonis dan inklusif, ditandai dengan kehidupan antarumat beragama yang berlangsung dalam suasana saling menghargai dan toleran. Kondisi ini tercermin dari capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Tren ini menggambarkan keberhasilan dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat toleransi. Walaupun demikian, IKUB pada tahu 2024 baru mencapai angka 76,47 yang mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam memperkuat toleransi, memperluas ruang interaksi lintas agama, dan mengantisipasi potensi perpecahan sosial. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kualitas interaksi lintas agama, perluasan ruang dialog, serta penguatan mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial secara berkelanjutan.



Gambar 2.40 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penggerak utama pembangunan. Keluarga berkualitas menjadi fondasi, sementara kesetaraan gender dan strategi pengarusutamaan gender diperlukan untuk mengatasi ketimpangan peran serta akses antara laki-laki dan perempuan. Dengan memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada kesetaraan dan inklusivitas, diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan berdaya.

2.2.6.1. Perlindungan Anak dan Perempuan

Kemajuan dalam pembangunan perlindungan anak di Indonesia diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indikator-indikator ini dirancang berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang mencakup hak-hak sipil dan kebebasan; hak-hak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak-hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak-hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus anak.

Tabel 2.26 Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA, 2022-2023

No	Keterangan	2022			2023		
		IPA	IPHA	IPKA	IPA	IPHA	IPKA
1	Kabupaten Barito Selatan	58,45	53,72	78,43	54,05	51,32	70,73
2	Provinsi Kalimantan Tengah	59,56	54,25	80,51	60,37	55,22	80,61
3	Nasional	63,30	60,33	75,21	63,83	60,75	75,72

Sumber: Kementerian PPPA Indeks Perlindungan Anak, 2023-2024

Berdasarkan capaian tahun 2023, Kabupaten Barito Selatan tercatat sebagai daerah dengan capaian IPA dan IPHA terendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPA mengalami penurunan sebesar 4,4 poin menjadi 58,45 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Barito Selatan masih belum optimal. Lebih lanjut, nilai IPHA di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan sebesar 2,4 poin menjadi 51,32 pada tahun 2023. Nilai IPHA yang rendah menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang masih rendah. Sementara itu, pada tahun 2023 IPKA mengalami penurunan sebesar 7,7 poin menjadi 70,73. Penurunan ini perlu menjadi perhatian yang cukup serius. Penurunan ini menjadi sinyal peringatan penting bahwa sistem perlindungan anak—baik dalam hal pencegahan, penanganan kasus, maupun pemulihan anak yang rentan—perlu diperkuat secara menyeluruh, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

2.2.6.2. Pembangunan Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk menjamin setiap keluarga memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, dan sanitasi. Pembangunan keluarga diukur Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini mengukur kualitas keluarga berdasarkan tingkat ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan serta mencerminkan peran dan fungsi keluarga. iBangga diklasifikasikan dalam 3 (tiga) status, yaitu tangguh, berkembang, atau rentan.

Pada tahun 2024, nilai iBangga Kabupaten Barito Selatan mencapai 62,51 sehingga terklasifikasi dalam kategori berkembang. Angka ini menempatkan Barito Selatan di posisi ke-sebelas dalam peringkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menandakan bahwa sebuah keluarga berada dalam proses pembangunan dan menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu perbaikan. Maka dari itu, diperlukan penguatan dari sisi ekonomi, pendidikan pengasuhan, stabilitas relasi, serta akses terhadap layanan dasar, agar dapat meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan strategi pembangunan keluarga yang lebih holistik dan terintegrasi untuk mendorong transisi dari kategori berkembang menuju keluarga yang tangguh dan mandiri.

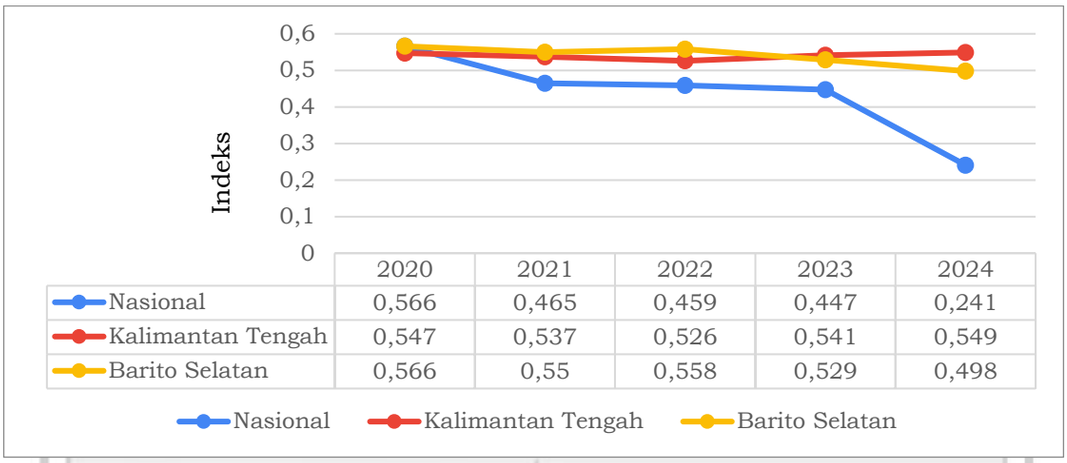
Tabel 2.27 i-Bangga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	iBangga
1	Kabupaten Sukamara	65,85
2	Kabupaten Barito Utara	65,83
3	Kota Palangkaraya	65,03
4	Kabupaten Lamandau	64,56
5	Kabupaten Kotawaringin Barat	64,49
6	Kabupaten Murung Raya	64,16
7	Kabupaten Katingan	64
8	Kabupaten Kotawaringin Timur	63,67
9	Kabupaten Barito Tiur	63,34
10	Kabupaten Seruyan	63,12
11	Kabupaten Barito Selatan	62,51
12	Kabupaten Gunung Mas	59,76
13	Kabupaten Pulang Pisau	59,19
14	Kabupaten Kapuas	56,67
Provinsi Kalimantan Tengah		62,2

Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, 2024

2.2.6.3. Kesetaraan Gender

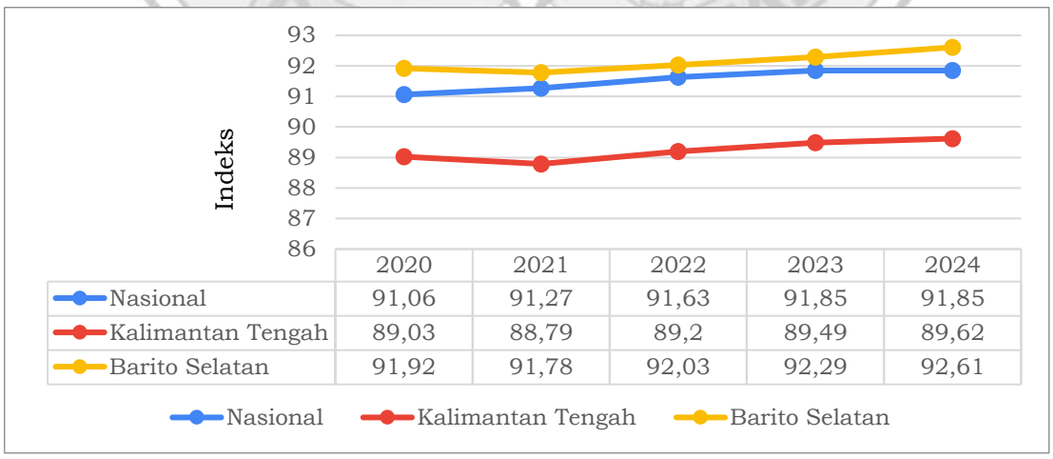
Kesetaraan gender merupakan tujuan strategis dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang bertujuan menghapus diskriminasi dan memastikan partisipasi perempuan secara setara. Indikator yang digunakan untuk memantau kemajuannya adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).



Gambar 2.41 Indeks Ketimpangan Gender, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

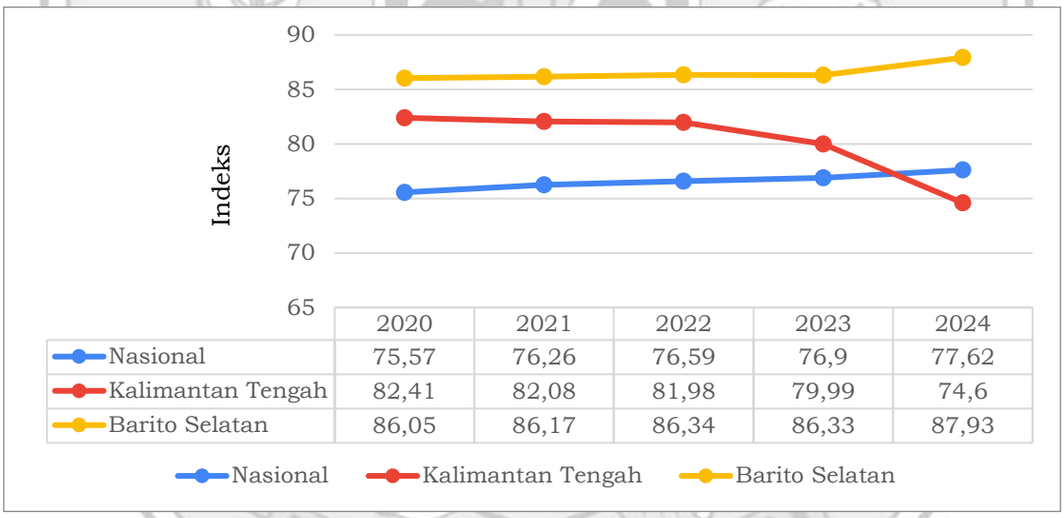
IKG merupakan indikator untuk melihat tingkat kesenjangan gender dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi perempuan, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Jika nilai IKG semakin mendekati 1 maka menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin tinggi antara laki-laki dan perempuan, begitu pula sebaliknya. Nilai IKG menunjukkan tren penurunan moderat dari 0,566 pada tahun 2020 menjadi 0,498 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam hal kesetaraan gender, meskipun secara umum nilainya masih berada di atas rata-rata nasional dan Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan ketimpangan gender sudah mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui strategi pengarusutamaan gender yang menyeluruh.



Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Gender, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sementara itu, IPG digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun dengan fokus pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. IPG merefleksikan sejauh mana perempuan dapat mengakses dan menikmati hasil pembangunan secara setara dengan laki-laki. Nilai IPG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan moderat. Setelah mengalami sedikit penurunan dari 91,92 pada tahun 2020 menjadi 91,78 di tahun 2021, IPG kembali meningkat hingga mencapai 92,61 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan capaian yang konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di angka 89,62 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa secara relatif, Barito Selatan telah menunjukkan progres yang baik dalam upaya mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62
Kalimantan Tengah	82,41	82,08	81,98	79,99	74,6
Barito Selatan	86,05	86,17	86,34	86,33	87,93

Gambar 2.43 Indeks Pemberdayaan Gender, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain itu, IDG digunakan untuk memperlihatkan kondisi sejauh mana peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. IDG menujukkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis maupun kontribusi ekonomi. Kondisi IDG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren perkembangan moderat. Setelah mencapai 86,34 pada tahun 2022, IDG sedikit menurun menjadi 86,33 di tahun 2023, namun kembali meningkat signifikan hingga mencapai 87,93

pada tahun 2024. Angka ini secara konsisten berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat sebesar 74,60 pada tahun 2024, maupun angka nasional sebesar 77,62. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Barito Selatan telah menunjukkan capaian yang kuat dalam memberdayakan perempuan, baik di level provinsi maupun nasional. Untuk mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender, diperlukan upaya konkret melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan posisi pengambilan keputusan.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada potensi, karakteristik, dan keunggulan masing-masing daerah. Daya saing di Kabupaten Barito Selatan mencakup beberapa aspek, yaitu kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, iklim investasi, dan sumber daya manusia.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu dalam suatu wilayah untuk bersaing di pasar tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun global, melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas. Peningkatan daya saing SDM penting untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan ekonomi global sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0–14 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Rasio Indikator ini penting dalam analisis demografi karena mencerminkan beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk yang belum atau tidak lagi bekerja. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tekanan ekonomi terhadap penduduk usia kerja untuk memenuhi kebutuhan kelompok usia non-produktif, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan data pada Tabel 2.28, rasio ketergantungan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan fluktuasi moderat selama periode 2020–2024. Setelah mengalami penurunan dari 41,73 pada tahun 2020 menjadi 40,87 di tahun 2022, rasio ini kembali meningkat menjadi 42,11 pada tahun 2024. Hal ini berimplikasi pada perlunya penguatan kapasitas ekonomi penduduk usia kerja serta perencanaan layanan sosial yang adaptif terhadap perubahan struktur demografi.

Tabel 2.28 Angka Ketergantungan, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
0-14 tahun	31.700	31.174	30.700	31.550	31.630
15-64 tahun	92.500	93.188	93.699	95.000	95.630
> 64 tahun	6.900	7.244	7.598	8.150	8.650
Rasio Ketergantungan	41,73	41,23	40,87	41,79	42,11

Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka Diolah, 2025

2.3.1.2. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan wilayah yang dapat dipertimbangkan dari dua aspek yaitu kualitas dan kuantitas. Aspek kuantitas menunjukkan seberapa banyak penduduk usia produktif yang mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Sementara itu, aspek kualitas mengacu pada tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Wilayah dengan angkatan kerja yang lebih terdidik dan terampil cenderung memiliki profesionalitas lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya mendorong produktivitas, efisiensi pembangunan, dan daya saing wilayah.

Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Barito menunjukkan perubahan positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat pendidikan angkatan kerja paling tinggi didominasi pada lulusan SD, yaitu mencapai 32,87 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 tingkat pendidikan angkatan kerja paling tinggi didominasi pada lulusan SMA, yaitu mencapai angka 33,67 persen. Tren ini mencerminkan peningkatan akses pada pendidikan menengah. Meski demikian, proporsi lulusan perguruan tinggi justru menurun, dari

16,32 persen pada tahun 2020 menjadi 14,21 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi guna mendorong daya saing angkatan kerja secara berkelanjutan.

Tabel 2.29 Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar	21.964	32,87	4.336	6,53	22.944	32,82	21.213	31,28	23.253	32,32
Sekolah Menengah Pertama	15.595	23,34	31.546	47,48	15.865	22,69	12.715	18,75	14.233	19,78
Sekolah Menengah Atas	18.349	27,46	19.543	29,41	22.445	32,1	25.987	38,32	24.225	33,67
Perguruan Tinggi	10.904	16,32	11.014	16,58	8.663	12,39	7.908	11,66	10.225	14,21
Jumlah	**66.812**	**100**	**66.439**	**100**	**69.917**	**100**	**67.823**	**100**	**71.956**	**100**

Sumber: Kabupaten Barito dalam Angka diolah, 2025

Lebih lanjut, sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan hanya sampai SD dengan nilai 41,44 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka dengan pendidikan rendah cenderung tidak bekerja yang mengindikasikan terdapat keterbatasan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah lulusan SMP yang tidak bekerja cenderung berkurang dari 2021 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak lulusan SMP mulai mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan mereka. Lulusan SMA dan Perguruan Tinggi memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam kelompok bukan angkatan kerja. Pada tahun 2024, lulusan SMA dengan nilai 26,78 persen dan lulusan Perguruan Tinggi dengan nilai 2,80 persen yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, idealnya semakin besar peluang mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja sehingga meningkatkan daya saing secara keseluruhan.

Tabel 2.30 Bukan Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar	14.514	39,78	4.180	10,94	13.664	37,91	14.520	40,86	13.471	41,44
Sekolah Menengah Pertama	11.587	31,76	22.522	58,93	12.546	34,81	11.917	33,53	9.583	29,48
Sekolah Menengah Atas	8.229	22,55	9.744	25,5	8.110	22,5	8.000	22,51	8.545	26,28

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perguruan Tinggi	2.155	5,91	1.773	4,64	1.719	4,77	1.102	3,1	911	2,8
Jumlah	36.485	100	38.219	100	36.039	100	35.539	100	32.510	100

Sumber: Kabupaten Barito dalam Angka Diolah, 2025

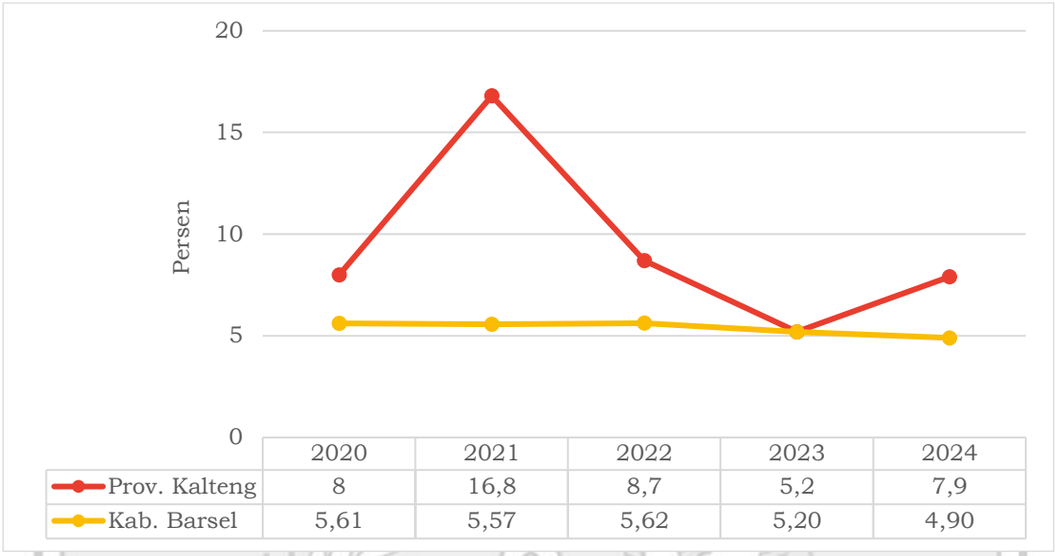
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek, Inovasi dan Produktivitas ekonomi diukur melalui rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum, Rasio PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan kondisi ketenagakerjaan. Berikut merupakan masing-masing penjelasan dari setiap indikator.

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah indikator yang menunjukkan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini menggambarkan peran dan signifikansi sektor manufaktur dalam perekonomian daerah. Pada periode tahun 2020 hingga 2024 rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Barito Selatan cenderung menurun, meski tahun 2022 terdapat kenaikan. Pada tahun 2024 nilai Rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Barito Selatan sebesar 4,90 persen. Selain itu, pada periode yang sama nilai rasio Kabupaten Barito Selatan berada di bawah nilai rasio Provinsi Kalimantan Tengah.

Rendahnya kontribusi industri pengolahan mencerminkan beberapa tantangan serius, seperi masih dominannya ekonomi berbasis sumber daya primer (tambang dan penggalian) tanpa nilai tambah, serta minimnya infrastruktur dan SDM industri. Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi komoditas lokal belum terolah secara maksimal melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Perlu kebijakan yang strategis, mengingat ketergantungan ekonomi yang masih tergantung pada sektor primer rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan krisis. Oleh sebab itu, perlu perhatian serius terhadap pengembangan industri pengolahan sebagai diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.



	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	8	16,8	8,7	5,2	7,9
Kab. Barsel	5,61	5,57	5,62	5,20	4,90

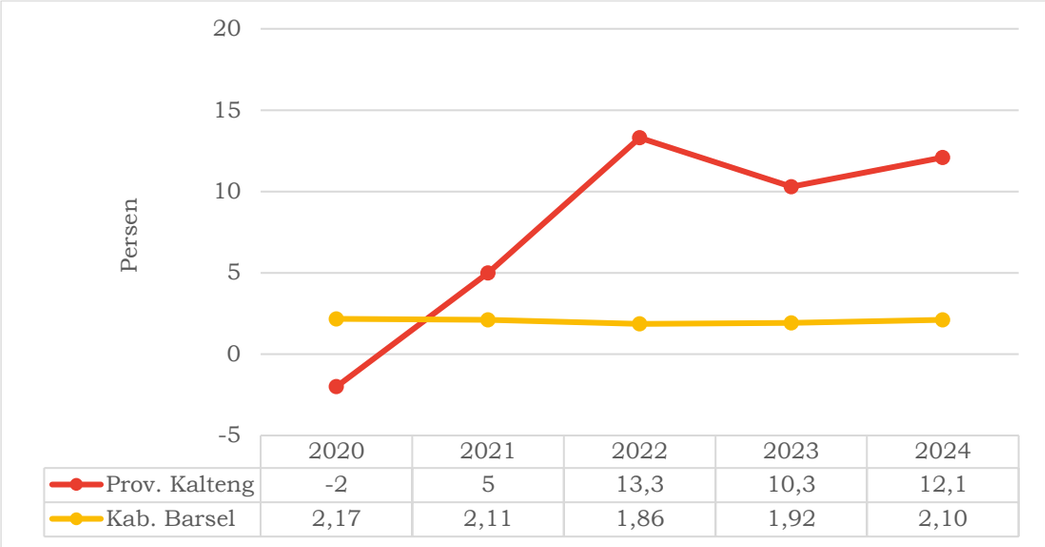
Gambar 2.44 PDRB Industri Pengolahan, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah indikator yang menunjukkan persentase kontribusi sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk menilai peran sektor pariwisata dan jasa kuliner dalam perekonomian daerah. Rasio PDRB akomodasi makan dan minum Barito Selatan cenderung stagnan di angka 1,8 hingga 2,2 persen. Sama seperti Rasio PDRB industri pengolahan, nilai rasio PDRB akomodasi makan dan minum juga berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020 hingga 2024.

Kondisi tren yang stagnan ini mengindikasikan belum berkembangnya peran sektor pariwisata dan jasa kuliner dalam perekonomian. Meskipun terdapat peningkatan kunjungan wisatawan domestik, kondisi ini belum mampu dikonversi secara optimal menjadi nilai tambah melalui sektor akomodasi dan kuliner. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor: rendahnya tingkat belanja wisatawan, minimnya pilihan akomodasi dan kuliner yang berkualitas, dominasi wisata harian tanpa menginap, serta lemahnya integrasi antara destinasi wisata dengan sektor pendukung seperti UMKM lokal, transportasi dan ekonomi kreatif.



	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	-2	5	13,3	10,3	12,1
Kab. Barsel	2,17	2,11	1,86	1,92	2,10

Gambar 2.45 PDRB Akomodasi Makan dan Minum, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2.3. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

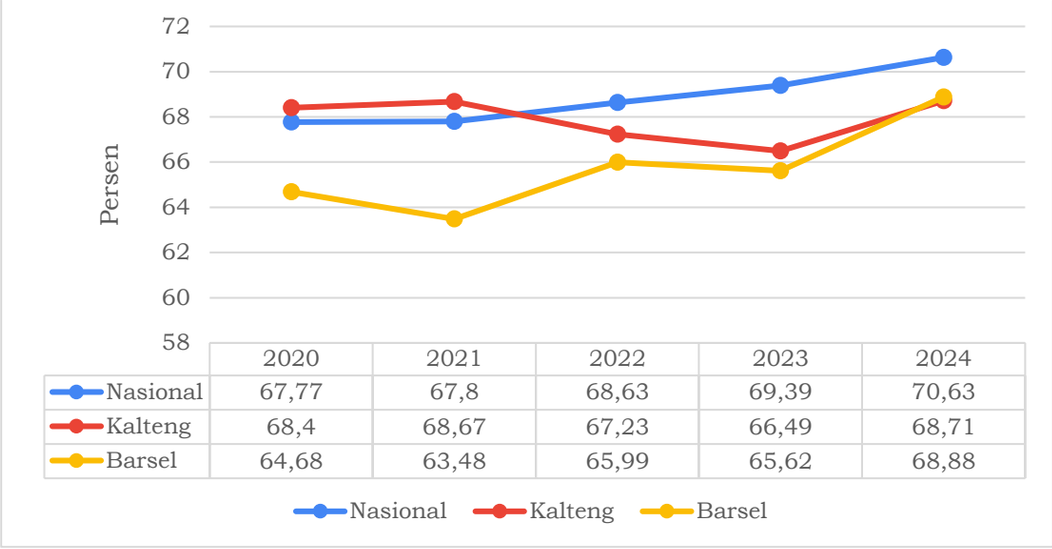
Rasio PDRB ekonomi kreatif adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB suatu daerah. Data mengenai indikator ini belum sepenuhnya tersedia di Kabupaten Barito Selatan. Indikator ini mencerminkan peran dan potensi sektor kreatif, seperti desain, kuliner, *fashion*, seni pertunjukan, dan industri digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kontribusi ekonomi kreatif terhadap pembangunan ekonomi yang inovatif, berbasis kreativitas, dan bernilai tambah.

2.3.2.4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah indikator yang menunjukkan proporsi jumlah wirausaha terhadap total angkatan kerja atau jumlah penduduk di suatu wilayah. Data mengenai indikator ini belum sepenuhnya tersedia di Kabupaten Barito Selatan. Indikator ini penting untuk menilai dinamika dan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru, inovasi usaha, dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin kuat pula potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk dalam angkatan kerja yang terlibat aktif dalam sektor tenaga kerja, baik penduduk yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan terhadap penduduk yang merupakan angkatan kerja. TPAK Kabupaten Barito Selatan mengalami tren yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 TPAK sebesar 63,48 persen atau menurun sebesar 1,2 poin dari tahun 2020 yang sebesar 64,68 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 TPAK Kabupaten Barito Selatan naik hingga 68,88 persen. Secara komparatif, TPAK Kabupaten Barito Selatan selalu berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. *Gap* yang terus melebar menjadi krusial bahwa perlu ada intervensi strategis, baik melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, maupun perluasan akses angkatan kerja perempuan dan kelompok rentan, agar partisipasi angkatan kerja di daerah ini dapat lebih kompetitif dan inklusif. Adapun grafik komparatif TPAK Kabupaten Barito Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.39 sebagai berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	67,77	67,8	68,63	69,39	70,63
Kalteng	68,4	68,67	67,23	66,49	68,71
Barsel	64,68	63,48	65,99	65,62	68,88

Gambar 2.46 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2.6. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang mencerminkan struktur, dinamika, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data ketenagakerjaan menurut status pekerjaan utama, Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk yang berusaha sendiri, yaitu sejumlah 21.798 jiwa. Kemudian, diikuti oleh Buruh/Karyawan/Pegawai dengan jumlah sebesar 22.181 jiwa. Komposisi ini menunjukkan tingginya proporsi pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang menggambarkan karakteristik ekonomi berbasis usaha perorangan. Sementara itu, jumlah penduduk yang berusaha dengan bantuan buruh tetap atau buruh dibayar tercatat paling rendah (445 jiwa), yang mengindikasikan masih terbatasnya skala usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja tetap. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sektor UMKM serta penciptaan iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan unit usaha produktif. Adapun kondisi ketenagakerjaan berdasarkan Status Pekerjaan Utama dijabarkan dalam Tabel 2.31 sebagai berikut.

Tabel 2.31 Kondisi Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2024

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
1	Berusaha sendiri	12.278	9.070	21.798
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	4.687	1.826	6.513
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	359	86	445
4	Buruh/karyawan/pegawai	16.113	9.891	26.004
5	Pekerja bebas	5.884	865	6.749
6	Pekerja keluarga/ tak dibayar	3.040	4.453	7.493
Jumlah		**42.811**	**26.191**	**69.002**

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

2.3.2.7. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga bentuk inovasi, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan

daerah, inovasi pelayanan publik, serta inovasi lainnya sesuai kewenangan daerah. Berdasarkan jenisnya, inovasi dapat berbentuk digital maupun non-digital yang masing-masing dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan kinerja inovasi. Pada tahun 2020 hingga 2022, status inovasi daerah berada pada kategori kurang inovatif. Perubahan positif terjadi pada tahun 2023 yang meningkat menjadi kategori *inovatif* dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2024. Sebaliknya, capaian Provinsi Kalimantan Tengah cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, status inovasi berada pada kategori kurang inovatif, meningkat menjadi inovatif pada tahun 2022, tetapi kembali menurun ke kategori kurang inovatif pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.32 Indeks Inovasi Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024
Barito Selatan	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif
Kalimantan Tengah	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif

Sumber: Menteri dalam Negeri, 2020–2025

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan Ekonomi Hijau adalah upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan suatu wilayah berjalan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indeks ini mencerminkan tingkat efisiensi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam praktiknya, indeks ekonomi hijau dapat mencakup berbagai indikator seperti intensitas emisi gas rumah kaca, rasio energi terbarukan, efisiensi energi, kualitas lingkungan

hidup, hingga jumlah lapangan kerja hijau. Pengembangan dan pemanfaatan indeks ini menjadi penting sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, berketahanan, dan berdaya saing. Untuk Kabupaten Barito Selatan, Indeks Ekonomi Hijau menggunakan 5 Proksi yakni produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri pengolahan, produktivitas sektor tersier, proporsi tenaga kerja di sektor tersier dan proporsi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian.

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merujuk pada perubahan sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Proses ini mencakup digitalisasi data, integrasi sistem informasi, serta pengembangan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia berbasis teknologi. Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat layanan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

2.3.4.1. Indeks Pembangunan TIK

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan TIK suatu daerah melalui tiga dimensi utama, yaitu akses, penggunaan, dan keahlian. IP-TIK digunakan untuk memantau kemajuan transformasi digital dan memetakan kesenjangan TIK antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IP-TIK Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan pada dua tahun terakhir, dengan nilai sebesar 5,78 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 5,92 pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi pada ketiga indikator pembentuk IP-TIK, terutama pada aspek akses dan infrastruktur serta penggunaan. Meskipun data spesifik untuk Kabupaten Barito Selatan belum tersedia, kondisi kesenjangan akses dan kualitas layanan internet di sebagian desa tetap menunjukkan perlunya percepatan transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, peningkatan keterjangkauan layanan, serta penguatan literasi digital masyarakat.

2.3.4.2. Proporsi Desa/Kelurahan yang Memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler/*Handphone* dengan Kondisi "Sinyal Sangat Kuat"

Indikator proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet telepon seluler/*handphone* dengan kondisi "sangat kuat" merupakan ukuran penting dalam menilai pemerataan akses komunikasi digital di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, hanya sekitar 22,55 persen desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki sinyal internet dengan kekuatan sangat kuat. Perhitungan untuk mendapatkan nilai proporsi ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi berapa banyak desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori "sinyal sangat kuat".

Tabel 2.33 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2020 – 2021

Jenis Penerimanaan Sinyal Internet	2020		2021	
	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
4G/LTE	23	542	30	635
3G/H/H+/EVDO	23	362	24	341
2,5G/E/GPRS	34	345	30	293
Tidak ada	13	157	9	138

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa/BPS-Statistics Indonesia, *Village Potential Data Collection*

Berdasarkan data dari BPS mengenai jenis penerimaan sinyal internet di Barito Selatan dan Kalimantan Tengah tahun 2020 – 2021, terlihat adanya peningkatan akses terhadap sinyal 4G/LTE. Di Barito Selatan, jumlah desa yang menerima sinyal 4G meningkat dari 23 desa pada 2020 menjadi 30 desa pada 2021. Peningkatan serupa terjadi di Kalimantan Tengah, dari 542 desa menjadi 635 desa. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dan penyedia layanan untuk memperluas jaringan internet berkualitas tinggi di wilayah pedesaan. Namun, meskipun terjadi peningkatan akses 4G, jumlah desa yang hanya menerima sinyal 2,5G/GPRS masih cukup tinggi, khususnya di Barito Selatan dengan 30 desa pada 2021. Bahkan masih terdapat 9 desa yang sama sekali tidak memiliki akses internet.

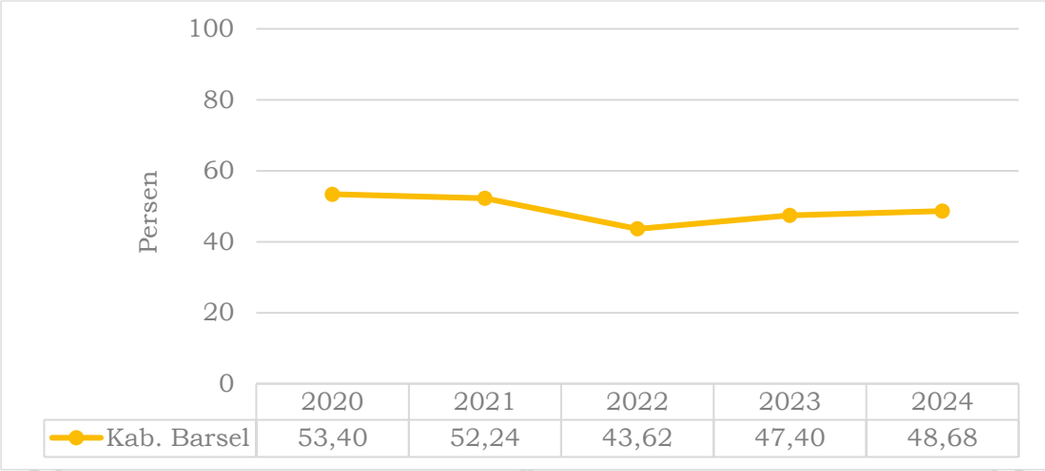
Kondisi ini mencerminkan kesenjangan digital yang masih nyata di lapangan, khususnya di daerah terpencil dan pedalaman yang sulit dijangkau infrastruktur telekomunikasi. Banyak desa di Barito Selatan berada di wilayah perbukitan dan kawasan hutan, yang menjadi tantangan dalam pembangunan menara telekomunikasi. Selain itu, faktor keterbatasan listrik, biaya operasional yang tinggi, serta rendahnya daya beli masyarakat terhadap perangkat digital dan layanan data turut memperlambat penetrasi sinyal berkualitas. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang terarah sangat diperlukan, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur TIK, insentif bagi operator, maupun penguatan literasi digital masyarakat.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global merujuk pada keterhubungan antara perekonomian suatu daerah dengan pasar internasional, baik melalui perdagangan, investasi, maupun arus barang, jasa, dan modal. Proses ini memungkinkan daerah untuk memanfaatkan peluang global, meningkatkan daya saing, dan menarik investasi asing serta mendorong ekonomi domestik yang lebih terbuka dan inovatif.

2.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencerminkan tingkat investasi dalam aset tetap seperti bangunan dan peralatan. Jika PMTB naik, hal ini menandakan meningkatnya kepercayaan pelaku ekonomi, ekspansi kapasitas produksi, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebaliknya, jika PMTB turun, itu bisa mencerminkan penurunan investasi akibat ketidakpastian ekonomi, efisiensi belanja, atau perlambatan aktivitas ekonomi secara umum.



Gambar 2.47 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 2020—2024

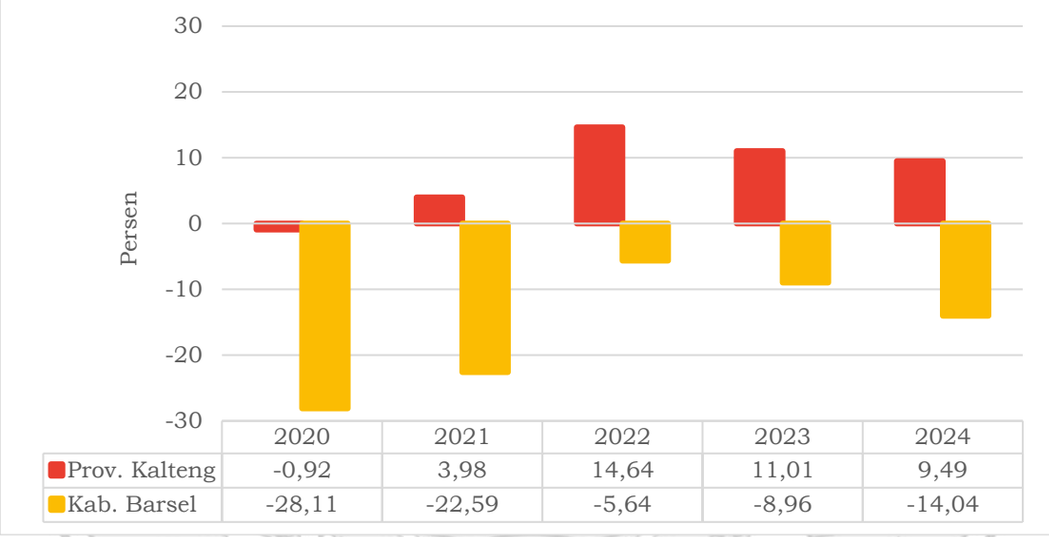
Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2024

Kondisi di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan adanya peningkatan positif dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, PMTB Barito Selatan berada di angka 43,62 persen naik di tahun 2024 menjadi 48,68 persen. Investasi yang meningkat kemungkinan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan produksi, dan penguatan sektor produktif. Peningkatan ini juga dapat diartikan adanya dorongan pembangunan fisik, baik pemerintah daerah maupun swasta. Namun, peningkatan PMTB ini perlu menjadi perhatian terhadap sisi kualitas belanja modal dan distribusi. Terlebih lagi data historikal dari tahun 2020 hingga 2024 tren kecenderungannya adalah menurun. Tren positif 3 tahun terakhir menjadi peluang strategis, namun tetap membutuhkan pengelolaan investasi yang tepat agar berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Net ekspor barang dan jasa merupakan salah satu komponen penting yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Berdasarkan Gambar 2.48 Kabupaten Barito Selatan mengalami defisit perdagangan dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Barito Selatan masih memiliki ketergantungan pada barang atau jasa dari luar wilayah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor produksi lokal belum mampu secara optimal memenuhi permintaan internal maupun bersaing di pasar eksternal. Sebagai perbandingan, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami surplus pada 4 tahun terakhir, yang mempertegas ketertinggalan Kabupaten Barito Selatan dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual tinggi dan dapat bersaing di laur daerah. Kondisi defisit ini juga didukung oleh rasio PDRB Industri Pengolahan yang semakin menurun sehingga terindikasi belum berkembangnya kapasitas hilirisasi pada sektor unggulan. Perlu adanya langkah strategis dalam pengembangan ekonomi untuk melepaskan ketergantungan Kabupaten Barito Selatan terhadap wilayah lain.



	2020	2021	2022	2023	2024
Prov. Kalteng	-0,92	3,98	14,64	11,01	9,49
Kab. Barsel	-28,11	-22,59	-5,64	-8,96	-14,04

Gambar 2.48 Net Ekspor Barang dan Jasa, 2020—2024

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.3.5.3. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal

Jumlah produk tersertifikasi halal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur banyaknya produk yang telah memperoleh sertifikasi halal dari lembaga berwenang. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kehalalan produk, sekaligus menunjukkan komitmen dalam memberikan jaminan mutu dan kepercayaan bagi konsumen. Capaian data historis mengenai jumlah produk tersertifikasi halal di Kabupaten Barito Selatan belum terpublikasi. Sebagai gambaran terdapat kuota yang disediakan oleh

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk sertifikasi produk halal. Secara Nasional pada tahun 2025, terdapat 1 juta kota dengan Kalimantan Tengah mendapat kuota 6.519. Hal ini dapat peluang Kabupaten Barito Selatan sebagai upaya penguatan produk halal daerah. Peningkatan jumlah produk tersertifikasi mampu memperluas peluang pasar meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong pertumbuhan sektor industri berbasis syariah, selain itu sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.5.4. Aset Perbankan Syariah

Aset Perbankan Syariah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur total nilai aset yang dimiliki lembaga perbankan syariah yang beroperasi di suatu wilayah. Indiaktor ini mencerminkan kapasitas dan skala keuangan berbasis prinsip syariah, yang berperan dalam menyediakan aset keuangan dan perbankan yang sesuai dengan hukum islam. Indikator ini belum memiliki capaian data historis di Kabupaten Barito Selatan, sehingga akan mulai dihitung pada periode RPJMD Tahun 2025-2029. Peningkatan nilai aset perbankan syariah dapat menunjukkan pertumbuhan pangsa pasar, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta peningkatan kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM.

2.3.5.5. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan instrumen pengukuran kinerja pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian pembangunan zakat, khususnya dalam mengukur kontribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi. Secara umum, pengukuran IZN dilakukan melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro menggambarkan peran dan kontribusi pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam pembangunan lembaga pengelola zakat di suatu daerah. Sementara itu, dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Baznas dalam Laporan Hasil Pengukuran IZN dan KDZ Tahun 2025, IZN Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 menunjukkan nilai dimensi makro sebesar 0,49 dan dimensi mikro sebesar 0,39 dengan nilai total IZN sebesar 0,42. Berdasarkan standar interpretasi, nilai tersebut berada pada kategori stabil, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Barito Selatan telah berjalan dengan baik, tetapi masih memerlukan peningkatan efektivitas, terutama pada aspek kelembagaan dan optimalisasi bagi penerima manfaat.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan karakteristik berbeda. Kota unggul dalam kepadatan penduduk, infrastruktur, akses pasar, teknologi, dan investasi, menjadikannya pusat kegiatan ekonomi dan inovasi. Sementara itu, perdesaan berpotensi besar dalam sektor peranian, perikanan, dan sumber daya alam, yang mendukung industri perkotaan.

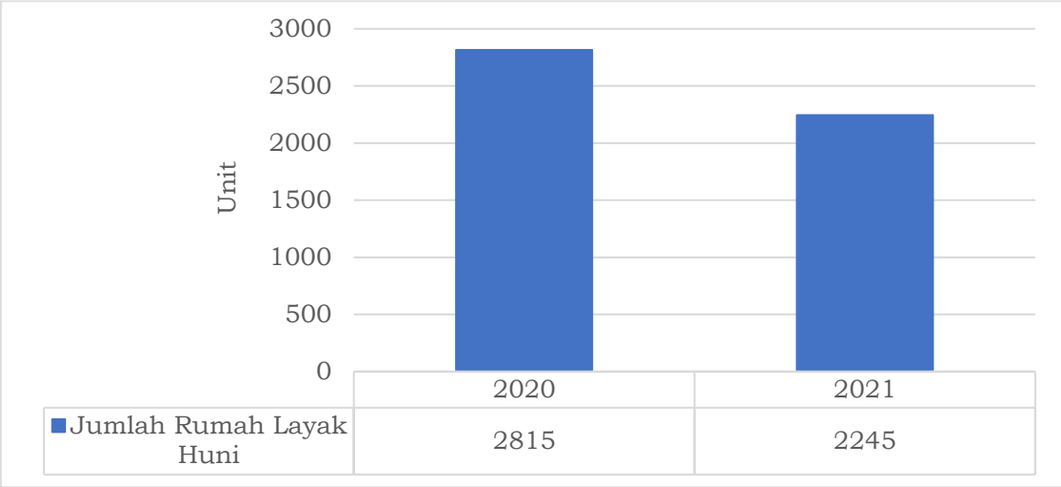
2.3.6.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Sampai saat ini, data resmi mengenai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) untuk Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara publik. IKLI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, serta manfaat infrastruktur yang ada. Tujuan dari pengukuran IKLI diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, menjadi dasar dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

2.3.6.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan

Indikator rumah layak huni adalah serangkaian standar atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah rumah memenuhi syarat untuk memberikan kondisi hidup yang sehat, aman, dan nyaman bagi penghuninya. Di Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah, upaya peningkatan jumlah rumah layak huni (RLH) terus dilakukan melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data dari Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2024, jumlah rumah layak huni mengalami penurunan signifikan dari 2.815 unit pada tahun 2020 menjadi 2.245 unit pada tahun 2021. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas perumahan di daerah tersebut, baik dari segi fisik bangunan, akses sanitasi, maupun ketersediaan prasarana dasar lainnya seperti listrik dan air bersih. Di lapangan, banyak rumah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang masih dibangun secara swadaya tanpa standar teknis yang memadai, sehingga rentan terhadap kerusakan dan tidak memenuhi kriteria rumah layak huni. Selain itu, kondisi geografis Barito Selatan yang terdiri dari wilayah perbukitan dan aliran sungai turut menyulitkan distribusi material bangunan dan pelaksanaan program rehabilitasi atau pembangunan rumah layak.

Faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor informal atau pertanian subsisten juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah yang lebih kuat dalam bentuk bantuan stimulan perumahan, peningkatan infrastruktur dasar, serta sinergi lintas sektor untuk mendorong peningkatan jumlah rumah layak huni secara berkelanjutan di Barito Selatan.



Gambar 2.49 Jumlah Rumah Layak Huni, 2020—2021

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024

2.3.6.3. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri adalah indikator yang menunjukkan proporsi desa dengan status "mandiri" dibandingkan dengan total jumlah desa dalam suatu wilayah tertentu. Status desa ini merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan dan keberlanjutan yang tinggi dalam tiga aspek utama, yaitu ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan.

Berdasarkan status desa, pada tahun 2024 jumlah desa dengan status mandiri 8 desa dengan mayoritas berada di Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai, kemudian status maju sebanyak 30 desa, dan status berkembang sebanyak 48 desa. Peningkatan nilai IDM ini mengindikasikan bahwa secara umum desa-desa di Barito Selatan mengalami kemajuan dalam hal pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan lingkungan. Namun demikian, dengan nilai yang masih berada di kisaran 0,7, sebagian besar desa masih berada pada kategori berkembang, dan belum seluruhnya mencapai status mandiri. Perlu adanya peningkatan dalam pembangunan desa untuk menuju status mandisi, khusunya dalam peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan aksesbilitas terhadap pelayanan dasar. Upaya ini dilakukan agar pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan merata agar ketimpangan antarwilayah dapat ditekan.

Tabel 2.34 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Desa Tertinggal	1	-
2.	Desa Berkembang	56	48
3.	Desa Maju	26	30
4.	Desa Mandiri	3	8

Sumber: Dinas DSPMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro mengacu pada kestabilan indikator ekonomi utama seperti inflasi dan rasio pajak daerah yang mencerminkan ketahanan ekonomi suatu daerah. Kondisi ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung kebijakan pembangunan yang efektif.

2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan melalui penerimaan pajak lokal yang tidak tergantung pada transfer dari pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak untuk mendanai pembangunan tanpa bergantung pada sumber dana eksternal. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB juga menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan pajak serta kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung program pembangunan.

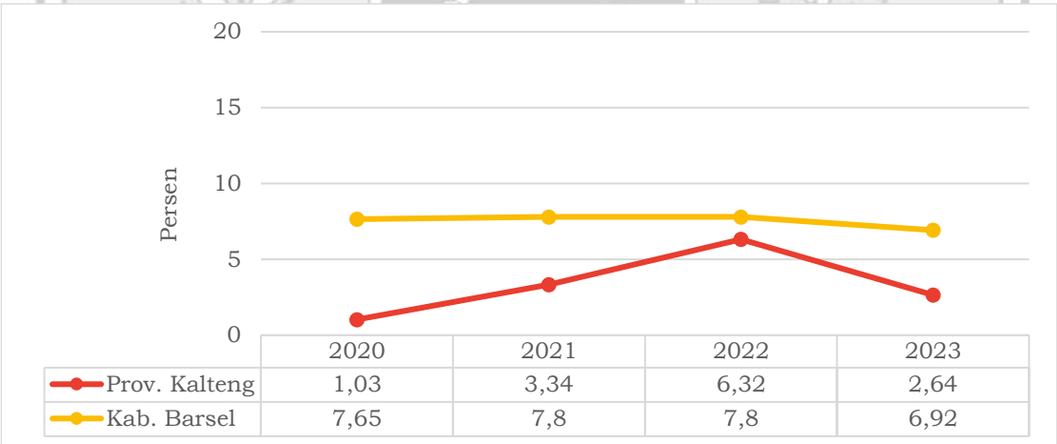
Tabel 2.35 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (miliar rupiah)	6.277,9	6.681,1	8.131,6	8.481,2	8.898,7
Realisasi pajak (miliar rupiah)	12,97	11,03	13,23	17,09	14,17
Rasio pajak (%)	0,21%	0,17%	0,16%	0,20%	0,16%

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2021-2025

2.3.7.2. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap harga barang dan jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga menyebabkan penurunan nilai mata uang. Inflasi berkaitan erat dengan penawaran dan permintaan serta harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk. Berdasarkan data inflasi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2020-2022, memiliki tren yang stagnan. Kondisi *Covid-19* tahun 2020-2021 berada di angka 7,65 dan 7,8 dan stagnan hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan harga kebutuhan pokok dan barang/jasa lainnya cenderung meningkat pada laju yang hampir sama tahun ke tahun, memberikan beban yang berkelanjutan bagi daya beli masyarakat. Inflasi di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, begitupun dengan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah. Penurunan ini mengindikasikan penawaran maupun permintaan mulai membaik dan kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan harga mulai memberikan hasil positif. Namun, periode ke depan tetap memerlukan pemantauan untuk memastikan harga barang dan jasa tetap stabil bagi masyarakat.



	2020	2021	2022	2023
Prov. Kalteng	1,03	3,34	6,32	2,64
Kab. Barsel	7,65	7,8	7,8	6,92

Gambar 2.50 Inflasi, 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

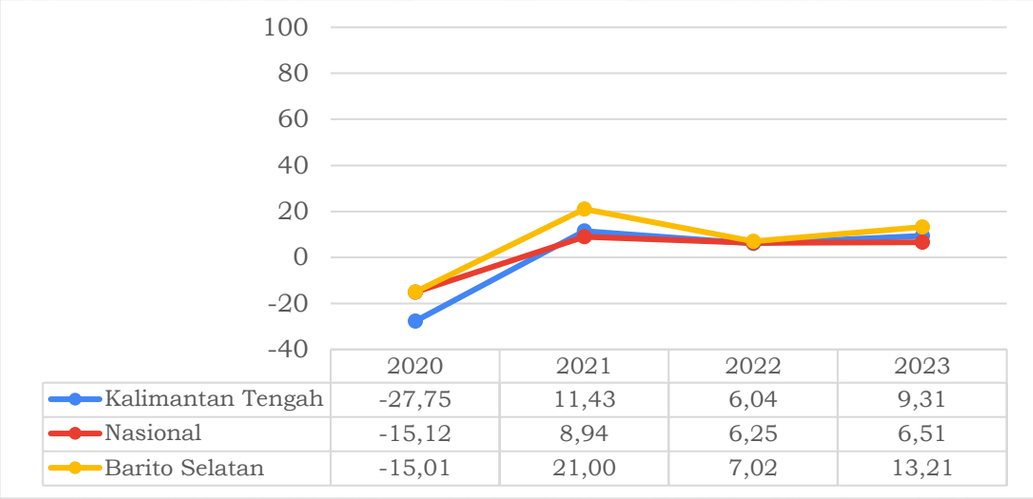
2.3.8. Daya Saing Iklim Berinvestasi

Daya saing iklim berinvestasi mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi masuk dan berkembangnya kegiatan usaha. Faktor-faktor seperti kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, stabilitas sosial, serta dukungan

kelembagaan menjadi elemen penting yang membentuk persepsi dan minat investor. ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

2.3.8.1. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR merupakan rasio antara peningketan investasi modal dengan peningkatan output. Nilai ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa iklim investasi di wilayah tersebut baik, karena mampu menghasilkan output yang besar dibandingkan dengan nilai investasi yang dilakukan.



	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	-27,75	11,43	6,04	9,31
Nasional	-15,12	8,94	6,25	6,51
Barito Selatan	-15,01	21,00	7,02	13,21

Gambar 2.51 Incremental Capital Output Rasio, 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2021, nilai ICOR di Kabupaten Barito Selatan mencapai 21,00 yang merupakan nilai tertinggi dalam periode 2020 hingga 2023, sedangkan nilai tahun 2023 adalah 13, 21. Nilai ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki iklim investasi, seperti mempersiapkan regulasi yang tepat, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan memperbaiki infrastruktur. Dengan ini, diharapkan modal yang masuk ke Kabupaten Barito Selatan dapat digunakan untuk menghasilkan output secara optimal.

2.3.8.2. Realisasi Investasi

Kondisi daya saing iklim investasi di Kabupaten Barito Selatan dapat dievaluasi dari realisasi investasi baik dari nilai investasi maupun jumlah investor yang berinvestasi di daerah tersebut. Pada tahun 2022, jumlah investor meningkat menjadi 44 dari sebelumnya 38 di tahun 2021. Namun, nilai investasi yang masuk justru menurun menjadi Rp468 miliar dibandingkan dengan Rp1,3 triliun. Tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah investor menjadi 49 dengan nilai investasi Rp 666 Miliar. Meskipun terdapat potensi positif dari meningkatnya jumlah investor, skala proyek atau nilai kapital yang ditanamkan relatif kecil. Kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan investor yang masuk berasal dari pelaku usaha skala kecil-menengah. Terdapat tantangan seperti terbatasnya infrastruktur penarik, insentif fiskal yang kurang menarik, atau belum tersedianya ekosistem pendukung investasi yang memadai sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan skala investasi.

Tabel 2.36 Jumlah Investor dan Nilai Investasi, 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor	14	38	44	49
2	Nilai Investasi (Dalam Juta)	Rp103.729	Rp1.373.916	Rp468.975	Rp666.735

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai penyedia layanan umum hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap aspirasi.

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

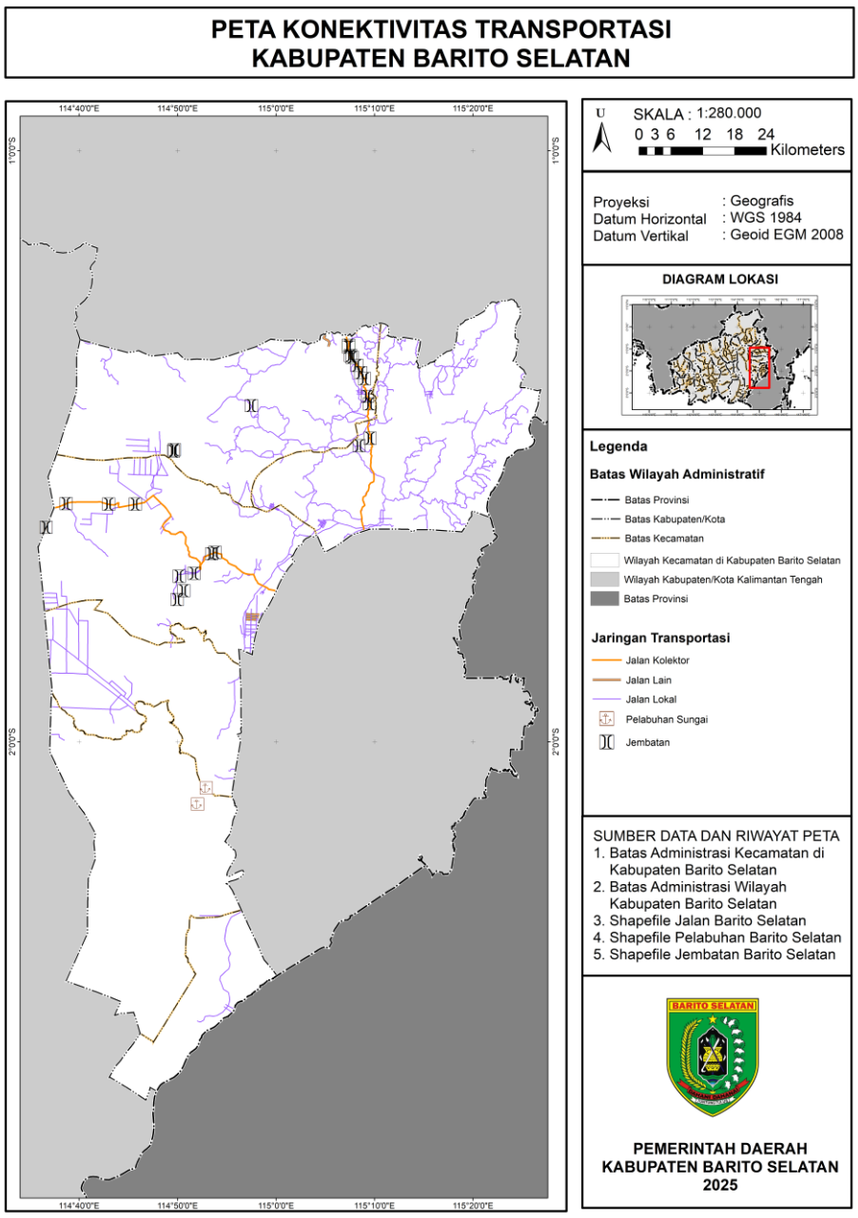
Penyelenggarraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik *(Good Governance)* memerlukan sebuah sistem yang adaptif dan kelembagaan yang berintegritas. Upaya mewujudkan tata kelola yang efektif dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

2.4.1.1. Rasio Konektivitas

Indikator rasio konektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui infrastruktur transportasi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap keterhubungan wilayah melalui berbagai moda transportasi yang ada di suatu wilayah. Pada tahun 2022, rasio konektivitas di Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 83,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari delapan puluh persen desa atau wilayah di Kabupaten Barito Selatan telah terhubung dengan jaringan transportasi, baik melalui jalan, sungai, maupun moda transportasi lainnya sehingga menandakan bahwa tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang cukup baik bagi masyarakat di daerah tersebut.

Jika dilihat dari pola keterhubungan antarwilayah pada Gambar 2.52, menunjukkan bahwa konektivitas jalan masih timpang dengan konsentrasi infrastruktur transportasi yang lebih padat di bagian utara dan barat wilayah. Hal ini terlihat dari dominasi jalan kolektor dan jalan lain yang membentang di sekitar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Sementara itu, bagian selatan dan timur masih tampak kurang terjangkau oleh jaringan jalan utama dengan hanya sedikit jalur lokal yang menghubungkan antarwilayah.

Lebih lanjut, Jumlah jembatan yang tersebar di beberapa titik mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melintasi hambatan geografis, seperti sungai kecil atau kontur wilayah yang tidak merata, meskipun unsur badan air tidak ditampilkan dalam peta. Kurangnya sebaran infrastruktur di beberapa kecamatan juga menunjukkan masih terbatasnya aksesibilitas antarwilayah yang dapat berdampak pada distribusi layanan dasar, aktivitas ekonomi, dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas melalui pembangunan dan peningkatan jalan kolektor, jembatan, serta penguatan akses jalan lokal menjadi hal yang strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.



Gambar 2.52 Peta Konektivitas Transportasi Barito Selatan

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025

Keberadaan beberapa jembatan serta konteks geografis Barito Selatan yang dilalui oleh Sungai Barito dan anak-anak sungainya menunjukkan bahwa potensi transportasi sungai masih sangat relevan. Kebutuhan akan pelabuhan menjadi penting, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh jalan darat atau belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai. Pelabuhan dapat berperan sebagai simpul logistik yang mendukung distribusi barang, hasil pertanian, serta kebutuhan pokok ke daerah pedalaman dan

terpencil. Selain itu, keberadaan pelabuhan sungai dapat menjadi alternatif transportasi yang efisien untuk mendukung konektivitas antarwilayah dalam skala lokal maupun regional. Dengan demikian, pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan turut memperkuat integrasi antar moda transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas di seluruh wilayah.

Kabupaten Barito Selatan memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung kegiatan perikanan, baik sebagai pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan perikanan skala lokal. Salah satu fasilitas utama adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Mangkatip yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul hasil perikanan tangkap dan budidaya air tawar. Selain itu, tersedia beberapa fasilitas pendukung seperti Balai Benih Ikan (BBI) di Palurejo, Stasiun Benih Ikan Lokal di Mangkatip, serta Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) dan pasar benih ikan di Kecamatan Dusun Selatan. Meskipun fasilitas-fasilitas ini telah mendukung aktivitas perikanan masyarakat, kapasitasnya masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal. Di sisi lain, kawasan Minapolitan di Buntok Seberang juga telah ditetapkan sebagai sentra kegiatan perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat distribusi dan pengumpulan hasil perikanan. Namun, penguatan konektivitas dan infrastruktur, seperti akses jalan dan fasilitas bongkar muat, masih sangat dibutuhkan agar pelabuhan pengumpul dan pelabuhan perikanan di Kabupaten Barito Selatan dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung ekonomi lokal dan distribusi hasil perikanan.

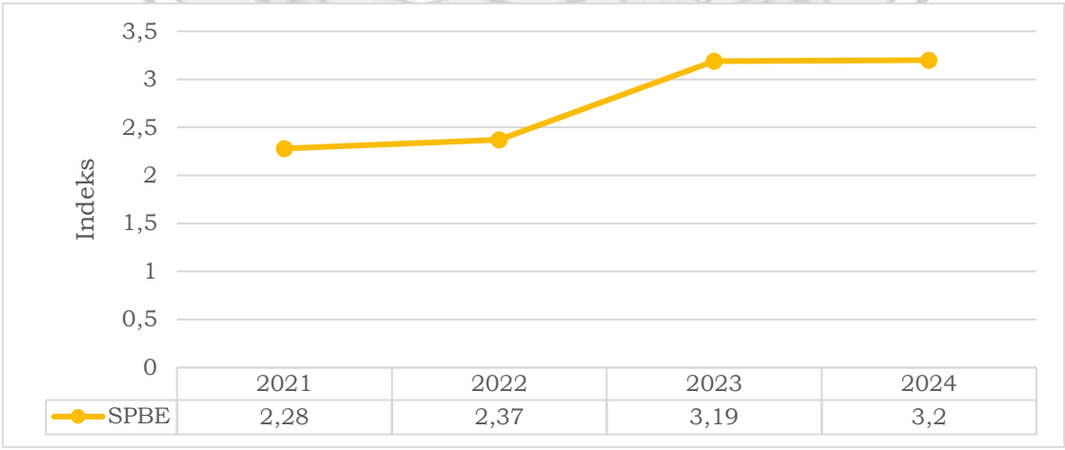
2.4.1.2. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas reformasi hukum pemerintah daerah. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, IRH Kabupaten Barito Selatan dalam proses pendampingan dan verifikasi data dukung yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah

bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap beberapa variabel seperti koordinasi regulasi, kompetensi ASN perancang peraturan, kualitas re-regulasi, dan penataan *database* peraturan perundang-undangan.

2.4.1.3. Indeks Pemerintahan Digital

Indeks Pemerintahan Digital merupakan indikator baru yang menggantikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat ukur kematangan dan kinerja transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terhadap kualitas digitalisasi layanan publik, tata kelola data, infrastruktur digital, serta kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, untuk menggambarkan kondisi capaian efektivitas tata kelola digital dan pelayanan birokrasi tetap menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Gambar 2.53 indeks SPBE Kabupaten Barito Selatan terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai SPBE tercatat sebesar 2,28, meningkat menjadi 2,37 pada 2022 yang berada pada kategori cukup. Kemudian, pada tahun 2023 nilai SPBE melonjak signifikan menjadi 3,19 dengan perolehan nilai tertinggi se-kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, nilai tersebut relatif stabil di angka 3,20 pada tahun 2024.



Gambar 2.53 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 2021–2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2024

Pencapaian ini merupakan salah satu komitmen keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital, termasuk dalam aspek kebijakan internal, infrastruktur teknologi informasi, pelayanan publik digital, dan keterpaduan sistem. Meskipun demikian, penguatan kelembagaan, integrasi antar layanan digital, serta peningkatan kapasitas SDM dan keamanan sistem informasi masih perlu untuk dipertahankan dan dioptimalkan guna mewujudkan tata kelola pemerintan yang efektif, efisien, dan akuntabel secara digital.

2.4.1.4. Indeks Harmoni

Indeks Harmoni merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan sosial dalam suatu wilayah, mencerminkan kondisi kohesi sosial, toleransi, inklusi, dan rasa aman antarwarga. Indeks ini bertujuan untuk menangkap dimensi kehidupan sosial yang beragam, seperti relasi antaragama, antarbudaya, dan antaridentitas lainnya, serta tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2025, Indeks Harmoni Kabupaten Barito Selatan masih dalam proses survei.

2.4.1.5. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian IKIP dilakukan berdasarkan empat dimensi, yaitu komitmen, ketersediaan informasi, pelayanan, serta pengelolaan dan dokumentasi informasi. Pada tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan mencatat skor IKIP sebesar 78,38 yang tergolong menuju informatif. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam keterbukaan informasi publik, namun masih memerlukan penguatan pada layanan dan tata kelola informasi.

2.4.1.6. Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kinerja statistik daerah secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Nilai indeks ini menjadi gambaran tingkat kematangan dan kesiapan statistik suatu daerah, serta menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kapasitas statistik secara nasional. Pada tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan memperoleh skor IPS sebesar angka 2,90 yang masuk kategori "baik". Meskipun demikian, capaian ini masih menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan statistik, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

2.4.1.7. Tingkat Kematangan Keamanan Informasi

Tingkat Kematangan Keamanan Informasi merupakan salah satu aspek dari komponen pelaksanaan pemerintahan digital (Pemdi). Hal tersebut dikategorikan dalam aspek keamanan siber yang diikur dengan indikator tingkat kematangan keamanan siber pemerintahan digital. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan/kapabilitas penyelenggaraan keamanan siber, meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan serta implementasi kontrol teknis keamanan lainnya berdasarkan instrumen kematangan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN. Pada tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan memiliki tingkat kematangan pada kategori tingkat I. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah masih berada pada tahap awal, dengan inisiatif digital yang bersifat terbatas dan belum merata di seluruh perangkat daerah.

2.4.1.8. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indeks ini dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa pelayanan publik sudah diberikan kepada masyarakat. Pada

tahun 2022, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan sebesar 2,36 atau berada pada klasifikasi cukup memadai. Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas layanan dasar belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat tantangan dalam hal kecepatan, aksesibilitas, maupun responsivitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistemik, termasuk reformulasi standar pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat akuntabilitas dan kepuasan pengguna layanan.

2.4.1.9. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

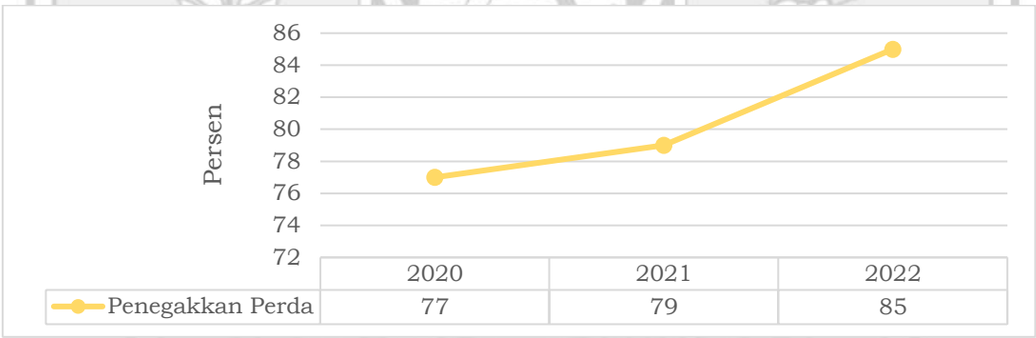
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah telah melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi pertanahan secara tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan hukum. Indeks ini mencerminkan kualitas tata kelola pertanahan, termasuk kepastian hukum atas hak tanah, keakuratan data pertanahan, serta keterpaduan sistem informasi pertanahan dengan pembangunan wilayah. Indeks ini penting dalam mendukung reformasi agraria, mencegah konflik lahan, dan mempercepat pelayanan publik berbasis pertanahan yang transparan dan akuntabel. Indeks ini belum memiliki data capaian historis, dan akan dihitung dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari terciptanya tatanan hukum yang berkeadilan, sistem keamanan yang tangguh, serta praktik demokrasi yang substansial. Komitmen untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat yang tidak diskriminatif, transparan, dan berorientasi pada hak asasi manusia menjadi prioritas untuk menciptakan rasa keadilan.

2.4.2.1. Penegakan Perda

Persentase penegakan perda digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lokal, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Tren persentase penegakan perda di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, persentase penegakan Perda tercatat sebesar 77 persen, kemudian mengalami kenaikan berturut-turut menjadi 85 persen di tahun 2022. Tren ini mencerminkan penguatan kapasitas aparatur penegak Perda, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dalam menegakkan aturan daerah. Capaian ini menjadi indikator positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, adil, dan berorientasi pada kepatuhan hukum.



Gambar 2.54 Persentase Penegakan Peraturan Daerah, 2021–2022

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2024

2.4.2.2. Indeks Demokrasi Indonesia

Kondisi demokrasi di Kabupaten Barito Selatan secara umum menunjukkan lingkungan yang kondusif. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan telah mendorong iklim politik yang lebih terbuka, inklusif, dan partisipatif, khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja demokrasi tahun 2024 yang menunjukkan

peningkatan signifikan, terutama pada aspek pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan (99,89 persen) dan ideologi bangsa dan bela negara (99,98 persen). Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode sebelumnya, tren capaian tahun 2024 menandakan adanya perbaikan dalam pendekatan edukatif dan partisipatif kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi, penguatan literasi politik masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil menjadi fokus strategis kedepan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Demokrasi, 2020–2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100	100	99,12	100	100
Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	100	78,78	98,99	67,95	99,89
Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat	100	4,59	98,99	0	99,98

Sumber: LAKIP, 2024

2.4.2.3. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai aspek seperti keamanan dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, serta keamanan dari kekerasan. Secara historis indeks ini belum memiliki data capaian karena termasuk dalam salah satu turunan dari indikator IUP yang akan dihitung dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan data selama lima tahun terakhir kondisi keamanan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian. Indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 8,9 pada tahun 2020 menurun menjadi 6,5 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan sebagai penurunan jumlah kasus kejahatan yang berhasil ditangani. Meskipun demikian, penurunan ini dapat

disebabkan oleh dua faktor yaitu: menurunnya jumlah kasus kriminal, atau justru menurunnya kemampuan penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus.

Risiko penduduk terkena kejahatan meningkat dari 85 pada tahun 2023 menjadi 95 pada tahun 2024, yang mengindikasikan peningkatan potensi ancaman terhadap masyarakat. Sementara itu, tingkat penyelesaian kejahatan sempat menurun tajam dari 91,2 persen pada tahun 2022 ke 75,21 persen pada tahun 2023, lalu naik menjadi 81,67 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum masih perlu ditingkatkan, melalui penguatan kapasitas aparat.

Tabel 2.38 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana, 2020–2024

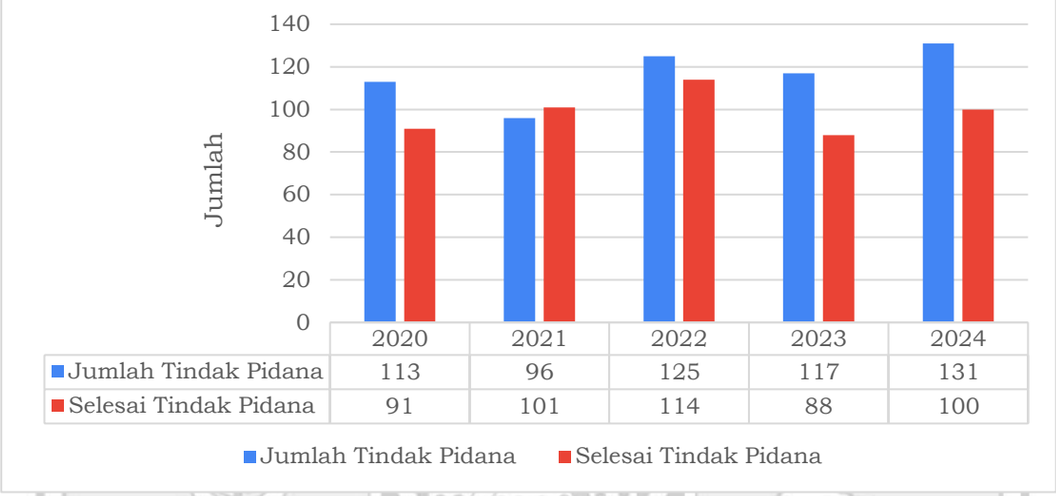
No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas Yang Tertangani per 10,000 penduduk	8,9	7,6	8,6	6,5	6,5
2	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	-	-	91	85	95
3	Persentase Penyelesaian Kejahatan	-	-	91,2	75,21	81,67

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025

2.4.2.4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Barito Selatan berada pada kondisi yang relatif aman dan kondusif bagi aktivitas masyarakat dan investasi. Pemerintah daerah secara aktif berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial, mengantisipasi potensi konflik horizontal, dan menekan angka kriminalitas. Peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja serta optimalisasi peran organisasi masyarakat turut memperkuat sistem deteksi dan respons dini terhadap gangguan ketertiban. Jika dilihat dari jumlah tindak pidana (JTP) Kabupaten Barito Selatan, terdapat fluktuasi sepanjang tahun 2020–2024 dengan tren peningkatan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 131 kasus. Sementara itu, jumlah tindak pidana yang berhasil diselesaikan (STP) cenderung tidak seimbang dengan jumlah kasus yang terjadi, terutama pada tahun 2023 dan 2024 yang

menunjukkan penurunan efektivitas penanganan perkara. Ketimpangan antara JTP dan STP ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sinergi kelembagaan, serta pendekatan preventif yang lebih proaktif guna menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Capaian kondisi ini dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 akan dihitung melalui Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.



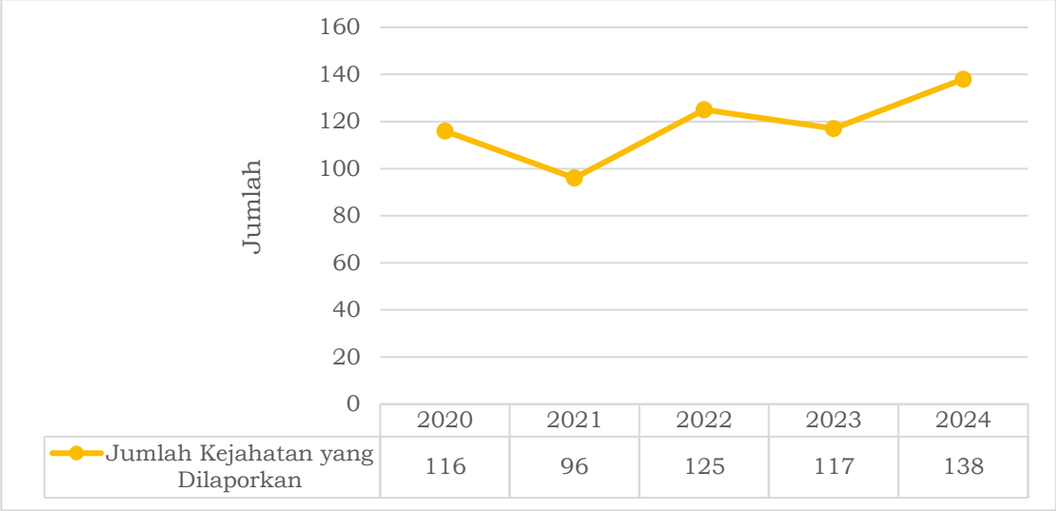
Gambar 2.55 Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban per Kepolisian Resort, 2020–2024

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025

2.4.2.5. Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Kriminalitas tidak hanya berdampak pada aspek keamanan individu dan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap iklim investasi, stabilitas sosial, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan demografis yang terus berkembang, kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan kompleksitas, mulai dari pelanggaran ringan hingga pidana berat. Angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan dilihat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan. Jumlah kejahatan yang dilaporkan di selama lima tahun terakhir cenderung meningkat yaitu dari 116 kasus pada tahun 2020 meningkat menjadi 138 kasus pada tahun 2024.

Meskipun demikian, jika dilihat pada tahun 2021 jumlah kejahatan yang dilaporkan sempat mengalami penurunan menjadi 96 kasus. Kejadian kejahatan di Kabupaten Barito Selatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, lingkungan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.



	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	116	96	125	117	138

Gambar 2.56 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, 2020–2024

Sumber: BPS Kalimantan Tengah diolah, 2025

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar Kabupaten Barito Selatan meskipun tidak secara langsung terhubung dengan dinamika internasional atau kawasan besar, tetap relevan dalam konteks memperkuat posisi daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan lokal serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Barito Selatan berperan dalam memperkuat kerjasama dengan daerah sekitar.

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,76. Skor ini menempatkan Barito Selatan di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 3,26 dan juga di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki skor

3,13. Sementara itu, IDSD Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 menunjukkan skor keseluruhan sebesar 2,93. Skor ini mencerminkan posisi daya saing daerah dalam skala nasional dengan beberapa pilar yang menjadi kekuatan dan tantangan tersendiri.

IDSD mengukur daya saing daerah berdasarkan 12 pilar utama, termasuk institusi, infrastruktur, adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Barito Selatan menunjukkan kekuatan pada pilar institusi dengan skor 4,09 dan dinamisme bisnis dengan skor sempurna 5,00. Namun, terdapat kelemahan pada pilar ukuran pasar dengan nilai 0,28 dan kapabilitas inovasi dengan nilai 0,40 yang menunjukkan perlunya perhatian lebih pada aspek pengembangan pasar dan inovasi daerah. Sementara itu, berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Barito Selatan masih dikategorikan sebagai daerah kurang inovatif. Untuk meningkatkan daya saing, Kabupaten Barito Selatan perlu fokus pada pengembangan inovasi daerah, perluasan ukuran pasar, dan peningkatan kapabilitas inovasi. Langkah-langkah strategis seperti pelatihan sumber daya manusia, pengembangan industri lokal, dan peningkatan infrastruktur dapat menjadi kunci dalam memperkuat posisi daya saing daerah ini.

2.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah akan mencerminkan keselarasan komitmen dengan program dan kebijakannya dalam mengelola berbagai kewenangan secara bertanggung jawab. Fokus layanan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai prioritas utama peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar difokuskan pada bidang-bidang yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.5.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.5.1.1. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan krusial dalam pembangunan wilayah karena menjadi landasan bagi kemajuan sosial ekonomi. Dalam konteks pembangunan, investasi dalam pendidikan dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dapat berkontribusi dalam perkembangan suatu wilayah dan merupakan pilar penting pembangunan.

Tabel 2.39 Kondisi Capaian Pendidikan, 2021–2023

No	Capaian Kinerja					
	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah					
	APS SD	%	0,28	0	0,52	-
	APS SMP	%	0,39	0	1,82	-
2	Angka Kelulusan					
	SD/MI	%	100	100	100	-
	SMP/MTs	%	100	100	100	-
3	Fasilitas Pendidikan					
	Ruang Kelas Pendidikan SD/MI yang Layak	%	96,02	100	91,75	92,68
	Ruang Kelas Pendidikan SMP/MTS yang Layak	%	94,65	100	94,74	93,11
	Ruang Kelas Pendidikan SMA/MA yang Layak	%	100	100	97,18	93,18
	Rasio Ketersedian Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	Rasio	0,09	-	0,11	-
4	Rasio Guru terhadap Murid					
	Pendidikan Dasar	Rasio	1:8	1:8	1:8	1:7
	Pendidikan Menengah	Rasio	1:11	1:10	1:10	1:8

Sumber: Kabupaten Barsel Dalam Angka; BPS Kalimantan Tengah; RPJMD Tahun 2017-2022; serta RKPD Tahun 2024 dan 2025

Jika dilihat berdasarkan Tabel 2.39, capaian kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Barito Selatan menunjukan hasil yang relatif stabil namun tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pada indikator Angka Putus Sekolah (APS), tercatatkan pada tahun 2021 tingkat putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sempat mencapai 0 persen, namun

terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 dengan masing-masing sebesar 0,52 persen (SD) dan 1,82 persen (SMP). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan keberlanjutan sekolah pada kelompok usia pendidikan dasar masih menjadi perhatian, terutama di jenjang menengah pertama. Sementara itu, jika dilihat dari angka kelulusan capaian jenjang SD/MI dan SMP/MTS konsisten di angka 100 persen yang berarti mencerminkan adanya keberhasilan dalam mempertahankan peserta didik hingga akhir jenjang pendidikan.

Pada indikator kondisi ruang kelas yang layak, terjadi fluktuasi atau cenderung mengalami penurunan di seluruh jenjang. Seperti halnya pada jenjang SMA/MA, persentase ruang kelas layak menurun dari 100 persen (2021) menjadi 93,18 persen (2023). Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap pemeliharaan dan rehabilitasi sarana fisik pendidikan agar mendukung kenyamanan belajar. Sementara itu, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar tercatat 0,11 pada tahun 2022, menunjukkan masih terbatasnya sebaran satuan pendidikan.

Dilihat dari sisi rasio guru terhadap murid selama periode 2021–2023 tercatat dalam (1:7–1:8) dan (1:8–1:11), baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Jika dibandingkan dengan standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, yang menetapkan rasio ideal 1:20 pada SD dan SMP, serta rekomendasi UNESCO yang berkisar hingga 1:30, maka rasio di Barito Selatan tergolong rendah. Rasio tersebut dianggap tidak ideal dalam konteks pendidikan karena beberapa faktor seperti biaya dan potensi kurangnya interaksi sosial antar siswa. Rasio yang lebih rendah memang memungkinkan guru untuk fokus pada kebutuhan masing-masing siswa, tetapi juga berdampak terhadap kesempatan siswa untuk belajar dari teman sebaya dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang lebih besar. Secara umum capaian kinerja menunjukkan beberapa kemajuan dalam sektor pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan terkait angka putus sekolah, kelayakan ruang kelas, dan distribusi layanan pendidikan.

2.5.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak mendasar manusia yang menjadi salah satu tolak ukur dalam suatu perencanaan pembangunan. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan dengan layak. Meskipun setiap warga negara bertanggung jawab untuk atas kesehatannya sendiri, pemerintah wajib memastikan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berikut dijabarkan capaian kinerja bidang kesehatan pada Tabel 2.40 sebagai berikut.

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan, 2020—2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	76,00	85.85	96,57	66,01	58,53
2	Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	83,3	75	90	75	8,33
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	69,82	63,94	65,69	51,01	45,18
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah	%	64,91	72,85	88,43	69,22	64,63
6	Cakupan kunjungan bayi	%	62,13	66,37	90,05	95,36	79,68
7	Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup	0	3,89	2	4	1
8	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	251	399,29	273	132	71
9	Angka kesakitan DBD	Orang	7	2	4	91	70
10	Jumlah penderita penyakit menular (Malaria)	Orang	0	2	0	0	0
11	Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi)	Orang	9.312	8.048	7.484	9.599	10.474
12	Angka Penemuan Kasus TBC	%	94	183	262	138	87
13	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	%	98	94	97	82	98
14	Jumlah kasus baru AIDS	Orang	2	1	9	12	11

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kalteng Tahun 2019, BPS Kalteng, Kalteng Dalam Angka, Barsel Dalam Angka, RPJMD Tahun 2017-2022, dan RKPD

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dapat meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Namun, capaian kinerja ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada periode tahun tahun 2022– 2024. Pada tahun 2022, cakupan pertolongan persalinan sudah mencapai 96,57 persen namun terus menurun hingga mencapai 58,53 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas layanan persalinan yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan tenaga perawat pendukung.

Jika dilihat berdasarkan Tabel 2.40 permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Barito Selatan masih memerlukan perhatian. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan dari 69,82 persen pada tahun 2020 menjadi 45,18 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2024 hanya mencapai 64,63 persen, masih di bawah target pelayanan gizi ibu hamil secara ideal. Di sisi lain, aspek mortalitas menunjukkan perbaikan, yaitu angka kematian ibu (AKI) menunjukkan tren poisitif dari 399,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, dan menurun menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) tercatat menurun dari 3,89 pada tahun 2021 menjadi 1,00 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan pada aspek penanganan kasus risiko tinggi, namun cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar—terutama pemantauan kehamilan, pemenuhan gizi, dan intervensi tumbuh kembang—masih perlu diperkuat. Kekurangan intervensi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya prevalensi stunting di Barito Selatan, khususnya pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.

Pada tahun 2024, angka kesakitan Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, yaitu mencapai 70 orang. Begitu pula terlihat pada jumlah penderita penyakit hipertensi yang mengalami kecenderungan

meningkat, yaitu mencapai 10.474 orang. Sementara itu, angka penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 87 orang pada tahun 2024. Meskipun data belum cukup untuk menyimpulkan pergeseran beban penyakit, temuan ini menjadi sinyal penting bagi penguatan kewaspadaan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, kondisi geografis Barito Selatan yang memiliki *oxbow lake*, potensi genangan air sebagai tempat berkembang biak seperti nyamuk DBD perlu diantisipasi secara serius. Upaya pengendalian penyakit perlu mempertimbangkan faktor lingkungan lokal dan memperkuat pendekatan promotif serta preventif berbasis risiko.

Rasio dokter per 100.000 digunakan untuk menilai ketersediaan layanan kesehatan dan dapat mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap perawatan medis. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan walaupun masih berada di bawah standar ideal, yakni 100 dokter per 100.000 penduduk berdasarkan standar World Health Organization (WHO). Pada tahun 2023, Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kabupaten Barito Selatan sebesar 46,03 yang berarti tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 46 dokter. Sementara itu, Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 4,43. Namun, masih jauh dari rasio ideal yang dietapkan oleh WHO, yakni 10 per 75.000 penduduk. Hal ini mengartikan bahwa sebanyak 75.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan hanya dilayani oleh 4 dokter gigi. Beban kerja dokter yang berlebihan karena rasio yang kurang ideal menjadi akar masalah yang mengkhawatirkan. Jumlah dokter yang sedikit menunjukkan rendahnya kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Tabel 2.41 Jumlah Rasio Dokter, 2021–2023

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	30,76	31,04	44,06	46,03
2.	Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk	3,76	3,70	3,36	4,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, 2023

Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, terutama pada layanan rujukan. Rasio rumah sakit umum per 1.000 penduduk stagnan di angka 0,007 sepanjang 2020–2024 atau hanya terdapat satu rumah sakit umum yang berada di Kecamatan Dusun Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah sakit belum bertambah dan masih sangat terbatas dalam melayani kebutuhan rujukan tingkat lanjut serta masih adanya ketimpangan aksesibilitas dan keterjangkauan antar wilayah. Pada layanan tingkat pertama, rasio puskesmas pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,087, atau masih belum memenuhi standar ideal WHO. Puskesmas pembantu menunjukkan capaian 0,126, dan poskesdes yang mulai tercatat sejak 2022 mencapai 0,62 pada 2024, menandakan belum meratanya keberadaan poskesdes di setiap desa. Sementara itu, rasio klinik meningkat menjadi 0,044 per 1.000 penduduk dalam dua tahun terakhir, meskipun kontribusinya terhadap layanan masih terbatas karena belum seluruhnya memiliki kapasitas rawat inap atau tenaga medis lengkap. Secara rinci, perkembangan sarana-prasarana kesehatan Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.42.

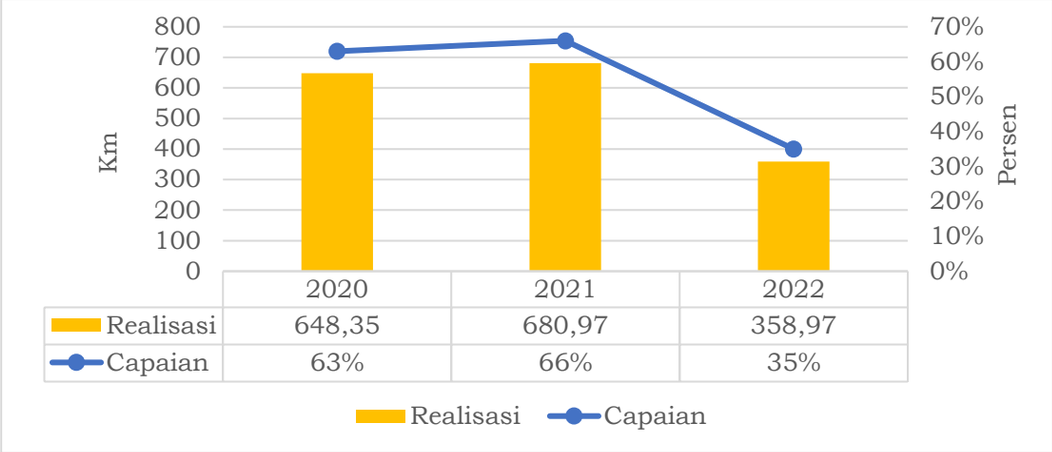
Tabel 2.42 Kondisi Perkembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Per 1.000 Penduduk, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Puskesmas	0,086	0,085	0,090	0,088	0,087
2.	Puskesmas Pembantu	-	0,123	0,130	0,128	0,126
3.	Poskesdes	-	-	0,64	0,63	0,62
4.	Rumah Sakit Umum	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
5.	Klinik	-	-	0,022	0,022	0,044

Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025

2.5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur yang mumpuni menjadi kunci utama dalam pembangunan. Infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan tidak hanya mempermudah pergerakan penduduk, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur utama dalam mendorong mobilisasi dan konektivitas antar wilayah guna mendorong pembangunan wilayah.



Gambar 2.57 Capaian Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, 2020–2022

Sumber: RPD Kab. Barito Selatan 2023-2026

Berdasarkan grafik capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 – 2022, terlihat bahwa realisasi panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan drastis pada tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi jalan dalam kondisi baik mencapai masing-masing 648,35 km (63 persen) dan 680,97 km (66 persen). Namun, pada tahun 2022 capaian ini merosot menjadi hanya 358,97 km atau sekitar 35 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya degradasi kualitas infrastruktur jalan yang cukup signifikan dalam waktu singkat. Di lapangan, hal ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, antara lain minimnya anggaran pemeliharaan rutin jalan, kerusakan akibat cuaca ekstrem seperti hujan deras dan banjir, serta tekanan dari kendaraan berat yang melintasi jalur transportasi utama. Selain itu, wilayah geografis Barito Selatan yang memiliki kontur tanah labil di beberapa kawasan serta masih terbatasnya sistem drainase menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat terjadi. Aksesibilitas yang menurun ini berdampak langsung pada konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perdagangan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemulihan dan peningkatan infrastruktur jalan secara berkelanjutan, termasuk melalui sinergi program pusat-daerah, pemanfaatan teknologi perkerasan jalan yang sesuai kondisi tanah, serta optimalisasi peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, irigasi memiliki peran yang sangat penting di Kabupaten Barito Selatan. Wilayah ini memiliki mayoritas penduduk yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Dengan sistem irigasi yang baik, pasokan air yang teratur dan dapat diandalkan ke lahan pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan hasil panen, produktivitas pertanian, dan juga mendukung perlindungan lingkungan dan manajemen yang berkelanjutan terhadap sumber daya air. Kabupaten Barito Selatan juga rentan terhadap musim kemarau dan kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian.

Tabel 2.43 Area Irigasi, 2020 – 2022

No	Keterangan	Satuan	2020	2021	2022
1	Jumlah daerah irigasi	Unit	70	70	70
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	28,12	42,18	44,49
3	Rasio jaringan irigasi	m/ha	17,6	18,57	35,94

Sumber: Dinas PUPR Barito Selatan 2023

Merujuk pada data diatas, jumlah daerah irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Persentase luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Selatan menunjukan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022, tetapi masih berada di bawah target yang ditetapkan. Upaya untuk menyediakan akses air bersih yang adil dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan air bersih masyarakat utamanya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Barito yang tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga melayani kebutuhan niaga, industri, pemerintah di wilayah tersebut. Pelanggan PDAM Tirta Barito menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2022 meningkat dengan jumlah 12.429 rumah tangga dan secara keseluruhan meningkat 13.772 pelanggan.

2.5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan data dari SK Kumuh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan tercatat memiliki luas kawasan kumuh sebesar 13,98 hektare (Ha). Kawasan kumuh tersebut berada di Kelurahan Hilir Sper, yang merupakan salah

satu wilayah permukiman padat penduduk di kabupaten ini. Luasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Barito Selatan tidak termasuk daerah dengan kawasan kumuh terluas di provinsi Kalimantan Tengah, tetapi tetap memerlukan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kumuh. Upaya peningkatan kualitas permukiman, penyediaan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, drainase, dan jalan lingkungan sangat penting dilakukan untuk mengurangi tingkat kekumuhan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.

Tabel 2.44 Sebaran Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi
Gunung Mas	0
Katingan	78,45
Seruyan	410
Lamandau	14,78
Sukamara	23
Kotawaringin Barat	13,8
Kotawaringin Timur	21,82
Pulang Pisau	0
Kapuas	0
Palangka Raya	24,17
Barito Timur	25,75
Barito Selatan	13,98
Barito Utara	29,98
Murung Raya	14,37

Sumber: SK Kumuh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalteng, 2024

2.5.1.5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja Tantribumlinmas Kabupaten Barito Selatan 2020–2023 menunjukkan tren peningkatan secara moderat. Cakupan pelayanan bencana kebakaran meningkat signifikan dari 20,71 persen pada tahun 2020 menjadi 80 persen pada tahun 2022, yang juga diikuti oleh perbaikan tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran dari 82,60 persen menjadi 80 persen pada periode yang sama setelah sempat menurun di tahun 2021. Namun demikian, terdapat penurunan kinerja pada keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas),

dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 70 persen pada 2022. Begitu pula tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan dari 100 persen menjadi 75 persen. Kondisi ini menjadi catatan penting, karena keberlanjutan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat bergantung pada kehadiran SDM pelaksana dan efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah memperkuat kelembagaan, konsistensi SDM, dan sistem monitoring-respons yang adaptif.

Tabel 2.45 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022
1	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	70
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	75
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	20,71	78	80
4	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	82,60	73	80

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.1.6. Sosial

Pembangunan wilayah dapat dicapai salah satunya dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Kondisi sosial di Kabupaten Barito Selatan jika dilihat dari PMKS yang memperoleh bantuan selama lima tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh PMKS menerima bantuan sosial. Begitu pula dengan persentase rumah tangga yang menerima bantuan melalui program keluarga harapan juga mencapai 100 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Barito Selatan berhasil dalam memberikan bantuan sosial secara konsisten kepada PMKS dan rumah tangga penerima PKH.

Tabel 2.46 Capaian Indikator Bidang Sosial, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100	100	100	100	100
2	Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan	%	100 (2.540 kpm)	100 (2.649 kpm)	100 (2.579 kpm)	100 (2.518 kpm)	100 (2.520 kpm)

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025

Lebih lanjut, jumlah korban bencana alam di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan angka tertinggi pada 2023 sebanyak 59.196 jiwa dan menurun menjadi 3.654 jiwa pada 2024, sementara korban bencana sosial juga meningkat menjadi 111 jiwa pada tahun yang sama. Di sisi lain, jumlah fakir miskin mengalami peningkatan konsisten dari 2.875 jiwa pada 2020 menjadi 5.114 jiwa pada 2024, disertai dengan masih tercatatnya kelompok rentan lainnya seperti anak korban kekerasan seksual, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penyandang disabilitas. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan sosial-ekonomi yang belum tertangani secara optimal serta keterbatasan dalam jangkauan perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi terpadu melalui penguatan data kesejahteraan sosial, perluasan program bantuan berbasis kebutuhan spesifik, peningkatan kapasitas respons terhadap bencana, serta penguatan layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang inklusif.

Tabel 2.47 Capaian Indikator Bidang Sosial, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Korban bencana alam	jiwa	18.044	93	27.772	59.196	3.654
2	Korban bencana sosial	jiwa	270	80	9	27	111
3	Gelandang dan Pengemis	jiwa	-	-	5	3	3
4	Penderita HIV/AIDS	jiwa	-	11	-	12	-
6	Fakir Miskin	jiwa	2.875	4.691	5.065	5.995	5.114
8	Anak korban kekerasan seksual	jiwa	6	6	5	2	6
9	Lanjut Usia Terlantar	jiwa	50	80	127	2	2
10	Penyandang Tuna Wicara-Rungu	jiwa	-	-	3	-	-
11	Tuna Daksa	jiwa	6	-	-	-	-
12	Penyandang Cacat Fisik	jiwa	-	-	194	251	251
13	Tuna Susila	jiwa	0	0	0	0	-

Sumber: Dinas DSPMD Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.5.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.5.2.1. Tenaga Kerja

Sektor tenaga kerja memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tenaga kerja yang produktif dan berkualitas merupakan aset utama dalam mendorong inovasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dominasi sektor jasa dan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian penduduk usia produktif. Dari total 69.002 jiwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, sebanyak 43,7 persen (30.139 jiwa) bekerja di sektor jasa, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 40,1 persen (27.679 jiwa), dan sektor industri yang hanya menyerap 16,2 persen (11.184 jiwa).

Komposisi tenaga kerja mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor tersier dan primer, dengan daya serap sektor industri yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sektor industri dan hilirisasi agar dapat mendorong diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah di tingkat lokal.

Tabel 2.48 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pertanian			
	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	19.838	7.841	27.679
2	Industri			
	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Minum; Konstruksi	9.172	2.012	11.184
3	Jasa			
	Perdagangan Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	13.801	16.338	30.139
Jumlah		**42.811**	**26.191**	**69.002**

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

2.5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Fokus ini mencakup upaya peningkatan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kemajuan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meskipun masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan intervensi strategis. Data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR mencapai 52 persen pada tahun 2024, mencerminkan representasi politik perempuan yang sangat baik. Di sisi lain, Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukkan lonjakan drastis hingga 86 persen pada tahun 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat cukup signifikan menjadi 52,58 persen pada 2024, yang dimaknai sebagai hasil dari membaiknya akses perempuan dalam pembangunan.

Namun demikian, terjadi peningkatan tajam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari 21 kasus pada 2023 menjadi 44 kasus pada 2024, serta fluktuasi rasio KDRT yang mencapai 2 pada 2022 dan kembali menurun menjadi 0,04 di tahun 2024. Meski seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani berhasil ditangani 100 persen selama lima tahun terakhir, tren kenaikan kasus tetap menjadi sinyal perlunya penguatan pencegahan, edukasi publik, serta sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Tabel 2.49 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	24,14%	-	14,01%	-	-
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	40%	-	40%	-	52%
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	31,30%	-	86%	-	-
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	47,09	43,1	47,89	47,39	52,58
5	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	6	14	21	21	44
6	Rasio KDRT	0,14	-	2	-	0,04

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Dewan dan DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.2.3. Pertanahan

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, urusan yang berkaitan dengan pertanahan dianggap sebagai bagian dari tugas pokok pemerintahan yang harus dilaksanakan dan tidak memiliki keterkaitan dengan penyediaan layanan dasar.

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan, 2020 – 2022

Pertanahan	Satuan	2020	2021	2022
Persentase Lahan Bersertifikat	persen	78,75	80,75	80,75
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	kasus	0	0	0
Penyelesaian Izin Lokasi	persen	100	100	100

Sumber: Bappeda Kab. Barito Selatan 2023 (diolah)

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 2023, persentase lahan bersertifikat menunjukkan tren yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 78,75 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 80,75 persen pada 2021, dan tetap di angka yang sama pada 2022. Stabilitas ini mencerminkan kinerja positif dalam administrasi pertanahan, khususnya dalam program sertifikasi lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Selain itu, penyelesaian kasus tanah negara tercatat nihil (0 kasus) selama tiga tahun berturut-turut, menunjukkan tidak adanya konflik agraria yang tercatat secara resmi dalam kategori tersebut. Di sisi lain, penyelesaian izin lokasi menunjukkan capaian maksimal sebesar 100 persen setiap tahunnya, yang mengindikasikan bahwa pengurusan izin lokasi untuk investasi atau penggunaan lahan berjalan efektif.

Namun, di lapangan masih terdapat tantangan tersembunyi. Meskipun persentase lahan bersertifikat cukup tinggi, masih ada sekitar 19 persen lahan yang belum memiliki status hukum jelas, yang umumnya berada di kawasan pedesaan, wilayah adat, atau kawasan dengan keterbatasan akses layanan pertanahan. Selain itu, kasus sengketa

atau tumpang tindih klaim lahan sering kali tidak tercatat secara resmi sebagai kasus tanah negara, tetapi tetap terjadi dalam bentuk konflik antarwarga atau antara warga dan perusahaan, terutama di sektor perkebunan. Faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah, keterbatasan biaya sertifikasi mandiri, serta akses terbatas ke kantor pertanahan juga turut memperlambat proses legalisasi aset tanah di akar rumput. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih proaktif, termasuk penyuluhan, layanan jemput bola, dan integrasi data pertanahan yang lebih inklusif untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

2.5.2.4. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup merupakan layanan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan lingkungan dan iklim. Suatu kegiatan pembangunan membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang cukup tinggi, terlepas dari hal tersebut maka akan sangat mempengaruhi kondisi dari lingkungan bahkan mengarah ada kerusakan lingkungan. Dengan adanya kerusakan lingkungan tersebut maka berpotensi menjadikan beban kepada masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan menjadi semakin penting di tengah ancaman perubahan iklim dan degradasi ekosistem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Salah satu inisiatif strategis dalam pengendalian perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (ProKlim), yaitu program berjenjang yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Implementasi ProKlim di Kabupaten Barito Selatan menunjukakn perkembangan positif, meskipun belum merata di seluruh kecamatan. Berdasarkan data, jumlah pelaksanaan ProKlim meningkat dari 2 desa pada tahun 2020 menjadi 14 desa pada tahun 2023 dan 2024. Kecamatan Dusun Utara menjadi wilayah paling aktif dengan peningkatan signifikan. Sementara itu, kecamatan lainnya seperti Dusun Hilir dan Jenamas belum menunjukkan perkembangan berarti dalam pelaksanaan program ini.

Peningkatan jumlah ProKlim mencerminkan kesadaran yang tumbuh terhadap pentingnya pelestarian lingkungan di tingkat komunitas. Program ini tidak hanya mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan sumber daya alam, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal, peningkatan literasi iklim, serta perluasan cakupan program di kecamatan lain menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 2.51 Jumlah Program Kampung Iklim, 2020–2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dusun Hilir	0	0	0	0	0
2.	Dusun Selatan	1	0	1	4	4
3.	Dusun Utara	1	1	2	4	4
4.	G. Bintang Awai	0	0	1	5	5
5.	Jenamas	0	0	0	0	0
6.	Karau Kuala	0	0	1	1	1
Total		2	1	5	14	14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan proses sistematis dalam pencatatan dan pengelolaan data individu yang mencakup biodata penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan untuk menunjang pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Tingkat kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga karena bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan.

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik, dan kutipan akta kematian telah mencapai 100 persen, mencerminkan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan. Meski sempat fluktuatif, cakupan akta kelahiran dan akta nikah terus menunjukkan peningkatan yang

menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen sipil. Kepemilikan Kartu Identitas Anak juga tumbuh pesat, memperlihatkan keberhasilan sosialisasi dan inovasi layanan yang inklusif bagi kelompok usia dini. Kualitas database kependudukan mengalami peningkatan konsisten hingga mencapai 95 persen pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan pembinaan partisipasi masyarakat dan stakeholder yang sempat menyentuh angka 100 persen. Kedepannya, tantangan terletak pada konsistensi partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen sipil, agar target pelayanan prima dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tabel 2.52 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020–2024

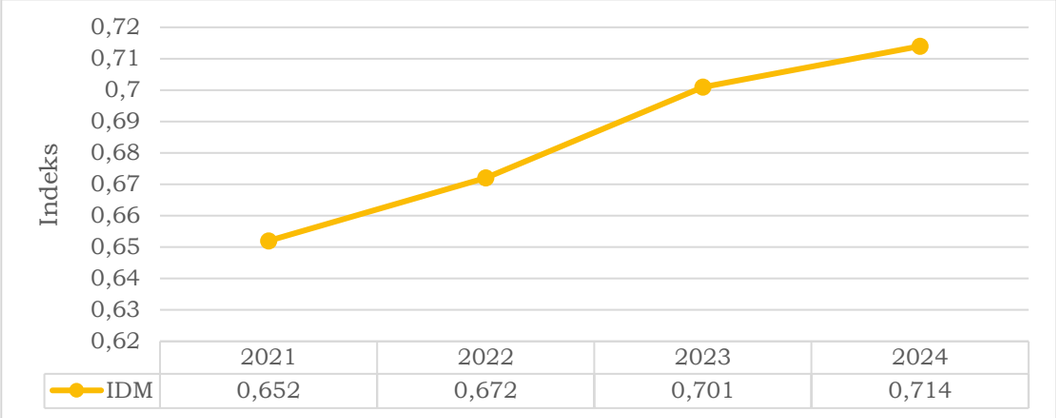
No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cakupan penerbitan kartu keluarga	100	100	100	100	100
2	Persentase pasangan berakta nikah	40,52	82,8	82,88	52,95	56,63
3	Persentase cakupan penerbitan ktp elektronik	99,17	99,63	99,69	97,14%	98,08
4	Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	93,26	94,22	97,63	94,61	95,42
5	Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kematian	77,47	81,34	100	100	100
6	Kepemilikan kartu identitas anak	10.519	12.363	14.979	17.717	64,28
7	Persentase kuantitas dan kualitas database kependudukan	78,32	80	80	85	95
8	Persentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang administrasi kependudukan	75,43	75,63	80	100	85
9	Persentase masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	79,02	80%	80%	30	95

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan. Melalui pemberdayaan, masyarakat desa didorong untuk mengenali potensi dan masalah di wilayahnya, serta merumuskan solusi secara

partisipatif. Tingkat kemajuan desa diukur menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menilai status perkembangan desa dari kategori tertinggal menuju mandiri.



Gambar 2.58 Indeks Desa Membangun, 2021–2024

Sumber: LPPD Kabupaten Barito Selatan, 2022-2024

Selama periode 2021 hingga 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Barito Selatan menunjukan tren positif, yakni meningkat dari 0,652 pada tahun 2021 menjadi 0,714 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa, yang merupakan komponen utama dalam pengukuran IDM. Selain IDM, capaian indikator pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan telah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan administrasi desa yang sudah sesuai regulasi dan tingginya partisipasi lembaga desa. Namun, stagnasi jumlah unit usaha masyarakat mengindikasikan perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, meskipun tingkat perkembangan desa terus meningkat, kualitas pertumbuhan dan kemandirian desa masih perlu ditingkatkan agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Secara lebih rinci capaian indikator bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat berdsarkan Tabel 2.53 sebagai berikut.

Tabel 2.53 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021–2023

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PKK aktif	100	80	100	100
2	Persentase desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100
3	Persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa	100	100	100	-
4	Persentase tingkat perkembangan desa	79	80	82	84
5	Jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk	9.264	9.264	9.264	9.264

Sumber: Dinas DSPMD Kabupaten Barito Selatan, 2023

2.5.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan upaya strategis untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), penurunan angka kelahiran dapat dikelola secara terarah guna menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan produktif. Berdasarkan data pada Tabel 2.54, rasio akseptor KB terus mengalami peningkatan dan mencapai 80,14 persen pada tahun 2023, hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Namun, angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15–49 tahun yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 75,27 persen justru menurun drastis menjadi 8,71 persen pada tahun 2024 sehingga perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran validitas data dan evaluasi sistem pelaporan. Sementara itu, indikator *unmet need* menunjukkan perbaikan signifikan, dari 16,18 persen pada tahun 2022 menjadi 3,83 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menandakan adanya keberhasilan penyuluhan dan ketersediaan layanan kontrasepsi yang lebih merata.

Di sisi lain, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) melonjak secara drastis hingga mencapai 77,26 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya pergeseran preferensi metode KB ke arah yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, tren penurunan pada cakupan peserta Bina Keluarga Lansia serta tidak tersedianya data yang konsisten pada beberapa indikator strategis menandakan

masih perlunya penguatan sistem monitoring dan integrasi data lintas tahun. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berkelanjutan berupa penguatan kapasitas SDM lini lapangan, optimalisasi fungsi kampung KB, serta revitalisasi sistem informasi keluarga.

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020–2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ratio Akseptor KB	72	-	75	80,14	-
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	72	-	75,27	-	8,71
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	2,18	-	1,83	-	-
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11,67	-	16,18	-	3,83
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,35%	-	10,86	-	77,26
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	79,53	-	84,6	-	100
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	88,06	-	82,9	-	93
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	75,27	-	74,91	-	70
9	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	66,67	-	100	-	-
10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri	76,72	-	77,25	-	-
11	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	93	-	100	-	100
12	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	1	-	1	-	-

Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.5.2.8. Perhubungan

Transportasi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung keberhasilan progres pembangunan karena berperan sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sektor dalam suatu perekonomian. Hal ini memungkinkan mobilitas manusia dan barang yang efisien, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang. Selain aspek ekonomi, transportasi juga berperan dalam aspek sosial dan lingkungan, seperti mengurangi kemacetan, emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan keamanan jalan. Dengan demikian, transportasi yang baik berperan sebagai pilar utama dalam mempercepat dan menjaga keberlanjutan progres pembangunan suatu negara.

Tabel 2.55 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor, 2020—2022

Penggunaan	2020	2021	2022
Mobil penumpang - Car Sedan	21	23	22
Mobil penumpang - Car Jeep	127	121	134
Mobil penumpang - Car – Minibus	1543	1754	1821
Micro Bus	8	8	13
Bus	-	-	-
Mobil barang – Pickup	308	387	397
Mobil barang - Light Truck	100	87	83
Truck	54	19	15
Sepeda Motor roda 2	17365	17692	17731
Sepeda Motor roda 3	26	25	19

Sumber: BPS Kab. Barito Selatan, 2023

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan saat COVID-19, tetapi terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 – 2022 seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan paling mencolok terjadi pada jumlah kendaraan roda dua. Peningkatan tersebut khususnya terjadi pada jenis kendaraan berupa mobil penumpang – *car* – *minibus*.

Tabel 2.56 Data Penumpang Angkutan Umum, 2020—2021

Keterangan	Satuan	2020	2021
Rasio jumlah arus penumpang	Unit	13,100	16,586
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km/bh	0.052	0.05
Rasio ijin trayek	Unit	310	25
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	220	690

Sumber: Dinas Perhubungan Barito Selatan, 2023

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Barito Selatan tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah arus penumpang angkutan umum dari 13.100 unit pada tahun 2020 menjadi 16.586 unit pada tahun 2021. Hal ini mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat dan kemungkinan pulihnya aktivitas ekonomi pascapandemi. Namun, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan justru sedikit menurun dari 0,052 km/bh menjadi 0,05 km/bh, yang dapat mengindikasikan kepadatan lalu lintas meningkat karena jumlah kendaraan bertambah lebih cepat dibanding pembangunan jalan. Selain itu, rasio izin trayek mengalami penurunan tajam dari 310 menjadi hanya 25 unit, yang dapat menunjukkan adanya pengetatan regulasi atau penurunan minat operator angkutan. Sebaliknya, jumlah uji kir angkutan umum meningkat drastis dari 220 menjadi 690 unit, mencerminkan peningkatan kesadaran atau penegakan terhadap aspek keselamatan dan kelayakan kendaraan umum di daerah tersebut.

Tabel 2.57 Jumlah Kendaraan Umum yang Berangkat dan Datang Menurut Trayek dan Jenis Pelayanan Angkutan, 2022

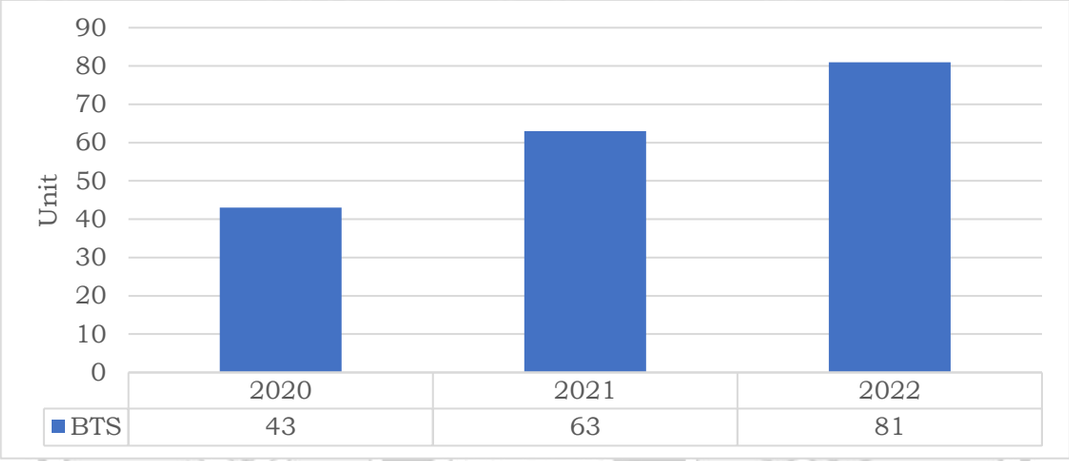
Jurusan	Jenis Pelayanan	Berangkat	Datang
Buntok-Banjarmasin	AKAP	288	290
Buntok-Palangkaraya	AKDP	199	180
Buntok-Sanggu	Angkot	-	-
Buntok-Asam	Angkot	-	-
Buntok-Tabak Kanilan	Angdes	211	212

Sumber: BPS Kab. Barito Selatan, 2023

Berdasarkan data tersebut menurut trayek kendaraan yang berangkat dan datang pada 2022 jurusan terbanyak ada pada Buntok-Barjarmasin yang kemudian jurusan Buntok-Tabak Kanilan. Dengan memperhatikan karakteristik geografis, Kabupaten Barito Selatan mencakup wilayah dataran rendah dan perbukitan mempermudah arus kendaraan darat untuk terhubung satu sama lain dengan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, infrastruktur seperti jaringan jalan dan perlengkapannya diperlukan untuk menghubungkan berbagai daerah guna memastikan penggunaan jaringan jalan dapat dioptimalkan dan pergerakan lalu lintas berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

2.5.2.9. Komunikasi dan Informatika

Dalam percepatan globalisasi informasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Sebagai salah satu upaya, jaringan kabel fiber optik *underground* telah terpasang di Kecamatan Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Gunung Bintang Awai. Sementara itu, jaringan nirkabel yang dikelola oleh pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebar di seluruh kecamatan.



Gambar 2.59 Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS), 2020 – 2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Barito Selatan, 2024

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) mengalami peningkatan signifikan selama periode 2020 – 2022, yaitu dari 43 unit pada tahun 2020 menjadi 63 unit pada 2021, dan kemudian naik lagi menjadi 81 unit pada 2022. Peningkatan jumlah BTS ini merupakan langkah positif dalam memperluas akses layanan telekomunikasi dan internet, khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya blank spot atau minim sinyal. Di lapangan, pembangunan BTS baru memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di desa-desa terpencil yang mulai dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih stabil, mendukung aktivitas ekonomi digital, pendidikan daring, dan layanan publik berbasis teknologi.

Namun demikian, tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan jaringan listrik di beberapa lokasi BTS yang memerlukan dukungan panel surya atau genset, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti daerah perbukitan atau kawasan hutan. Selain itu, meskipun jumlah BTS meningkat, kualitas sinyal dan kecepatan internet belum sepenuhnya merata karena kapasitas dan jangkauan tiap BTS masih terbatas. Oleh karena itu, selain menambah jumlah BTS, peningkatan kualitas jaringan dan teknologi yang digunakan juga perlu menjadi perhatian agar digitalisasi dapat berlangsung merata dan inklusif di seluruh wilayah Barito Selatan.

2.5.2.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UKM dan Koperasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi serta pengembangan kapasitas pelaku UKM menjadi strategi dalam menciptakan wiarusaha produktif, memperluas lapangan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi daerah. Jumlah koperasi sehat di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2030 dengan 45 unit. Sementara itu, untuk koperasi aktif menunjukkan kondisi yang sama baiknya dengan peningkatan jumlah yang konsisten setiap tahunnya, dari 29 koperasi pada tahun 2020 menjadi 61 koperasi pada tahun 2023.

Tabel 2.58 Perkembangan Urusan Koperasi, 2020-2023

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi sehat (Unit)	Unit	29	31	33	45
2	Koperasi aktif (Unit)	Unit	42	54	55	61

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Koperasi di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan bidang usaha, yaitu serba usaha, jasa dan sejenisnya, serta lain-lain. Pada periode 2020-2023, ketiga jenis koperasi ini menunjukkan karakteristik yang sama, dengan kenaikan jumlah setiap tahunnya dan angka tertinggi tercatat pada tahun 2023.

Tabel 2.59 Jumlah Koperasi Menurut Bidang Usaha, 2020-2023

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Serba usaha	Unit	9	9	9	10
2	Jasa dan sejenisnya	Unit	56	59	59	62
3	Lain-lain	Unit	58	60	62	64

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Peningkatan jumlah koperasi sehat, aktif maupun jumlah menurut bidang usaha mencerminkan masyarakat mulai melihat koperasi sebagai wadah usaha yang menjanjikan dan relevan dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, meskipun secara kuantitatif mengalami kenaikan, tantangan pada kualitas manajemen, kapasitas SDM koperasi, dan akses terhadap pasar serta pembiayaan perlu menjadi perhatian. Perlu adanya penguatan dari sisi kelembagaan dan usaha agar koperasi mampu menjadi alat distribusi ekonomi berbasis kerakyatan dan kekeluargaan yang adil dan berkelanjutan.

Perkembangan usaha mikro di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kondisi yang positif, ditandai dengan pertumbuhan usaha mikro, peningkatan jumlah wirausahawan baru, dan usaha mikro yang berizin. Jumlah usaha mikro meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, dengan puncaknya mencapai 525 usaha pada tahun 2023. Tren serupa juga terlihat pada peningkatan jumlah wirausahawan baru selama periode 2020-2023. Namun demikian, masih terdapat tantangan mendasar terkait aspek legalitas usaha. Persentase usaha mikro yang telah berizin stagnan di angka 4 persen selama periode tersebut, menunjukkan sebagian besar pelaku usaha masih berada di sektor informal.

Tabel 2.60 Perkembangan Usaha Mikro, 2020-2023

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan usaha Mikro	Usaha	210	315	420	525
2	Peningkatan Wirausaha Baru	Orang	35	37	40	42
3	Usaha Mikro yang Berizin	Persen	4	4	4	4

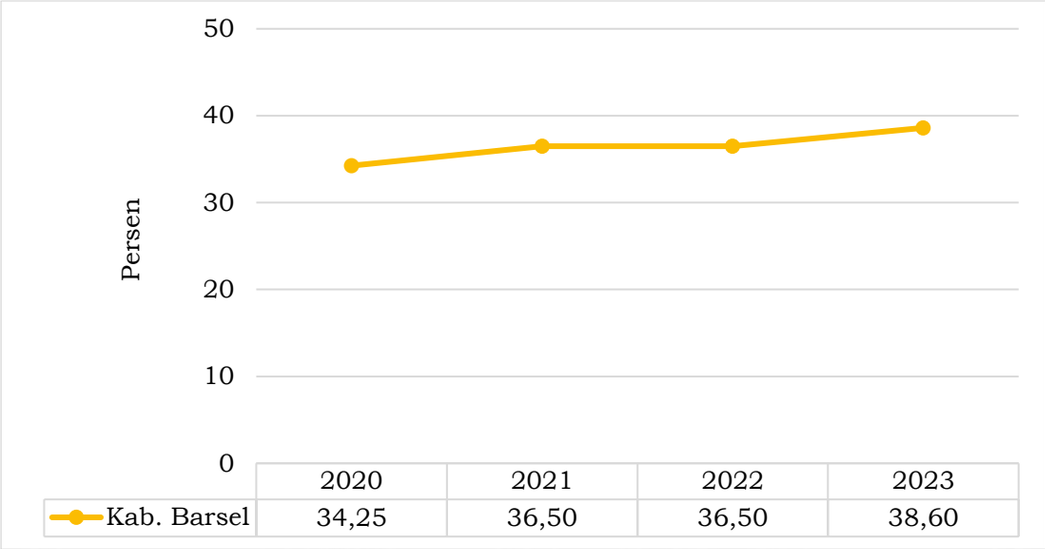
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Kondisi ini menjadi tantangan pembangunan untuk meningkatkan akses terhadap layanan perizinan karena menjadi prasyarat penting untuk peningkatan kapasitas usaha, keterbukaan akses terhadap pasar dan pembiayaan formal, serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, selain mendorong pertumbuhan kuantitatif, perlu adanya upaya intensif untuk mempercepat formalisasi usaha mikro agar lebih berdaya saing dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

2.5.2.11. Penanaman Modal

Penanaman modal dapat menjadi indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar efeknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2020 hingga 2023, persentase pertumbuhan investasi di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan trens positif terhadap dinamika ekonomi daerah. Investasi yang tumbuh menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan investor terhadap potensi daerah, baik dari sisi SDA, infrastruktur, maupun iklim usaha.

Untuk memaksimalkan dampak positif dan investasi, penting untuk memperhatikan arah dan kualitas investasi yang masuk. Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi hilirisasi dan padat karya. Selain itu pemerintah perlu untuk memperkuat kebijakan promosi investasi, tata kelola kelembagaan, perizinan, jaminan kepastian hukum, serta penyediaan infrastruktur. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan arus invenstasi yang masuk sekaligus manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Kabupaten Barito Selatan.



Gambar 2.60 Persentase Pertumbuhan Investasi, 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.5.2.12. Statistik

Data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun nasional. Data ini menjadi bahan dasar dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan wilayah. Selain itu, data statistik juga digunakan untuk menganalisis tren jangka panjang, meramalkan perkembangan masa depan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Peramalan berdasarkan data statistik membantu dalam perencanaan sumber daya dan pengalokasian anggaran yang tepat. Data statistik juga berguna untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Saat ini, data statistik menjadi kebutuhan mendasar bagi publik secara luas. Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga penting bagi pemangku kepentingan, dunia bisnis, akademisi, pengamat, serta masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan BPS. Pelaksanaan tugas-tugas statistik dilakukan

melalui penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis ekonomi makro, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengelolaan database daerah, pengelolaan Portal Satu Data, dan koordinasi dalam pengelolaan data bersama dengan BPS. Capaian kinerja urusan statistik di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan konsistensi dalam penyediaan data dan informasi statistik dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun, diterbitkan masing-masing satu buku "Kabupaten dalam Angka" dan "PDRB", yang menjadi sumber data penting bagi perencanaan pembangunan. Selain itu, ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi terus dijaga, dengan status "Ada" setiap tahun, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Statistik 2020 – 2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Buku "Kabupaten dalam Angka"	Jumlah	1	1	1	1	1
Buku "PDRB"	Jumlah	1	1	1	1	1
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka)	Ketersediaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Barito Selatan, 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2023 – 2026

2.5.2.13. Persandian

Pembangunan infrastruktur persandian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur persandian adalah fondasi utama yang memungkinkan komunikasi aman dan efisien di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ancaman siber, infrastruktur persandian yang kuat diperlukan untuk melindungi data sensitif, baik dalam konteks keamanan, bisnis, maupun privasi manajemen pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang persandian, mengatur sistem persandian, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi persandian.

Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Persandian, 2020-2021

Keterangan	Satuan	2020	2021
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	60%	60%

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2023 – 2026

2.5.2.14. Perpustakaan

Urusan perpustakaan memegang peranan krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi dan penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya literasi, pelestarian khazanah budaya, serta penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan layanan perpustakaan di Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Selama periode 2020–2024, capaian pelayanan perpustakaan sesuai Standar Minimal Nasional stagnan di angka 60 persen. Hal ini mencerminkan terbatasnya ekspansi jangkauan dan peningkatan mutu layanan secara sistemik. Kemudian, jumlah koleksi buku juga tidak mengalami pertumbuhan signifikan sejak 2021 yang menunjukkan perlunya kebijakan revitalisasi konten berbasis kebutuhan masyarakat. Sementara itu, tingkat kunjungan justru mengalami penurunan drastis dari 7.818 orang pada 2020 menjadi hanya 1.983 orang pada 2024, meskipun pada tahun-tahun awal pandemi angka pengunjung justru lebih tinggi—mengindikasikan belum optimalnya adaptasi layanan terhadap perubahan perilaku masyarakat pasca-pandemi.

Di sisi lain, peningkatan tingkat kegemaran membaca dari kategori sedang ke tinggi pada 2023, serta tumbuhnya jumlah buku yang dibaca di tempat, menjadi indikasi potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh. Oleh karena itu, diperlukan transformasi layanan perpustakaan menuju model digital, peningkatan kapasitas SDM, kurasi koleksi yang lebih relevan, serta kolaborasi dengan sekolah dan komunitas lokal sebagai langkah strategis untuk mendorong ekosistem literasi. Capaian kinerja perpustakaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.63 sebagai berikut.

Tabel 2.63 Capaian Kinerja Perpustakaan, 2020–2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	7.818	2.495	3.386	2.725	1.983
2	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	60	60	60	60	60
3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	14	16	16	16	16
4	Jumlah anggota perpustakaan	4.898	4.939	4.981	5.010	5.027
5	Jumlah koleksi buku perpustakaan	31.412	33.718	33.718	33.718	33.718
6	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan	403	335	208	1441	1415
7	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	-	-	54,85 (Sedang)	67,00 (Tinggi)	-
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perpustakaan	77	79	80	81,71	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.2.15. Kearsipan

Dalam konteks transformasi digital dan peningkatan tata kelola pemerintahan, kearsipan merupakan aspek fundamental yang mendukung akuntabilitas, efisiensi pelayanan, serta keberlangsungan informasi pemerintahan. Adapun kinerja urusan kearsipan dalam lima tahun terakhir menujukkan bahwa jumlah SOPD yang menerapkan kearsipan sesuai standar mengalami penurunan signifikan dari 19 perangkat daerah pada 2022 menjadi hanya 5 pada 2024. Penurunan serupa terlihat pada persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 63 persen pada 2022 menjadi hanya 17 persen pada 2024. Kondisi ini bertentangan dengan urgensi kearsipan sebagai instrumen akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, jumlah SDM pengelola arsip meningkat dari 2 orang pada tahun 2020 menjadi 33 orang pada 2024, namun belum sebanding dengan turunnya komitmen kelembagaan dalam pengelolaan arsip. Hal ini tercermin dari capaian Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang masih sangat rendah. Pada tahun 2024, LHPKN

jauh di bawah ambang batas penilaian memadai, dan berada dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk memperkuat tata kelola kearsipan melalui kebijakan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan digitalisasi sistem kearsipan yang terintegrasi lintas perangkat daerah.

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Kearsipan, 2020–2024

No	Indikator Kearsipan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	17	18	19	10	5
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	57	60	63	33	17
3	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	3	3	35	33
4	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN)	42,42	42,42	6,95	20,49	29,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.2.16. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan penggerak utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari perkembangan organisasi, kegiatan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Melihat Tabel 2.65 cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda telah mencapai 100 persen secara konsisten sejak tahun 2020 yang mana menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan olahraga. Namun, jika dilihat dari persentase pelatih bersertifikasi masih sangat rendah atau sebesar 9 persen selama periode 2021–2022. Hal tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan kualitas sumber daya kepelatihan. Di sisi lain, organisasi pemuda yang aktif mengalami penurunan tajam dari 98 persen pada tahun 2020 menjadi 60 persen pada tahun 2021, dan tidak tercatat pada 2022 yang berarti melemahnya partisipasi pemuda dalam kelembagaan kepemudaan.

Dari sisi hasil, prestasi olahraga baru mulai terlihat pada tahun 2022 dengan satu atlet berprestasi dan satu medali diraih, menunjukkan bahwa pembinaan mulai membuahkan hasil, meski masih sangat terbatas. Implikasinya, penguatan kualitas pelatih, revitalisasi

organisasi kepemudaan, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mendorong prestasi dan partisipasi pemuda yang lebih optimal ke depan.

Tabel 2.65 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga, 2021–2022

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	98	60	-
2	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	9	9	9
4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100	100	100
5	Jumlah atlet berprestasi	orang	0	0	1
6	Jumlah prestasi olahraga	medali	0	0	1

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2024

2.5.2.17. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan, tidak hanya untuk melestarikan identitas lokal, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Penguatan nilai kearifan lokal serta optimalisasi aset budaya terus diupayakan agar sektor kebudayaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Capaian pelestarian kebudayaan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kondisi yang stabil, dengan 8 cagar budaya dilestarikan dan dikelola secara terpadu, serta 70 koleksi museum yang terpelihara setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen pelestarian yang konsisten, namun juga menunjukkan minimnya perkembangan jumlah aset budaya yang dijaga, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam pendataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan.

Tabel 2.66 Capaian Kinerja Pelayanan Kebudayaan, 2021–2023

No	Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	8	8	8	8
2	Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara	Buah	70	70	70	70
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	8	8	8	8

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2024

2.5.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.5.3.1. Perikanan

Kabupaten Barito Selatan tidak memiliki batas laut sehingga membedakan perikanan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang menangkap ikan, hewan air lainnya, atau tanaman air untuk dijual sebagian atau seluruhnya. Sedangkan rumah tangga perikanan budidaya adalah rumah tangga yang membudidayakan ikan, hewan air lainnya, atau tanaman air untuk tujuan penjualan sebagian atau seluruh hasilnya. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Barito Selatan tidak banyak berubah pada tahun 2020—2024. Sementara itu, untuk jumlah rumah tangga perikanan budidaya mengalami peningkatan drastis pada tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Sebaliknya, produksi perikanan budidaya mengalami fluktuasi: meningkat dari 2020 hingga 2021, menurun pada 2022, dan kembali meningkat pada 2023-2024. Secara strategis, potensi perikananbaik tangkap maupun budidaya di Barito Selatan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama jika diintgrasikan dengan sektor hilir seperti industri pengolahan hasil perikanan dan sistem pangan berbasis lokal. Pemanfaatan potensi ini memerlukan penguatan dukungan infrastruktur, pelatihan teknis, permodalan, serta perlindungan lingkungan.

Tabel 2.67 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap, 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT Perikanan Tangkap	4.513	4.513	4.513	4.515	4.513
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	6.567	6.697	6.831	6.967,14	7.108,05

Sumber: BPS Barito Selatan, 2025

Tabel 2.68 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT Perikanan Budidaya	3.769	3.769	3.769	3.769	7.393
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	8.766,63	8.943,36	7.545,15	9.300,98	9.488,84

Sumber: BPS Barito Selatan, 2025

2.5.3.2. Pariwisata

Pariwisata adalah sektor yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan pembangunan wilayah, karena berperan sebagai pendorong ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Perkembangan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Keberhasilan pembangunan pariwisata tercermin dari peningkatan jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan pendapatan individu dalam masyarakat dan memperluas peluang kerja di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan.

Aktivitas pariwisata di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama dari sisi kunjungan domestik. Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2021 hingga mencapai 93.305 orang pada tahun 2024 mencerminkan bahwa sektor pariwisata mulai menjadi salah satu daya tarik ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan peningkatan minat masyrakat terhadap destinasi lokal. Namun, rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang hanya 2 orang pada tahun 2024 menggambarkan sektor pariwisata Barito Selatan masih belum dikenal secara luasi di pasar global. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan yang lebih terarah. Hal ini diperlukan untuk mendukung arah kebijakan dalam RPJPD Barito Selatan tahun 2025-2045, dimana Barito Selatan difokuskan pada kebijakan pariwisata berbasis jasa lingkungan. Penting juga untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pariwisata agar sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

Tabel 2.69 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Barito Selatan, 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nusantara	15.561	23.170	51.936	68.128	93.305
Mancanegara	-	-	-	-	2

Sumber: BPS Barito Selatan, 2025

Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir, dari 52 unit pada tahun 2020 menjadi 70 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada subsektor kuliner yang berpotensi mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan daya tarik daerah. Jumlah hotel juga mengalami peningkatan dari 16 unit pada tahun 2020 menjadi 21 unit pada tahun 2023 meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 20 unit. Sementara itu, jumlah potensi objek wisata mengalami peningkatan dari 5 lokasi pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 7 lokasi pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 8 lokasi pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa potensi destinasi wisata daerah terus berkembang meskipun masih terbatas dari sisi jumlah dan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas sarana, promosi, serta daya saing destinasi wisata lokal.

Tabel 2.70 Jumlah Restoran, Hotel, dan Objek Wisata, 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Makan/Restoran	52	56	60	68	70
Jumlah Hotel	16	18	20	21	20
Potensi Objek Wisata	5	5	7	8	8

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka, 2020—2024

2.5.3.3. Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Barito Selatan memiliki sejumlah komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kinerja ketiga sektor tersebut dapat diamati melalui beberapa indikator utama, yaitu luas panen, volume produksi, dan produktivitas. Produktivitas diukur berdasarkan rasio antara volume produksi dan luas lahan tanam. Sebagai komoditas pangan strategis, padi menunjukkan tren produktivitas yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Produktivitas tertinggi tercapai pada tahun 2020, yaitu sebesar 3,55 ton per hektare dengan total produksi mencapai 15.171,14 ton. Pada tahun 2024, data menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi luas panen maupun produktivitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.71 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Barito Selatan, 2020—2024

Tahun	Luas Areal Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi Padi Setara Beras (Ha)	Produktivitas Padi Setara Beras (Ton/Ha)
2020	4.276,05	15.171,14	3,55	8.965,41	2,10
2021	1.758,47	4.763,49	2,71	2.814,98	1,60
2022	2.069,58	4.708,42	2,28	2.796,85	1,35
2023	1.854,20	6.108,75	3,29	3.628,66	1,96
2024	2.000,80	7.101,23	3,55	4.218,22	2,11

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025

Tabel 2.72 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kalimantan Tengah, 2020—2024

Tahun	Luas Areal Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi Padi Setara Beras (Ha)	Produktivitas Padi Setara Beras (Ton/Ha)
2020	143.275,05	457.952,00	3,20	270.627,66	1,89
2021	125.310,54	400.444,04	3,20	236.643,17	1,89
2022	109.756,22	353.864,63	3,22	226.431,15	2,06
2023	101.580,30	330.781,05	3,26	196.487,84	1,93
2024	111.016,13	366.146,82	3,30	217.495,56	1,96

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025

Untuk sektor perkebunan yang menjadi potensi di Kabupaten Barito Selatan adalah kelapa sawit, kelapa kopra, karet, kopi.

Tabel 2.73 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit, 2020—2024

Tahun	Luas Areal Tanaman (Ha)		Produksi Perkebunan (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
2020	4.109,2	1.800.902,4	14.114,4	6.015.360,0	3,43	3,34
2021	4.169,2	1.890.799,6	14.533,5	6.506.724,3	3,49	3,44
2022	4.975,0	1.901.171,7	14.809,3	6.826.786,9	2,98	3,59
2023	4.975,0	1.919.610,2	15.181,6	6.801.819,0	3,05	3,54
2024	4.975,3	1.933.590,0	8.143,8	7.243.480,4	1,64	3,75

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025

Tabel 2.74 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Kopra, 2020—2024

Tahun	Luas Areal Tanaman (Ha)		Produksi Perkebunan (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
2020	517,7	37.458,5	75,4	16.390,5	0,15	0,44
2021	525,7	37.039,7	81,4	16.629,4	0,15	0,45
2022	528,7	37.093,7	91,5	16.613,9	0,17	0,45
2023	528,7	37.050,6	147,0	16.444,2	0,28	0,44
2024	528,7	36.938,8	147,0	16.668,3	0,28	0,45

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025

Tabel 2.75 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Karet, 2020—2024

Tahun	Luas Areal Tanaman (Ha)		Produksi Perkebunan (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
2020	517,7	37.458,5	75,4	16.390,5	0,15	0,44
2021	525,7	37.039,7	81,4	16.629,4	0,15	0,45
2022	528,7	37.093,7	91,5	16.613,9	0,17	0,45
2023	528,7	37.050,6	147,0	16.444,2	0,28	0,44
2024	528,7	36.938,8	147,0	16.668,3	0,28	0,45

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025

Tabel 2.76 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kopi, 2020—2024

Tahun	Luas Areal Tanaman (Ha)		Produksi Perkebunan (Ton)		Produktivitas (Kg/Ha)	
	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
2020	66,5	2490,4	0,2	404,5	3,16	162,41
2021	66,5	2366,8	0,3	369,5	3,76	156,12
2022	66,5	2226,6	0,0	231,0	0,15	103,75
2023	66,5	2065,9	0,1	193,7	1,20	93,76
2024	66,5	2138,7	0,1	233,2	1,20	109,03

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025

Produktivitas panen komoditas perkebunan di Kabupaten Barito Selatan dari empat komoditas perkebunan yaitu, kelapa sawit, kelapa kopra, karet, dan, kopi mengalamimenunjukkan tren yang bervariasi. Produktivitas panen perkebunan Kabupaten Barito Selatan dari empat komoditas perkebunan yaitu, kelapa sawit, kelapa kopra, karet, dan, kopi mengalami tren yang bervariasi. Kelapa sawit dan kopi cenderung mengalami penurunan, kelapa kopra dan karet produktivitas, sedangkan kelapa kopra dan karet menunjukkan peningkatan secara konsisten naik. Salah satu arah kebijakan strategis dalam RPJPD

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sampai 2045 menetapkan wilayah ini sebagai daerah lumbung pangan. Penetapan tersebut menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Komoditas unggulan dari kedua sektor menjadi tumpuan penting dalam mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan produktivitas, penguatan infrastruktur, perluasan akses pembiayaan, serta integrasi rantai nilai dari sisi hulu hingga hilir.

2.5.3.4. Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan salah satu elemen utama dalam pembangunan daerah karena berperan langsung sebagi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi. Hal tersebut terlihat pada tahun 2021 jumlah sarana perdagangan diangka 1.652 akibat dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi dan memaksa para pelaku usaha untuk menghentikan operasional. Terlepas dari hal tersebut, adaptasi cukup kuat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Barito Selatan sehingga pada tahun 2022 jumlah sarana perdagangan ini naik sebanyak 1.672. Meskipun tahun 2023 jumlahnya turun, pada tahun 2024 sarana perdagangan mengalami peningkatan signifikan hingga 2.523 sarana menjadi tanda positif bahwa sektor perdagangan menjadi lebih kuat. Kondisi ini menggambarkan pentingnya dukungan kebijakan konsisten, pemguatan infrastruktur, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut tidak hanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis di masa depan.

Tabel 2.77 Jumlah Sarana Perdagangan, 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar	57	59	63	63	63
Toko	8	621	628	549	549
Kios	1024	436	425	425	1143
Warung	846	536	556	556	768
Jumlah Sarana Perdagangan	1935	1652	1672	1593	2523

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.5.3.5. Perindustrian

Kondisi perindustrian yang ada di Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh industri kecil atau industri dalam level rumah tangga, yang menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun 2020 hingga 2023. Sementara itu , industri besar tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada jumlah industri, tetapi untuk jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan industri di Barito Selatan masih stagnan dan tidak ada yang naik kelas. Fluktuasi tenaga kerja di industri besar dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti permintaan pasar atau efisiensi. Secara keseluruhan, perindustrian di Barito Selatan masih sangat bergantung pada industri kecil dan rumah tangga sebagai penopang utama. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi daerah diperlukan dukungan yang lebh intensif agar industri kecil dapat berkembang dan bertransformasi menuju skala yang lebih besar dan berdaya saing.

Tabel 2.78 Capaian Kinerja Perindustrian, 2020—2024

Kriteria	2020	2021	2022	2023
Industri Kecil/Rumah Tangga	626	650	662	847
Industri Besar	1	1	1	1
Tenaga Kerja Industri Kecil/Rumah Tangga	1.092	1.132	1.933	1.844
Tenaga Kerja Industri Besar	276	295	363	318

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.3.6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan bagian dari strategi pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mendukung pemerataan penduduk dan pengembangan kawasan baru. Melalui pemindahan penduduk secara terencana, transmigrasi tidak hanya mengurangi beban kepadatan di daerah asal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di daerah tujuan. Selama periode tahun 2020–2022, transmigrasi di Kabupaten Barito Selatan tidak memiliki upaya pengembangan kawasan baru, tercermin dari nihilnya satuan permukiman baru dan daya tampung yang tidak bertambah. Jumlah

bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat tercatat tetap, yaitu 2,99 hektar, serta terdapat 9 satuan permukiman yang telah berakhir masa pembinaan, tanpa ada tambahan permukiman baru.

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Transmigrasi, 2020–2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	2,99	2,99	2,99
2	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	0	0	0
3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	9	9	9

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Tidak adanya kawasan transmigrasi aktif dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan terhentinya redistribusi penduduk dan pengembangan kawasan baru di Kabupaten Barito Selatan. Namun, pada tahun 2024 sudah mulai disusun rencana persiapan lahan transmigrasi, hal ini membuka peluang untuk menghidupkan kembali fungsi transmigrasi sebagai instrumen pengembangan wilayah dan pemerataan penduduk. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan lahan, infrastruktur dasar, dan koordinasi lintas sektor guna mendukung keberhasilan pelaksanaan transmigrasi ke depan.

2.5.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.5.4.1. Sekretariat Daerah

Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah memerlukan dukungan koordinasi yang solid dan sistem pengawasan yang menyeluruh. Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam memastikan konsistensi antarprogram, sinergi antarperangkat daerah, serta keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan mencatat peningkatan dalam reformasi birokrasi dengan naiknya indeks dari kategori CC menjadi B (62,00) pada tahun 2024, serta capaian tertinggi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebesar 61,02 dengan predikat B. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut belum mencerminkan performa yang optimal. Lebih

lanjut, evaluasi produk hukum belum berdampak pada peningkatan kualitas substantif kebijakan. Reformasi birokrasi memerlukan penguatan secara lebih terstruktur melalui peningkatan kapasitas teknis penyusunan regulasi, optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta percepatan digitalisasi sistem administrasi dan pengawasan internal.

Tabel 2.80 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laporan kinerja Pemerintah	Kategori	59,04	57,19	56,74	66,15	61,02 (B)
2	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	CC	CC	CC	B	62,00 (B)
3	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah	rancangan perda	9	2	7	5	5
4	Jumlah penyusunan Peraturan Bupati	rancangan pergub	35	55	69	27	38
5	Jumlah penyusunan Keputusan Bupati	rancangan kepgub	415	289	486	403	480
6	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dievaluasi	rancangan produk hukum kab/kota	459	346	562	435	495
7	Jumlah produk hukum yang dilakukan pengawasan secara refresif	rancangan produk hukum kab/kota	459	346	562	435	495
8	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang tertata format dan substansiya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	rancangan produk hukum kab/kota	459	346	562	435	495
9	Jumlah dokumen perkara hukum litigasi yang tertangani	dokumen perkara litigasi	1	-	1	1	-
10	Jumlah dokumen perkara non litigasi yang tertangani	dokumen perkara litigasi	1	1	1	1	-
11	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	-	-	-	81,30	-

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan krusial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis kepada dewan.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan fluktuasi dalam pelaksanaan fungsi legislatif. Selama lima tahun terakhir, jumlah Perda yang dibahas tepat waktu bervariasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 11 perda, dan terendah pada tahun 2021 sebanyak 2 perda. Hal ini mencerminkan dinamika produktivitas legislatif yang belum konsisten.

Sementara itu, jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebanyak 580 aspirasi, dibandingkan 128 aspirasi pada tahun 2020. Ini menunjukan tingginya respon DPRD pada momen tertentu yang perlu diimbangi dengan keberlanjutan tindak lanjut secara periodik dan transparasi. Sementara itu, penerimaan delegasi yang cukup tinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 146 kali juga menggambarkan peningkatan interaksi antarwilayah dan koordinasi eksternal, yang turut memperkuat peran DPRD sebagai jembatan komunikasi pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2.81 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perda yang dibahas tepat waktu	9	2	7	11	8
2	Penerimaan delegasi	72	52	146	-	-
3	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota	12	12	12	-	12
4	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	128	-	580	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.4.3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang ditetapkan melalui regulasi sesuai ketentuan. Sementara itu, capaian indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD menunjukan fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020, penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD mencapai angka 93,07 persen dan 81,39 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan perencanaan yang cukup selaras, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis ke 14,04 persen, yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara dokumen strategis dan dokumen operasional tahunan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan yang signifikan dengan tingkat konsistensi kembali mencapai 100 persen, menunjukkan adanya upaya korektif dalam penyelarasan arah kebijakan pembangunan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Hal ini menjadi catatan untuk memperkuat mekanisme integrasi dan konsistensi perencanaan di masa mendatang. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan monitoring evaluasi dokumen tahunan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan tersebut.

Tabel 2.82 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	-	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	-	-
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	93,07	81,39	14,04	-	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.4.4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian kinerja capaian pengelolaan keuangan daerah dapat diukur berdasarkan beberapa indikator seperti opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan daerah, persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap APBD, dan Persentase

program/kegiatan yang tidak terlaksana. Opini BPK di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPK. Hal tersebut terlihat dari pencapaian opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Kriteria yang ditetapkan oleh BPK sendiri berupa kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Persentase SILPA terhadap APBD dari Tahun 2021–2022 tergolong cukup kecil karena berada di bawah 10 persen.

Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Keuangan, 2021–2022

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	8,53	8,53	-
3	Persentase SILPA terhadap APBD	5,06	8,4	0,0846
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	2,8	3,2	0,1492
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	24	25	0,2651
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	17,41	13,2	0,1286
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	56/44	56/45	54,29/ 39,79
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.5.4.5. Kepegawaian

Pengelolaan kepegawaian merupakan fondasi utama dalam membentuk birokrasi yang efektif dan efisien terhadap dinamika pelayanan publik. Berdasarkan data indikator kepegawaian tahun 2020–2024, terlihat bahwa pengelolaan sumber daya aparatur di Kabupaten Barito Selatan mengalami dinamika yang cukup signifikan. Jumlah penyelesaian administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, penerbitan Karpeg, dan masa kerja PNS menunjukkan fluktuasi yang mencolok, di mana terjadi peningkatan pada tahun 2022 (890 kasus), namun menurun drastis pada tahun 2024 (199 kasus). Hal ini mengindikasikan ketidakkonsistenan dalam proses administrasi kepegawaian yang dapat memengaruhi kinerja organisasi.

Sementara itu, tren peningkatan jumlah PNS yang terdata secara elektronik menunjukkan kemajuan dalam aspek digitalisasi kepegawaian, yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam tata kelola ASN yang modern dan akuntabel. Namun, efektivitas pengawasan dan penegakan disiplin ASN tampak menurun, tercermin dari berkurangnya jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani dan tidak adanya data terbaru pada tahun 2023–2024. Capaian kinerja bidang kepegawaian dijabarkan melalui Tabel 2.84 sebagai berikut.

Tabel 2.84 Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS	647	461	890	614	199
2	Jumlah PNS kabupaten yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar	66	69	106	-	-
3	Jumlah PNS yang terdata secara elektronik	3.503	3.451	3.584	3.737	4.185
4	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	6	1	1	-	-
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	83,33%	-	0,19%	-	-
6	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0%	-	60,4%	-	-

Sumber: BPKSDM Kabupaten Barito Selatan, 2025

Secara umum, capaian pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal konsistensi administrasi, peningkatan kompetensi, maupun pembinaan disiplin ASN. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem manajemen ASN yang lebih terencana, terintegrasi, dan berbasis data guna mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Hal ini kedepannya akan diukur secara kuantitatif melalui Indeks Profesionalitas ASN guna memastikan tercapainya aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

2.5.4.6. Pendidikan dan Pelatihan

Penguatan kapasitas aparatur menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan responsif. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam lima tahun terakhir menujukkan capaian positif. Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023, yaitu mencapai 90 persen. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus *post test* serta terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat dari tahun ke tahun menunjukkan tren optimal dengan pencapaian sebesar 100 persen di tiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa program diklat telah berhasil meningkatkan kompetensi sehingga tercipta ASN yang terampil dan terlatih untuk mendukung efektivitas pelayanan publik. Walaupun menunjukkan capaian yang positif, tantangan utama dalam urusan ini adalah memastikan keberlanjutan mutu pelatihan serta penyesuaian materi agar tetap sejalan dengan kebutuhan strategis pembangunan dan tuntutan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.85 Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1	Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan	-	62	60	90
2	Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	75	75	75	85
3	Persentase peserta diklat teknis yang lulus post test	100	100	100	100
4	Pesertase peserta diklat fungsional yang lulus post test	100	100	100	100
5	Persentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat	100	100	100	100
6	Persentase rata-rata nilai hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan diklat	100	100	100	100

Sumber: BPKSDM Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.5.4.7. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen dalam memastikan kualitas mutu kebijakan. Kajian atau penelitian disusun sebagai landasan berbasis teoritis dan praktis untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan berbasis bukti. Penelitian

dan pengembangan sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga akademis, yang dapat memperkuat partisipasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, hanya pada tahun 2024 kajian penelitian tercapai 100 persen. Artinya, perlu adanya prioritas untuk daerah dalam ketersediaan dan pelaksanaan kajian penelitian untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tersedia dengan baik. Efektivitas proses ini dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 akan diukur melalui Persentase Kebijakan Berbasis Bukti sebagai bagian dari evaluasi sistem perencanaan yang lebih komprehensif.

2.5.4.8. Pengawasan

Pengawasan memiliki peran yang signfikan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berlangsung sesuai dengan peraturan dan ketentuan secara tertib, transparan, dan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, capaian indikator kinerja reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Barito Selatan masih berada pada level yang relatif rendah. Indeks Reformasi Birokrasi baru meningkat dari kategori CC menjadi B pada tahun 2024, sementara Indeks SAKIP mengalami perbaikan lebih awal, mencapai nilai B sejak tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Selain itu, masih terdapat sejumlah catatan kelemahan pengelolaan pemerintahan, seperti keberadaan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sebanyak 3 temuan pada tahun 2024. Disatu sisi, persentase tindak lanjut atas temuan memang menunjukkan tren positif, meningkat dari 71,62 persen pada 2020 menjadi 79,47 persen pada 2024. Namun demikian, keberadaan pelanggaran pegawai menunjukkan bahwa aspek disiplin dan integritas aparatur perlu terus dijaga secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan perlunya akselerasi reformasi birokrasi yang lebih strategis dan menyeluruh.

Angka *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Kabupaten Barito Selatan menunjukan kenaikan dari 70,23 pada tahun 2022 menjadi 83,84 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah mengupayakan pencegahan korupsi dengan lebih baik, tetapi masih perlu adanya upaya optimalisasi agar nilai yang dicapai lebih tinggi.

Tabel 2.86 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	C	B
2	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	CC	CC	CC	B	B
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan	71,62	76,62	74,44	76,41	79,47
4	Persentase Pelanggaran Pegawai	25	5	0	-	0
5	Jumlah Temuan BPK	12	9	3	-	3
6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	-	-	70,23	83,84	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.5.4.9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memegang peranan strategis dalam menciptakan stabilitas sosial-politik yang menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kesbangpol berkontribusi dalam memperkuat demokrasi melalui peningkatan literasi dan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum maupun pengambilan keputusan publik.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari tahun ke tahun di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2022, namun mengalami penurunan yang drastis di tahun 2024 hingga hanya mencapai 22 kegiatan selama setahun. Sementara itu, kegiatan pembinaan politik daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2020-2024.

Rendahnya aktivitas pembinaan turut berdampak pada ketidakstabilan capaian indikator pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya daerah. Hal ini tercermin dari fluktuasi nilai pemahaman yang cukup signifikan, seperti pemahaman wawasan kebangsaan yang menurun menjadi

67,95 persen pada tahun 2023. Meskipun capaian pembinaan politik daerah dan kerja sama dengan aparat keamanan tercatat stabil, disparitas antarindikator menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan masyarakat menjadi krusial dalam membangun stabilitas iklim politik dan sosial daerah.

Tabel 2.87 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	43	47	47	20	22
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	90	90	90	90	100
3	Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	100%	99,12%	100%	100%
4	Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	100%	78,78%	98,99%	67,95%	99,89%
5	Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat	100%	4,59%	98,99%	0%	99,98%

Sumber: LAKIP, 2024

2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat konstitusional yang memastikan setiap warga negara menerima layanan dasar yang layak sebagai bagian dari hak asasi dan keadilan sosial. SPM dimandatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri yang mengatur urusan SPM terkait. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, SPM menjadi instrumen krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, sekaligus menjadi barometer kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan publik yang efektif dan berkeadilan.

Implementasi SPM tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, melainkan juga menjadi sarana untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Penerapan SPM yang konsisten dan progresif berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan,

memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting dalam perencanaan pembangunan untuk mengintegrasikan secara sistematis SPM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah.

Urgensi pelaksanaan SPM menjadi semakin strategis ketika dihadapkan pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, khususnya Tahap I (2025–2029) yang mengusung tema "Transformasi Fondasi Pembangunan". SPM bukan sekadar instrumen administratif, melainkan elemen strategis yang menjadi titik awal keberhasilan *transformasi pondasi pembangunan*. Pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan ketertiban umum menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

SPM merupakan *entry point* dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, agar pondasi transformasi yang dibangun tidak rapuh, melainkan kokoh dan berkelanjutan. Capaian pelaksanaan SPM selama periode 2021–2024 mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan sebagai landasan awal menuju transformasi pembangunan. Berikut ini adalah capaian realisasi berdasarkan enam urusan wajib pelayanan dasar:

Tabel 2.88 Persentase Realisasi Capaian SPM, 2021—2024

PERSENTASE (%) REALISASI CAPAIAN SPM					
KETERANGAN		2021	2022	2023	2024
SPM PENDIDIKAN					
1	Pengelolaan Pendidikan Dasar	85,39	92,98	90,35	94,28
2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	94,68	80,01	72,56	90,53
3	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,5	10,1	84,53	98,46
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal.	79,65	70,42	85,6	97,87
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	85,85	73,32	78,7	88,51
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	78,12	40,05	80,1	98,57
4	Pelayanan kesehatan balita.	41,05	59,77	98,18	62,72
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	39,82	82,44	87,37	96,33
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif.	90	50,4	75,34	97,37

PERSENTASE (%) REALISASI CAPAIAN SPM					
KETERANGAN		2021	2022	2023	2024
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	86,67	50,48	95,54	80,7
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	86,67	52,79	50,97	79,16
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.	86,67	77,56	67,47	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	80	91,67	94,29	95,56
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB).	26,49	91,58	79,21	91,23
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	43,52	38,9	81,56	98,12
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	65,74	58,41	79,73	79,91
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD)	51,55	2,68	17,52	100
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	32,51	100	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	0	100	100	90
SPM TRANTIBUMLINMAS					
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24,85	100	93,33	90
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	80	0	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	100	0	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	86,67	100	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	80	100	93,33	93,33
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial	81,33	93,33	96,92	96,92
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	81,33	92	96,67	96,67
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	0	92	96,92	96,92
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0	92	96,67	96,67
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	84	100	100	100

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Hasil capaian kinerja selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa Barito Selatan belum sepenuhnya berhasil memenuhi standar pelayanan dasar secara menyeluruh atau mencapai 100 persen. Ini menjadi masalah mendasar yang harus diatasi secara sistemik, konkret, dan berorientasi pada hasil. Melalui komitmen yang kuat dan pendekatan yang sistematis, pada tahap pertama RPJPD ini harus menjadi titik balik pemenuhan SPM, sebagai prasyarat utama keberhasilan Transformasi Pondasi Pembangunan.

Selain dari capaian kuantitatif, keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sangat ditentukan oleh seberapa besar hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Berdasarkan rekapitulasi permasalahan yang dilaporkan oleh masing-masing urusan pelayanan dasar selama tahun 2021 hingga 2024, berikut adalah uraian permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut:

Tabel 2.89 Permasalahan Penerapan SPM, 2021—2024

Urusan	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	0	0	0	0
Kesehatan	4	5	0	0
Pekerjaan Umum	0	1	1	0
Perumahan Rakyat	4	4	4	5
Trantibumlinmas	4	0	0	0
Sosial	6	3	1	0

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Data realisasi anggaran menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan anggaran antar urusan dan tahun belum sepenuhnya konsisten. Terdapat perbedaan signifikan meliputi beberapa sektor yang mengalami realisasi sangat rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini berdampak terhadap optimalisasi capaian SPM dalam kurun waktu tersebut. Tabel berikut menyajikan persentase realisasi anggaran untuk masing-masing urusan pelayanan dasar:

Tabel 2.90 Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM, 2021—2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	98,3	0	0	63,11
Kesehatan	82,1	20,86	37,36	28,74
Pekerjaan Umum	98,52	41,96	97,58	96,28
Perumahan Rakyat	0	35,39	100	96,67
Trantibumlinmas	98,77	24,84	77,33	43,06
Sosial	100	0	98,46	93,66

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.7. Gambaran Keuangan Daerah

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang kemudian lebih jauh mengatur tata kelola keuangan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal ini, ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

a) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c) Penerimaan Daerah;
d) Pengeluaran Daerah;
e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kepala Daerah berwenang mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah atas kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengajukan rancangan, menugaskan, menetapkan, dan melaksanakan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. APBD menjadi dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran serta merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, termasuk juga tugas dan fungsi setiap organisasi perangkat daerah. Pengelolaan APBD dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tercermin dari pelaksanaan program yang sejalan dengan perencanaan dan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Secara umum, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran berjalan. Belanja daerah merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Sementara itu, pembiayaan daerah mencakup penerimaan yang akan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

2.7.1. Realisasi APBD

Gambaran umum kinerja APBD Kabupaten Barito Selatan disajikan berdasarkan data realisasi, pagu anggaran, serta data persentase realisasi pada periode tahun anggaran 2020 hingga 2024. Ketiga data tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.91 hingga Tabel 2.93.

Tabel 2.91 Gambaran Kondisi Realisasi APBD, 2020—2024

URAIAN	Realisasi APBD (Miliar Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	56,80	97,74	78,82	59,95	75,98
Pendapatan Transfer	903,14	878,33	1045,25	1144,65	1755,76
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	27,46	23,92	5,22	4,02	0,14
JUMLAH PENDAPATAN	987,40	999,99	1129,29	1208,62	1831,88
BELANJA					
Belanja Operasi	601,71	623,53	689,30	746,27	1020,49

URAIAN	Realisasi APBD (Miliar Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Modal	203,30	180,14	179,38	265,95	533,28
Belanja Tidak Terduga	12,42	22,04	12,90	-0,18	0,42
Belanja Transfer	145,41	144,87	139,68	149,77	212,57
JUMLAH BELANJA	962,84	970,58	1021,26	1161,81	1766,76
SURPLUS/DEFISIT	24,56	29,41	108,03	46,81	65,12
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	93,49	133,93	71,55	117,25	110,42
Pengeluaran Pembiayaan	32,90	91,80	62,30	16,25	12,45
PEMBIAYAAN NETO	60,59	42,13	9,25	101,00	97,97

Sumber: Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Tabel 2.92 Gambaran Kondisi Pagu Anggaran APBD, 2020—2024

URAIAN	Pagu APBD (Miliar Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93,78	95,78	98,06	84,79	90,12
Pendapatan Transfer	969,19	861,62	896,59	1151,32	1750,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.	30,74	28,09	7,35	20,74	10,34
JUMLAH PENDAPATAN	1093,71	985,49	1002,00	1256,85	1850,94
BELANJA					
Belanja Operasi	725,46	700,29	680,00	794,40	1142,25
Belanja Modal	295,63	201,15	179,78	267,17	577,54
Belanja Tidak Terduga	2,00	3,00	26,72	15,90	5,47
Belanja Transfer	155,79	150,05	133,20	163,29	223,75
JUMLAH BELANJA	1178,88	1054,49	1019,70	1240,76	1949,01
SURPLUS/DEFISIT	-85,17	-69,00	-17,70	16,09	-98,07
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	118,06	160,79	80,00	0,00	110,52
Pengeluaran Pembiayaan	32,91	91,80	62,30	16,10	12,45
PEMBIAYAAN NETO	85,15	68,99	17,70	-16,10	98,07

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Tabel 2.93 Gambaran Capaian Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Terhadap Pagu APBD Kabupaten Barito Selatan

URAIAN	Realisasi APBD (Persentase)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60,57	102,05	80,38	70,70	84,31
Pendapatan Transfer	93,19	101,94	116,58	99,42	100,30
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	89,33	85,15	71,02	19,38	1,35
JUMLAH PENDAPATAN	90,28	101,47	112,70	96,16	98,97
BELANJA					
Belanja Operasi	82,94	89,04	101,37	93,94	89,34
Belanja Modal	68,77	89,56	99,78	99,54	92,34

URAIAN	Realisasi APBD (Persentase)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Tidak Terduga	621,00	734,67	48,28	-1,13	7,68
Belanja Transfer	93,34	96,55	104,86	91,72	95,00
JUMLAH BELANJA	81,67	92,04	100,15	93,64	90,65
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	79,19	83,29	89,44	-	99,91
Pengeluaran Pembiayaan	99,97	100,00	100,00	100,93	100,00
PEMBIAYAAN NETO	71,16	61,07	52,26	-627,33	99,90

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024, realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan fluktuasi pada komponen utama. Capaian tersebut dipengaruhi oleh dinamika eksternal, terutama dampak pascapandemi Covid-19. Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan menunjukkan tren yang cukup stabil dengan rata-rata capaian di atas 90 persen. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan mencapai 112,70 persen dari target yang menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pendapatan transfer menjadi komponen tertinggi dan paling stabil dengan capaian di atas 99 persen setiap tahun. Sebaliknya, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan drastis, terutama pada tahun 2023 dan 2024.

Realisasi Belanja Daerah mengalami tekanan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 81,67 persen yang disebabkan oleh pembatasan kegiatan akibat pandemi. Namun, realisasi belanja menunjukkan perbaikan dan kembali mendekati 100 persen sejak tahun 2022. Belanja Operasi dan Belanja Modal menunjukkan konsistensi yang cukup baik, sementara belanja tidak terduga sangat fluktuatif, terutama pada tahun 2020 dan 2021 yang menunjukkan lonjakan akibat penanganan darurat pandemi.

Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Daerah menetapkan pendekatan untuk mengukur kondisi ruang fiskal daerah yang dikenal dengan istilah Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). KFD didefinisikan sebagai kemampuan keuangan suatu daerah yang dihitung dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan

tertentu serta dikurangi dengan pendapatan dengan penggunaan yang telah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan tertentu. Selanjutnya, KFD dihitung dalam bentuk Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD), yaitu hasil pembagian antara nilai KFD dengan belanja pegawai. Kategori ini digunakan untuk menilai tingkat kemampuan fiskal masing-masing daerah dalam membiayai urusan pemerintahan secara mandiri.

Tabel 2.94 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	0,739	0,496	1,377	1,399	2,070
Klasifikasi	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020—2024

RKFD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2021, RKFD berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Namun, RKFD meningkat dan masuk dalam kategori rendah dan sedang mulai tahun 2022 dan 2023 dengan nilai masing-masing 1,377 dan 1,399. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana RKFD mencapai nilai 2,070 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Perkembangan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan urusan pemerintahan. Penguatan kapasitas fiskal menjadi kunci agar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mampu melaksanakan berbagai program prioritas secara optimal dan berkelanjutan.

2.7.1.1. Pendapatan Daerah

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah tersusun atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b) Pendapatan transfer
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Yang mana PAD meliputi: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer sebagaimana di atas terbagi menjadi dua: (a) transfer Pemerintah Pusat; dan (b) transfer

antar-daerah. Terakhir, Lain-lain Pendapatan yang sah dibagi menjadi: (a) hibah; (b) dana darurat; dan/atau (c) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan gambaran ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.95 Gambaran Ringkas Capaian Pendapatan Daerah

Uraian	Jenis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	1093,71	985,49	1002,00	1256,85	1850,94
	Realisasi (Miliar Rp)	987,40	999,99	1129,29	1208,62	1831,88
	Persentase (%)	90,28	101,47	112,70	96,16	98,97
PAD	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	93,78	95,78	98,06	84,79	90,12
	Realisasi (Miliar Rp)	56,80	97,74	78,82	59,95	75,98
	Persentase (%)	60,57	102,05	80,38	70,70	84,31
Pajak Daerah	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	21,86	21,86	30,43	22,43	23,01
	Realisasi (Miliar Rp)	12,97	11,03	13,23	17,09	14,17
	Persentase (%)	59,33	50,46	43,48	76,19	61,58
Retribusi Daerah	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	5,34	7,34	7,13	7,00	7,67
	Realisasi (Miliar Rp)	3,46	3,72	6,30	5,44	4,77
	Persentase (%)	64,79	50,68	88,36	77,71	62,19
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	8,96	8,96	10,21	10,21	13,70
	Realisasi (Miliar Rp)	8,53	10,23	12,46	0,08	4,52
	Persentase (%)	95,20	114,17	122,04	0,78	32,99
Lain-Lain PAD yang Sah	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	57,62	57,62	50,29	45,15	45,74
	Realisasi (Miliar Rp)	31,84	72,76	46,83	37,34	52,52
	Persentase (%)	55,26	126,28	93,12	82,70	114,82
PENDAPATAN TRANSFER	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	969,19	861,62	896,59	1151,32	1750,48
	Realisasi (Miliar Rp)	903,14	878,33	1045,25	1144,65	1755,76
	Persentase (%)	93,19	101,94	116,58	99,42	100,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	935,17	828,40	863,37	1110,50	1709,51
	Realisasi (Miliar Rp)	872,89	846,96	1000,17	1091,45	1695,09
	Persentase (%)	93,34	102,24	115,84	98,28	99,16
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	34,02	33,22	33,22	40,82	40,97
	Realisasi (Miliar Rp)	30,25	31,37	45,08	53,20	60,67
	Persentase (%)	88,92	94,43	135,70	130,33	148,08
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	30,74	28,09	7,35	20,74	10,34
	Realisasi (Miliar Rp)	27,46	23,92	5,22	4,02	0,14
	Persentase (%)	89,33	85,15	71,02	19,38	1,35
Pendapatan Hibah	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	29,00	7,35	7,35	16,44	0,00
	Realisasi (Miliar Rp)	21,40	3,02	3,41	1,21	0,14
	Persentase (%)	73,79	41,09	46,39	7,36	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	1,74	20,74	0,00	4,30	10,34
	Realisasi (Miliar Rp)	6,06	20,90	1,81	2,81	0,00
	Persentase (%)	348,28	100,77	-	65,35	0,00

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Adapun proporsi sumber Pendapatan Daerah dan rata-rata pertumbuhan jenis-jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.96 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Tahun (Persentase)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	100	100	100	100	100
PAD	5,75	9,77	6,98	4,96	4,15
Pajak Daerah	1,31	1,10	1,17	1,41	0,77
Retribusi Daerah	0,35	0,37	0,56	0,45	0,26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,86	1,02	1,10	0,01	0,25
Lain-Lain PAD yang Sah	3,22	7,28	4,15	3,09	2,87
PENDAPATAN TRANSFER	91,47	87,83	92,56	94,71	95,84
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	88,40	84,70	88,57	90,31	92,53
Pendapatan Transfer Antar Daerah	3,06	3,14	3,99	4,40	3,31
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,78	2,39	0,46	0,33	0,01
Pendapatan Hibah	2,17	0,30	0,30	0,10	0,01
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,61	2,09	0,16	0,23	0,00

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Tabel 2.97 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah

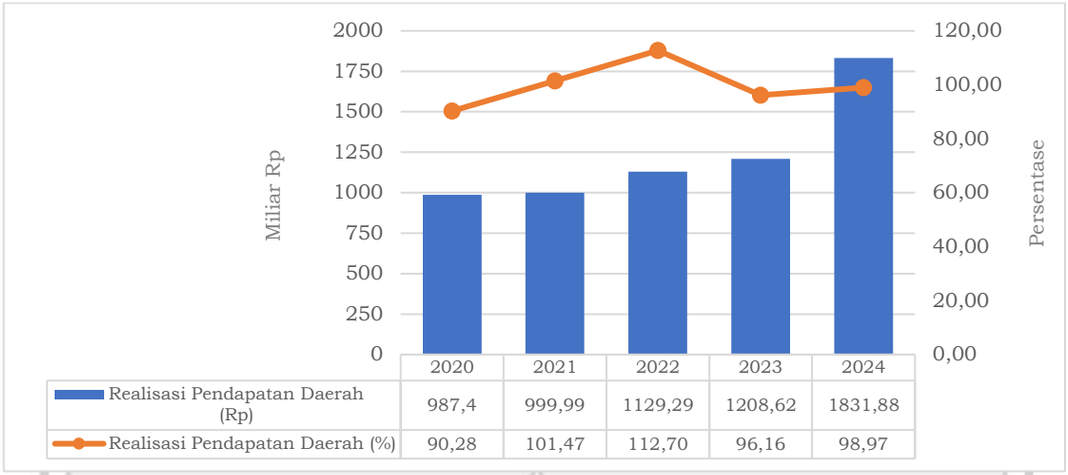
Uraian	Tahun (Miliar Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	987,40	999,99	1129,29	1208,62	1831,88	18,20
PAD	56,80	97,74	78,82	59,95	75,98	13,88
Pajak Daerah	12,97	11,03	13,23	17,09	14,17	4,27
Retribusi Daerah	3,46	3,72	6,30	5,44	4,77	12,73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,53	10,23	12,46	0,08	4,52	1373,09
Lain-Lain PAD yang Sah	31,84	72,76	46,83	37,34	52,52	28,32
PENDAPATAN TRANSFER	903,14	878,33	1045,25	1144,65	1755,76	19,79
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	872,89	846,96	1000,17	1091,45	1695,09	19,89
Pendapatan Transfer Antar Daerah	30,25	31,37	45,08	53,20	60,67	19,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27,46	23,92	5,22	4,02	0,14	-52,64
Pendapatan Hibah	21,40	3,02	3,41	1,21	0,14	-56,48
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,06	20,90	1,81	2,81	0,00	27,20

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dominasi yang sangat tinggi dari pendapatan transfer. Komponen ini secara konsisten menyumbang lebih dari 90 persen terhadap total pendapatan daerah sejak 2022 dengan kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 95,84 persen. Dominasi pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat mencapai 92,53 persen dari total pendapatan pada 2024. Fenomena ini menandakan pentingnya strategi diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan kebijakan pusat.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami tren penurunan kontribusi. Pada tahun 2021, PAD sempat mencapai proporsi tertinggi sebesar 9,77 persen, tetapi turun menjadi hanya 4,15 persen pada 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya kontribusi komponen utama PAD, seperti Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber PAD justru menunjukkan tren penurunan dari 1,31 persen pada 2020 menjadi hanya 0,77 persen pada 2024. Hal serupa terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sempat stabil di atas 1 persen pada 2021 dan 2022, tetapi turun drastis menjadi 0,01 persen di 2023 dan sedikit naik ke 0,25 persen di 2024. Sementara itu, Retribusi Daerah cenderung stagnan pada kisaran di bawah 0,5 persen yang menandakan potensi layanan publik yang belum dimonetisasi secara optimal.

Komponen lain yang juga mengalami penurunan drastis adalah Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusinya menurun tajam dari 2,78 persen pada 2020 menjadi hanya 0,01 persen pada 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan hibah secara konsisten serta tidak adanya realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak 2022. Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tantangan serius dalam hal kemandirian fiskal. Ketergantungan pada transfer pusat yang sangat tinggi, penurunan kontribusi PAD, memperkuat urgensi untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.



	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	987,4	999,99	1129,29	1208,62	1831,88
Realisasi Pendapatan Daerah (%)	90,28	101,47	112,70	96,16	98,97

Gambar 2.61 Realisasi Pendapatan dan Persentase Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Anggaran

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Selain dari sisi struktur, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan juga menunjukkan fluktuasi dalam capaian realisasinya terhadap target. Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi pendapatan daerah secara nominal mengalami tren kenaikan, dari Rp987,4 miliar pada 2020 menjadi Rp1.831,88 miliar pada 2024. Namun, dari sisi persentase terhadap target APBD, capaian tersebut tidak selalu stabil. Realisasi pendapatan bahkan sempat melampaui target pada tahun 2022 dengan capaian 112,70 persen, tetapi kembali menurun pada 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 96,16 persen dan 98,97 persen. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam perencanaan dan pelaksanaan pendapatan baik dari sisi asumsi dasar penyusunan APBD maupun dari faktor teknis pelaksanaan di lapangan.

2.7.1.2. Belanja Daerah

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana membagi belanja daerah menjadi sebagai berikut:

a) Belanja operasi
b) Belanja modal
c) Belanja tidak terduga
d) Belanja transfer

Belanja operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, berisi: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang dan jasa; (c) belanja bunga; (d) belanja subsidi; (e) belanja hibah; dan (f) belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja modal pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Terakhir, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer tersebut selanjutnya dirinci menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Tabel 2.98 memperlihatkan capaian belanja daerah Kabupaten Barito Selatan pada rentang periode anggaran tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.98 Gambaran Ringkas Capaian Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Jenis	Tahun				
		2020	2020	2021	2022	2023
BELANJA	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	1178,88	1054,49	1019,70	1240,76	1949,01
	Realisasi (Miliar Rp)	962,84	970,58	1021,26	1161,81	1766,76
	Persentase (%)	81,67	92,04	100,15	93,64	90,65
Belanja Operasi	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	725,46	700,29	680,00	794,40	1142,25
	Realisasi (Miliar Rp)	601,71	623,53	689,30	746,27	1020,49
	Persentase (%)	82,94	89,04	101,37	93,94	89,34
Belanja Pegawai	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	486,05	457,26	425,86	456,29	499,63
	Realisasi (Miliar Rp)	369,22	397,12	390,86	380,18	467,11
	Persentase (%)	75,96	86,85	91,78	83,32	93,49
Belanja Barang Jasa	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	215,37	195,50	214,16	274,95	525,83
	Realisasi (Miliar Rp)	210,95	183,27	252,91	289,06	447,96
	Persentase (%)	97,95	93,74	118,09	105,13	85,19

Uraian	Jenis	Tahun				
		2020	2020	2021	2022	2023
Belanja Bunga	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00
	Realisasi (Miliar Rp)	0,64	0,69	0,92	0,00	0,00
	Persentase (%)	51,20	55,20	73,60	0,00	0,00
Belanja Subsidi	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	1,29	1,29	0,68	3,18	2,74
	Realisasi (Miliar Rp)	1,29	1,29	0,93	3,05	2,74
	Persentase (%)	100,00	100,00	136,76	95,91	100,00
Belanja Hibah	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	19,00	42,06	35,55	54,98	85,29
	Realisasi (Miliar Rp)	14,57	38,19	40,22	70,84	80,85
	Persentase (%)	76,68	90,80	113,14	128,85	94,79
Belanja Bantuan Sosial	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	2,50	2,93	2,50	5,00	28,76
	Realisasi (Miliar Rp)	5,04	2,97	3,46	3,14	21,83
	Persentase (%)	201,60	101,37	138,40	62,80	75,90
Belanja Modal	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	295,63	201,15	179,78	267,17	577,54
	Realisasi (Miliar Rp)	203,30	180,14	179,38	265,95	533,28
	Persentase (%)	68,77	89,56	99,78	99,54	92,34
Belanja Tidak Terduga	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	2,00	3,00	26,72	15,90	5,47
	Realisasi (Miliar Rp)	12,42	22,04	12,90	-0,18	0,42
	Persentase (%)	621,00	734,67	48,28	-1,13	7,68
Belanja Transfer	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	155,79	150,05	133,20	163,29	223,75
	Realisasi (Miliar Rp)	145,41	144,87	139,68	149,77	212,57
	Persentase (%)	93,34	96,55	104,86	91,72	95,00
Belanja Bagi Hasil	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	2,72	2,92	3,78	4,58	4,79
	Realisasi (Miliar Rp)	1,08	1,13	1,70	0,00	0,00
	Persentase (%)	39,71	38,70	44,97	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	153,07	147,13	129,42	158,71	218,96

Uraian	Jenis	Tahun				
		2020	2020	2021	2022	2023
	Realisasi (Miliar Rp)	144,33	143,74	137,98	149,77	212,57
	Persentase (%)	94,29	97,70	106,61	94,37	97,08

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Tabel 2.99 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Tahun (Miliar Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA	962,84	970,58	1021,26	1161,81	1766,76	17,96
Belanja Operasi	601,71	623,53	689,30	746,27	1020,49	14,80
Belanja Pegawai	369,22	397,12	390,86	380,18	467,11	6,53
Belanja Barang Jasa	210,95	183,27	252,91	289,06	447,96	23,54
Belanja Bunga	0,64	0,69	0,92	0,00	0,00	-14,71
Belanja Subsidi	1,29	1,29	0,93	3,05	2,74	47,47
Belanja Hibah	14,57	38,19	40,22	70,84	80,85	64,42
Belanja Bantuan Sosial	5,04	2,97	3,46	3,14	21,83	140,35
Belanja Modal	203,30	180,14	179,38	265,95	533,28	34,24
Belanja Tidak Terduga	12,42	22,04	12,90	-0,18	0,42	-99,69
Belanja Transfer	145,41	144,87	139,68	149,77	212,57	11,30
Belanja Bagi Hasil	1,08	1,13	1,70	0,00	0,00	-11,23
Belanja Bantuan Keuangan	144,33	143,74	137,98	149,77	212,57	11,51

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Tabel 2.100 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	100	100	100	100	100
Belanja Operasi	62,49	64,24	67,50	64,23	57,76
Belanja Pegawai	38,35	40,92	38,27	32,72	26,44
Belanja Barang Jasa	21,91	18,88	24,76	24,88	25,35
Belanja Bunga	0,07	0,07	0,09	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,13	0,13	0,09	0,26	0,16
Belanja Hibah	1,51	3,93	3,94	6,10	4,58
Belanja Bantuan Sosial	0,52	0,31	0,34	0,27	1,24
Belanja Modal	21,11	18,56	17,56	22,89	30,18
Belanja Tidak Terduga	1,29	2,27	1,26	-0,02	0,02
Belanja Transfer	15,10	14,93	13,68	12,89	12,03
Belanja Bagi Hasil	0,11	0,12	0,17	0,00	0,00

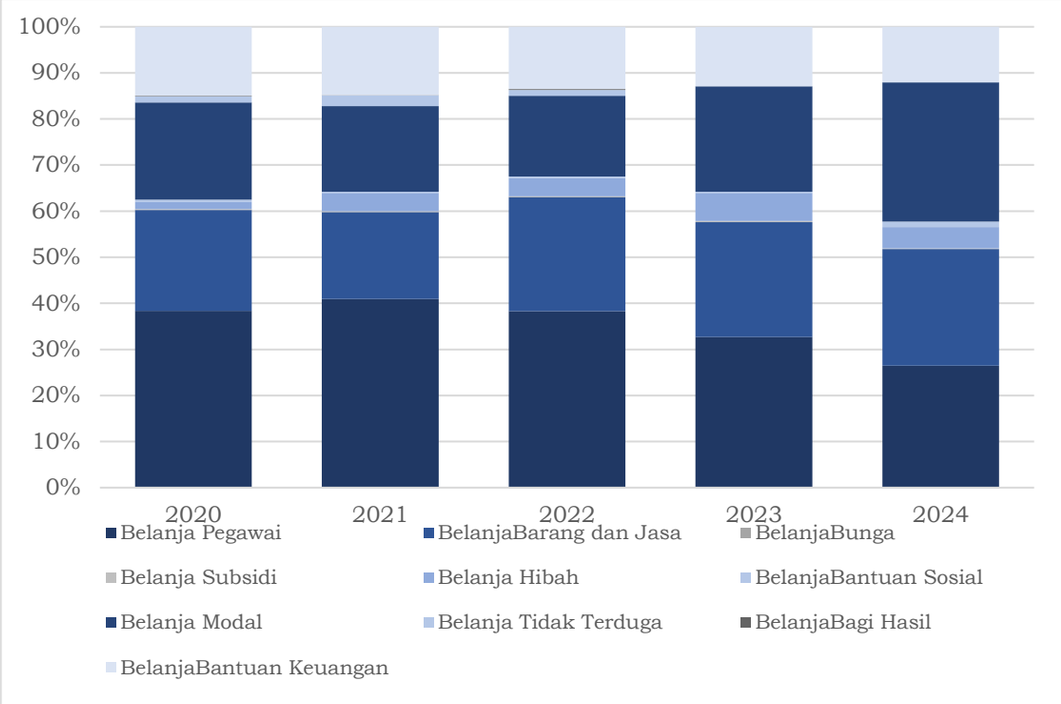
Uraian	Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bantuan Keuangan	14,99	14,81	13,51	12,89	12,03

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Struktur belanja daerah Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran pola alokasi anggaran, khususnya antara belanja operasi dan belanja modal. Secara konsisten, belanja operasi tetap menjadi porsi terbesar dari total belanja daerah meskipun proporsinya mengalami penurunan dari 67,50 persen pada 2022 menjadi 57,76 persen pada 2024. Penurunan terbesar terjadi pada komponen belanja pegawai yang turun dari 40,92 persen pada 2021 menjadi hanya 26,44 persen pada 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai upaya pengendalian belanja rutin agar tidak membebani struktur fiskal daerah.

Di sisi lain, alokasi untuk belanja modal justru mengalami tren peningkatan yang cukup tajam. Pada 2020, belanja modal hanya mencakup 21,11 persen dari total belanja daerah, tetapi meningkat menjadi 30,18 persen pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang modal yang bersifat produktif dan mendukung pelayanan publik jangka panjang.

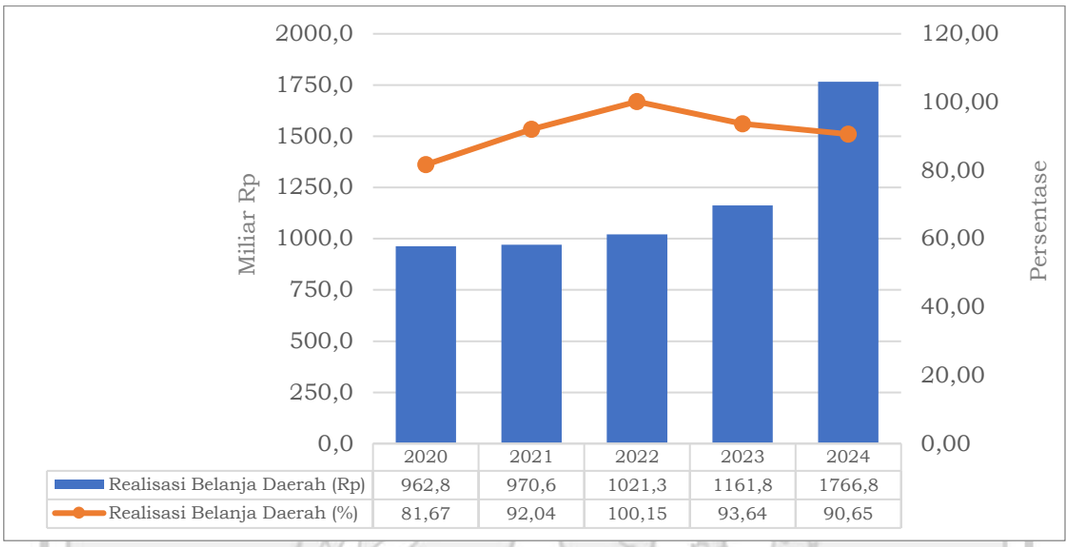
Belanja barang dan jasa secara konsisten berada pada kisaran 18—25 persen yang mencerminkan kebutuhan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, belanja transfer yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan juga menunjukkan tren penurunan dari 15,10 persen pada 2020 menjadi 12,03 persen pada 2024 yang dapat mencerminkan rasionalisasi belanja yang bersifat lintas pihak. Komponen belanja tidak terduga, hibah, dan bantuan sosial tetap berada dalam porsi yang relatif kecil, fluktuatif, dan menunjukkan karakteristik belanja yang bersifat responsif serta situasional. Kenaikan belanja hibah dan bantuan sosial di tahun-tahun tertentu dapat dikaitkan dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat atau peningkatan dukungan sosial.



Gambar 2.62 Proporsi Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Proporsi belanja pegawai yang menurun menunjukkan adanya kecenderungan penguatan efisiensi birokrasi dan pergeseran menuju belanja yang lebih produktif. Di sisi lain, peningkatan belanja modal sejak 2022 hingga 2024 mencerminkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dasar. Belanja barang dan jasa yang cenderung stabil turut mengindikasikan upaya menjaga kualitas layanan publik. Secara keseluruhan, pola ini memperkuat arah kebijakan daerah dalam membangun fondasi transformasi pembangunan yang berkelanjutan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Belanja Daerah (Rp)	962,8	970,6	1021,3	1161,8	1766,8
Realisasi Belanja Daerah (%)	81,67	92,04	100,15	93,64	90,65

Gambar 2.63 Realisasi Belanja dan Persentase Realisasi Belanja Terhadap Rencana Anggaran

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Berdasarkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Selatan, nilai belanja mengalam peningkatan secara nominal dari Rp962,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.766,8 miliar pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian realisasi terhadap anggaran menunjukkan fluktuasi. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 100,15 persen, sedangkan capaian terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 81,67 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

2.7.1.3. Pembiayaan Daerah

Menurut PP Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan Daerah terbagai menjadi dua, yaitu:

a) Penerimaan pembiayaan daerah; dan
b) Pengeluaran pembiayaan daerah

Penerimaan pembiayaan daerah dihimpun berdasarkan: (a) SiLPA; (b) pencairan Dana Cadangan; (c) hasil penjaulan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan Pinjaman Daerah; (e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; (f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

pengeluaran pembiayaan daerah mencakup: (a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; (b) penyertaaan modal daerah; (c) pembentukan Dana Cadangan; (d) pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan gambaran ringkas realisasi dan target pembiayaan daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.101 Gambaran Ringkas Capaian Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Jenis	Tahun (Miliar Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi (Miliar Rp)	85,15	68,99	17,70	-16,10	98,07
	Persentase (%)	60,59	42,13	9,25	101,00	97,97
	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	71,16	61,07	52,26	-627,33	99,90
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Realisasi (Miliar Rp)	118,06	160,79	80,00	0,00	110,52
	Persentase (%)	93,49	133,93	71,55	117,25	110,42
	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	79,19	83,29	89,44	0,00	99,91
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi (Miliar Rp)	79,96	110,79	80,00	0,00	110,52
	Persentase (%)	48,59	83,93	71,55	117,25	110,42
	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	60,77	75,76	89,44	0,00	99,91
Penerimaan Pinjaman Daerah	Realisasi (Miliar Rp)	38,10	50,00	0,00	0,00	0,00
	Persentase (%)	44,90	50,00	0,00	0,00	0,00
	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	117,85	100,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi (Miliar Rp)	32,91	91,80	62,30	16,10	12,45
	Persentase (%)	32,90	91,80	62,30	16,25	12,45
	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	99,97	100,00	100,00	100,93	100,00
Penyertaan Modal	Realisasi (Miliar Rp)	7,96	8,50	12,30	16,10	12,30
	Persentase (%)	7,95	8,50	12,30	16,25	12,30
	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	99,87	100,00	100,00	100,93	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Realisasi (Miliar Rp)	24,95	83,30	50,00	0,00	0,15
	Persentase (%)	24,95	83,30	50,00	0,00	0,15
	Realisasi (Miliar Rp)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Tabel 2.102 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Tahun (Miliar Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PEMBIAYAAN DAERAH	60,59	42,13	9,25	101	97,97	220,10
Penerimaan Pembiayaan Daerah	93,49	133,93	71,55	117,25	110,42	13,68
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48,59	83,93	71,55	117,25	110,42	29,01
Penerimaan Pinjaman Daerah	44,9	50	0	0	0	-17,73
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32,9	91,8	62,3	16,25	12,45	18,24
Penyertaan Modal Daerah	7,95	8,5	12,3	16,25	12,3	14,86
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	24,95	83,3	50	0	0,15	18,78

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Tabel 2.103 Proporsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN DAERAH	100	100	100	100	100
Penerimaan Pembiayaan Daerah	154,30	317,90	773,51	116,09	112,71
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80,19	199,22	773,51	116,09	112,71
Penerimaan Pinjaman Daerah	74,10	118,68	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	54,30	217,90	673,51	16,09	12,71
Penyertaan Modal Daerah	13,12	20,18	132,97	16,09	12,55
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41,18	197,72	540,54	0,00	0,15

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Pembiayaan daerah Kabupaten Barito Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang dinamis, khususnya dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 773,51 persen dari target yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sejak tahun tersebut, SiLPA secara konsisten menjadi satu-satunya komponen penerimaan pembiayaan. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi antar tahun. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 673,51 persen yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran pokok utang.

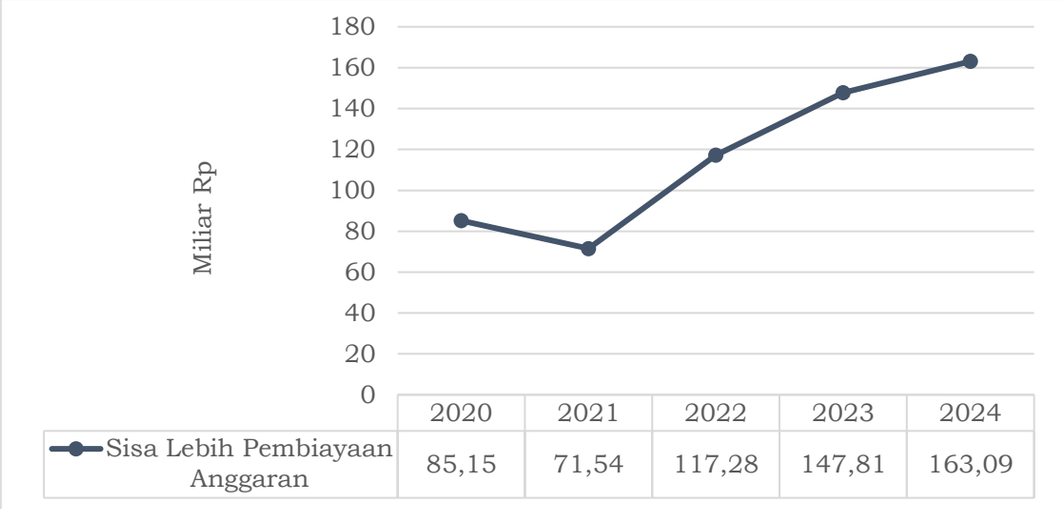
Secara umum, struktur pembiayaan daerah mencerminkan peran strategis SiLPA dan pengelolaan pinjaman dalam menjaga kesinambungan fiskal. Kinerja anggaran tahun sebelumnya terbukti memengaruhi kapasitas pembiayaan pada tahun berjalan, terutama dalam memastikan kecukupan dana tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.

Tabel 2.104 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Waktu Berjalan Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Tahun (Miliar Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	987,40	999,99	1129,29	1208,62	1831,88
Belanja Daerah	962,84	970,58	1021,26	1161,81	1766,76
Surplus/Defisit Realisasi	24,56	29,41	108,03	46,81	65,12
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	60,59	42,13	9,25	101	97,97
SiLPA TA Sebelumnya	48,59	83,93	71,55	117,25	110,42
Penerimaan Pinjaman Daerah	44,9	50	0	0	0
Penyertaan Modal	7,95	8,5	12,3	16,25	12,3
Pembayaran Pokok Utang	24,95	83,3	50	0	0,15
SILPA	85,15	71,54	117,28	147,81	163,09

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan belanja daerah yang menghasilkan posisi surplus anggaran setiap tahunnya. Surplus tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp108,03 miliar. Meskipun surplus tercapai, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tetap mengoptimalkan penerimaan pembiayaan, utamanya melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sejak tahun 2022, porsi terbesar penerimaan pembiayaan sepenuhnya bersumber dari SiLPA tanpa tambahan dari pinjaman daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan masih mencakup penyertaan modal dan pembayaran pokok utang yang nilainya cenderung menurun. Akumulasi pengelolaan fiskal yang bijak dan hati-hati tersebut tercermin dari tren SiLPA yang terus meningkat dari Rp85,15 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp163,09 miliar pada tahun 2024.



Gambar 2.64 Pergerakan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Waktu Berjalan Kabupaten Barito Selatan

Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025

Tren surplus anggaran yang berlanjut dari tahun 2020 hingga 2024 disertai peningkatan SiLPA mengindikasikan pola pelaksanaan anggaran yang cenderung berhati-hati. Meskipun menunjukkan efisiensi, hal ini juga mencerminkan tantangan dalam penyerapan anggaran secara optimal. Realisasi pembiayaan yang relatif tinggi dibanding kebutuhan riil anggaran turut memperbesar akumulasi SiLPA. Keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas belanja perlu ditingkatkan agar potensi fiskal dapat dimanfaatkan lebih maksimal bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

2.7.1.4. Neraca Daerah

PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan menjabarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan menetapkan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Aturan tersebut kemudian diterjemahkan dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Maka, pemerintah daerah dalam hal ini wajib menyertakan neraca daerahnya. Akan tetapi, Selain untuk

memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya neraca daerah juga penting sebab neraca daerah mampu berperan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Berikut merupakan neraca daerah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2020–2024.

Tabel 2.105 Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan

URAIAN	Tahun (Miliar Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
Aset Lancar	127,27	114,19	144,49	125,88	218,73
Investasi Jangka Panjang	73,18	116,48	128,09	142,38	151,64
Aset Tetap	1651,08	1759,79	1779,60	1890,76	2252,11
Aset Lainnya	41,67	61,51	72,73	452,93	163,81
JUMLAH ASET	1893,20	2051,97	2124,90	2611,94	2786,28
KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	21,76	61,57	3,68	4,39	9,64
Kewajiban Jangka Panjang	44,90	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	66,66	61,57	3,68	4,39	9,64
EKUITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekuitas	1690,33	1990,40	2128,58	2611,94	2786,28
JUMLAH EKUITAS	1690,33	1990,40	2128,58	2611,94	2786,28

Sumber : Barito Setalan, 2025

Tabel 2.106 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
Aset Lancar (Juta Rp)	127.268,3	114.190,0	144.487,4	125.877,9	218.730,2
Persediaan (Juta Rp)	6.283,78	9.616,07	11.214,61	9.836,78	46.384,55
Kewajiban Jangka Pendek (Juta Rp)	21.759,69	61.573,99	3.677,19	4.393,31	9.637,49
Rasio Lancar	5,85	1,85	39,29	28,65	22,70
Rasio Cepat	5,56	1,70	36,24	26,41	17,88
Rasio Solvabilitas					
Aset (Juta Rp)	1.893.202,5	2.051.969,9	2.124.899,1	2.611.937,6	2.786.279,35
Kewajiban (Juta Rp)	66.660,69	61.573,99	3.677,19	4.393,31	9.637,49
Ekuitas (Juta Rp)	1.690.333,7	1.990.395,9	2.121.221,9	2.616.330,8	2.776.641,8
DAR	3,52	3,00	0,17	0,17	0,35
DER	3,94	3,09	0,17	0,17	0,35

Sumber : Barito Selatan, 2025

Selama periode 2020–2024, kinerja neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan penguatan struktur keuangan yang ditandai oleh pertumbuhan aset dan penurunan kewajiban. Berdasarkan perhitungan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR), rata-rata pertumbuhan aset daerah tercatat sebesar 10,05 persen per tahun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya investasi jangka panjang serta adanya pencatatan dana transfer nontunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang mulai diimplementasikan berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023.

Indikator rasio likuiditas yang diukur melalui rasio lancar dan rasio cepat menunjukkan posisi keuangan yang likuid, khususnya sejak tahun 2022. Nilai rasio lancar dan cepat yang di atas angka 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami tekanan likuiditas. Sementara itu, rasio solvabilitas yang terdiri dari *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) juga menunjukkan tren positif. Setelah tahun 2021, kedua rasio ini turun hingga berada di bawah 1 yang mengindikasikan bahwa proporsi utang terhadap aset maupun ekuitas sangat kecil. Hal ini dapat diartikan bahwa struktur pendanaan pemerintah daerah lebih banyak bertumpu pada ekuitas dan tidak bergantung pada pembiayaan utang.

2.7.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proyeksi keuangan daerah menjadi aspek krusial untuk memastikan ketercapaian target pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi keuangan perlu dilakukan secara cermat, disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan, mempertimbangkan dinamika, dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Salah satu faktor perubahan yang signifikan adalah implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membawa implikasi terhadap struktur fiskal daerah.

2.7.2.1. UU Nomor 1 Tahun 2022

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) merupakan UU yang mengatur lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak diundangkan pada tahun 2022, Perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak UU disahkan (2025), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetap berlaku sampai dengan 3 tahun (2026). Berlakunya UU ini menggambarkan perubahan yang akan terjadi dalam penerimaan dan belanja daerah Kabupaten Barito Selatan. Ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi: (a) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; (b) pengelolaan TKD; (c) pengelolaan Belanja Daerah; (d) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan (e) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Pada aspek penerimaan daerah terdapat perubahan jenis, dasar pengenaan, dan besaran pajak menjadi:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
d) Pajak Reklame;
e) Pajak Air Tanah (PAT);
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
g) Pajak Sarang Burung Walet;
h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Yang mana PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a) Makanan dan/atau minuman;
b) Tenaga listrik;
c) Jasa perhotelan;
d) Jasa parkir; dan
e) Jasa kesenian dan hiburan

Pada retribusi walaupun tetap akan terdiri atas tiga jenis dengan klasifikasi serupa dengan UU Nomor 28 tahun 2009, komponen dari masing-masing jenis retribusi akan diubah sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum
    a. Pelayanan kesehatan
    b. Pelayanan kebersihan
    c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
    d. Pelayanan pasar
    e. Pengendalian lalu lintas
b) Retribusi Jasa Usaha
    a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
    e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
    g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
    h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
    i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
    j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pelayanan Pemberian izin
   a. Persetujuan bangunan gedung;
   b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
   c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Besaran dari masing-masing jenis retribusi tersebut disesuaikan lebih lanjut dalam peraturan tingkat daerah. Selain berdasarkan penerimaan daerah, aspek pengelolaan TKD atau pendapatan transfer juga memiliki perubahan. UU Nomor 1 Tahun 2022 melakukan beberapa perubahan terkait persentase DBH yang diterima oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak hanya DBH, pertimbangan penetapan DAU juga berubah dengan mempertimbangkan lebih banyak aspek seperti: (a) kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; (b) kemampuan Keuangan Negara; (c) pagu TKD secara keseluruhan; dan (d) target pembangunan nasional. Perubahan substansial ini disinyalir mempengaruhi nominal DAU yang akan diterima oleh Kabupaten Barito Selatan. Dapat dilihat bahwa aturan batas minimum 26% dari APBN yang wajib dialokasikan untuk DAU pada UU Nomor 3 tahun 2004 juga tidak diwajibkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, perubahan perhitungan KFD menjadi merujuk pada PMK Nomor 84 tahun 2023 ditambah dasar penetapannya sudah tidak mempertimbangkan alokasi dasar tentu memengaruhi besaran DAU saat peraturan tersebut mulai diterapkan. Terakhir, dasar kebijakan DAK juga berubah yang lebih memperhatikan kemampuan APBN.

Pada sisi belanja daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga memandatkan perubahan substansial pada postur belanja daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan program pembangunan daerah ditekankan untuk berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan serta sinkron dan harmonis dengan program pemerintah pusat. Lebih lanjut, struktur belanja daerah mewajibkan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja daerah dan harus disesuaikan paling lama 5 tahun sejak UU ini diundangkan,

atau 2027. Selain itu, alokasi untuk belanja infrastruktur pelayanan publik diatur dalam Pasal 147 Ayat (1) dengan persentase paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja transfer.

Terakhir, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur terkait optimalisasi SiLPA untuk belanja daerah. Ketika SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi maka dapat digunakan untuk membentuk Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi. Namun, ketika SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Penilaian kinerja layanan ini menggunakan hasil penilaian kinerja untuk penghitungan DAU.

2.7.2.2. Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029

Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan sejumlah aspek strategis. Aspek tersebut mencakup hasil analisis kinerja keuangan pada periode sebelumnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Proyeksi ini juga memperhitungkan kondisi aktual serta arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang.

Tema pembangunan jangka panjang periode pertama RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 adalah Transformasi Fondasi Pembangunan. Dalam konteks ini, fokus pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga prinsip pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif. Tema ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai prasyarat utama untuk mendukung agenda pembangunan.

Tabel 2.107 Gambaran Ringkas Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan

URAIAN	Proyeksi APBD (Miliar Rp)				
	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150,6	200,0	227,6	252,6	287,5
Pajak Daerah	52,8	84,5	98,4	110,6	126,1
Retribusi Daerah	8,5	11,8	15,5	16,9	18,6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,0	16,5	18,2	20,0	22,0
Lain-lain PAD yang Sah	74,3	87,2	95,5	105,1	120,8
PENDAPATAN TRANSFER	1.719,2	1.903,1	2.028,8	2.167,2	2.319,4
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.674,7	1.854,2	1.975,1	2.108,0	2.254,3
Dana Perimbangan	1.605,6	1.778,1	1.891,4	2.016,0	2.153,0
Dana Transfer Umum - DBH	799,9	879,9	967,8	1.064,6	1.171,1
Dana Transfer Umum - DAU	659,4	737,3	746,5	756,6	767,8
Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	18,0	19,8	21,8	24,0	26,4
Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	128,3	141,1	155,2	170,7	187,8
Insentif Fiskal	-	-	-	-	-
Dana Desa	69,2	76,1	83,7	92,1	101,3
Pendapatan Transfer Antar Daerah	44,4	48,9	53,8	59,1	65,1
Pendapatan Bagi Hasil	44,4	48,9	53,8	59,1	65,1
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12,6	13,8	15,2	16,7	18,4
Pendapatan Hibah	3,1	3,4	3,7	4,1	4,5
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	9,5	10,5	11,5	12,7	13,9
JUMLAH PENDAPATAN	1.882,3	2.116,9	2.271,7	2.436,5	2.625,3
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.148,3	1.091,3	1.108,3	1.122,4	1.224,3
Belanja Pegawai	642,0	642,0	642,0	642,0	642,0
Belanja Barang dan Jasa	465,2	408,2	425,2	425,2	526,1
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Belanja Hibah	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Belanja Bantuan Sosial	12,1	12,1	12,1	26,2	27,2
BELANJA MODAL	656,3	913,2	1.004,5	1.012,2	1.076,4
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139,7	160,6	176,7	176,7	183,8
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198,8	278,4	306,2	313,9	329,6
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310,4	465,6	512,2	512,2	553,1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,8	1,0	1,1	1,1	1,1
Belanja Modal Aset Lainnya	6,6	7,6	8,4	8,4	8,8
BELANJA TIDAK TERDUGA	15,0	14,9	15,0	15,0	15,0
Belanja Tidak Terduga	15,0	14,9	15,0	15,0	15,0
BELANJA TRANSFER	212,6	247,4	266,5	287,0	309,6
Belanja Bagi Hasil	6,1	9,6	11,4	12,8	14,5
Belanja Bantuan Keuangan	206,5	237,8	255,1	274,2	295,2
JUMLAH BELANJA	2.032,3	2.266,9	2.394,4	2.436,5	2.625,3
SURPLUS/DEFISIT	(150)	(150)	(122,7)	-	-
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150	150	122,7	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150	150	122,7	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	

URAIAN	Proyeksi APBD (Miliar Rp)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	
Pembiayaan Netto	150	150	122,7	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	- 0,00	- 0,00	- 0,00	-	-

Sumber : BPAKD Barito Selatan, 2024

Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah diperkirakan meningkat dari Rp1.882,3 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp2.625,3 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan pendapatan transfer yang mencapai Rp2.319,4 miliar pada akhir periode. PAD juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari Rp150,6 miliar menjadi Rp287,5 miliar. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal. Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami peningkatan dari Rp12,6 miliar menjadi Rp18,4 miliar.

Dari sisi belanja, APBD Kabupaten Barito Selatan meningkat dari Rp2.032,3 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp2.625,3 miliar pada tahun 2030. Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan dasar dan operasional pemerintahan. Belanja modal juga tumbuh dari Rp656,3 miliar menjadi Rp1.076,4 miliar yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang produktif.

Untuk mencapai target proyeksi APBD, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan serangkaian langkah strategis dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah pembentukan Tim Satuan Tugas Optimalisasi PAD. Tugas utama tim ini adalah melakukan identifikasi, verifikasi, dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergarap secara optimal. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengembangkan dan memperluas akses layanan pembayaran pajak dan retribusi melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sistem pembayaran daring. Inovasi ini

dirancang untuk menghilangkan hambatan waktu dan lokasi sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa terikat pada jam operasional kantor pelayanan.

2.8. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan komponen fundamental dalam penyusunan dokumen RPJMD karena menjadi landasan utama dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah. Analisis permasalahan diperoleh melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan periode 2020–2024 dengan mengkaji kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita/kondisi eksisting. Hal ini dirangkum dari capaian berbagai indikator, hambatan pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program secara historis. Sementara itu, isu strategis merupakan hasil sintesa dari potensi dan permasalahan yang menjadi perhatian utama pembangunan karena potensi dampak dan sifatnya yang mendesak.

2.8.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Analisis permasalahan dibagi dalam beberapa fokus berdasarkan agenda pembangunan dan disusun secara berjenjang, mulai dari akar masalah, pokok masalah, hingga permasalahan daerah. Pola ini bertujuan untuk membangun logika kausalitas sehingga dapat mengidentifikasi hubungan makro-mikro antara faktor struktural penyebab masalah dengan dampaknya terhadap realita/kondisi eksisting pembangunan.

2.8.1.1. Transformasi Sosial

Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Rata-rata nilai UHH di Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah karena masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya akses dan kualitas sarana prasarana yang belum mumpuni.

Urusan: Kesehatan
Topik : Usia Harapan Hidup
Masalah 1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan 2. Rendahnya jangkauan pelayanan oleh tenaga kesehatan
Akar Masalah 1. Belum tercukupinya jumlah fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk di seluruh kecamatan 2. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 3. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan baik dalam komposisi jumlah maupun jenis tenaga kesehatan 4. Belum optimalnya pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi 5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat

Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan

Tingginya risiko kematian ibu menjadi salah satu faktor yang turut menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Kabupaten Barito Selatan masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tingginya angka pernikahan usia dini yang meningkatkan jumlah kehamilan pada usia di bawah 20 tahun. Kelompok usia ini rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang turut memperburuk akses layanan maternal. Hal ini berdampak pada menurunnya cakupan pelayanan yang tercermin dari penurunan tren cakupan kunjungan ibu dan pemberian tablet tambah darah. Beberapa pokok permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu diuraikan sebagai berikut.

Urusan: Kesehatan
Topik : Angka Kematian Ibu
Masalah Rendahnya kualitas layanan kesehatan ibu
Akar Masalah 1. Keterbatasan jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, khususnya tenaga spesialis kebidanan dan bidan

2. Minimnya fasilitas pelayanan kesehatan maternal, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit 3. Jumlah kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan 4. Ketidaktercapaian pemberian tablet tambahan darah bagi ibu hamil 5. Tingginya kasus pernikahan dini 6. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko kehamilan usia dini

Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita

Permasalahan stunting masih menjadi catatan bagi Kabupaten Barito Selatan. Kasus stunting menunjukkan tren yang cenderung meningkat, seperti pada Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Dusun Utara. Lonjakan kasus dalam empat tahun terakhir mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan belum berjalan optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemberian asupan gizi dalam kehamilan dan kesadaran untuk periksa rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, peran dan fungsi Posyandu sebagai layanan kesehatan dasar belum optimal baik dari segi kapasitas kader, ketersediaan alat ukur maupun integrasi layanannya dengan fasilitas kesehatan. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah terkait tingginya prevalensi stunting dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Kesehatan
Topik : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Masalah Rendahnya layanan dasar kesehatan anak usia dini
Akar Masalah 1. Menurunnya pemberian ASI pada penduduk umur 0–23 tahun 2. Praktik pemberian makan yang tidak sesuai, seperti pemberian makanan pendamping ASI yang tidak cukup atau terlalu dini 3. Pemberian imunisasi lengkap belum dapat mencakup seluruh bayi 4. Kesadaran masyarakat untuk membawa balita ke posyandu sangat rendah terutama bayi yang telah melewati umur 1 tahun dan telah mendapatkan imunisasi lengkap 5. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi dan kesehatan anak 6. Kurangnya asupan gizi yang cukup dan seimbang 7. Minimnya peran dan fungsi Posyandu

Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan efektivitas yang konsisten yang ditandai dengan fluktuasi kasus dan lemahnya intervensi berbasis data. Lonjakan kasus DBD dan peningkatan penderita hipertensi mencerminkan lemahnya sistem deteksi dini dan promosi kesehatan. Penemuan dan keberhasilan pengobatan TBC juga menunjukkan tren penurunan yang menandakan belum optimalnya upaya penanganan secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan kasus AIDS dari tahun ke tahun mengindikasikan minimnya edukasi dan layanan kesehatan preventif. Adapun permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Kesehatan
Topik : 1. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) 2. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) 3. Angka kesakitan DBD 4. Jumlah penderita penyakit menular (Malaria) 5. Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi) 6. Jumlah kasus baru AIDS
Masalah Lemahnya intervensi yang sistematis dalam upaya promotif, preventif, dan kuratif dalam upaya pengendalian penyakit
Akar Masalah 1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait gejala penyakit dan urgensi pengobatan sedini mungkin 2. Kualitas diagnosis dan pengobatan di beberapa fasilitas kesehatan belum optimal 3. Kurangnya pelatihan tenaga medis, ketersediaan alat diagnostik, dan prosedur yang tidak sesuai standar 4. Rendahnya intensitas kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelayanan dari fasilitas kesehatan dasar

Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Angka persentase penerima jaminan kesehatan di Kabupaten Barito Selatan masih rendah dan mengalami tren penurunan, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal ini

mencerminkan lemahnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja rentan di daerah. Penurunan ini tidak diimbangi oleh peningkatan signifikan pada skema alternatif seperti PBI Non-BPJS Kesehatan. Di sisi lain, jaminan kesehatan melalui asuransi swasta dan perusahaan/kantor juga mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses atau perlindungan kesehatan yang memadai. Adapun pokok masalah dan akar masalah terkait dengan permasalahan ini dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Kesehatan dan Tenaga Kerja
Topik : Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
Masalah Keikutserraan masyarakat dalam program jaminan kesehatan masih rendah
Akar Masalah 1. Keterbatasan dan tidak meratanya akses informasi dan edukasi mengenai jaminan kesehatan 2. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan kesehatan masih kurang optimal, terutama bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat miskin 3. Rendahnya kesadaran perusahaan/kantor dalam menyediakan jaminan kesehatan

Rendahnya Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan pilar penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat masih tergolong dalam klasifikasi sedang. Rendahnya literasi dan numerasi dapat membatasi kapasitas masyarakat dalam memahami informasi, mengambil keputusan yang rasional, serta berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan. Salah satu penyebab kondisi ini adalah penurunan minat membaca masyarakat di perpustakaan karena rendahnya kondisi fasilitas perpustakaan. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah terkait dengan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pendidikan dan Perpustakaan
Topik : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Masalah Rendahnya kualitas dan keterjangkauan layanan perpustakaan
Akar Masalah 1. Perpustakaan yang tidak memperbarui secara berkala koleksi buku yang tersedia 2. Minimnya minat masyarakat dalam keikutsertaan anggota perpustakaan 3. Rendahnya kualitas dan fungsionalitas fisik perpustakaan 4. Belum meratanya cakupan layanan perpustakaan (sesuai SPM) 5. Kurangnya dukungan terhadap program literasi dan numerasi. 6. Belum optimalnya adaptasi layanan terhadap perubahan perilaku masyarakat pasca-pandemi 7. Penurunan minat pelajar dalam membaca dan menghitung

Belum Tercapainya Wajib Belajar 13 Tahun

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Selatan masih belum memenuhi wajib belajar 13 tahun. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pondasi pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam mempersiapkan generasi yang adaptif dan kompetitif. Permasalahan mendasar dari isu pendidikan adalah sulitnya akses ke fasilitas pendidikan serta kurangnya jumlah dan belum terpenuhinya kualifikasi guru untuk meningkatkan fasilitas pengajaran. Permasalahan ini berdampak pada ketidaktercapaian jenjang pendidikan yang optimal dan melemahkan fungsi sekolah. Kasus putus sekolah karena keterbatasan ekonomi juga masih menjadi hambatan keberlanjutan jenjang pendidikan masyarakat. Adapun rincian masalah dan akar masalah terkait dengan ketercapaian penyelesaian jenjang pendidikan dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pendidikan
Topik : 1. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 2. Harapan Lama Sekolah
Masalah 1. Keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan dasar dan menengah 2. Kurangnya kualitas pengajaran 3. Minimnya bantuan pendidikan/beasiswa

Akar Masalah
1. Di beberapa kecamatan, akses ke sekolah dasar dan menengah masih sulit untuk dijangkau karena faktor geografis
2. Belum tercukupinya jumlah guru terhadap murid (sesuai SPM)
3. Kurangnya keikutsertaan guru dalam proses sertifikasi
4. Banyaknya guru yang merangkap lebih dari satu mata pelajaran
4. Tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena keterbatasan ekonomi keluarga
5. Rendahnya partisipasi pelajar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/Sederajat dan Pendidikan Tinggi
6. Belum optimalnya pemanfaatan dan persebaran program bantuan pendidikan/beasiswa
7. Belum meratanya akses pendidikan untuk disabilitas

Rendahnya Kontribusi Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi

Lulusan perguruan tinggi diharapkan membawa keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi dalam produktivitas tenaga kerja. Namun, jumlah lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Barito Selatan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Permasalahan tersebut mencerminkan belum optimalnya peran pendidikan tinggi dalam mendukung produktivitas dan daya saing daerah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pendidikan dan Tenaga Kerja
Topik : Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan
Masalah
Rendahnya proporsi tenaga kerja yang berasal dari pendidikan tinggi
Akar Masalah
1. Keterbatasan skema *link and match* satuan pendidikan dengan lapangan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja
3. Minimnya dukungan beasiswa berkelanjutan dan bantuan pendidikan tinggi
4. Keterbatasan jumlah perguruan tinggi atau program studi yang relevan dengan kebutuhan lokal
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi

Tingginya Proporsi Angkatan Kerja Pada Sektor Informal

Ketidaksesuaian antara *output* pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menyebabkan lulusan dari jenjang pendidikan dasar dan menengah kesulitan untuk mengakses pekerjaan yang layak. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah tenaga kerja yang berada pada sektor informal. Sektor ini bersifat tidak stabil, tidak terlindungi, dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Kondisi ini memperlemah peluang masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat *vicious circle* kemiskinan. Berikut dijabarkan pokok dan akar masalah sebagai berikut.

Urusan: Tenaga Kerja
Topik : Kondisi Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan
Masalah Masih tingginya pekerja informal dalam struktur ketenagakerjaan
Akar Masalah 1. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan kerja lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah 2. Minimnya lapangan kerja formal di luar ibukota kabupaten 3. Masih kuatnya orientasi masyarakat terhadap kebutuhan bekerja segera setelah lulus pendidikan dasar dan menengah

Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal

Efektivitas penerima bantuan sosial di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya dapat diukur dari sisi ketercapaian penyaluran. Meskipun tingkat penyaluran tersalurkan sempurna selama lima tahun terakhir, hal tersebut belum menjamin bahwa bantuan tersebut benar-benar terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tetap berada dalam kondisi rentan, terutama karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah KPM yang tidak menurun secara signifikan. Situasi ini memperlemah peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan serta menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan sosial tanpa disertai peningkatan kapasitas produktif masyarakat.

Urusan: Sosial
Topik : 1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 2. Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan
Masalah Bantuan sosial belum efektif mendorong kemandirian penerima manfaat
Akar Masalah 1. Bantuan terserap belum sepenuhnya untuk kebutuhan dasar 2. Ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan sosial 3. Pemberian bantuan sosial masih berupa bantuan kebutuhan dasar yang bersifat jangka pendek

Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan belum mampu mengatasi akar struktural kemiskinan baik dari sisi desain program maupun efektivitas pelaksanaannya. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru berpotensi menciptakan ketergantungan karena belum terintegrasi dengan strategi peningkatan kemandirian ekonomi. Di sisi lain, persoalan teknis seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya basis data, serta kurangnya integrasi antar program juga turut memperburuk efektivitas kebijakan. Adapun rincian masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Sosial
Topik : Persentase Penduduk Miskin
Masalah Penanangan kemiskinan belum menujukkan hasil yang efektif
Akar Masalah 1. Program pengentasan kemiskinan belum berjalan secara tepat sasaran 2. Belum optimalnya pemberian bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial 3. Belum optimalnya pengintegrasian pendataan masyarakat miskin 4. Lemahnya pemutakhiran dan analisis data kemiskinan 5. Belum optimalnya skema integrasi bantuan sosial dan peningkatan produktivitas penerima manfat

Rendahnya Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ketercakupan jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan belum menyeluruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal serta belum efektifnya pelaku usaha dalam menyediakan jaminan ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, atau kematian. Selain itu, pendataan kepesertaan minim dan rendahnya kesadaran masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan sosial turut memperlemah efektivitas program. Adapun rincian masalah dan akar masalah diuraikan sebagai berikut.

Urusan: Tenaga Kerja
Topik : Jaminan Ketenagakerjaan
Masalah Jaminan ketenagakerjaan belum mencakup seluruh tenaga kerja
Akar Masalah 1. Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal 2. Belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses pekerjaan, layanan publik, serta kesempatan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun demikian, perhatian dan upaya pemberdayaan terhadap kelompok ini masih terbatas. Hal ini tercermin dari belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan lapangan kerja inklusif. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Sosial
Topik : Penyandang Disabilitas
Masalah Belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dan fasilitas layanan publik ramah disabilitas

Akar Masalah
1. Minimnya tempat kerja yang ramah disabilitas 2. Minimnya sistem layanan publik yang inklusif dan adaptif bagi disabilitas 3. Keterbatasan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas 4. Minimnya pelatihan atau workshop bagi penyandang disabilitas 5. Sekolah khusus belum tersedia secara merata

2.8.1.2. Transformasi Ekonomi

Belum Optimalnya Utilitas, Kelembagaan dan Kualitas SDM Kepariwisataan Daerah

Belum optimalnya utilitas, kelembagaan, dan SDM kepariwisataan daerah tercermin dari rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum yang rendah. Sektor pariwisata di Barito Selatan tumbuh lebih lambat yang ditandai dengan stagnasi pengembangan fasilitas akomodasi dan lambannya diversifikasi destinasi wisata. Kondisi ini diperburuk oleh belum terbangunnya ekosistem pariwisata yang terintegrasi secara kolaboratif antara sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif. Masalah-masalah ini menghambat peningkatan daya tarik destinasi serta nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata. Adapun rincian akar permasalahan tersebtu dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:

Urusan: Pariwisata
Topik : PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Masalah Belum berkembangnya sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi strategis daerah
Akar Masalah 1. Terbatasnya jumlah dan rendahnya kapasitas kelompok sadar wisata (POKDARWIS) 2 Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata 3. Lambatnya pengembangan, diversifikasi destinasi wisata, serta stagnasi pertumbuhan fasilitas akomodasi dan usaha penunjang pariwisata 4. Belum terbangunnya ekosistem pariwisata yang terintegrasi, melibatkan sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif secara kolaboratif.

Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata yang berdaya Saing

Tingkat pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing di Kabupaten Barito Selatan masih rendah. Hal ini tercermin dari minimnya kunjungan wisatawan mancanegara, meskipun jumlah wisatawan domestik meningkat. Kabupaten menghadapi tantangan dasar, seperti keterbatasan objek wisata unggulan, kurangnya atraksi dan event, serta lemahnya promosi dan pemasaran. Kondisi tersebut memperlemah citra pariwisata daerah. Selain itu, ketiadaan roadmap pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan menyebabkan pengelolaan destinasi belum konsisten. Rincian akar permasalahan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:

Urusan: Pariwisata
Topik : Jumlah Wisatawan Mancanegara
Masalah Rendahnya Daya Saing Pariwisata
Akar Masalah 1.Minimnya objek wisata ungulan, baik wisata buatan maupun alam 2. Kurangnya atraksi dan event pariwisata yang menarik bagi wisatawan 3. Terbatasnya kegiatan promosi dan pemasaran destinasi wisata 4. Belum adanya roadmap pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan

Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan belum selarasnya antara pertumbuhan angkatan kerja dan kapasitas serapan dunia usaha. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan pasar. Belum optimalnya peran pendidikan vokasional juga menjadi kendala utama dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Hal ini kemudian secara berantai berdampak pada pengangguran yang memberbesar beban sosial ekonomi daerah. Rincian akar permasalahan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:

Urusan: Tenaga Kerja
Topik : Tingkat Pengangguran Terbuka
Masalah 1. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dengan lapangan kerja 2. Terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal dan produktif 3. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas angkatan kerja
Akar Masalah 1. Lapangan pekerjaan yang terbatas 2. Keterbatasan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja 3. Akses dan mutu pendidikan vokasional belum merata 4. Minimnya keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal

Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Barito Selatan menandakan masih terbatasnya peran perempuan dalam proses pembangunan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kebijakan afirmatif maupun dukungan struktural untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor produktif. Ketimpangan ini tidak hanya memperlambat kemajuan pembangunan yang inklusif, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan gender. Rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Topik : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Masalah Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal
Akar Masalah 1. Tingginya jumlah perempuan yang lebih memilih kegiatan mengurus rumah tangga setiap tahunnya (*housekeeping*) 2. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah 3. Minimnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Lemahnya Daya Saing Daerah dalam Menarik Investasi

Daya tarik investasi di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi berbagai kendala yang tercermin dari rendahnya nilai investasi dan tingginya nilai ICOR. Meskipun jumlah investor meningkat, nilai investasi yang masuk belum signifikan. Nilai ICOR yang tinggi

menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan tidak menghasilkan output yang sebanding sehingga efisiensi investasi tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Barito Selatan belum optimal. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti tata kelola dan kelembagaan daerah yang belum mendukung, belum tersedianya regulasi serta skema insentif yang menarik bagi pelaku usaha, dan keterbatasan infrastruktur dasar yang menghambat penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif.

Urusan: Penanaman Modal
Topik : *Incremental Capital Output Ratio*
Masalah Lemahnya kapasitas Barito Selatan dalam dalam menarik investasi
Akar Masalah 1. Belum adanya skema insentif atau peraturan pendukung daerah untuk investasi 2 Kurangnya faktor pernarik investor untuk menanamkan modalnya **3** Keterbatasan jaringan infrastruktur dasar sebagai aksesbilitas dasar pergerakan barang dan jasa

Produk Hasil Industri Lokal Kurang Kompetitif

Produk olahan dari industri Barito Selatan masih belum kompetitif dan berdaya saing untuk menembus pasar nasional maupun global. Kondisi ini tercermin dari tren kinerja ekspor yang menunjukkan kondisi tren negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produk industri lokal masih rendah dalam hal nilai tambah dan belum memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Salah satu tantangan utama adalah minimnya perkembangan industri skala besar yang dalam beberapa tahun terakhir hanya terbatas pada satu industri. Akibatnya, potensi sumber daya lokal belum dapat diolah secara maksimal di dalam daerah serta lemahnya daya saing rantai pasok lokal. Uraian pokok masalah dan akar permasalahan terkait produk hasil industri lokal kurang kompetitif dalam tabel berikut.

Urusan: Perindustrian, Perdagangan
Topik : Nilai Ekspor
Masalah Rendahnya nilai tambah dan lemahnya daya saing produk lokal
Akar Masalah 1. Rendahnya nilai ekspor 2. Jumlah industri besar yang stagnan

Minimnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah. Kondisi ini tercermin dari rasio desentralisasi fiskal yang menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Rendahnya kontribusi PAD mencerminkan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri. Permasalahan tersebut juga merefleksikan adanya kelemahan dalam tata kelola pendapatan daerah. Uraian pokok masalah dan akar permasalahan terkait rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

Urusan: Keuangan
Topik : Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
Masalah Rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD
Akar Masalah 1. Kurangnya inovasi dan optimalisasi dalam pengelolaan potensi PAD, seperti pajak dan retribusi 2. Keterbatasan pemanfaatan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan 3. Belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah

Penurunan kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan berbasis pertanian lokal

Produksi pangan dari komoditas padi di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren penurunan selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tergambar dari penurunan produksi padi dan padi setara

beras yang mencerminkan berkurangnya ketersediaan pangan lokal. Penurunan tersebut berdampak pada meningkatnya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari wilayah lain dan mengancam kemandirian pangan daerah. Penurunan produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara internal, produksi terganggu akibat serangan hama dan penyakit tanaman yang belum tertangani secara optimal. Secara eksternal, alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian menyebabkan penyusutan areal tanam yang berdampak langsung pada turunnya kapasitas produksi padi. Adapun pokok permasalahan dan akar masalah yang berkaitan dengan penurunan produksi pertanian padi dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pertanian dan Perikanan
Topik : Produksi Pertanian Padi
Masalah Penurunan Kapasitas Produksi Pertanian Padi
Akar Masalah 1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi dalam keadaan rusak. 2. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. 3. Perluasan percetakan sawah atau lahan pertanian terkendala status kawasan 4. Belum adanya perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai lahan yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun 5. Hama dan penyakit pada tanaman pertanian

Rendahnya Produktivitas dan Penurunan Produksi pada Komoditas Perkebunan Utama

Komoditas utama subsektor perkebunan di Kabupaten Barito Selatan meliputi kelapa sawit, kelapa kopra, karet, dan kopi. Dalam beberapa tahun terakhir, komoditas-komoditas tersebut menunjukkan kinerja yang belum optimal baik dari sisi produktivitas maupun volume produksi. Rendahnya produktivitas mencerminkan bahwa pemanfaatan lahan perkebunan belum dilakukan secara maksimal untuk menghasilkan hasil yang optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tantangan struktural dan teknis dalam sistem budidaya, termasuk keterbatasan sarana pendukung serta gangguan

terhadap kesehatan tanaman. Penurunan performa subsektor perkebunan ini berpotensi menghambat peningkatan nilai tambah hasil perkebunan dan menurunkan kesejahteraan petani.

Urusan: Pertanian dan Perikanan
Topik : Produksi dan Produktivitas Perkebunan
Masalah Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan komoditas perkebunan
1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi dalam keadaan rusak 2. Hama dan penyakit pada tanaman pertanian

Belum Optimalnya Efektivitas Usaha Budidaya Perikanan

Efektivitas usaha budidaya perikanan di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan jumlah rumah tangga budidaya yang tidak diikuti oleh pertumbuhan produksi yang sebanding. Ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pelaku belum sepenuhnya diiringi dengan perbaikan metode budidaya maupun efisiensi usaha. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya kapasitas pendukung di sektor perikanan baik dari sisi kualitas input produksi maupun dukungan pascapanen. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menghambat pencapaian target ketahanan pangan berbasis ikan serta peningkatan kesejahteraan pelaku budidaya. Adapun pokok permasalahan dan akar masalah yang berkaitan dengan efektivitas usaha budidaya perikanan dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pertanian dan Perikanan
Topik : Produksi dan Produktivitas Perkebunan
Masalah Kinerja perikanan budidaya belum sebanding dengan peningkatan jumlah pelaku usaha.
1. Pengelolaan dan Pengolahan Hasil Perikanan masih bersifat tradisional dan musiman. 2. Masih belum optimalnya Balai Benih Ikan (BBI) Palu Rejo dalam memproduksi benih ikan.

2.8.1.3. Transformasi Tata Kelola

Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Kualitas dan responsivitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai ketertiban umum, *e-government*, dan pelimpahan kewenangan ke tingkat kecamatan. Selain itu, upaya perbaikan sistemik seperti reformulasi standar pelayanan masih terbatas dan peningkatan kapasitas aparatur belum dilakukan secara signifikan. Belum optimalnya kualitas dan responsivitas layanan mencerminkan masih lemahnya tata kelola serta kesiapan sistem pelayanan dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Urusan: Komunikasi dan informatika
Topik : 1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Masalah: 1. Kualitas layanan, kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik masih rendah 2. Belum adanya regulasi dan sistem pelayanan publik yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat
Akar Masalah 1. Belum adanya regulasi di daerah tentang ketertiban umum, *e-goverment*, dan pelimpahan kewenangan pada kecamatan, serta turunan beberapa peraturan perundangan terbaru yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik 2. Belum adanya upaya perbaikan sistemik, termasuk dalam reformulasi standar pelayanan 3. Kualitas, kecepatan, dan responsivitas pelayanan masih rendah 4. Aksesibilitas layanan masih terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau rentan 5. Keterbukaan informasi publik belum optimal, terlihat dari skor IKIP yang masih "menuju informatif" 6. Belum adanya peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pelayanan berbasis digital dan respons masyarakat 7. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan layanan masih rendah

Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan pemerataan, terutama dari sisi aksesibilitas dan keterjangkauan. Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil masih menjadi kendala dalam penyediaan layanan yang efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini berpengaruh terhadap keterlambatan layanan, rendahnya jangkauan, serta kesenjangan antarwilayah dalam memperoleh pelayanan yang layak.

Urusan: Komunikasi dan informatika
Topik : Indeks Pelayanan Publik
Masalah: Infrastruktur dan Sarana Pendukung Layanan Publik Masih Terbatas dan Belum Terintegrasi Secara Optimal
Akar Masalah 1. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan 2. MPP (Mall Pelayanan Publik) belum berjalan dengan efektif dan optimal 3. Belum tersedianya fasilitas telepon kedaruratan dan pengaduan yang responsif seperti *live* chat, dan *call centre* 24 jam 4. Keterbatasan sarana operasional, seperti unit siaran keliling dan fasilitas multimedia lainnya

Belum Optimalnya Upaya Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi merupakan bagian intergal dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun terdapat tren perbaikan dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Barito Selatan masih belum berjalan secara optimal. Masih adanya temuan hasil pemeriksaan, pelanggaran disiplin pegawai, dan lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa integritas aparatur dan efektivitas sistem pengendalian belum sepenuhnya prima. Selain itu, pemanfaatan instrumen pencegahan seperti MCP belum menyentuh seluruh aspek tata kelola sehingga upaya pencegahan korupsi belum sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah

Kabupaten Barito Selatan sudah mengupayakan pencegahan korupsi dengan lebih baik, tetapi masih perlu adanya upaya optimalisasi agar nilai yang dicapai lebih tinggi.

Urusan: Pengawasan
Topik : Angka *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Daerah
Masalah: 1. Masih lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal 2. Budaya integritas dan kepatuhan ASN belum terbentuk secara menyeluruh
Akar Masalah 1. Masih adanya temuan pengawasan dari BPK 2. Tindak lanjut atas temuan pengawasan (audit BPK) belum sepenuhnya sistematis dan tuntas 3. Masih terdapat pelanggaran disiplin pegawai 4. Pemanfaatan instrumen pencegahan korupsi (seperti MCP) belum terintegrasi secara menyeluruh 5. Kapasitas dalam membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel masih terbatas

Belum Optimalnya Upaya Implementasi Reformasi Hukum

Reformasi yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu *road map* reformasi birokrasi dalam Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024. Di Kabupaten Barito Selatan, capaian reformasi hukum masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Permasalahan ini terutama disebabkan oleh kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memadai, khususnya dalam hal perumusan, harmonisasi, dan analisis regulasi. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi masih rendah sehingga regulasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Adapun rincian masalah dan akar masalah terkait dengan belum optimalnya upaya reformasi hukum dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Sekretariat Daerah
Topik : Indeks Reformasi Hukum
Masalah 1. Kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik dalam reformasi hukum masih rendah

2. Sistem informasi regulasi yang terintegrasi dan transparan
Akar Masalah 1. Kualitas ASN di bidang regulasi masih belum memadai 2. Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi regulasi bagi ASN 3. Mininmnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi 4. Penataan *database* peraturan perundang-undangan yang belum terintegrasi dengan baik 5. Sulitnya akses publik terhadap produk hukum daerah yang valid dan terkini 6. Evaluasi kinerja penyelesaian perkara hukum yang masih rendah

Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi

Upaya pemerintah dalam pengawasan perencanaan pembangunan dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi tingkat kemajuan dan efektivitas reformasi birokrasi di perangkat daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Selatan masih belum optimal. Kelemahan terlihat dari belum konsistennya tindak lanjut atas hasil evaluasi internal oleh perangkat daerah yang menyebabkan perbaikan kinerja tidak berjalan menyeluruh. Lemahnya pengawasan dan evaluasi turut menghambat terciptanya perbaikan berkelanjutan karena tidak menghasilkan umpan balik yang efektif. Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi juga menghadapi hambatan internal berupa prosedur kerja yang masih rumit dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Di sisi lain, penempatan pegawai antar perangkat daerah kerap tidak mempertimbangkan kesesuaian kompetensi sehingga menghambat transfer pengetahuan dan efektivitas kerja. Adapun rincian masalah dan akar masalah terkait dengan indeks reformasi birokrasi dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pengawasan
Topik : Indeks Reformasi Birokrasi
Masalah: 1. Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan reformasi 2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah 3. Manajemen kepegawaian yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan profesionalisme

Akar Masalah
1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi internal oleh perangkat daerah
2. Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Struktur birokrasi yang kompleks
4. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sinkron
5. Penempatan dan rotasi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian kompetensi
6. Belum optimalnya mekanisme pengelolaan talenta dan transfer pengetahuan antarunit kerja

Akuntabilitas Pemerintahan yang Belum Optimal dan Terintegrasi

Penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaporan tahun berikutnya sehingga pelaporan kinerja cenderung bersifat administratif dan belum menjadi alat manajemen yang efektif. Selain itu, kelemahan dalam perencanaan, ketidaktepatan penggunaan, penentuan target indikator kinerja, serta rendahnya kapasitas SDM melemahkan kualitas laporan kinerja. Rincian masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pengawasan
Topik : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
Masalah:
Rendahnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum mendukung perbaikan kinerja secara berkelanjutan dan partisipatif
Akar Masalah
1. Laporan akuntabilitas kinerja yang masih dipandang sebagai pemenuhan administrasi
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP oleh perangkat daerah sebagai dasar perbaikan kinerja
3. Belum tersedianya sistem informasi akuntabilitas yang terintegrasi, sehingga akses terhadap data dan dokumen kinerja belum terbuka dan mudah diakses
4. Kurangnya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah daerah

Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal

Sistem informasi pemerintahan Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menghambat efektivitas koordinasi, efisiensi proses layanan, serta penyederhanaan birokrasi. Hal ini tercermin dari belum tercapainya tingkat kematangan yang diharapkan dalam praktik keterbukaan dan pemanfaatan sistem digital di lingkungan pemerintahan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas digital pemerintahan belum berkembang signifikan. Kondisi ini menandakan perlunya percepatan integrasi sistem informasi pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang responsif, tidak berbelit, dan berbasis mudah diakses.

Urusan: Komunikasi dan Informatika
Topik : 1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Masalah Layanan dan penyederhanaan birokrasi secara digital yang belum optimal
Akar Masalah 1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2. Keterbatasan koordinasi dalam pengembangan dan integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah 3. Belum maksimalnya pemanfaatan data dan sistem untuk mendukung percepatan pengambilan keputusan secara *real-time*

Konsistensi Data yang Rendah

Pengelolaan data antar perangkat daerah serta antar level pemerintah belum berjalan secara seragam dan terpadu sehingga menimbulkan disparitas informasi lintas sumber. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data secara holistik yang berdampak pada lemahnya konsistensi, validitas, serta kesesuaian data untuk mendukung pengambilan keputusan. Maka dari itu, penguatan sistem satu data daerah menjadi krusial untuk menjamin tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses sebagai fondasi tata kelola pemerintahan.

Urusan: Statistik
Topik : Indeks Pembangunan Statistik
Masalah Belum optimalnya penguatan sistem satu data
Akar Masalah 1. Keterbatasan kapasitas SDM dalam tata kelola data dan pemanfaatan teknologi informasi 2. Sistem informasi yang masih berjalan sektoral 3. Tidak konsistennya penggunaan indikator dan variabel data

2.8.1.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro

Tingkat Keamanan dan Penanganan Tindak Kriminalitas Belum Memadai

Ketahanan sosial di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kecenderungan melemah yang ditandai dengan meningkatnya risiko kejahatan dan menurunnya efektivitas penyelesaian kasus. Situasi ini mencerminkan lemahnya kapasitas penegakan hukum dan belum optimalnya stabilitas sosial di tingkat komunitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jaminan keamanan belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah diuraikan sebagai berikut.

Urusan: Sosial
Topik : 1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani per 10,000 penduduk 2. Persentase Penyelesaian Kejahatan 3. Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
Masalah 1. Melemahnya kohesi dan partisipasi sosial masyarakat di tingkat komunitas 2. Menurunnya kepercayaan dan efektivitas lembaga penegakan hukum serta penyelesaian konflik
Akar Masalah 1. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial dan kelembagaan di tingkat komunitas 2. Penurunan kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum dan penyelesaian konflik

3. Kurangnya transparasi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus 4. Rendahnya efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian kasus kejahatan 5. Belum optimalnya mekanisme pencegahan dan penanganan gangguan sosial di tingkat desa/kelurahan 6. Ketimpangan spasial dan ekonomi antarwilayah (tekanan sosial yang memicu tindak kejahatan di wilayah tertentu)

Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Proses Politik

Partisipasi masyarakat Kabupaten Barito Selatan dalam proses politik, seperti musyawarah desa dan musrenbang kecamatan masih cenderung rendah meskipun forum-forum tersebut telah dilaksanakan secara rutin. Rendahnya kualitas pendidikan politik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Sementara itu, menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat serta minimnya ruang dialog kebangsaan turut melemahkan semangat kolektif dan rasa memiliki terhadap arah pembangunan daerah. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah serta rendahnya representasi aspirasi masyarakat.

Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik
Topik : 1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 2. Kegiatan pembinaan politik daerah 3. Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4. Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat 5. Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat
Masalah: Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Akar Masalah 1. Masih rendahnya kualitas pendidikan politik 2. Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat 3. Melemahnya pemahaman kebangsaan masyarakat 4. Berkurangnya jumlah kegiatan pembinaan politik 5. Rendahnya kesadaran dan partisipasi LSM, Ormas dan OKP dalam kegiatan pembinaan politik

2.8.1.5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Rendahnya Upaya Pelestarian Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan warisan bersejarah yang memiliki nilai sejarah, arkeologi, dan budaya yang tinggi. Rendahnya pelestarian cagar budaya dapat menyebabkan rusaknya artefak dan situs bersejarah yang tidak tergantikan. Dalam hal ini, minimnya perhatian terhadap cagar budaya ditunjukkan dari lebih banyaknya jumlah cagar yang belum dipugar daripada sudah dipugar. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran akan pelestarian cagar budaya. Di sisi lain, pelaksanaan dan pemasaran pameran seni budaya masih rendah dan belum menarik minat para wisatawan. Adapun pokok masalah dan akar permasalahan diuraikan sebagai berikut.

Urusan: Kebudayaan
Topik : 1. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 2. Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara 3. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Masalah 1. Minimnya perhatian terhadap cagar budaya 2. Rendahnya pelaksanaan dan pemasaran pameran seni budaya
Akar Masalah 1. Kesadaran akan pelestarian cagar budaya masih rendah 2. Minimnya anggaran dan perhatian masyarakat untuk mengelola cagar budaya 3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian adat dan budaya lokal 4. Masih minimnya pagelaran seni budaya 5. Pameran yang kurang inovatif dan tidak menawarkan pengalaman baru 6. Minimnya dokumentasi, digitalisasi, dan basis data cagar budaya dan seni tradisional 7. Tersebarnya letak cagar budaya tersebar dan sulit dijangkau

Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Budaya

Rendahnya keterlibatan rumah tangga dalam pelaksanaan dan kehadiran pada kegiatan kebudayaan tidak hanya mencerminkan masalah partisipasi, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan pelestarian budaya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan modernisasi, urbanisasi, serta pengaruh kuat budaya

global menyebabkan berbagai tradisi lokal, seperti ritual adat, upacara tradisional, dan kesenian lokal semakin terpinggirkan dari ruang sosial, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu penyebab utamanya adalah belum terbentuknya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan.

Urusan: Kebudayaan
Topik : Indeks Harmoni
Masalah Menurunnya kesadaran dan pemahaman budaya
Akar Masalah 1. Kurangnya regenerasi pelaku budaya, yaitu minat dan keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan dan pelestarian tradisi adat 2. Kapasitas SDM dan kelembagaan kebudayaan masih relatif rendah 3. Pengaruh media dan teknologi yang menggeser minat masyarakat, khususnya generasi muda 4. Masih rendahnya koordinasi pelaku kebudayaan dalam mengembangkan potensi maupun sarana prasarana

Ketimpangan Gender serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Ketimpangan gender merupakan persoalan struktural yang berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Ketidaksetaraan ini menimbulkan rasa ketidakadilan, membatasi potensi perempuan, serta memperlebar kesenjangan sosial. Kabupaten Barito Selatan memiliki angka ketimpangan gender yang cukup tinggi. Di samping itu, isu perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya pemahaman terhadap pengarusutamaan gender, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal yang masih terbatas, belum optimalnya lembaga perlindungan anak, serta ketiadaan anggaran khusus untuk layanan penting seperti visum KDRT dan ruang konseling.

Urusan: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Topik : 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Masalah 1. Rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor formal 2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Akar Masalah 1. Masih rendahnya pemahaman terhadap pangarustamaan gender 2. Perempuan memiliki partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja formal dan peran dalam pengambilan keputusan publik 3. Belum optimalnya keberadaan dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan anak secara merata 4. Belum tersedianya anggaran khusus untuk visum KDRT dan layanan konseling 5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan penanganan kekerasan 6. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak 7. Kurangnya mekanisme deteksi dan respons dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak 8. Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak

Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak

Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang aman dan layak di Kabupaten Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan sarana sanitasi di seluruh kecamatan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehingga upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni menjadi kurang efektif.

Urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Topik : Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak
Masalah Sanitasi aman dan layak perlu ditingkatkan
Akar Masalah 1. Belum optimalnya realisasi pembangunan sanitasi layak dan aman 2. Tidak meratanya pembangunan sanitasi layak di seluruh kecamatan

3. Keterbatasan infrastruktur dasar 4. Penyebaran penduduk di wilayah pedesaan dan pelosok sehingga sulit terjangkau 5. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi

Ancaman Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ancaman ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari tingginya nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Barito Selatan masih menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Tingginya prevalensi ini juga merefleksikan adanya permasalahan struktural baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan maupun pemanfaatan pangan. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah yang berkaitan dengan ancaman ketidakcukupan konsumsi pangan adalah sebagai berikut.

Urusan: Pahan
Topik : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Masalah: Terbatasnya pemenuhan pangan dasar penduduk
Akar Masalah 1. Belum optimalnya ketahanan pangan dari sisi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. 2. Produksi pertanian dan perkebunan daerah yang stagnan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Belum Optimalnya Capaian Pembangunan Infrastruktur Air Minum Layak

Akses terhadap air bersih siap minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimum masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya pengolahan air, dan distribusi yang belum merata masih menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak rumah tangga yang harus bergantung pada sumber air alternatif yang kualitasnya tidak selalu terjamin sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial.

Urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Topik : Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Masalah Belum optimalnya pembangunan infrastruktur air minum layak
Akar Masalah 1. Masih banyaknya penggunaan air dari sumber utama sumur 2. Belum optimalnya saluran hilirisasi PDAM 3. Menurunnya kualitas air 4. Ketersediaan air bersih di perkotaan/perdesaan semakin terbatas 5. Proses pengolahan air baku menjadi air siap minum masih belum optimal

Risiko Gangguan Bencana Terhadap Ketahanan Wilayah

Kabupaten Barito Selatan berpotensi terdapat ancaman bencana alam serius, terutama banjir dan kebakaran lahan. Faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, kondisi geografis yang rentan, serta praktik-praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan kian memperparah risiko tersebut. Dampak dari bencana ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menghambat pembangunan daerah.

Urusan:
Topik : Indeks Risiko Bencana
Masalah Adanya ancaman risiko bencana alam banjir dan kebakaran lahan
Akar Masalah Tingginya ancaman risiko kebakaran hutan dan lahan Lokasi permukiman yang berada di sepanjang pinggiran sungai Kualitas infrastruktur drainase yang rendah Tidak memadainya kapasitas saluran dalam menampung debit air

Penanganan Sampah Belum Optimal

Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah yang belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS) masih terbatas pada aktivitas penampungan dan belum disertai proses pengolahan lanjutan yang efektif. Hal ini menyebabkan sebagian sampah tidak tertangani dengan

baik dan mencemari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas lingkungan, sanitasi, dan kenyamanan permukiman, serta berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Urusan: Lingkungan Hidup
Topik : Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Masalah Belum optimalnya pengelolaan sampah
Akar Masalah 1. Keterbatasan TPS yang mampu mengelola sampah (sebagian hanya pengumpul sampah saja) 2. Peningkatan volume sampah akibat peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk 3. Kapasitas dan pemanfataan TPS 3R dan TPST masih terbatas 4. Adanya ketidakkonsistenan dalam sistem manajemen sampah 5. Keterbatasan armada pengangkut sampah 6. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah 7. Rendahnya pemilahan sampah dari sumber pertama 8. Belum meratanya fasilitas TPS di wilayah pedesaan dan pelosok

Belum Optimalnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan.

Permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan tercermin dari penurunan angka indeks kualitas lingkungan hidup. Angka indeks ini menurun bahkan berada di bawah angka nasional dan provinsi. Permasalahan mencakup dari lahan hingga kelembagaan Hal ini akan menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

Urusan: Lingkungan hidup
Topik : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Masalah Meningkatnya tekanan terhadap ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.
Akar Masalah 1. Penurunan tutupan hutan akibat tingginya erosi 2. Rendahnya ketaatan usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Belum adanya sistem pemantauan kualitas air

2.8.1.6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Jaringan Jalan yang Belum Merata

Konektivitas jaringan jalan yang belum merata antara ibu kota kabupaten dengan pusat-pusat kecamatan menjadi tantangan utama dalam pembangunan wilayah Kabupaten Barito Selatan. Dengan luas wilayah yang besar dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, yaitu 19 jiwa/km², aksesibilitas jalan menjadi faktor krusial dalam menjangkau layanan dasar dan aktivitas ekonomi. Ketimpangan konektivitas ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang jasa, tetapi juga memperlambat intervensi pembangunan secara merata. Hal ini mengakibatkan disparitas antarwilayah yang semakin melebar.

Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Topik : Proporsi Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Masalah Kualitas dan keterhubungan jalan yang belum optimal
Akar Masalah 1. Tidak meratanya kualitas jalan dalam kondisi baik 2. Rendahnya kualitas pembangunan jalan 3. Degradasi kualitas infrastruktur jalan yang signifikan dalam waktu singkat 4. Minimnya anggaran pemeliharaan rutin jalan 5. Kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan tekanan kendaraan berat 6. Terbatasnya sistem drainase menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat terjadi

Meluasnya Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh di Zona Sempadan Sungai

Perkembangan permukiman padat dan kumuh di sempadan sungai di Kabupaten Barito Selatan merupakan konsekuensi dari aktivitas permukiman dan sosial ekonomi yang secara historis terbangun mengikuti alur sungai sebagai konektivitas wilayah. Fenomena ini diperparah oleh laju pertumbuhan hunian yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan layak huni di kawasan yang aman dan sesuai tata ruang. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, minim infrastruktur dasar serta rentan terhadap bencana banjir dan pencemaran lingkungan.

Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Topik : Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Masalah Perkembangan permukiman padat dan kumuh di kawasan sempadan sungai
Akar Masalah 1. Ketergantungan terhadap sungai sebagai jalur aktivitas 2. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang 3. Peningkatan pertumbuhan penduduk 4. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh, terkhususnya di Kelurahan Hilir Sper, yang memerlukan peningkatan kualitas permukiman dan sanitasi 5. Banyak rumah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang masih dibangun secara swadaya tanpa standar teknis yang memadai sehingga rentan terhadap kerusakan

Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Belum Optimal

Masalah minimnya desa atau kelurahan yang memiliki sinyal internet seluler dengan kondisi "sinyal sangat kuat" di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan masih rendahnya aksesibilitas jaringan komunikasi digital, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) akibat kondisi geografis yang terjal, seperti perbukitan dan kawasan hutan. Selain itu, kesenjangan digital makin diperparah oleh tingginya biaya operasional pembangunan menara, rendahnya daya beli masyarakat terhadap perangkat digital dan layanan data, serta belum meratanya kualitas dan kecepatan sinyal internet. Kapasitas dan jangkauan BTS yang terbatas juga menjadi faktor penghambat utama dalam pemerataan akses informasi.

Urusan: Komunikasi dan Informatika
Topik : Minimnya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler/*Handphone* dengan Kondisi "Sinyal Sangat Kuat"
Masalah Kesenjangan akses digital di daerah terpencil dan pedalaman
Akar Masalah 1. Banyaknya desa/kelurahan yang tidak memiliki penerimaan terhadap sinyal internet 2. Minimnya ketersediaan *Base Transceiver Station* (BTS)

3. Kondisi lokasi desa yang masih banyak terdapat di perbukitan dan kawasan hutan sehingga menjadi tantangan dalam membangun menara telekomunikasi 4. Biaya operasional BTS yang tinggi 5. Kualitas sinyal dan kecepatan internet belum sepenuhnya merata 6. Kapasitas dan jangkauan tiap BTS masih terbatas

Jangkauan Layanan Pemerintahan yang Terbatas Akibat Luas Wilayah dan Sebaran Penduduk yang Tidak Seimbang

Wilayah administrasi yang luas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil untuk mengakses pelayanan publik. Lebih lanjut, sebagian besar masyarakat bermukim di sepanjang bantaran sungai sehingga akses terhadap fasilitas pelayanan publik kerap terkendala karena keterbatasan infrastruktur darat yang menghubungkan antar wilayah. Beberapa kecamatan memiliki jarak tempuh yang jauh dari ibu kota kabupaten, seperti Jenamas (132 km), Dusun Hilir (99 km), dan Karau Kuala (57 km), sementara kepadatan penduduk hanya sekitar 19 jiwa/km^2. Hal ini menyebabkan pelayanan pemerintahan berjalan kurang optimal baik dari sisi efektivitas koordinasi maupun pemerataan pembangunan. Kebutuhan terhadap penataan wilayah, termasuk pemekaran desa atau kecamatan menjadi krusial untuk menjawab tantangan geografis dan mempercepat akses layanan publik.

Urusan: Perencanaan dan Sekretariat Daerah
Topik : Pemekaran Desa/Kecamatan
Masalah Akses pelayanan publik belum merata
Akar Masalah 1. Wilayah kecamatan memiliki cakupan geografis yang terlalu luas dan tidak efisien untuk dijangkau dari ibukota kabupaten 2. Persebaran penduduk rendah dan tidak merata, mengakibatkan layanan publik sulit menjangkau masyarakat secara optimal 3. Keterbatasan infrastruktur transportasi yang mendukung mobilitas antarwilayah 4. Belum optimalnya penataan wilayah administrasi

2.8.1.7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Irigasi

Rendahnya kuantitas dan kualitas irigasi merupakan salah satu permasalahan yang signifikan dalam sektor pertanian di Kabupaten Barito Selatan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan pangan. Namun, banyak daerah pertanian di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi masalah infrastruktur irigasi yang tidak memadai. Permasalahan ini meliputi sistem irigasi yang usang, kurangnya pemeliharaan, serta distribusi air yang tidak merata mengakibatkan produktivitas lahan pertanian menurun dan melemahnya kesejahteraan petani. Rendahnya kualitas irigasi ini juga berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap kekeringan dan banjir yang berdampak negatif pada hasil panen dan ketahanan pangan.

Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Topik : Rasio Jaringan Irigasi
Masalah Menurunnya tren irigasi dalam kondisi baik yang tidak sejalan dengan peningkatan pembangunan kuantitas panjang irigasi
Akar Masalah 1. Belum adanya perencanaan terkait kebutuhan air serta infrastruktur irigasi berbasis data dan wilayah 2. Rendahnya kualitas bangunan irigasi 3. Minimnya pemeliharaan dan jaringan irigasi secara berkala

Menurunnya Drainase dalam Kondisi Baik

Prasarana drainase sebagian besar terkonsentrasi di Kota Buntok yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi. Namun, pada musim hujan, masih ditemukan genangan dan banjir di beberapa titik yang mengindikasikan belum optimalnya fungsi sistem drainase dan pengelolaan sungai. Di wilayah pedesaan, kondisi drainase umumnya bergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat. Permasalahan utama terletak pada kualitas drainase yang kurang baik serta pemerataan pembangunan yang belum terpenuhi.

Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Topik : Infrastruktur Drainase
Masalah Sistem drainase belum optimal dan tidak merata
Akar Masalah 1. Tidak memadainya kapasitas saluran dalam menampung debit air 2. Kualitas infrastruktur drainase yang rendah 3. Pemasangan yang kurang tepat terhadap kondisi sekitar 4. Tidak meratanya pembangunan saluran drainase

Ketimpangan Konektivitas Antarwilayah

Zona Timur Kluster Buntok yang meliputi Kabupaten Barito Selatan salah satunya dimandatkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi wilayah dengan transportasi barang dan publik yang unggul. Namun, pola keterhubungan antarwilayahnya masih timpang akibat berbagai kendala konektivitas. Penurunan izin trayek dan jumlah pengguna angkutan umum serta tidak optimalnya terminal darat menunjukkan lemahnya sistem transportasi publik. Selain itu, penyebaran infrastruktur seperti jembatan yang belum merata di beberapa kecamatan menghambat mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi. Keterbatasan sarana transportasi sungai, seperti pelabuhan juga menjadi masalah tersendiri dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses lewat jalur darat sehingga konektivitas antardaerah belum dapat berjalan secara efisien dan merata.

Urusan: Perhubungan
Topik : Rasio Konektivitas
Masalah : Pola keterhubungan antarwilayah masih timpang
Akar Masalah 1. Izin trayek menurun 2. Tidak optimalnya terminal angkutan darat 3. Menurunnya pengguna angkutan umum 4. Kurangnya sebaran infrastruktur konektivitas di beberapa kecamatan, seperti jembatan, yang menghambat aksesibilitas antarwilayah, aktivitas ekonomi, dan mobilitas penduduk 5. Kurangnya sarana transportasi untuk konektivitas sungai, seperti pelabuhan, guna mengakomodasi akses yang tidak mampu dilakukan secara darat

Belum Optimalnya Pengelolaan Energi di Daerah

Kebutuhan energi masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya aktivitas ekonomi, serta meluasnya kawasan permukiman. Peningkatan jumlah penduduk juga berdampak langsung pada naiknya kebutuhan energi yang ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Di sisi lain, meskipun rasio elektrifikasi telah mencapai 99%, masih terdapat rumah tangga yang belum sepenuhnya menikmati pasokan listrik secara optimal dari sumber PLN. Ketergantungan sistem kelistrikan terhadap energi primer seperti batu bara dan BBM juga menimbulkan risiko keberlanjutan pasokan, terlebih ketika distribusi terganggu. Selain itu, kelangkaan energi rumah tangga seperti gas elpiji juga terjadi menunjukkan bahwa akses energi secara fisik belum sepenuhnya dibarengi oleh keterjangkauan dan keberlanjutan.

Urusan: Energi	
Topik : Intensitas Energi Primer	
Masalah : Upaya pemanfaatan energi alternatif dan efisiensi energi primer yang belum maksimal	
Akar Masalah 1. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat 2. Terjadinya kelangkaan energi di daerah 3. Elektrifikasi listrik yang bersumber dari energi primer 4. Kebutuhan energi yang meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk	

2.8.1.8. Kesinambungan Pembangunan

Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya peran kajian dan penelitian dalam proses perencanaan yang menyebabkan kebijakan dan program pembangunan kurang berbasis bukti ilmiah. Selain itu, sinkronisasi perencanaan pembangunan yang belum optimal antara berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor mengakibatkan ketidakefisienan pembangunan. Kualitas sistem informasi data satu

pintu yang rendah juga menjadi kendala. Lebih lanjut, data yang tersedia seringkali tidak akurat atau tidak terbaru yang menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Di samping itu, sinkronisasi antara metadata dan capaian indikator data yang belum memadai menyebabkan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan sehingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan tidak bisa dilakukan secara efektif.

Urusan: Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
Topik : Perencanaan Pembangunan
Masalah : 1. Rendahnya integrasi riset dalam kebijakan pembangunan 2. Ketidaksinambungan antara perencanaan pembangunan 3. Lemahnya tata kelola sistem informasi pembangunan daerah
Akar Masalah 1. Minimnya kerjasama untuk kajian pembangunan daerah 2. Rendahnya aksi tindak lanjut/implementasi teknis dari kajian/penelitian dalam pelaksanaan perencanaan pembangungan daerah 3. Keterbatsasan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menghasilkan kajian berbasis data dan bukti 4. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dan tata ruang 5. Forum koordinasi seperti musrenbang, konsultasi publik atau rakor masih belum belum dijadikan ruang strategis dalam penyelarasan prioritas pembangunan 6. Rendahnya kualitas sistem informasi data satu pintu 7. Belum memadainya sinkronisasi antara metadata dan capaian indikator data 8. Kurang teritegrasinya sistem pendataan dari rumah data 9. Kurangnya pembaruan data secara berkala (*update* periodik tidak konsisten) 10. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan

2.8.2. Isu Strategis Kewilayahan

Isu strategis perlu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Barito Selatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai dtuberengan konteks yang terjadi baik dari di lingkup global, nasional, maupun regional.

2.8.2.1. Isu Global

Ketidakpastian global selama 5 tahun mendatang patut menjadi perhatian sebab tidak adanya antisipasi akan mengganggu pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Maka, isu global tetap perlu dipertimbangkan dalam merencanakan agar tetap mencapai target yang sudah ditetapkan atau justru menjadi kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Laporan Risiko Global atau *Global Risks Report* oleh World Economic Forum (WEF) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi rujukan dalam memetakan isu global.

1. **Cuaca Ekstrem**

   Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dengan frekuensi yang tidak biasa termasuk di dalam isu cuaca ekstrem. Tidak dapat dipungkiri, cuaca ekstrem semakin kerap terjadi beberapa waktu terakhir menimbulkan berbagai bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, hingga perubahan suhu secara mendadak. Hal ini secara langsung berdampak pada makhluk hidup di dalamnya, tak terkecuali manusia.

2. **Perubahan kritikal terhadap ekosistem**

   Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol meningkatkan perubahan tatanan ekosistem secara masif di titik tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula. Ketika kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan seperti semula, bencana seperti volatilitas suhu hingga kenaikan permukaan laut menjadi jelas terjadi.

3. ***Biodiversity loss* dan gangguan ekosistem**

   Biodiversitas mendefinisikan variasi dan variabilitas dari makhluk hidup di bumi. Ekosistem yang terganggu sebagai akibat dari aktivitas ekonomi tidak berkelanjutan. *Biodiversity loss* yang dibiarkan dapat berujung pada kepunahan makhluk hidup yang mengakibatkan kerusakan dalam satu ekosistem karena rantai interaksi yang terputus. Kondisi ini jika dibiarkan akan memunculkan efek berantai pada ekologis dan umat manusia yang mengakibatkan kelangkaan pangan atau mungkin kepunahan.

4. **Krisis sumber daya alam**

   Isu krisis sumber daya alam saat ini menjadi fokus utama global. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan serta mismanajemen sumber daya alam kritis. Efek yang ditimbulkan dari krisis ini berujung pada kerentanan air dan pangan di tingkat global. Krisis tersebut dapat berupa kekeringan sampai penggurunan.

5. **Misinformasi dan disinformasi**

   Globalisasi semakin menggerus dinding besar yang memisahkan antar masyarakat di berbagai belahan dunia. Akses internet yang menjangkau setiap sudut kehidupan menghadirkan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Akan tetapi, percepatan arus informasi yang muncul rupanya berkorelasi dengan tingginya misinformasi dan disinformasi di dalamnya. Kencangnya arus informasi palsu dan penuh manipulasi semakin sulit dibedakan.

6. **Dampak buruk teknologi AI**

   Sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi AI sangat ekspansif memberikan dorongan produktivitas bagi masyarakat. Akan tetapi, perkembangan AI juga menyimpan potensi kerusakan sosial yang masif. *Generative AI* (GAI) merupakan bentuk AI yang mampu menciptakan teks, foto, atau video berdasarkan model generatif. Di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, pengembangan GAI dapat mengarah pada misinformasi yang berujung pada instabilitas sosial dan politik.

7. **Involuntary migration**

   Involuntary migration atau perpindahan penduduk secara paksa muncul akibat situasi mengancam pada tempat penduduk berasal. Beberapa tahun terakhir, tingginya tensi geopolitik yang semakin memanas serta bencana alam yang semakin rutin terjadi meningkatkan kerentanan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat marjinal. Hal tersebut memaksa mereka untuk mengevakuasi diri ke wilayah lain. Isu ini patut diantisipasi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk berperan aktif menjaga mengatasi isu *involuntary migration*.

8. **Cyber insecurity**

   Perkembangan teknologi seakan memaksa manusia untuk bergantung di dalamnya. Realitanya terdapat potensi kerentanan siber yang mengancam seluruh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Berbagai kejahatan siber semakin beragam mulai dari *computer fraud,* terorisme siber, *cyberextortion,* sampai *ransomware.* Hal ini mengancam keamanan pengguna teknologi, salah satunya pemerintah Indonesia. Kerentanan data vital nasional perlu menjadi isu yang diperhatikan.

9. **Polarisasi sosial**

   Keberagaman ideologi, suku, dan bangsa yang ada di dunia saat ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Diskriminasi, persekusi, pembatasan kesempatan bagi kaum tertentu semakin sering terjadi menciptakan polarisasi sosial. Kondisi ini ditakutkan akan rawan menimbulkan instabilitas sosial pada masyarakat global.

10. **Polusi**

    Aktivitas ekonomi yang semakin maju bersamaan dengan pertambahan penduduk yang terus memadati suatu wilayah menimbulkan berbagai zat berbahaya di sekitarnya. Limbah dan polutan ini menjadi berbahaya jika tidak mampu ditindaklanjuti sebab akan merusak ekosistem di sekitarnya. Dalam upaya pembangunan, pengelolaan limbah perlu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memastikan terjaganya kualitas hidup masyarakat Indonesia.

2.8.2.2. Isu Nasional

Pemerintah Republik Indonesia telah memetakan isu nasional dalam RPJMN 2025–2029 untuk memastikan perencanaan yang dilakukan mampu memitigasi isu yang terjadi di tingkat nasional. Perencanaan dengan mempertimbangkan isu terkini mampu menghasilkan perencanaan yang *future proof* dan mampu dioptimalisasi untuk mencapai sasaran jangka panjang.

1. **Rendahnya Produktivitas**

   Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terutama pada kelompok perempuan. Hal ini diperburuk oleh rendahnya produktivitas sektor ekonomi, keterbatasan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta kelembagaan yang lemah seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung partisipasi dan keberlangsungan perempuan di pasar kerja. Faktor-faktor tersebut mencakup norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses terhadap layanan penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau.

2. **Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

   Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja, masih relatif rendah dan berada di bawah rata-rata kawasan Asia Tenggara. Salah satu tantangan utama dalam isu ini adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia unggul juga menghadapi hambatan berupa rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari tingkat kualifikasi pendidikan yang belum memadai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang optimal, perlu mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

3. **Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

   Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja.

4. **Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif**

   Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. **Krisis Lingkungan**

   Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan 39 ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

6. **Geopolitik dan Geoekonomi**

   Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

7. **Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**

   Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku 40 kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

2.8.2.3. Isu Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029, telah terpetakan beberapa isu strategis di tingkat provinsi. Isu ini disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan isu nasional maupun global. Perhatian akan isu ini menjadi penting dalam mencapai tujuan jangka panjang RJPD Kalimantan Tengah 2025-2045.

1. **Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan Hilirisasi SDA**

   Optimalisasi pemanfaatan kawasan sentra terpadu perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas investasi pemerintah pusat. Pengelolaan pertanian harus diarahkan pada sistem yang produktif dan berbasis teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi geografis. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan yang didukung oleh pembangunan jaringan irigasi dan diversifikasi tanaman pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian bernilai tambah perlu didorong untuk memperluas pasar. Sebagai pusat konservasi internasional, Kalimantan Tengah juga perlu menetapkan regulasi dan langkah konkret dalam pelestarian ekosistem alami.

2. **Infrastruktur belum memadai**

   Pengembangan infrastruktur sumber daya air perlu dipercepat untuk mendukung pembangunan wilayah ke depan. Di sisi lain, belum tercapainya rasio elektrifikasi 100% menunjukkan masih adanya rumah tangga yang belum terjangkau layanan listrik. Oleh

karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik melalui sistem *on-grid* maupun *off-grid*, perlu didorong untuk pemerataan akses listrik.

3. **Luas Wilayah Dan Aksesibilitas**

   Pembangunan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti desa-desa yang terisolasi, belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan, serta belum tersambungnya jalan Trans Kalimantan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses logistik, pemasaran hasil bumi, dan kesiapan pengembangan industri hilirisasi. Di samping itu, belum tersedianya angkutan umum dalam kota dan antar kota menjadi hambatan dalam mendukung mobilitas penduduk dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Pengembangan sistem transportasi publik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

4. **Ketergantungan Pada Sektor Primer**

   Ketergantungan terhadap sektor primer, khususnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan masih menjadi tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri pada sektor-sektor potensial lainnya perlu didorong guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5. **Pengelolaan Lingkungan dan Deforestasi**

   Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu isu strategis pembangunan di Kalimantan Tengah. Permasalahan seperti eksploitasi air tanah, pembuangan limbah yang tidak terkontrol, sedimentasi sungai, dan potensi *bleaching* terumbu karang akibat perubahan iklim memerlukan perhatian serius. Deforestasi untuk alih fungsi lahan skala besar juga mengancam kelestarian ekosistem alami, termasuk konservasi air, habitat satwa liar, serta keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah.

6. **Kesiapan Kalimantan Tengah Menyongsong IKN**

   Sebagai daerah mitra pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Tengah perlu mempersiapkan diri dalam mendukung keberlangsungan IKN, khususnya melalui penyediaan tenaga kerja terampil dan pasokan bahan pangan. Untuk itu, diperlukan perumusan regulasi serta pelaksanaan program yang mendukung pengembangan SDM, ketahanan pangan, dan aspek pendukung lainnya secara terintegrasi.

7. **Urbanisasi dan Permukiman Kumuh**

   Urbanisasi merupakan tantangan utama dalam pembangunan wilayah perkotaan. Untuk mengantisipasi dampaknya, perlu dilakukan penguatan regulasi perkotaan serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Risiko kemacetan, tumbuhnya kawasan kumuh, dan permasalahan pengelolaan air serta limbah perlu menjadi perhatian. Penanganan permukiman kumuh yang ada saat ini juga perlu diselesaikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

8. **SDM yang Berdaya Saing**

   Peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Tengah perlu didorong melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan. Di bidang pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah masih tergolong rendah meskipun menunjukkan tren peningkatan. Penguatan program wajib belajar 13 tahun dan perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi langkah strategis untuk mendorong capaian pendidikan yang lebih baik. Di bidang kesehatan, usia harapan hidup yang masih di bawah rata-rata nasional serta fluktuasi Angka Kematian Ibu dan Bayi menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis juga perlu diperkuat guna mendukung target eliminasi TBC nasional pada tahun 2030. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh diharapkan mampu mendongkrak daya saing masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.

9. Ketimpangan Wilayah dan Kesejahteraan

Ketimpangan pembangunan di Kalimantan Tengah disebabkan oleh belum optimalnya konektivitas antarwilayah. Pemerataan pembangunan perlu diwujudkan melalui penguatan pembangunan desa, peremajaan kota, serta pembukaan akses wilayah pedalaman dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Dalam bidang kesejahteraan, pengentasan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan perlu dilakukan melalui kebijakan afirmatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Selain itu, peningkatan kualitas angkatan kerja menjadi kunci dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka. Upaya ini perlu didukung dengan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendukung agenda pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.8.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan situasi/kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini merujuk pada signifikansi dampak dan manfaat bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak. Isu strategis digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan pencapaian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Isu strategis disusun berdasarkan sintesa atas potensi dan permasalahan yang dikaitkan dengan isu lingkungan dinamis, baik dari skala global, nasional, maupun regional. Melihat pada tahap satu pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025–2045, maka fokus utama dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 menekankan pada aspek/sisi fundamental pembangunan. Adapun isu strategis Kabupaten Barito Selatan dijbarkan sebagai berikut:

1. Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas merupakan langkah krusial dalam memantapkan fondasi pembangunan daerah. Upaya ini menekankan pentingnya layanan kesehatan dasar yang merata, tenaga medis yang terdistribusi secara adil, serta

perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan sistem kesehatan diperlukan untuk menjawab tantangan tingginya kebutuhan layanan maternal dan anak, peningkatan status gizi, serta pengendalian penyakit secara terpadu. Dengan sistem layanan yang inklusif dan adaptif, daerah dapat membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan lebih siap menghadapi dinamika pembangunan ke depan.

2. **Penguatan Kapabilitas SDM yang Terampil dan Terdidik**

   Penguatan kapabilitas SDM yang terampil dan terdidik merupakan langkah krusial dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah. Upaya ini perlu menekankan pentingnya peningkatan literasi dan numerasi sejak jenjang pendidikan dasar, perluasan akses dan mutu pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi, serta penguatan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pengembangan kompetensi kerja berbasis potensi wilayah dan inovasi menjadi pondasi untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing. Peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan diperlukan untuk membentuk ekosistem pembelajaran yang adaptif.

3. **Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial**

   Upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan secara lebih transformatif, dari pola bantuan sosial berbasis konsumsi menuju peningkatan produktivitas dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Pendekatan graduasi menjadi langkah strategis dengan penahapan yang terukur dari bantuan kebutuhan dasar menuju produktivitas ekonomi. Bantuan sosial juga harus menyasar secara merata seluruh kelompok rentan, termasuk anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia. Transparansi dalam pendataan dan penyaluran diperlukan agar manfaat diterima secara utuh. Sementara itu, kesadaran penerima manfaat juga perlu diarahkan dan dibangun bahwa bantuan sosial adalah bagian dari proses pemberdayaan, yang membutuhkan komitmen bersama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

4. **Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja**

   Kabupaten Barito Selatan tengah berada dalam fase bonus demografi yang berpotensi menjadi akselerator pembangunan ekonomi. Di sisi lain, kualitas pendidikan dan kesehatan belum optimal, keterlibatan tenaga kerja dalam sektor formal yang terbatas, dan cakupan perlindungan ketenagakerjaan yang belum merata. Oleh karena itu, penguatan ekosistem ketenagakerjaan—melalui peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja (*labour intensive*), serta penguatan sistem perlindungan tenaga kerja—menjadi agenda strategis guna memastikan kontribusi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

5. **Penguatan Tata Kelola Lingkungan untuk Meningkatkan Ketahanan dan Keberlanjutan Ekosistem**

   Tata kelola lingkungan masih menemui kendala terutama dalam hal optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya tata kelola lingkungan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, penguatan tata kelola lingkungan menjadi kebutuhan strategis. Pendekatan yang kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada ketahanan ekosistem diperlukan guna menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

6. **Penguatan 4A Pariwisata: *Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary***

   Penguatan 4A pariwisata mencerminkan kebutuhan mendesak akan peningkatan kualitas peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata secara menyeluruh di Kabupaten Barito Selatan pengembangan pariwisata belum berjalan optimal akibat berbagai hambatan struktural, mulai dari terbatasnya destinasi unggulan, minimnya kegiatan promosi dan event yang menarik, hingga belum adanya perencanaan terpadu yang menjamin keberlanjutan sektor ini. Selain itu, kualitas layanan, sarana pendukung, dan keterlibatan pelaku lokal masih belum mampu memenuhi

ekspektasi wisatawan. Situasi ini berdampak pada rendahnya kunjungan wisata serta belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sektor pariwisata secara menyeluruh diperlukan agar mampu menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara destinasi, infrastruktur, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja, serta promosi citra daerah yang lebih luas.

7. **Penguatan Daya Saing Investasi dan Industri untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

   Penguatan daya saing investasi dan produk industri lokal merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan mencakup peningkatan kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Di sisi lain, produk industri lokal perlu didorong agar memiliki nilai tambah dan kualitas yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas pelaku industri, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendukung menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang produktif dan mendorong tumbuhnya industri lokal berbasis potensi unggulan daerah.

8. **Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Lokal untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah**

   Peningkatan kontribusi sektor unggulan menjadi langkah strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Upaya ini menuntut inovasi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi, pemanfaatan aset daerah secara produktif, maupun penguatan BUMD. Penguatan kapasitas kelembagaan fiskal serta tata kelola pendapatan yang transparan dan akauntabel akan menjadi fondasi pentung untuk mendorong peningkatan PAD. Kebutuhan sistem perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan.

Pemanfaatan data spasial dan integrasi sistem informasi pendapatan juga dapat membantu pemetaan potensi dan pengambilan kebijakan yang lebih responsif. Sinergi antara pmerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

9. **Penguatan Kemampuan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana**

   Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana perlu dilakukan mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kerentanan wilayah terhadap bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta genangan air akibat curah hujan tinggi menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi. Peningkatan sistem deteksi dini bencana menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dimana sistem peringatan yang handal mampu memberikan informasi lebih awal memprediksi dan mengantisipasi bencana yang datang memungkinkan evakuasi tepat waktu, meminimalkan korban dan kerugian, serta mendorong mitigasi melalui infrastruktur tahan bencana, penataan ruang, dan kesiapsiagaan masyarakat.

10. **Percepatan Pemerataan Infrastruktur Air Minum Layak**

    Akses yang merata terhadap air minum bersih dan aman tidak hanya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, tetapi juga meningkatkan produktivitas. Selain itu, ketersediaan air minum layak dapat mendorong perbaikan lingkungan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap air minum yang layak, hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali diperparah oleh kelangkaan sumber daya air.

11. **Penguatan Pondasi Infrastruktur Dasar hingga Daerah Terpencil**

    Konektivitas merupakan faktor penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang merata. Infrastruktur jalan yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke

layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Di daerah terpencil, jalan yang memadai dapat membuka peluang ekonomi baru, seperti menghubungkan petani dan produsen lokal ke pasar yang lebih luas sehingga meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, konektivitas yang baik berperan penting dalam respon cepat terhadap keadaan darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan yang memungkinkan penanganan dengan lebih efisien. Tanpa infrastruktur jalan yang kuat, daerah terpencil akan terus terisolasi sehingga memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi.

12. Peningkatan Konektivitas dan Mobilitas Barang atau Jasa

Konektivitas yang unggul dan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan yang komprehensif terhadap pembangunan jalan yang berkualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung logistik, seperti terminal dan angkutan publik serta angkutan barang berperan sangat krusial. Jalan yang baik memungkinkan pergerakan yang lebih cepat dan efisien serta meningkatkan akses ke pasar, pekerjaan, dan layanan dasar. Angkutan umum yang andal dan efisien mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurangi polusi udara, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Selain itu, sistem angkutan barang yang efisien mendukung sektor industri dan perdagangan yang memperkuat daya saing ekonomi daerah.

13. Peningkatan Kebutuhan Irigasi dalam Kondisi Baik

Penguatan infrastruktur irigasi sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan. Sistem irigasi yang baik dapat meningkatkan produksi pangan dengan memastikan pasokan air yang stabil dan cukup sehingga mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dari perspektif ekonomi, peningkatan produksi pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, efisiensi irigasi dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, seperti pengeroposan tanah dan pencemaran air yang sering terjadi akibat penggunaan air yang tidak terkontrol.

14. Peningkatan Drainase dalam Kondisi Baik

Sistem drainase yang berfungsi optimal tidak hanya mencegah terjadinya genangan air dan banjir, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Drainase yang memadai menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman. Dengan mengalirkan air secara efektif, drainase dapat mencegah terjadinya erosi tanah, melindungi sumber daya air tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Drainase yang baik juga dapat meningkatkan nilai properti, menarik investasi, dan mendukung pengembangan kawasan.

15. Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Sanitasi

Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan hak dasar setiap manusia. Sarana prasarana sanitasi yang optimal memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dari segi sosial, sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan rasa aman terlindungi. Secara ekonomi, sanitasi yang buruk dapat menjadi beban yang besar bagi individu, baik dalam bentuk biaya pengobatan maupun hilangnya produktivitas. Dari aspek kesehatan, sanitasi yang tidak memadai merupakan faktor utama penyebab berbagai penyakit menular, terutama penyakit yang terkait dengan air dan sanitasi.

16. Peningkatan Akses Digital di Daerah Terpencil

Kesenjangan digital di daerah terpencil mencerminkan ketimpangan struktural yang lebih luas, bukan hanya soal ketersediaan internet, tapi juga mencakup kurangnya perangkat, rendahnya literasi teknologi, hambatan ekonomi, hingga kelemahan kebijakan. Infrastruktur telekomunikasi yang masih minim, terjalnya geografis, serta investasi yang tidak menjangkau daerah 3T (terluar, tertinggal, terpencil) membuat pembangunan teknologi di wilayah tersebut berjalan lambat dan terkadang tidak tepat sasaran. Disparitas ini diperburuk oleh tingginya biaya perangkat dan langganan internet yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah sehingga akses digital menjadi semacam kemewahan yang hanya

dimiliki oleh sebagian kecil populasi. Bahkan ketika konektivitas tersedia, rendahnya literasi digital, dari penggunaan perangkat hingga kemampuan berpikir kritis secara digital, membatasi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi teknologi yang ada.

17. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan permukiman. Sistem pengelolaan yang tidak optimal, terutama pada fungsi tempat penampungan sementara (TPS) yang hanya berperan sebagai lokasi penampungan tanpa proses pengolahan lanjutan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menurunnya kualitas sanitasi. Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya berdampak pada lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

18. Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Permukiman yang Layak

Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang permukiman yang layak, khususnya di kawasan sempadan sungai diperlukan untuk mengatasi kecenderungan tumbuhnya permukiman padat dan kumuh di wilayah yang tidak sesuai peruntukan ruang. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Penataan ruang yang adaptif dan pengawasan yang efektif perlu diperkuat melalui kebijakan yang mendukung relokasi berbasis partisipatif, pengembangan kawasan permukiman baru yang sesuai RTRW, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman eksisting secara bertahap dan berkelanjutan.

19. Penguatan Nilai dan Pelestarian Warisan Budaya Lokal

Warisan budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk jati diri serta memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Potensi budaya juga menjadi sumber daya strategis yang dapat dioptimalkan dalam membangun karakter dan daya saing daerah. Di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya, upaya pelestarian nilai tradisional menghadapi tantangan dari rendahnya perhatian

terhadap cagar budaya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta melemahnya regenerasi pelaku seni dan adat. Penguatan ekspresi budaya lokal perlu terus didorong sebagai fondasi pembentukan karakter, penguatan identitas, dan peningkatan kohesi sosial yang mendukung arah pembangunan daerah.

20. Penguatan Sistem Sosial yang Responsif Gender dan Ramah Anak

Penguatan sistem sosial yang responsif gender dan ramah anak merupakan bagian penting dari upaya membangun struktur sosial yang lebih adil dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Ketimpangan peran perempuan serta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak menandakan masih lemahnya ekosistem yang mendukung kesetaraan dan sistem perlindungan. Tantangan ini menuntut penguatan norma sosial, kelembagaan, serta partisipasi yang lebih bermakna dari perempuan dan anak dalam berbagai ruang kehidupan, sebagai landasan untuk membentuk masyarakat yang aman, setara, dan berdaya saing.

21. Penguatan Stabilitas Sosial dan Ketahanan Masyarakat

Kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih memerlukan penguatan, terutama dalam pencegahan gangguan keamanan dan penyelesaian konflik sosial. Situasi ini membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum yang profesional, adil, dan berbasis kepercayaan publik, maupun dari sisi penguatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Sementara itu, upaya peningkatan literasi politik dan demokrasi partisipatif menjadi krusial dalam memperkuat kesadaran warga sebagai subjek pembangunan serta dalam menjaga stabilitas sosial-politik yang inklusif.

22. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance* dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Percepatan reformasi birokrasi dan hukum

diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi. Sistem manajemen kinerja dari SAKIP dan SPIP perlu dioptimalkan sebagai alat kendali berbasis hasil, bukan sekadar formalitas administratif. Kinerja birokrasi juga harus berorientasi pada *output* dan *outcome* yang terukur dengan penguatan budaya kerja profesional dan sistem evaluasi yang menjamin efektivitas pemerintahan.

23. Penyelarasan Perencanaan Pembangunan

Penyelarasan perencanaan pembangunan harus diupayakan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pembangunan berjalan secara terpadu dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan sinergi yang kuat antara kajian ilmiah, dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah, serta sistem informasi yang andal. Saat ini, keterbatasan integrasi data dan koordinasi lintas sektor mengakibatkan pelaksanaan program belum sepenuhnya tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Oleh karena itu, penyelarasan dokumen perencanaan menjadi sangat penting. Penguatan tata kelola perencanaan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis data merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

24. Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas dan responsif merupakan prasyarat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong efisiensi birokrasi daerah. Di Kabupaten Barito Selatan, pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, kecepatan, dan keterbukaan informasi akibat belum optimalnya sistem, regulasi, kapasitas SDM, serta infrastruktur penunjang. Upaya transformasi pelayanan publik ke arah yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat perlu terus dikedepankan sebagai pondasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Peningkatan kualitas layanan publik juga menjadi cerminan dari kesiapan daerah dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan digital.

25. Percepatan Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi dan integrasi sistem informasi lintas sektor perlu menjadi perhatian. Keterpaduan sistem informasi masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketidaksesuaian data hingga minimnya keterbukaan informasi publik yang membatasi akses masyarakat terhadap pembangunan secara aktual dan andal. Penguatan integrasi sistem ini tidak hanya bertujuan memastikan keselarasan antar penyedia data seperti BPS, Satu Data, Simdatik, hingga data internal perangkat daerah, tetapi juga mendorong penyederhanaan proses birokrasi secara struktural dan prosedural. Dengan dukungan digitalisasi yang optimal, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat melalui ketersediaan data *real-time* yang mendukung kebijakan berbasis bukti.

26. Keterbatasan Jangkauan Layanan Pemerintahan

Cakupan wilayah administrasi yang luas serta belum proporsional terhadap kapasitas layanan publik menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan inklusif. Keterbatasan jangkauan berdampak pada rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar serta lemahnya koordinasi lintas wilayah. Kondisi ini menegaskan urgensi penataan ulang wilayah administrasi, termasuk opsi pemekaran desa atau kecamatan, sebagai strategi untuk mendekatkan layanan, mempercepat respons birokrasi, dan memastikan kehadiran negara hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

27. Penguatan Ketahanan dan Produktivitas Pangan

Penguatan ketahanan dan produktivitas pangan merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Upaya ini perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pertanian lokal melalui modernisasi budidaya, perlindungan lahan produktif, dan dukungan terhadap petani skala kecil. Hal ini menjadi agenda penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi komoditas

unggulan memerlukan intervensi pada aspek teknis, kelembagaan, dan pemasaran untuk mampu memberikan kontribusi pada perekonomian. Peningkatan efektivitas budidaya perikanan dan pertanan menjadi krusial, seiring kebutuhan akan diverifikasi pangan dan gizi. Ancaman ketidakcukupan konsumsi pangan juga perlu diatasi dengan memperkuat sistem distribusi dan edukasi konsumsi pangan bergizi. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pangan daerah yang tangguh dan inklusif.

28. Penguatan Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

Penguatan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal. Upaya ini perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi teknologi budidaya, peningkatan kapasitas petani dan nelayan, serta perlindungan terhadap ekosistem yang menopang aktivitas produksi. Sektor-sektor ini berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah perdesaan. Namun, belum optimalnya efektivitas usaha budidaya perikanan dan rendahnya nilai tambah produk pertanian dan perkebunan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Intervensi pada aspek teknis, akses pembiayaan, kelembagaan usaha tani, dan penguatan rantai pasok menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing sektor ini. Kolaborasi diperlukan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem agribisnis yang efisien, tangguh menghadapi perubahan iklim, dan berorientasi pada keberlanjutan.

29. Penguatan Ketahanan Energi dan EBT

Untuk memastikan ketersediaan energi yang andal, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah. Upaya ini harus mencakup pemanfaatan potensi energi lokal, mulai dari tenaga surya, biomassa, biofuel, serta optimalisasi infrastruktur energi yang mampu menjangkau

seluruh lapisan masyarakat. Selain itu diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi serta investasi pada sektor energi menjadi kunci dalam mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih efisien dan mandiri. Penguatan ketahanan energi sekaligus sebagai menjaga keberlanjutan lingkungan guna menunjang kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.108 Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat		SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	SDM yang berdaya saing	Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
	Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan					
	Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita					
	Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan					
	Rendahnya Kemampuan Literasi dan Numerasi		SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas, dan inovasi	SDM yang berdaya saing	Penguatan Kapabilitas SDM yang Terampil dan Terdidik
	Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun			Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah		
	Rendahnya Kontribusi Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi			Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah		
	Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal		SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Ketimpangan Wilayah dan Kesejahteraan	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial
	Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan					
	Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas					
Jumlah penduduk usia produktif yang lebih	Tingginya Tingkat Pengangguran		SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan	Penurunan daya saing dan kualitas tenaga kerja	SDM yang Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
	Tingginya Proporsi Angkatan Kerja Pada Sektor Informal					
	Rendahnya Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
banyak/ mendominasi			Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja informal		
	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan		*Triple Planetary Crisis:* Perubahan Iklim , Polusi dan Kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati	Pengelolaan kawasan hutan masih belum optimal		Penguatan tata kelola lingkungan untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan ekosistem.
			SDGs 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Penerapan ekonomi konvensional tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem		
	Belum Optimalnya Kelembagaan dan Kualitas SDM Kepariwisataan Daerah		Skill Mismatch dalam Industri Pariwisata	Kurangnya keterampilan SDM Pariwisata dan Rendahnya Pemanfaatan Ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal	Potensi Ekonomi Melalui Wisata Alam	Penguatan 4A Pariwisata: Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary
	Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing		Ketergantungan Pariwisata Musiman	Terbatasnya amenitas, aksesbilitas, dan atraksi yang melaksanakan		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kaidah pariwisata berkelanjutan		
				Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman		
	Belum optimalnya daya tarik investasi di Barito Selatan		SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Keja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Produk hasil industri lokal kurang kompetitif		SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	Kekayaan sumber daya alam sebagai modalitas hilirisasi namun belum banyak yang diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri	Belum optimalnya hilirisasi produk dan kualitas SDM	Penguatan daya saing investasi dan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
				Stagnasi kinerja ekspor Indonesia dan rendahnya partisipasi dalam rantai nilai global		
	Minimnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah			Rendahnya daya saing BUMD		Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Lokal untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah
				Lemahnya skema insentif dan		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kerjasama antar daerah		
	Risiko gangguan bencana terhadap ketahanan wilayah	Banjir dan genangan	*Global Warming*	Terbatasnya kapasitassumber daya di bidang penanggulangan bencana		Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana
				Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi		
Ketersediaan sumber air baku yang melimpah	Belum Optimalnya Capaian Pembangunan Infrastruktur Air Minum Layak	Ketersediaan air bersih di perkotaan/perdesaan semakin terbatas	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	Krisis Lingkungan		Percepatan Pemerataan Infrastruktur Air Minum Layak
Terdapat konsentrasi penduduk yang terpusat di sepanjang aliran sungai yang dapat dioptimalkan sebagai koridor pengembangan sarana dan prasarana transportasi.	Jaringan Jalan yang Belum Merata			Penurunan ketimpangan wilayah dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan, serta infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah	Luas wilayah dan aksesibilitas	Penguatan Pondasi Infrastruktur Dasar hingga Daerah Terpencil
	Ketimpangan Konektivitas Antarwilayah					Peningkatan Konektivitas dan Mobilitas Barang atau Jasa
	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Irigasi			Krisis Lingkungan	Infrastruktur belum memadai	Peningkatan Kebutuhan Irigasi dalam Kondisi Baik
	Menurunnya Drainase dalam Kondisi Baik					Peningkatan Drainase dalam Kondisi Baik
	Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak					Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Sanitasi
	Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Belum Optimal			Memperkuat keamanan teknologi		Peningkatan Akses Digital di Daerah Terpencil

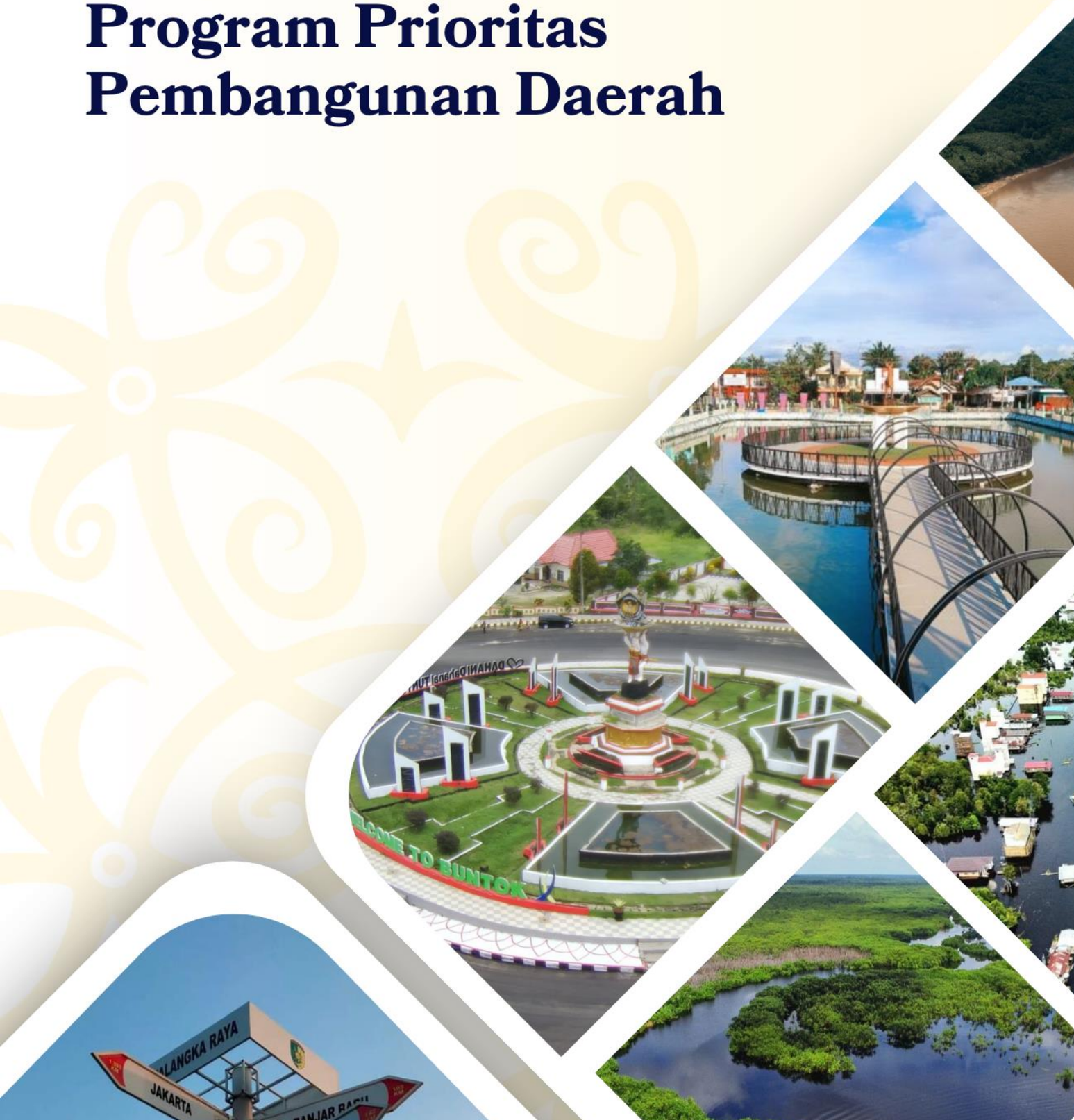
Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber		
	Penanganan Sampah Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan persampahan		Krisis Lingkungan		Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Berkelanjutan
	Meluasnya Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh di Zona Sempadan Sungai	Perkembangan permukiman padat, kumuh, dan di sempadan sungai.			Urbanisasi dan permukiman kumuh	Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Permukiman yang Layak
		Ketidak sesuaian pemanfaatan ruang				
Keberadaan suku dayak, rumah adat Huma Betang, kesenian dan tradisional daerah	Rendahnya Upaya Pelestarian Cagar Budaya		Polarisasi Sosial Budaya	Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial	Perlunya pembangunan pada bidang sosial kebudayaan	Penguatan nilai dan pelestarian warisan budaya lokal
	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Budaya			Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global		
	Ketimpangan Gender serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial		Penguatan sistem sosial yang responsif gender dan ramah anak
	Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan					
	Tingkat Keamanan dan Penanganan Tindak Kriminalitas Belum Memadai		Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme		Penguatan Stabilitas Sosial dan Ketahanan Masyarakat

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Proses Politik					
Tata kelola pemerintah digital Barito Selatan terbaik di Kalimantan Tengah (EPPD 2023)	Belum Optimalnya Upaya Pencegahan Korupsi		Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
	Belum Optimalnya Upaya Implementasi Reformasi Hukum					
	Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi					
	Akuntabilitas Pemerintahan yang Belum Optimal dan Terintegrasi					
	Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan					Penyelarasan Perencanaan Pembangunan
	Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai					Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik
	Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat					
	Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal					Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan
	Jangkauan Layanan Pemerintahan yang Terbatas Akibat Luas Wilayah dan Sebaran Penduduk yang Tidak Seimbang					Keterbatasan Jangkauan Layanan Pemerintahan
	Penurunan kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan berbasis pertanian lokal		SDGs 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan	Terbatasnya diversifikasi bahan pangan dan pengetahuan masyarakat tentang kualitas pangan serta sulitnya akses logistik	Penguatan Ketahanan dan Produktivitas Pangan
				Menurunnya lahan baku sawah		
				Tingginya ketergantungan terhadap impor pangan		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ancaman Ketidakcukupan Konsumsi Pangan			Perlunya penguatan cadangan pangan nasional		
				Stagnasi/Penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan		
	Rendahnya Produktivitas dan Penurunan Produksi pada Komoditas Perkebunan Utama		SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian	Ketergantungan pada sektor primer	Penguatan daya saing Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
	Belum Optimalnya Efektivitas Usaha Budidaya Perikanan			Menurunnya proporsi petani/nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian		
	Belum optimalnya pengelolaan energi di daerah	Keresahan dan konflik diwilayah usaha pertambangan dan perkebunan	SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau	*Reserve to Production* Energi fosil semakin menurun	Kalimantan Tengah memiliki sumber energi yang besar, baik energi terbarukan dan energi tidak terbarukan.	Penguatan Ketahanan Energi dan EBT
				Impor migas semakin meningkat		
				Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah	Tantangan pemenuhan ketahanan energi di tengah upaya transisi energi ketahanan energi	
				Sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar		

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah



BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Visi merupakan rumusan cita-cita Kepala Daerah yang menggambarkan kondisi daerah yang ingin dicapai dan diwujudkan sebagai hasil kinerja pembangunan. Visi Kepala Daerah juga mencerminkan arah pembangunan yang ingin dituju selama masa jabatan. Visi dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian pelaksanaan program pembangunan. Adapun visi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:



"**Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara**"

Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang. Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Periode ini mengusung *tagline* pembangunan yakni "Bekerja Bersama, Merangkul Semua". *Tagline* ini adalah cerminan dari semangat kolaborasi dan inklusivitas yang ingin diwujudkan dalam proses pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Frasa Bekerja Bersama, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mencapai tujuan pembangunan. Menciptakan kesadaran bahwa

dengan bekerja bersama tantangan pembangunan yang kompleks dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan frasa Merangkul Semua, menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus adil, merata, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk lebih detail mengenai makna dari visi RPJMD Barito Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera**

   Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

2. **Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing**

   Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. **Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara**

   Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan.

4. **Terwujudnya Barito Selatan Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara**

   Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi.

Visi ini merefleksikan kesinambungan dari visi provinsi maupun visi nasional, dengan fokus mewujudkan kesejahteraan daerah serta mendukung pembangunan IKN. Keselarasan visi dari nasional hingga daerah menciptakan kesinambungan arah pembangunan, dari mandat nasional yang diformulasikan secara kultural di tingkat provinsi hingga dijabarkan secara konkret di tingkat kabupaten, guna memastikan sinergi antar-level pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui strategi pembangunan lokal yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan.

Tabel 3.1 Keselarasan Visi Nasional, Kalimantan Tengah, dan Barito Selatan

Visi RPJMN 2025 - 2029	Visi RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029	Visi RPJMD Barito Selatan 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas	Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk Menyambut Indonesia Emas 2045	Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara

Sumber: RPJPN 2025 – 2045, RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029, dan RPJMD Barito Selatan 2025 – 2029

3.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi "**Terwujudnya Kabupaten Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara",** ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:



1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
6. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Penjelasan atas masing-masing misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil.

Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan jumlah dan persebaran tenaga kesehatan maupun tenaga pengajar menjadi faktor penghambat dalam pemerataan kualitas layanan dasar. Selain itu, kualitas pendidikan secara umum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya sarana dan prasarana penunjang belajar, keterbatasan fasilitas pendidikan vokasi, dan rendahnya partisipasi pendidikan lanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat

keterampilan dan produktivitas angkatan kerja lokal. Dengan demikian, penguatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Selatan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi daerah yang sejahtera dan berdaya saing. Fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan akan menjadi kunci untuk menghasilkan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil yang mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan menghadapi berbagai tantangan struktural yang memengaruhi daya saing daerah, terutama dalam hal kemiskinan, kualitas tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan sosial dan tingginya angka kemiskinan menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja dan keterampilan yang belum memadai membatasi masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, daya tarik investasi dan industri lokal masih perlu diperkuat agar mambu bersaing. Pemanfaatan sektor unggulan lokal belum optimal sebagai sumber peningkatan PAD, termasuk dari sektor agribisnis dan pariwisata yang memiliki potensi. Pembangunan pariwisata masih menghadapi kendala dalam hal dasar utilitas, amenitas, dan kelembagaan pendukung. Selain itu, ketahanan ekologi masih rentan akibat belum optimalnya tata kelola lingkungan dan lemahnya kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Oleh karena itu, pengembangan daya saing ekonomi di Barito Selatan perlu diarahkan pada penguatan sektor unggulan lokal yang ramah lingkungan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pendekatan ini menuntut integrasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan.

Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pengembangan infrastruktur wilayah adalah ketidakmerataan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur yang belum memadai, khususnya di daerah terpencil dapat menghambat laju pembangunan dan memperlebar kesenjangan antar wilayah. Permasalahan terkait jalan, jembatan, dan akses transportasi antar kecamatan serta desa perlu segera ditangani. Keterbatasan ini nantinya akan berdampak pada distribusi barang dan jasa, serta membatasi mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. Dengan perbaikan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, Kabupaten Barito Selatan dapat mengoptimalkan potensi ekonominya. Infrastruktur yang lebih baik akan memperlancar mobilitas dan akses, serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Misi 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.

Pembangunan sosial budaya di Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya. Meskipun memiliki kekayaan kearifan

lokal yang berharga, Kabupaten Barito Selatan memiliki kendala dalam kurangnya keberlanjutan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut. Di sisi lain, masih adanya kesenjangan gender yang memperburuk kesetaraan dalam partisipasi sosial juga menjadi hambatan dalam memperkuat kondisi sosial budaya daerah. Kondisi ini dapat memperlemah kualitas kohesi sosial serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kearifan lokal dan kesetaraan gender menjadi hal yang sangat mendasar untuk memastikan keberlanjutan nilai budaya di tengah modernisasi yang semakin berkembang. Sebagai daerah yang kaya dengan tradisi, Kabupaten Barito Selatan perlu menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan pelestarian budaya yang ada.

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan merupakan pondasi utama dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, kesenjangan antar dokumen perencanaan dan lemahnya sinergi lintas sektor menyebabkan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya konsisten dan terintegrasi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek kecepatan, kepastian layanan, maupun kepuasan masyarakat, terutama pada sektor-sektor layanan dasar. Transformasi digital yang berjalan belum merata dan masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur dan integrasi sistem informasi,

yang berdampak pada lambatnya proses birokrasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Terbatasnya jangkauan layanan pemerintahan ke wilayah-wilayah terpencil juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan akses pelayanan.

Penguatan tata kelola yang responsif, adaptif, dan transparan perlu dikedepankan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis digital, serta perluasan akses dan kualitas pelayanan publik. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.

Misi 6 : Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Kabupaten Barito Selatan dihadapkan pada tantangan ganda dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus energi yang berkelanjutan. Tingginya prevelansi tidakcukupan konsumsi pangan, yang turut berdampak pada persoalan gizi buruk dan stunting, menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan belum berjalan normal. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai tumbuan produksi pangan daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya sarana produksi, keterbatasan teknologi, serta rendahnya daya saing hasil komoditas lokal. Sementara itu, di sektor energi, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sedangkan potensi energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.

Pelu adanya penguatan ketahan pangan dan energi dengan strategi terpadu melalui peningkatan produktivitas di sektor pangan, pengembanagn komoditas unggulan lokal berdaya saing, serta percepatan pemanfaatan potensi EBT. Upaya ini perlu didukung oleh kolaborasi lintas sektor,

penguatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Kabupaten Barito Selatan dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi dalam menciptakan ketahanan sosial yang lebih baik untuk seluruh masyarakat

Secara nasional, Asta Cita menjadi sebuah misi atau kerangka besar yang mengarahkan pembangunan Indonesia Emas 2045 melalui delapan pilar strategis, termasuk penguatan SDM dan teknologi (Asta Cita 4), kemandirian pangan-energi-ekonomi hijau (Asta Cita 2), perluasan lapangan kerja dan infrastruktur (Asta Cita 3), serta pemberdayaan desa untuk pemerataan ekonomi (Asta Cita 6). Di tingkat provinsi, RPJMD Kalimantan Tengah 2025–2029 secara sistematis mengadopsi dan menurunkan misi nasional ini ke dalam delapan misi daerah yang saling berdampingan dengan keberlangsungan kebijakan untuk realisasi Asta Cita.

Kemudian, RPJMD Barito Selatan 2025–2029 menerjemahkan misi-misi yang ada pada RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029 ke dalam program konkret pada konteks kabupaten, diantaranya Misi 1 tentang membangun SDM yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil (sejalan Asta Cita 4 dan RPJMD Provinsi Misi 2), Misi 2 dan 6 mengembangkan ekonomi lokal dan mewujudkan ketahanan pangan serta energi (mengacu pada Asta Cita 2 serta RPJMD Misi 1), sedangkan Misi 3, 4, dan 5 memperkuat infrastruktur, sosial budaya, dan tata kelola (mengacu Asta Cita 3, 5, 8 dan RPJMD Misi 3 serta 5). Dengan demikian, terdapat alur keselarasan hierarkis mulai dari misi nasional Asta Cita, turun ke kerangka strategis RPJMD provinsi, dan akhirnya dieksekusi lewat RPJMD kabupaten. Pola ini memastikan bahwa kebijakan ini bukan hanya selaras, tetapi juga terintegrasi dan memiliki dampak nyata pada kesejahteraan dan pembangunan.

Tabel 3.2 Keselarasan Asta Cita, Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029, dan Misi RPJMD Barito Selatan Tahun 2025 - 2029

Asta Cita		Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025 - 2025		Misi RPJMD Barito Selatan 2025 – 2029	
Asta Cita 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	**Misi 2**	Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat	**Misi 1**	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	**Misi 1**	Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.	**Misi 2**	Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Asta Cita 3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;				
Asta Cita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	**Misi 3**	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.	**Misi 3**	Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
Asta Cita 3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;				
Asta Cita 5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;				
Asta Cita 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);	**Misi 5**	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan program pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.	**Misi 4**	Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
Asta Cita 3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;				
Asta Cita 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas				
Asta Cita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.				
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	**Misi 4**	Meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.	**Misi 5**	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Asta Cita 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas				
Asta Cita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;				
Asta Cita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.				
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	**Misi 1**	Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli	**Misi 6**	Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Asta Cita		Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025 - 2025		Misi RPJMD Barito Selatan 2025 – 2029	
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;		Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.		
Asta Cita 3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;				
Asta Cita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				

Sumber: RPJMN 2025 – 2029, RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029, dan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025 – 2029

Setiap misi yang dirumuskan, secara strategis disusun untuk menjawab isu-isu strategis daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya, melalui pendekatan teknokratis yang berbasis data dan analisis kebijakan. Setiap misi mengakomodasi kebutuhan pembangunan lintas sektor, mencerminkan prioritas daerah, serta menjadi landasan arah kebijakan guna mencapai visi pembangunan jangka menengah secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Adapun *cascading* misi dengan isu strategis dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini:

Misi 1 **Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan Terampil**

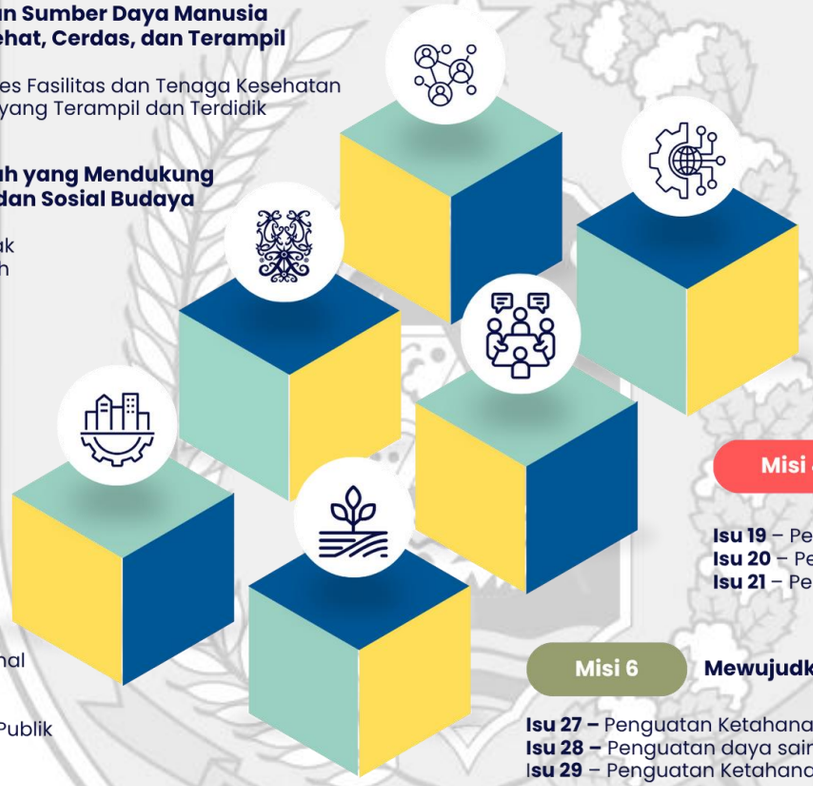
Isu 1 – Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
Isu 2 – Penguatan Kapabilitas SDM yang Terampil dan Terdidik

Misi 2 **Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Isu 3 – Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial
Isu 4 – Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
Isu 5 – Penguatan tata kelola lingkungan untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan ekosistem
Isu 6 – Penguatan 4A Pariwisata: *Attraction*, *Amenities*, *Accessibility*, dan *Ancillary*
Isu 7 – Penguatan daya saing investasi dan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Isu 8 – Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Lokal untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah
Isu 9 – Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana

Misi 3 **Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya**

Isu 10 – Percepatan Pemerataan Infrastruktur Air Minum Layak
Isu 11 – Penguatan Pondasi Infrastruktur Dasar hingga Daerah Terpencil
Isu 12 – Peningkatan Konektivitas dan Mobilitas Barang/Jasa
Isu 13 – Peningkatan Kebutuhan Irigasi dalam Kondisi Baik
Isu 14 – Peningkatan Drainase dalam Kondisi Baik
Isu 15 – Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Sanitasi
Isu 16 – Peningkatan Akses Digital di Daerah Terpencil
Isu 17 – Peningkatan Akses Digital di Daerah Terpencil
Isu 18 – Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Permukiman yang Layak



Misi 4 **Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Berbasis Kearifan Lokal**

Isu 19 – Penguatan nilai dan pelestarian warisan budaya lokalk
Isu 20 – Penguatan sistem sosial yang responsif gender dan ramah anak
Isu 21 – Penguatan Stabilitas Sosial dan Ketahanan Masyarakat

Misi 5 **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik**

Isu 22 – Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
Isu 23 – Penyelarasan Perencanaan Pembangunan
Isu 24 – Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Isu 25 – Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan
Isu 26 – Keterbatasan Jangkauan Layanan Pemerintahan

Misi 6 **Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah yang Berkelanjutan**

Isu 27 – Penguatan Ketahanan dan Produktivitas Pangan
Isu 28 – Penguatan daya saing Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
Isu 29 – Penguatan Ketahanan Energi dan EBT

Gambar 3.1 Visualisasi *Cascading* Misi dengan Isu Strategis

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan pijakan utama dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan hirearki level kinerja, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 terdapat pada level *strategic objectives* yang bersifat makro, jangka menengah, dan lintas urusan, serta menjadi kerangka acuan bagi perumusan tujuan spesifik urusan (*tactical objectives*) dan tujuan operasional (*operational objectives*) di tingkat perangkat daerah. Tujuan pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, serta menggambarkan arah capaian kinerja pembangunan yang menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah secara menyeluruh. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi terukur sebagai hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan secara lebih spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sesuai prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, dan Continuously Improve), setiap sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Selain mengacu pada visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan permasalahan dan isu lingkungan dinamis. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat dan kontekstual akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: **Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 1 "Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-1 antara lain:

   a) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter
   b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar

2. Tujuan 2: **Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 "Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-2 yaitu:

   a) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan
   b) Upaya ketahanan bencana

3. Tujuan 3: **Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 "Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-3 yaitu antara lain:

   a) Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata
   b) Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah

4. Tujuan 4: **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 "Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-4 yaitu antara lain:

   a) Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
   b) Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah

5. Tujuan 5: **Menguatkan fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 "Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-5 yaitu antara lain:

   a) Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing
   b) Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal

6. Tujuan 6: **Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 3 "Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-6 yaitu antara lain:

   a) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni
   b) Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa.

7. Tujuan 7: **Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 4 "Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-7 yaitu:

   a) Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal

8. Tujuan 8: **Menjadikan masyarakat tangguh dengan kualitas hidup yang sejahtera**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 4 "Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-8 yaitu:

   a) Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender

9. Tujuan 9: **Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik**

   Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 5 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-9 yaitu antara lain:

   a) Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital
   b) Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

10. Tujuan 10: **Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal**

    Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 6 "Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-10 yaitu:

    a) Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.

11. Tujuan 11: **Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat**

    Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 6 "Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-11 yaitu:

    a) Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan.

Secara lebih detail, berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025–2029 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 -2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.								
Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,01	71,86	72,71	73,56	74,41	75,26
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	13,10	13,18	13,27	13,35	13,44
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	56,00
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	56,00
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,25	9,44	9,62	9,81	9,99	10,18
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	64,82	66,14	67,46	68,81	70,19	71,59

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,05	68,73	69,42	70,11	70,80	71,49
Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.								
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**76,74**	**76,95**	**77,17**	**77,38**	**77,59**	**77,81**
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,74	76,95	77,17	77,38	77,59	77,81
Upaya ketahanan bencana.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,93	3,08	3,24	3,39	3,54	3,69

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,93	1,96	1,99	2,02	2,05	2,08
Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,33	3,70	4,07	4,43	4,80	5,17
	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	8,82	9,62	10,34	10,98	11,53	12,00
	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72	0,73	0,76	0,78	0,78	0,80
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	**PDRB per Kapita**	Rp/Kapita	85,30	94,98	104,65	114,33	124,00	133,68
	Indeks Gini	Indeks	0,29	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	4,61	4,19	3,77	3,35	2,93	2,51
Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,24	3,16	3,09	3,01	2,93	2,85
	Pertumbuhan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,23	0,27	0,32	0,37	0,42	0,48
Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60	6,03	6,45	6,88	7,30	7,73

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing.	Deflator PDRB	%	1,916	1,905	1,893	1,882	1,870	1,859
	Persentase Peningkatan Investasi	%	87,00	90,00	93,00	94,00	95,00	97,00
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	3,60	3,70	3,80	3,91	4,01	4,11
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	5,66	5,69	5,75	5,82	5,91	6,02
Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,90	3,92	3,95	3,98	4,00	4,02
MISI 3: Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.								
Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	53.88	54.23	55.29	56.54	57.38	58.40

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	54,99	57,80	60,62	63,43	66,24	69,05
	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	718,00	788,50	859,00	929,50	1000,00	1070,50
Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa.	Rasio Konektivitas	%	0,55:0,58	0,56:0,59	0,57:0,60	0,58:0,61	0,59:0,62	0,60:0,63
MISI 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal								
Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju.	Indeks Harmoni	Indeks	6,59	6,60	6,65	6,67	6,70	6,72
Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal.	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	Indeks	95	95	95	95	95	95
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	59	59	59	60	60	60
	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,75	57,45	58,00	58,70	59,25	59,94
	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	2,75	3,00	3,35	3,85	4,00	4,25
Menjadikan masyarakat tangguh dengan kualitas hidup yang sejahtera.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,25	93,50	93.85	94,15	95,00	95,55

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	86,40	86,43	86,47	86,50	86,53	86,56
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,53	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,45	65,00	65,55	66,12	66,85	67,55
	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,00	62,05	62,10	63,00	63,85	64,12
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Maju	Maju	Maju	Inklusif	Inklusif	Inklusif
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik								
Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik.	**Indeks Pelayanan Publik**	Indeks	2,50	2,63	2,75	2,88	3,00	3,13
Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	78,50	80,13	81,75	83,38	85,00	86,63
	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,90	2,93	2,95	2,98	3,00	3,03
	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Nilai	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat IV

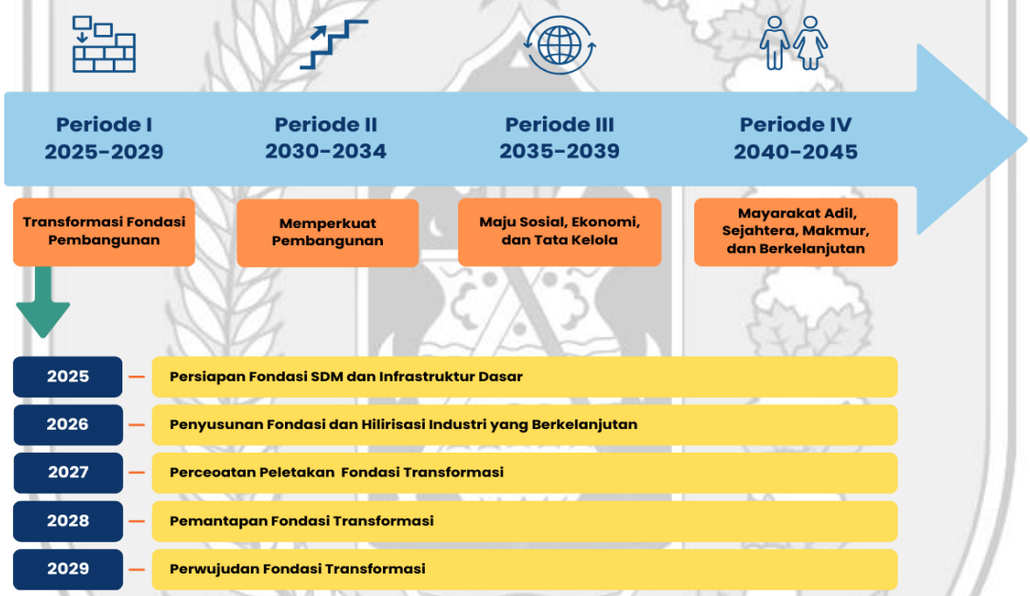
Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	A	A	A	A	A	A
Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,00	66,50	68,00	69,50	71,00	72,50
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,10	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	29,75	30,47	31,23	32,01	32,82	33,64
	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Indeks	71	72	73	74	75	76
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	75,00	76,50	78,00	79,50	81,00	82,50
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,50	77,00	77,50	77,80	80,00	80,30
	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	11,40	11,40	11,60	12,00	12,40	12,80

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks/ Nilai	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	75	76	77	78	79	80
MISI 6: Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan								
Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	**68,00**	**69,08**	**70,01**	**71,81**	**73,11**	**75,14**
Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	95,20	95,59	95,99	96,38	96,77	97,16
	Nilai Tukar Petani	Nilai	123,36	124,97	126,58	128,19	129,80	131,41
	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	330,00	262,50	268,75	275,00	281,25	287,50
	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Nilai	340,00	346,67	353,33	360,00	366,67	373,33
Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,00	20,25	23,50	26,75	30,00	33,25

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT).	Intensitas Energi Primer	SBM/RP Milyar	183,00	179,75	176,50	173,25	170,00	166,75
	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rangkaian kerja dan fokus pembangunan Kabupaten Barito Selatan periode 2025–2029 merujuk pada RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-2045. Tahap pembangunan jangka panjang tersebut terbagi ke dalam empat periode yang masing-masing memiliki periode lima tahun. Lebih lanjut, terdapat dua tahapan utama perencanaan RPJPD Barito Selatan 2025-2045, yakni Masyarakat Prasyarat Lepas Landas dan Lepas Landas. Tahapan ini kemudian dikontekstualisasikan pada empat periode pembangunan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Periodesasi Target Pembangunan RPJPD dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD 2025–2029

RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 merupakan fase implementatif dari RPJPD 2025–2045 dan berfungsi sebagai alat operasional utama untuk mencapai visi jangka panjang daerah. Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2045, yaitu “Barito Selatan yang Maju, Bermartabat, Adil, Sejahtera, Makmur, dan Berkelanjutan”, diterjemahkan ke dalam enam misi strategis dan kerangka program jangka menengah dalam RPJMD. Dokumen RPJMD menetapkan fokus, seperti peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, pengembangan SDM, penguat ekonomi lokal, infrastruktur, dan pemerintahan yang baik, yang mengalir dari mandat RPJPD.

RPJPD Kabupaten Barito Selatan pada periode satu (2025–2029) akan mengusung tema *Transformasi Fondasi Pembangunan*. Masing-masing tahun memiliki arah kebijakan masing-masing yang bermuara pada terwujudnya fondasi pembangunan. Pada tahun pertama, arah kebijakan akan berfokus pada pembangunan fondasi pada aspek SDM dan infrastruktur dasar. Hal ini penting sebab SDM dan infrastruktur dasar menjadi basis dalam pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Tahun kedua, inovasi dan hilirisasi industri adalah dua faktor yang menjadi sasaran. Dalam tahap ini, dilakukan kerjasama dengan pihak badan usaha untuk berinvestasi mengembangkan industri berkelanjutan di wilayah Kabupaten Selatan. Selain itu, akselerasi inovasi yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi dengan cara menjalin kerjasama dengan mitra daerah. Di samping menjalin kerjasama, penyusunan peta jalan yang komprehensif serta reformasi regulasi juga patut menjadi perhatian.

Tahun pertama dan kedua menjadi kritikal dalam memastikan jalan awal dalam pembangunan pondasi telah terbangun, tahun ketiga dan tahun keempat percepatan dan penguatan pondasi melalui berbagai macam program pembangunan di sisi SDM, infrastruktur dasar, inovasi dan industri berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan regulasi dan pemaksimalan investasi menjadi kunci untuk mewujudkan fondasi pembangunan. Selain itu, bentuk kerjasama dalam proses pembangunan juga perlu dilaksanakan dengan melibatkan badan usaha, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun terakhir fondasi pembangunan diharapkan telah tercapai. Tahun ini menjadi momentum bagi Kabupaten Barito Selatan melakukan evaluasi fondasi yang telah terbangun yang selanjutnya menyusun strategi optimilasisasi serta memperkuat fondasi.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran pembangunan ditujukan untuk memberikan gambaran rangkaian kinerja yang mungkin tercapai hingga tahun 2029, sebagai pertimbangan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu srategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025-2029. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025–2029. Penjelasan terkait sasaran pembangunan di Kabupaten Barito Selatan dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1.1. Tema Pembangunan

Pada tahun 2026, tahap *Persiapan Pondasi SDM dan Infrastruktur Dasar* mengusung tema peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dasar, dan penguatan nilai budaya. Hal ini sejalan dengan misi pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (tahun rencana 2026 – 2030), yaitu:

- Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil,
- Misi 3: Pembangunan infrastruktur wilayah untuk percepatan ekonomi dan sosial budaya,
- Misi 4: Penguatan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal.

Langkah ini bertujuan untuk membangun fondasi pendidikan, layanan kesehatan, dan budaya lokal sebagai pijakan awal. Memasuki tahun 2027, tahap *Pondasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan* mengangkat tema ketahanan pangan dan energi yang sejalan dengan misi:

- Misi 2: Pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya dengan kelestarian lingkungan,
- Misi 6: Ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.

Fokusnya adalah mendorong hilirisasi berbasis komoditas lokal guna menciptakan kemandirian ekonomi dan energi. Pada tahun 2028, tahap *Percepatan Peletakan Pondasi Transformasi* dengan tema akselerasi infrastruktur dan tata kelola responsif selaras dengan:

- Misi 3, mempercepat infrastruktur ekonomi dan budaya, serta
- Misi 5, mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan pelayanan publik.

Tahap tersebut menandai pergeseran fokus pada kualitas layanan publik dan fondasi struktural pemerintahan. Selanjutnya, tahun 2029 menjadi tahap *Pemantapan Pondasi Transformasi* dengan tema penguatan pembangunan *pentahelix* inklusif. Semua misi 1–6 diberdayakan secara simultan, baik meliputi SDM, ekonomi, infrastruktur, budaya, tata kelola, pangan maupun energi. Hal tersebut menunjukkan puncak konsolidasi pondasi menuju daerah yang lebih adaptif dan tangguh. Kemudian, pada tahun 2030, tahap *Perwujudan Pondasi Transformasi* diterjemahkan sebagai tema pembangunan infrastruktur berkualitas, pelestarian budaya lokal, dan layanan publik profesional. Misi 1 – 6 kembali bersinergi yang menunjukkan bahwa seluruh program telah mengakar dan siap didorong menuju fase implementasi lanjutan di periode berikutnya.

Secara keseluruhan, rencana tahunan ini memperlihatkan kesinambungan dan sistematika mulai dari memperkuat fondasi yang meliputi peningkatan kapasitas SDM dan budaya, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, mempercepat tata kelola dan infrastruktur, melakukan konsolidasi seluruh sektor, serta mewujudkan hasil akumulatif dari keseluruhan tahapan pembangunan yang telah dilakukan. Setiap tema tahunan terintegrasi dengan misi strategis RPJMD untuk memastikan pembangunan berjalan berurutan, fokus, dan hasilnya dapat terukur.

Tabel 3.4 Keselarasan Tahap dan Tema Pembangunan terhadap Misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (Tahun Rencana 2026 – 2030)

Tahap Pembangunan		Tema Pembangunan	Misi
2026	Persiapan Pondasi SDM & Infrastruktur Dasar	Persiapan Fondasi Pembangunan Daerah melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan Ketahanan Nilai-Nilai Sosial Budaya	**(1)** Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
			(3) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
			(4) Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
2027	Penyusunan Pondasi dan Hilirisasi Industri yang Berkelanjutan	Pembangunan Pondasi Hilirisasi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Energi yang Berkelanjutan	**(2)** Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
			(6) Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan
2028	Percepatan Peletakan Pondasi Transformasi	Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	**(3)** Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
			(5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
2029	Pemantapan Pondasi Transformasi	Pemantapan Pembangunan Pentahelix Menuju Daerah Tangguh, Maju, dan Adaptif Berbasis Inklusivitas	**(1)** Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
			(2) Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
			(3) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
			(4) Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
			(5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
			(6) Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan
2030	Perwujudan Pondasi Transformasi	Perwujudan Transformasi Daerah melalui Infrastruktur Berkualitas, Budaya Lokal, dan Pelayanan Publik yang Professional	**(1)** Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
			(2) Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
			(3) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
			(4) Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
			(5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
			(6) Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025 – 2029



Gambar 3.3 Tahap dan Tema Pembangunan

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029 memandatkan arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Kabupaten Barito Timur dalam Klaster Buntok di Zona Timur. Pada dokumen tersebut, zona timur Kalimantan Tengah memiliki tema pembangunan lumbung energi baru dan terbarukan (EBT), hilirisasi SDA, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Lebih detail, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Klaster Buntok akan memiliki 3 tema pembangunan yaitu hub transportasi barang, pengembangan industri hulu agro, dan sentra pangan terintegrasi. Arah pembangunan ini ditentukan sebab Klaster Buntok dinilai memiliki potensi pertanian yang melimpah dan posisi yang strategis untuk menjadi mitra pembangunan IKN. Akan tetapi, potensi tersebut sampai saat ini masih belum maksimal dikarenakan minimnya fasilitas pengolahan serta sarana prasana, berimplikasi pada rendahnya produktivitas di wilayah tersebut. Maka dari itu, dalam periode 2025–2029, tiga arah pembangunan ini akan menjadi dasar dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Hub transportasi barang, pengembangan industri hulu agro, dan sentra pangan terintegrasi menjadi arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang dimandatkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator pembangunan makro yang menjadi sasaran pada tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Sasaran Pembangunan Makro Klaster Buntok

No	Indikator Pembangunan Makro	*Baseline* 2025	Target 2029
1	PDRB per Kapita (Juta Rp)	78.83	113.93
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5.08	3.88
3	Rasio Gini (Indeks)	0.31	0.3
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	74.11	76.08
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76.34	77.25
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1.89	6.35

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2025–2029

3.2.1.2. Upaya Big *Push* Pembangunan

Dalam Dokumen RPJPD Barito Selatan 2025-2045 arah kebijakan pembangunan ditetapkan melalui upaya *big push* sebagai akselerasi transformasi ekonomi maupun sosial. Periodesasi tahap pertama adalah pondasi pembangunan. Fokus pada periode ini berada pada membangun hal-hal dasar daerah mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan dasar, penyediaan infrastruktur pendukung serta penguatan kelembgaan untuk mendorong kesiapan menuju percepatan pembangunan tahap selanjutnya.

Pada transformasi ekonomi, upaya *big push* dilakukan dengan mendorong sektor-sektor unggulan yang berpotensi untuk menjawab tantangan provinsi dan nasional. Transformasi sosial di sisi lain berfokus pada optimalisasi produktivitas dari momentum bonus demografi yang dirasakan oleh Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2045 dengan jalan peningkatan kesehatan dan pendidikan. Hal ini krusial sebab menjalankan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat dan inklusif dapat mendukung pemerataan di Kabupaten Barito Selatan.

Transformasi Ekonomi

Penentuan rencana transformasi ekonomi di Kabupaten Barito Selatan disusun atas pertimbangan arah kebijakan dalam RPJPN 2025-2045. Kesenjangan antarwilayah merupakan satu hal yang menjadi fokus utama dokumen perencanaan 2025-2045. Kontribusi ekonomi Pulau Kalimantan masih relatif kecil dibandingkan Pulau Jawa, sehingga ditargetkan mengalami peningkatan peran dalam perekonomian nasional. Hal ini berdampak pada target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan Barito Selatan.

Dalam RPJPN, kontribusi PDRB Indonesia Barat diarahkan bergeser ke Indonesia Timur, dengan target kontribusi Kalimantan sebesar 11,3 persen pada tahun 2045. Untuk periode awal tahun 2025-2029, kontribusi Kalimantan ditargetkan mencapai 9,6 persen dengan pertumbuhan tahunan 5,6-6,3 persen. Bagi Provinsi Kalimantan

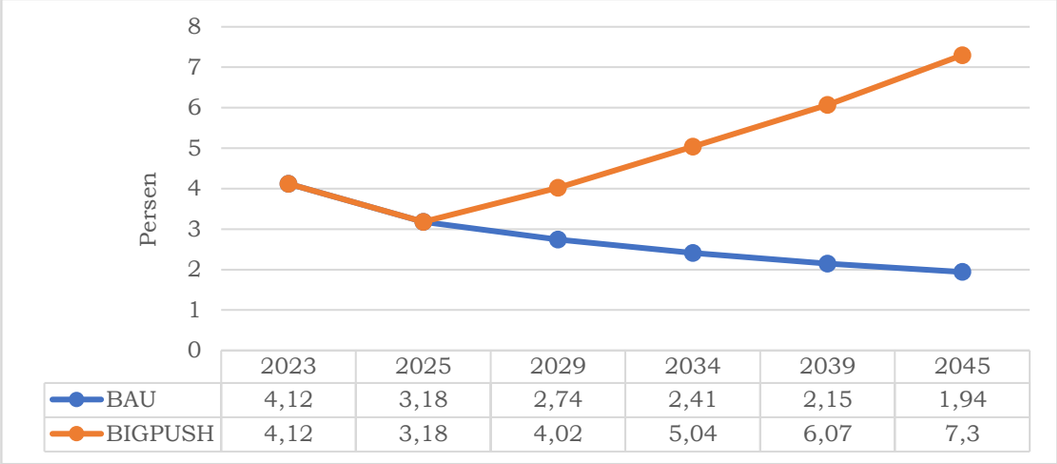
Tengah, ini merupakan tatantangan. Dalam skenario *business as usual* (BAU), kontribusi Provinsi Kalimantan Tengah naik dari 11,32 persen pada tahun 2022 menjadi 12,87, persen pada tahun 2045. Namun, melalui skenario *big push*, kontribusi Kalimantan Tengah diproyeksi meningkat signifikan menjadi 19,17 persen pada tahun 2045. Target *big push* Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diturunkan pada masing-masing kabupaten, berdasarkan zonasi dan klaster. **Kabupaten Barito Selatan berada di Zona Timur dan masuk dalam Klaster Buntok.**

Tabel 3.6 Kontribusi PDRB Skenario *Big push* Setiap Kluster di Provinsi Kalimantan Tengah

Kluster	Baseline 2022	2025	2030	2035	2040	2045
Zona Barat						
Pangkalan Bun	20,14%	20,13%	19,92%	19,55%	19,04%	18,25%
Sampit	23,77%	23,63%	23,32%	22,77%	22,08%	21,12%
Zona Tengah						
Palangka Raya	19,36%	19,70%	19,47%	19,05%	18,51%	17,72%
Kuala Kapuas	14,53%	14,53%	14,44%	14,21%	13,87%	13,33%
Zona Timur						
Buntok	9,40%	9,00%	9,76%	11,01%	12,57%	14,88%
Muara Teweh	12,81%	13,02%	13,09%	13,41%	13,93%	14,70%

Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan, 2025-2045

Mengacu pada mandat *big push* dalam RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2025-20245, Kabupaten Barito Selatan didorong untuk meningkatkan perannya sebagai bagian dari Zona Timur dan Klaster Buntok. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu adanya strategi perencanaan yang progresif dan optimis, sebagaimana diarahkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045. Strategi tersebut adalah melakukan upaya *big push* terhadap perekonomian Kabupaten Barito Selatan. Lebih lanjut strategi *big push* yang diterapkan dalam transformasi ekonomi Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:



	2023	2025	2029	2034	2039	2045
BAU	4,12	3,18	2,74	2,41	2,15	1,94
BIGPUSH	4,12	3,18	4,02	5,04	6,07	7,3

Gambar 3.4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan Skema BAU dan *Bigh Push*, 2025-2045

Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan, 2025-2045

Proyeksi laju pertumbuhan Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan adanya penurunan secara gradual pada periode baseline hingga akhir periode RPJPD dalam skema BAU. Kondisi ini menegaskan urgensi perlunya trategi percepatan melalui pendekatan *big push* pada sektor-sektor potensial, guna merespons tantangan pembangunan Kalimantan sebagaimana diarahkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Kalimantan Tengah 2025-2045. Adapun di Zona Timur, Klaster Buntok termasuk Kabupaten Barito Selatan, terdapat tiga fokus pembangunan, yaitu Energi Baru Terbarukan (EBT), *Food Estate,* dan Pengembangan Jasa Pariwisata Lingkungan. Ketiga sektor ini menjadi pilar utama dalam mendorong transformasi ekonomi Barito Selatan melalui skenario *big push.*

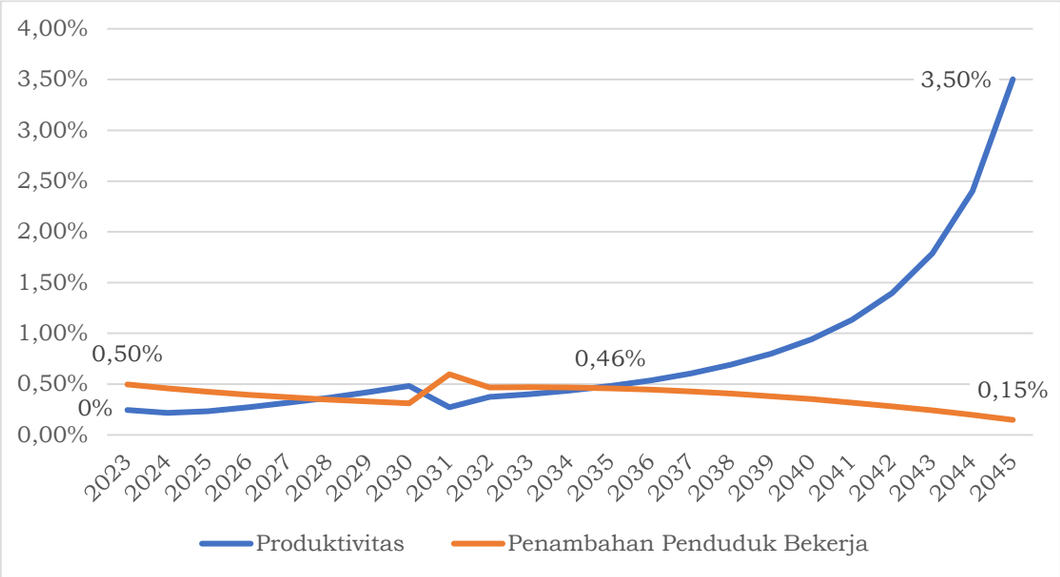
Periode pembangunan Barito Selatan tahun 2025-2029, sebagai tahap awal RPJPD, memiliki peran sebagai pondasi transformasi untuk persiapan upaya *big push*. Pada periode pertama dan kedua RPJPD, perekonomian Barito Selatan memasuki tahapan Masyarakat Prasyarat Lepas Landas dengan fokus pemenuhan aspek dasar, seperti pemenuhan fasilitas dasar prasarana umum, peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan awal industri dan pengolahan komoditas sumber daya alam. Diharapkan ketika aspek dasar tersebut dipenuhi, periode ketiga dan keempat akan mencapai tahapan Masyarakat Lepas Landas yang mana pembangunan lanjut

pada industri pengolahan dengan berbagai teknik serta pengembangan pada sektor yang berbasis kapital untuk peningkatan perekonomian daerah. Pada periode ketiga dan keempat, Kabupaten Barito Selatan dapat memposisikan diri sebagai pendorong bagi perekonomian di Zona Timur. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut, pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah telah melewati puncak dan mengalami kondisi stabil hingga tahun 2045 sedangkan pada periode 2035 hingga 2045, Kabupaten Barito Selatan akan menerima bonus demografi. Hal ini menjadi momentum untuk menggeser dominasi Zona Barat menjadi seimbang dengan Zona Timur.

Transformasi Sosial

Transformasi sosial berperan penting dalam *big push* pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu Kabupaten Barito Selatan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, populasi penduduk usia produktif menjadi pondasi pelaksanaan *big push.* Sebagaimana dilihat dari proyeksi demografi pada Sub Bab 2.1.7. Demografi, Kabupaten Barito Selatan akan merasakan bonus demografi pada periode ini. Momentum bonus demografi ini berpotensi menghasilkan produktivitas tinggi jika dimaksimalkan, namun menjadi malapetaka bila salah arah.

Mengacu pada RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, skenario *big push* dalam mendorong produktivitas tenaga kerja diatargetkan untuk dapat melaju di tahun 2030. Hal ini dilihat dari Gambar 3.4 yang menunjukkan persilangan temu antara laju penambahan angkatan kerja yang bekerja dengan tingkat produktivitas. Untuk mencapai tahapan pembangunan tersebut, sesuai arah RPJPD, periode RPJMD Barito Selatan tahun 2025-2029 menjadi fase krusial bagi Kabupaten Barito Selatan dalam memperkuat fondasi sumberdaya manusia sebagai dasar transformasi sosial ke depan. Penguatan tidak hanya berfokus meningkatkan kapasitas tenaga kerja, namun memantapkan kualitas pendidikan dari level dasar hingga menengah tinggi menjadi prioritas pembangunan agar peningkatan kualitas SDM berjalan secara berkelanjutan.



Gambar 3.5 Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Bekerja dengan Asumsi *Big push*

Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045

Sebagai langkah strategis, upaya peningkatan produktivitas dengan tenaga kerja eksisting adalah akselerasi melalui *labour intensive.* Melihat komposisi dan struktur angkatan kerja, strategi ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan perekonomian secara masif untuk meningkatkan aktivitas perekonomian yang pada akhirnya menciptakan taraf kesejahteraan yang lebih tinggi. Strategi ini perlu diiringi dengan peningkatan pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil sesuai potensi wilayah dan kebutuhan lapangan kerja. Di sisi lain, perluasan kesempatan kerja perlu diarahkan secara konkret melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan sektor-sektor produktif padat karya, serta integrasi program kewirausahaan lokal.

3.2.1.3. Arah Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman penting yang mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Keduanya disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Melalui rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga mampu menciptakan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Berikut tabel strategi dan arah kebijakan RPJMD 2025 – 2029 dengan tahun rencana 2026 – 2030.

Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 (Tahun Rencana 2026–2030)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.							
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan inklusif.	Peningkatan partisipasi sekolah melalui wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk melalui beasiswa pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi dan keluarga kurang mampu; pakaian/seragam sekolah gratis; dan pembangunan sekolah rakyat serta sekolah unggulan garuda.	✓	✓	✓	✓	✓
		Intensifikasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui kebijakan satu keluarga satu sarjana dengan pendirian perguruan tinggi serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) sesuai sektor potensial wilayah.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dan skema integrasi SMK dengan BLUD untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli, terampil, siap kerja, dan mampu bersaing (DUDI).	✓			✓	✓
		Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan formal serta informal dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	✓			✓	✓
	Meningkatkan kualitas literasi dan numerasi masyarakat secara menyeluruh.	Penguatan budaya literasi dan numerasi untuk membentuk pola pikir kritis dan inovatif melalui penyediaan media pembelajaran yang adaptif terhadap jenjang dan lingkungan belajar.				✓	✓
		Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemenuhan mutu dan layanan pendidikan yang berkualitas dengan penguatan nilai-nilai keagamaan dan muatan kebudayaan lokal berbasis falsafah “Belom Bahadat”.	✓				
	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi lulusan pendidikan.	Penguatan kapasitas tenaga kerja terdidik melalui peningkatan partisipasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi.	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kependidikan serta pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan mata pelajaran.	✓			✓	✓

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja dan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat.	✓			✓	✓
	Memperkuat infrastruktur dan mekanisme tata kelola pendidikan yang efektif.	Penguatan infrastruktur pendidikan melalui peningkatan kualitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi dan TIK, serta media pembelajaran sebagai sarana pendukung mutu pendidikan.	✓			✓	✓
		Optimalisasi tata kelola pendidikan dasar dan menengah pertama melalui penataan struktur organisasi, pembenahan alur koordinasi, serta penyempurnaan sistem manajemen layanan pendidikan.				✓	✓
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar	Memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan.	Peningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan perluasan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat.	✓	✓	✓	✓	✓
	Optimalisasi pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat.	Percepatan penangangan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular.	✓			✓	✓
		Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat pravelensi kategori tinggi.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca persalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.	✓	✓	✓	✓	✓
	Memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif.	Perluasan cakupan dan keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa.	✓			✓	✓
		Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine.	✓			✓	✓
		Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis.	✓	✓	✓	✓	✓

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis.	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan.				✓	✓
		Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses.	✓	✓	✓	✓	✓
Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.							
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan	Pelestarian cadangan air baku	Penguatan ketahanan cadangan air baku			✓	✓	✓
	Pelestarian fungsi ekologis hutan.	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan.			✓	✓	✓
Upaya ketahanan bencana	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana.	Penguatan kapasitas mitigasi kebencanaan serta penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi dan data			✓	✓	✓
	Pengendalian melalui solusi berbasis alam sebagai ketahanan bencana.	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian risiko bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran hutan.		✓	✓	✓	✓
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata.	Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata.	Penguatan infrastruktur akomodasi dan layanan pendukung pariwisata yang berdaya saing		✓	✓	✓	✓
	Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan pariwisata unggulan.	Pengembangan pariwisata berbasis jasa lingkungan.			✓	✓	✓
Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah	Meningkatkan daya saing produk lokal.	Pengembangan 1 desa 1 produk berdasarkan potensi daerah.	✓	✓	✓	✓	✓

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan kualitas infrastruktur pasar dan sentra UMKM.	Optimalisasi pengembangan pasar dan sentra UMKM sebagai pusat aktivitas ekonomi		✓	✓	✓	✓
	Optimalisasi sistem rantai pasok dan manajemen logistik.	Pengembangan layanan logistik untuk mendukung peningkatan perdagangan.		✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kapasitas industri pengolahan produk lokal.	Pengembangan dan penguatan pusat industri pengolahan produk untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.		✓	✓	✓	✓
	Peningkatan nilai ekonomi aset daerah.	Pengembangan dan optimalisasi peran koperasi, BUMD dan BULD dalam perekonomian daerah.		✓	✓	✓	✓
	Peningkatan daya saing produk lokal.	Optimalisasi potensi produksi tanaman hutan berbasis kearifan lokal dengan prinsip berkelanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.			✓	✓	✓
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Penguatan Puskesmas dan Poskesdes, mobilisasi tenaga kesehatan, Bantuan siswa miskin, pembangunan ruang kelas baru, Pengembangan UMKM, hilirisasi produk pertanian/perkebunan, Pembangunan jalan desa, SPAM, dan sanitasi, Pelatihan ASN, digitalisasi layanan publik, Program bantuan sosial, pemberdayaan kelompok rentan **(Multi Dimensi)**	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, Pemerataan akses pendidikan berkualitas, Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, Peningkatan infrastruktur dasar, Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN, Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat **(Multi Dimensi)**	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah	Pengembangan tenaga kerja produktif dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan sektor strategis daerah.	Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pengembangan kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓
	Penguatan lapangan kerja formal berbasis ekspansi usaha produktif.	Peningkatan dan pengembangan lapangan kerja formal melalui perluasan sektor usaha.	✓	✓	✓	✓	✓
	Perlindungan tenaga kerja kelompok rentan dari adanya risiko sosial.	Peningkatan akses dan kepesertaan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.	✓	✓	✓	✓	✓

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing	Penguatan posisi ekonomi daerah dalam rantai nilai global.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema kerjasama regional dan internasional.			✓	✓	✓
		Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah.	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan Barito Selatan sebagai daerah penyangga IKN.	Pembangunan dan pengembangan Barito Selatan sebagai gerbang Kalimantan Tengah untuk mendukung IKN sebagai hub ekonomi yang mendorong aktivitas ekonomi maju dan kompetitif.			✓	✓	✓
Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	Peningkatan kapasitas fiskal daerah.	Peningkatan dan penguatan kondisi fiskal daerah melalui optimalisasi PAD sesuai dengan potensi daerah, peningkatan proporsi belanja program pembangunan, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif.			✓	✓	✓
	Pembenahan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan pembangunan	Pengelolaan keuangan daerah yang efektif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.	✓	✓	✓	✓	✓
Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.							
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni	Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan sanitasi.	Pemerataan akses terhadap air bersih dan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi serta sanitasi aman di kawasan permukiman.	✓		✓	✓	✓
		Optimalisasi, pembinaan, dan pengawasan cakupan dan kualitas drainase lingkungan permukiman.	✓		✓	✓	✓

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyediaan sarana pengelolaan sistem air limbah domestik terpadu dan berkelanjutan untuk skala regional, skala kota, dan skala kawasan.	✓		✓	✓	✓
		Pengembangan tata kelola sampah yang menyeluruh dan terpadu dari sumber timbulan hingga tempat pemrosesan akhir secara berkelanjutan dan inklusif.	✓		✓	✓	✓
	Meningkatkan akses jaringan listrik.	Peningkatan konektivitas dan distribusi jaringan tenaga kelistrikan serta pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, terkhususnya bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu.	✓		✓	✓	✓
	Membangun fasilitas pelayanan publik.	Pengembangan fasilitas pelayanan dasar dalam meningkatkan penguatan kapasitas ketahanan dan tata kelola pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, industri, pariwisata, dan sektor lainnya.			✓	✓	✓
		Pembangunan wilayah perkotaan yang maju, layak, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang terintegrasi.			✓	✓	✓
Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa	Mengembangkan konektivitas wilayah berkelanjutan.	Optimalisasi pembangunan jalan nasional yang menjadi konektivitas antarwilayah sehingga mempermudah pergerakan barang, jasa, dan manusia serta meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan konektivitas jalan menuju wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat untuk menangkap peluang perekonomian yang lebih tinggi.	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengadakan moda transportasi umum.	Pengembangan moda transportasi yang terintegrasi dan terjangkau dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat.	✓		✓	✓	✓
	Memperbaiki dan membangun jalan, jembatan, dan jalur irigasi.	Penguatan infrastruktur dasar jembatan dalam rangka memenuhi keterhubungan wilayah yang dibatasi oleh aliran sungai.			✓	✓	✓
		Perbaikan dan/atau pelebaran infrastruktur jalan arteri primer dan kolektor primer dalam rangka meningkatkan mobilitas masuk ke Barito Selatan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan dan perkembangan wilayah.	✓	✓	✓	✓	✓

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan jaringan irigasi primer sebagai upaya peningkatan ketahanan dan produktivitas pangan, terkhususnya pertanian, dalam rangka mendukung Barito Selatan sebagai lumbung pangan.				✓	✓
	Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur transportasi	Pembangunan jaringan transportasi berupa terminal sebagai penghubung mobilitas barang dan jasa, seperti Terminal Tarusan, terminal khusus, dan terminal penumpang tipe C.	✓	✓	✓		
		Pembangunan pelabuhan pengumpul untuk meningkatkan mobilitas dan akses transportasi untuk barang dan jasa pada skala regional.	✓	✓	✓		
		Pembangunan pelabuhan perikanan sebagai sarana bongkar muat perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan aktivitas perikanan.	✓	✓	✓		
		Optimalisasi pembangunan bandara dalam rangka meningkatkan keterhubungan dan konektivitas wilayah antarpulau untuk memperluas skala aktivitas perekonomian regional dan nasional.			✓	✓	✓
		Optimalisasi pembangunan infrastruktur pertambangan batubara dalam meningkatkan potensi dan pencatatan sumber daya hasil pertambangan.	✓	✓	✓		
Misi 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.							
Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal	Menguatkan harmoni sosial, keagamaan, ketertiban, dan demokrasi yang berkeadilan.	Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	✓			✓	✓
		Penguatan kerukunan inter dan antar umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat.				✓	✓
		Penguatan stabilitas sosial melalui peningkatan sistem keamanan dan penanganan kriminalitas yang responsif, disertai internalisasi nilai kebangsaan melalui pendidikan ideologi Pancasila dan pembinaan politik beretika, serta penguatan peran organisasi kemasyarakatan secara sinergis.				✓	✓

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemanfaatan kesenian serta percepatan pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan.	Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan disertai penyelenggaraan festival budaya yang terintegrasi dengan agenda daerah untuk memperkuat identitas budaya dan partisipasi masyarakat.	✓			✓	✓
		Pengadaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dan melestarikan budaya.	✓			✓	✓
Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dan perlindungan dari kekerasan.	✓			✓	✓
		Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat dalam berkompetensi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing.	✓			✓	✓
	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga.				✓	✓
		Peningkatan pelayanan, advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.	✓			✓	✓
	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.	Penguatan sistem respons dan pemulihan perlindungan anak yang komprehensif.				✓	✓
	Menekan kesenjangan sosial dengan kebijakan publik inklusif.	Penguatan jaring pengaman sosial berbasis pendekatan produktivitas yang adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan.				✓	✓
		Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak keluarga rentan, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia.	✓			✓	✓
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik							

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital	Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif	Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsif.				✓	✓
		Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.			✓	✓	✓
		Penguatan tata kelola data pembangunan melalui integrasi sistem database sektoral yang konsisten, baik antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan.				✓	✓
Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif.	Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.			✓	✓	✓
		Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi.				✓	✓
		Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif.			✓	✓	✓
	Penguatan supremasi hukum yang transparan, adil, dan netral.	Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.				✓	✓
	Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif.	Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	✓	✓	✓	✓	✓

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan.	✓	✓	✓	✓	✓
Misi 6 : Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan							
Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan kawasan hilirisasi komoditas pangan.	Percepatan pengintegrasian kawasan hilirisasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Selatan		✓	✓		
		Advokasi kebijakan yang mendukung hilirisasi pangan, termasuk perizinan yang mudah, standar kualitas produk, dan insentif fiskal.		✓	✓	✓	✓
		Penyusunan kajian untuk pemetaan identifikasi komoditas unggulan dan potensi pengembangan wilayah	✓	✓			
	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas komoditas pangan.	Penyusunan rencana strategis yang terukur hilirisasi pangan, mencakup timeline, target, skema pembiayaan, dan kebutuhan anggaran	✓	✓			
		Penyelenggaraan pelatihan bagi petani dan pekerja terkait teknik pengolahan pangan, manajemen produksi, dan teknologi pengolahan.		✓	✓	✓	✓
Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Mendorong integrasi sistem pertanian berkelanjutan yang mendukung ketahanan energi.	Pengembangan model pertanian terpadu yang mengintegrasikan aspek pangan dan energi.		✓	✓	✓	✓

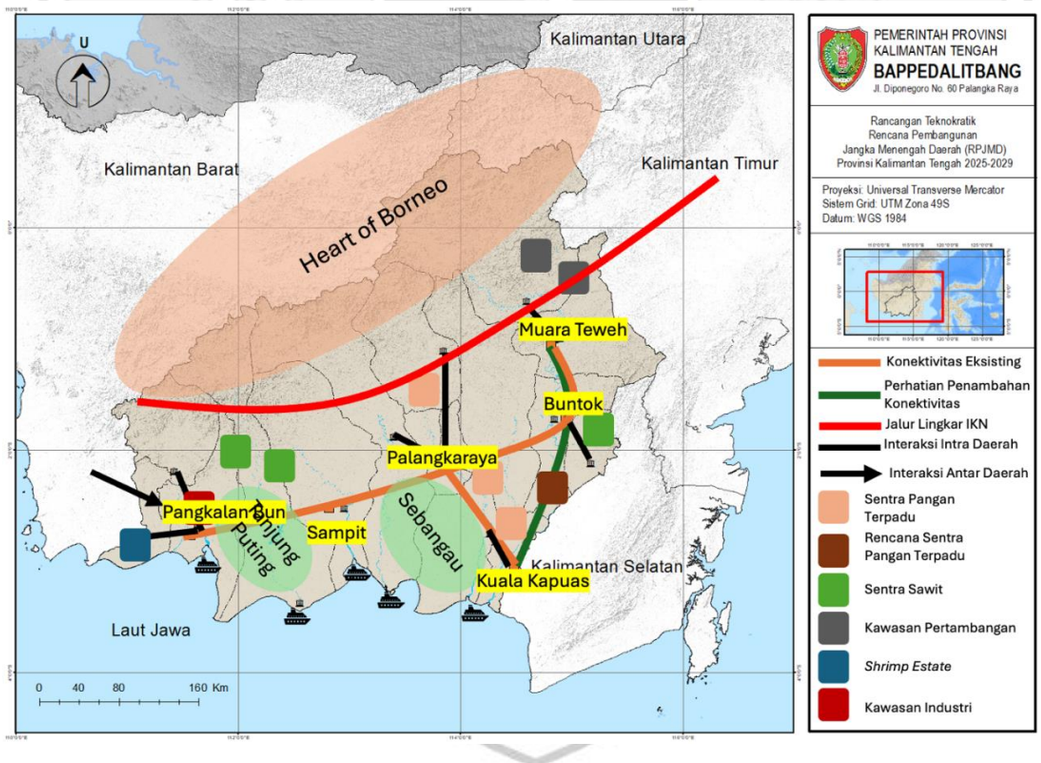
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mengembangkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara optimal.	Penyelarasan tata kelola energi terbarukan melalui penelaahan dokumen RUEN, RUED, dan RUPTL sebagai dasar perencanaan kebutuhan energi di Barito Selatan	✓	✓			
		Penyusunan kajian dan perencanaan komprehensif potensi sumber daya EBT (Surya, angin, biomassa, dan hidro) meliputi kelayakan teknis, jadwal, pembiayaan, serta manajemen risiko.	✓	✓			
		Penyesuaian regulasi dan standar nasional serta daerah terkait pengembangan EBT.	✓	✓	✓		
		Kolaborasi dengan akademisi dan LSM untuk penelitian, pengembangan, dan edukasi masyarakat mengenai energi terbarukan.		✓	✓	✓	✓
		Penyusunan masterplan pemerataan energi dan perancangan sistem energi terbarukan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan lokal	✓	✓			
	Pembangunan Industri hijau yang berkelanjutan.	Pengembangan industri hijau dan sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi secara berkelanjutan melalui dukungan inovasi dan teknologi			✓	✓	✓
	Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terintegrasi.	Penguatan ketahanan energi melalui pendekatan terpadu FEW Nexus (Food-Energy-Water).		✓	✓	✓	✓
		Pengembangan potensi energi terbarukan berbasis energi biomassa, energi surya (solar), energi mikrohidro, dan energi gambut.			✓	✓	✓

3.2.2. Lokus Pembangunan

Sebagai bagian dari arah kebijakan yang dimandatkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang maupun menengah dari Provinsi Kalimantan Tengah dan dokumen perencanaan jangka panjang dari Kabupaten, terdapat beberapa arah kebijakan yang difokuskan pada wilayah sebagai lokus pembangunan dalam rencana pembangunan.

3.2.2.1. Koridor Pembangunan Ekonomi

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, KPW Buntok diarahkan pada pengembangan hub transportasi barang, pengembangan industri hulu agro, dan sentra pangan terintegrasi. Bersamaan dengan itu, Kabupaten Barito Selatan sendiri dalam RPJPD Barito Selatan 2025-2045 direncanakan memiliki isu prioritas pembangunan pariwisata jasa lingkungan, pengembangan Food Estate, dan penyediaan EBT. Hal ini selaras dengan potensi SDA serta posisinya yang strategis.



Gambar 3.6 Koridor Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

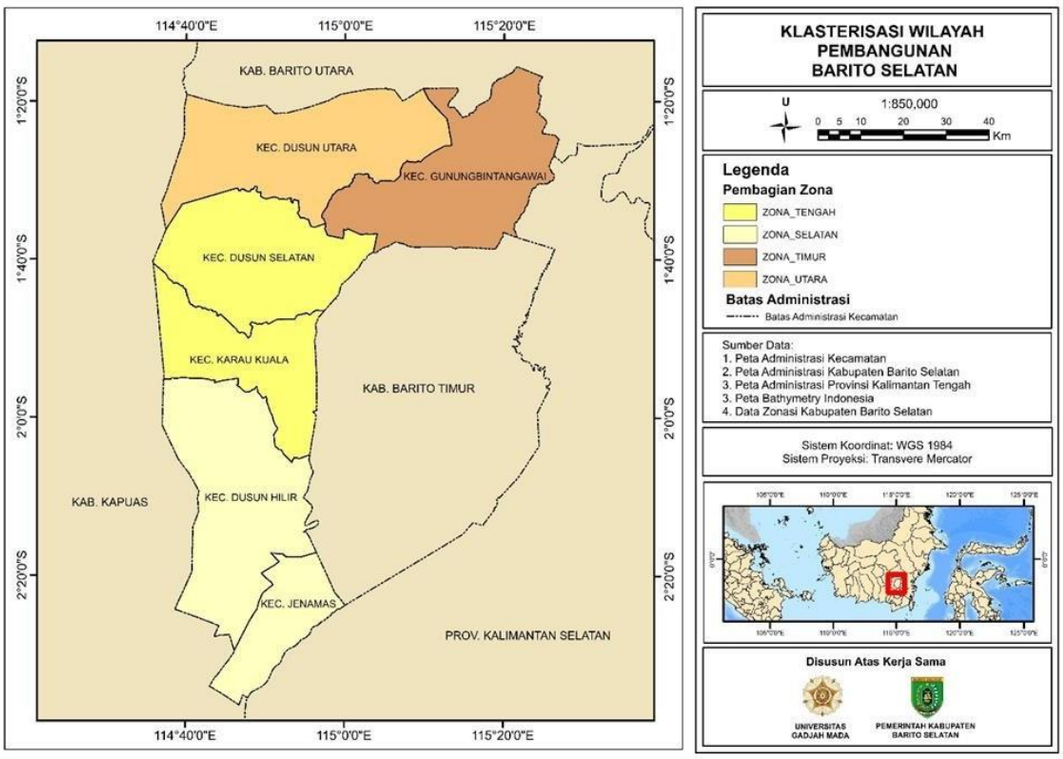
Sumber: RPJPD Kalimantan Tengah 2025–2029

Jika melihat koridor pembangunan ekonomi, KPW Muara Teweh akan terhubung hingga Kuala Kapuas melalui penambahan konektivitas antara PKW Buntok sampai Kuala Kapuas. Harapannya, hasil produksi pada wilayah yang dilewati jalan ini akan dipasarkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bahaur-Batanjung. Rencana ini akan menguntungkan KPW Buntok sebab secara langsung mendorong terciptanya perekonomian di Kabupaten Barito Selatan, terutama *Food Estate* dan industri hulu agro. Pada sisi timur, Kabupaten Barito Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini cukup strategis, mengingat jaraknya yang dekat serta ketersediaan akses menuju IKN. Ketersediaan akses ini sekaligus menjadikan Kabupaten Barito Selatan sebagai hub transportasi jalur logistik dari Zona Barat maupun Zona Tengah menuju IKN. Kondisi ini juga menjadi momentum bagi Kabupaten Barito Selatan untuk menjadi mitra pembangunan IKN. Konektivitas yang baik beserta lokasi strategis perlu direspon dengan memaksimalkan program-program yang menjadi isu prioritas.

3.2.2.2. Arah Tema Pembangunan Kewilayahan

Sebagaimana tercantum dalam RPJPD Barito Selatan 2025-2045, terdapat pembagian zona pembangunan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, daya saing, dan inovasi dalam suatu wilayah atau sektor ekonomi. Dengan membagi wilayah menjadi zona membantu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan optimalisasi infrastruktur. Adapun klasifikasi wilayah meliputi:

1. Zona Timur : Kecamatan Gunung Bintang Awai
2. Zona Utara : Kecamatan Dusun Utara
3. Zona Tengah: Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Karau Kuala
4. Zona Selatan: Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas



Gambar 3.7 Klasterisasi Wilayah Pembangunan

Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025-2045

Zona Timur

Zona timur memiliki fokus utama pusat pengolahan sumber daya alam mineral dan menjadi kawasan penghubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lokasinya yang dilewati oleh jalur strategis semakin meningkatkan urgensi pembangunan industri pengolahan berkelanjutan di Zona Timur. Pada saat ini, Zona Timur merupakan zona dengan kondisi sarana aktivitas ekonomi dan eksisting jumlah penduduk paling banyak kedua di Kabupaten Barito Selatan.

Posisi yang strategis ini direncanakan akan terbangun kegiatan perekonomian di Barito Selatan pada tahun-tahun ke depan. Maka, fondasi pembangunan yang menyeluruh menjadi sangat penting, beberapa diantaranya terkait peningkatan akses sanitasi, jaring irigasi, dan percepatan perluasan jaringan distribusi tenaga listrik. Zona timur memiliki fokus utama pusat pengolahan sumber daya alam mineral dan menjadi kawasan penghubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lokasinya yang dilewati oleh jalur jalan strategis semakin

meningkatkan urgensi pembangunan berkelanjutan di Zona Timur. Pada saat ini, Zona Timur merupakan zona dengan kondisi sarana aktivitas ekonomi dan eksisting jumlah penduduk paling banyak kedua di Kabupaten Barito Selatan.

Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai kawasan untuk pengembangan kegiatan perekonomian di masa mendatang. Maka, pembangunan fondasi pembangunan yang menyeluruh menjadi sangat penting, beberapa diantaranya terkait peningkatan akses sanitasi, jaring irigasi, percepatan perluasan jaringan distribusi tenaga listrik, sampai sarana transportasi umum. Selain di sisi infrastruktur, penyiapan kualitas pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan.

Zona Utara

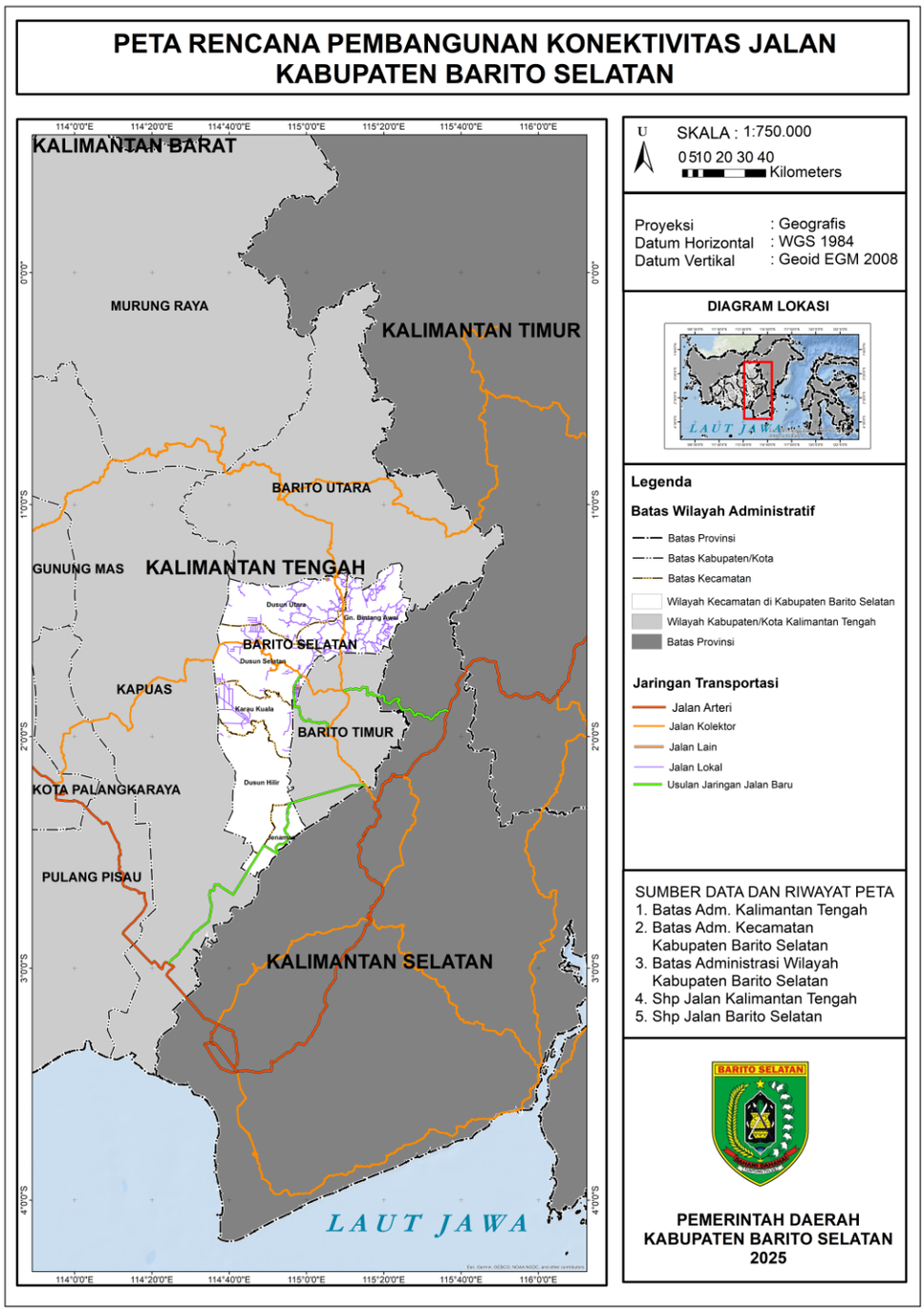
Berdasarkan karakteristik dan potensi daerah, Zona Utara diidentifikasi memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang melimpah, dikarenakan kondisi tanah yang subur bagi berbagai komoditas. Selain itu, posisinya di dekat IKN memberikan keunggulan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Zona Utara direncanakan sebagai kawasan produksi tanaman industri yang dapat memasok kebutuhan industri pengolahan maupun produksi BBN. Potensi yang dimiliki wilayah ini perlu dioptimalkan melalui peningkatan konektivitas guna memperlancar akses logistik, baik menuju Zona Barat Kalimantan Tengah maupun ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain dari sisi infrastruktur dasar, aspek kesehatan dan pendidikan turut menjadi perhatian untuk memastikan SDM yang berdaya saing. Selain itu, Zona Utara memiliki potensi untuk dikembangkan pelabuhan perikanan di Desa Batilap, Kecamatan Dusun Utara yang terletak di tepi Sungai Barito sebab memiliki aktivitas perikanan tangkap masyarakat yang cukup aktif. Pembangunan pelabuhan berskala kecil di desa ini dapat melayani nelayan lokal serta menghubungkan hasil perikanan ke pasar yang lebih luas.

Zona Tengah

Zona Tengah memiliki potensi utama sebagai kawasan industri dan sebagai pusat pemerintahan. Keunggulan yang dimiliki pada wilayah ini yaitu memiliki akses yang baik ke berbagai sumber daya termasuk sumber daya manusia, bahan baku dan infrastruktur. Posisi sebagai pusat pemerintahan merupakan kunci dalam pengelolaan dan penyelenggaraan berbagai layanan publik di Kabupaten Barito Selatan. Selain itu, daerah Buntok Seberang di Kecamatan Dusun Selatan merupakan wilayah yang cocok dikembangkan pelabuhan karena telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Lokasi ini memiliki konsentrasi kegiatan perikanan budidaya serta didukung oleh beberapa desa seperti Jelapat, Muara Ripung, dan Danau Masura yang aktif dalam sektor perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan di wilayah ini akan memperkuat fungsinya sebagai pusat distribusi hasil tangkap dan budidaya.

Selain itu, Kelurahan Buntok sebagai Ibukota Kecamatan Dusun Selatan sekaligus Ibukota Kabupaten Barito Selatan dipilih menjadi ibukota sebab posisinya yang strategis di sepanjang Sungai Barito serta memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan baru yang menghubungkan Buntok dengan Desa Dadahup yang melewati Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian, konektivitas antarkabupaten, terkhususnya dengan Kabupaten Barito Timur, menjadi semakin kuat dalam rangka menangkap peluang perekonomian yang lebih besar. Tidak hanya itu, pembangunan jalan baru juga diarahkan menuju ke arah Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jalan tersebut juga menghubungkan pertemuan antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Barito Utara. Secara lebih detail, pembangunan tersebut tergambarkan dengan lebih jelas pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Peta Rencana Pembangunan Konektivitas Jalan Kabupaten Barito Selatan

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan

Arah kebijakan untuk Zona Tengah diarahkan untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi, seperti pengembangan destinasi wisata unggulan dan pengembangan kawasan industri berbagai komoditas. Dalam mendukung hal tersebut, diperlukan penguatan konektivitas dan penambahan titik-titik jaringan transportasi di Zona Tengah.

Zona Selatan

Zona Selatan difokuskan sebagai pusat pengembangan *food estate* untuk meningkatkan produksi dan pengolahan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Potensi yang dimiliki pada zona ini adalah memiliki pengembangan potensi kawasan mencakup rencana kawasan strategis agropolitan dan kawasan strategis perikanan terpadu. Dalam mendukung rencana kawasan strategis perikanan terpadu, diperlukan pelabuhan pengumpul dan perikanan agar memudahkan budidaya perikanan yang menjadi potensi di Zona Selatan. Rekomendasi lokus wilayah di Kabupaten Barito Selatan yang strategis untuk pembangunan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan perikanan dapat difokuskan pada kawasan yang memiliki akses langsung ke sungai besar, potensi perikanan yang tinggi, dan kedekatan dengan sentra produksi maupun jalur distribusi. Salah satu lokasi yang sangat potensial adalah Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir yang saat ini sudah memiliki Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Kawasan ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan pengumpul karena posisinya yang strategis di dekat Sungai Barito dan dekat dengan sentra budidaya perikanan air tawar.

3.2.3. Program Prioritas

Penyusunan Program prioritas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan terhdap arah pembangunan nasional dan provinsi. Pada tingkat nasional diseleraskan sebagaimana Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2025–2029, sedangkan pada tingkat provinsi diseleraskan dengan agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dirumuskan dalam kerangka HUMA BETANG sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.

Program Prioritas Nasional

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat Visi Presiden periode 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut dijabarkan dalam Delapan Misi Presiden yang kemudian dirumuskan dalam Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembanguna berbagai sektor strategis, serta dilengkapi dengan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) sebagai langkah percepatan pencapaian hasil pembangunan. Seluruh upaya ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama pembangunan nasional secara cepat, tepat, dan terukur, serta untuk membangun fondasi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah. Program Prioritas Nasional menjadi acuan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui penetapan prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025–2029 dalam mencapai sasaran pembangunan.

Tabel 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029

17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air 2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemberantasan Kemiskinan 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat Untuk Rakyat 8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2. Merryelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC. Dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu

17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14. Melanjutkan Pemerataaan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Porgram Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya 15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17. Pelestarian Seni Budaya, Pening Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh). TNI/POLRI, dan pejabat negara 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin perryediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Dalam hal ini, program prioritas yang terdapat di RPJMD Kabupaten Barito Selatan sudah seharusnya selaras dengan Asta Cita dan Program Prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, seperti:

1. Makan Bergizi Gratis
2. Pakaian/Seragam Sekolah Gratis
3. Sekolah Rakyat
4. Sekolah Unggul Garuda
5. Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
6. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Program Prioritas Kalimantan Tengah

Selain mengacu pada Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Povinsi Kalimantan Tengah menjadi pertimbangan dalam penyusunan Program Prioritas Kabupaten Barito Selatan. Program Prioritas Kalimantan Tengah dalam RPJMD Provinsi Tahun 2025–2029, dirumuskan dari permasalahan daerah dan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode Tahun 2025–2029 termuat dalam HUMA BETANG.

Kerangka ini menjadi pijakan utama dalam mengarahkan pembangunan daerah secara menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan. Program Prioritas Kalimantan Tengah teridiri atas 30 Program Prioritas yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, Ekonomi , infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan merumuskan program prioritas daerah dengan memperhatikan keselarasan terhadap arah kebijakan provinsi, guna memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah dan memastikan tercapainya target pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat pusat hingga daerah.

Tabel 3.9 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029

PROGRAM HUMA BETANG KALIMANTAN TENGAH	
KALTENG BERMARTABAT	
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir
2	Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat dalam berkompetensi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing
BETANG MAJU	
1	Pembangunan 1000 Km jalan Desa
2	Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kab/ Kota
3	Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif
4	Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa
5	Peningkatan akses listrik desa (100% Bersinar)
6	Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman
BETANG MAKMUR	
1	Bantuan Pangan Rp 2 Juta/KK
2	Operasi Pasar Murah
3	Menciptakan 250 orang Milyader Muda
4	Milenial Job Center
5	Inkubasi UMKM
6	Asuransi Petani dan Nelayan
7	Bantuan Perahu dan Alat Tangkap
BETANG CERDAS	
1	Sekolah/Kuliah Gratis
2	1 Sarjana 1 Keluarga
3	1000 unit Rumah Guru
4	Insentif Guru Agama
5	Kalteng Mengaji
BETANG SEHAT	
1	Berobat Gratis berbasis KTP
2	Insentif Tenaga Kesehatan Desa
3	Revitalisasi Puskesmas Desa

PROGRAM HUMA BETANG KALIMANTAN TENGAH	
4	Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil
5	1 Ambulans / Desa
BETANG HARMONI	
1	Berdayakan 100 Desa Wisata (Dewi)
2	Bantuan Provinsi untuk Kab/Kota Rp 150 Milyar
3	Rp 250 Juta Stimulus Desa
4	Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, RT/RW seKalteng
5	Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga

Program Prioritas Kabupaten Barito Selatan

Program prioritas Kabupaten Barito Selatan disusun sebagai hasil sintesis dari *cascading* kinerja pembangunan daerah, mulai dari visi, misi, tujuan, hingga outcome perangkat daerah yang terukur, baik dari tingkat nasional hingga provinsi. Program-program ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak strategis, serta relevansi terhadap isu-isu pembangunan utama, sekaligus menjaga keterpaduan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Ini didasarkan pada janji politik dan program yang kemudian diharmonisasikan dengan perencanaan secara teknokratis. Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong akselerasi pencapaian visi daerah, dengan dukungan indikator kinerja yang tersusun sistematis guna memastikan arah pembangunan yang terukur, terarah, dan berkelanjutan.



Gambar 3.9 Fokus Strategis Pembangunan

Selaras dengan *tagline* visi Kepala Daerah **"Bekerja Bersama, Merangkul Semua"** terdapat 6 dimensi yang menjadi fokus strategis pembangunan selama periode berjalan. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi:

a. **Barsel Ceria – Pendidikan Kesehatan**
   - C (Cerdas)
   - E (Edukasi inklusif)
   - R (Ruang belajar sepanjang hayat)
   - I (Inklusivitas sosial)
   - A (Asupan bergizi)

   Dimensi ini mencakup tentang "Generasi cerdas, sehat, dan bahagia" sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sejak usia dini, melalui pendekatan yang terintegrasi antara pendidikan dan kesehatan.

b. **Barsel Sejahtera – Perekonomian**
   - S (SDA lestari)
   - E (Ekonomi kreatif)
   - J (Jaminan sosial ketenagakerjaan)
   - A (Akselerasi tenaga kerja lokal)
   - H (Hilirisasi potensi daerah)
   - T (Tumbuhnya wisata unggulan)
   - E (Ekspansi fiskal yang sehat)
   - R (Resiliensi bencana)
   - A (Akses ekonomi hijau)

   Dimensi ini menekankan pada perwujudan "Perekonomian yang adil dan inklusif" untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. **Barsel Kuat – Infrastruktur**
   - K (Ketangguhan menghadapi bencana)
   - U (Utilitas publik yang merata)
   - A (Akses antarwilayah yang terkoneksi)
   - T (Tata ruang adaptif)

Dimensi ini menjadi fokus untuk Infrastruktur yang tangguh, merata, dan adaptif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan wilayah di masa kini dan masa depan. Ini menitikberatkan pada pembangunan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga adaptif, termasuk terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah.

d. Barsel Rukun – Sosial Budaya

- R (Ruang harmoni antarumat)
- U (Unjuk seni & budaya lokal)
- K (Keterlibatan perempuan dalam pembangunan)
- U (Upaya penguatan keluarga rentan)
- N (Nilai-nilai kearifan lokal)

Dimensi ini diarahkan untuk dapat menjadikan masyarakat sebagai aktor sekaligus objek perencanaan sebagai upaya membangun lingkungan masyarakat yang hidup dalam kerukunan, kebudayaan, dan kebersamaan.

e. **Barsel Sigap – Tata Kelola**

- S (Sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien)
- I (Integritas birokrasi dan transparansi tata kelola)
- G (Good Governance)
- A (Akselerasi digitalisasi pemerintahan)
- P (Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan)

Dimensi ini berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih, dan akuntabel. Pemerintahan diarahkan untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap teknologi digital.

f. **Barsel Tumbuh – Ketahanan Pangan**

- T (Tumbuhnya sentra pangan)
- U (Usaha tani dan energi lokal)
- M (Mandiri dari sisi pangan dan energi)
- B (Berbasis potensi desa)
- U (Unggul dalam teknologi dan pasokan)
- H (Harmoni antara manusia dan alam)

Dimensi ini ditujukan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dan energi dengan menjadikan Barito Selatan sebagai penyangga pangan yang produktif, dan mandiri berbasis sumber daya lokal melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Tabel 3.10 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
A.	**BARSEL CERIA**					
1	**Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal**	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	**Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi**	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	1.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	Pendidikan	Dinas Pendidikan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				dalam pendidikan dasar 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 5. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 6. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 7. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 8. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 9. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) 10. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%) 11. Iklim Inklusivitas SD (Nilai) 12. Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) 13. Iklim Keamanan SD (Nilai) 14. Iklim Keamanan SMP (Nilai) 15. Iklim Kebhinekaan SD (Nilai) 16. Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)		

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**Beasiswa Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Berprestasi dan Kurang Mampu**	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	**Pemberian Minum Susu Gratis**	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	Kesehatan	Dinas Kesehatan

TUNTUNG TULUS

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
5	**Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh**	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
6	**Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua**	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
B	**BARSEL SEJAHTERA**					
7	**Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan**	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

TUNTUNG TULUS

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lMeningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidupingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan (%)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8	**Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana**	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Perlindungan Masyarakat	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana		
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
		Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Sosial	Dinas Sosial
9	**Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata**	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
10	**Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal**	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Program Penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif (%) (%)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Program Pengembangan UMKM	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	**Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat**	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	1.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 5. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 6. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 7. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 8. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen	Pendidikan	Dinas Pendidikan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Nasional (Nilai) 9. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) 10. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%) 11. Iklim Inklusivitas SD (Nilai) 12. Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) 13. Iklim Keamanan SD (Nilai) 14. Iklim Keamanan SMP (Nilai) 15. Iklim Kebhinekaan SD (Nilai) 16. Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)		
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	Kesehatan	Dinas Kesehatan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Sosial	Dinas Sosial
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Program Pengendalian Penduduk	1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena	Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		relokasi akibat program pemerintah		Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Sosial	Dinas Sosial

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejehatera (KS)	1. Indeks Lansia Berdaya (Indeks) 2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang IPW (%) 3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Ekonomi SDA (%)	Perencanaan	Bapperida
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Program Peneltian dan pengembangan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Bapperida
		Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Penelitian dan Pengembangan	Bapperida
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Efektivitas Kerja Sama Daerah 3. Indeks Kematangan Organisasi 4. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan 5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 2. Tingkat Kematangan UKBPJ 3.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
12	**Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal**	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Terkelolanya informasi tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
13	**Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan**	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
14	**Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah**	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
15	**Penguatan Kapasitas fiskal daerah**	Meningkatnya tata kelola anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2. Persentase Penurunan SILPA	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		Persentase laporan keuangan tepat waktu	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
C	**BARSEL KUAT**					
16	**Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan**	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare)	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
17	**Intensifikasi Pemerataan Infrastruktur Air Minum Perpipaan**	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%) 2.Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%) 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
18	**Peningkatan Konektivitas Tenaga Listrik**	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
19	**Peningkatan Akses Internet Cepat Dan Digitalisasi Masyarakat**	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
20	**Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan**	Meningkatnya layanan persampahan regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
21	**Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan**	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	**Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal**	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Perhubungan	Dinas Perhubungan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Angkutan Jalan (LLAJ)			
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Program Pengelolaan Pelayaran	1. Konektivitas Laut 2. Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%)	Perhubungan	Dinas Perhubungan
D	**BARSEL RUKUN**					
23	**Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal**	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi (Medali)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya tata kelola museum	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		MHA yang terkait dengan PPLH	Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH			
		Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
24	**Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama**	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	**Penguatan Iklim Stabililitas Politik**	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
26	**Peningkatan Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Daerah**	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Sosial	Dinas Sosial

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
27	**Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan**	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Pemberdayaan Perempuan Dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Perlindungan Anak	Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejehatera (KS)	1. Indeks Lansia Berdaya (Indeks) 2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) (%) 2. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
E	**BARSEL SIGAP**					
28	**Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik**	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

TUNTUNGTULUS

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pemerintahan Digital	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas penataan desa	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

TUNTUNG TULUS

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Efektivitas Kerja Sama Daerah 3. Indeks Kematangan Organisasi 4. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan 5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 2. Tingkat Kematangan UKBPJ 3.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	1.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) 2. Perekaman KTP elektronik (%)	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi	1.Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Administrasi Kependudukan	2. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	Dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	Kewilayahan	Kecamatan
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	Kewilayahan	Kecamatan
		Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Kewilayahan	Kecamatan
		Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	Kewilayahan	Kecamatan
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%)	Kewilayahan	Kecamatan
		Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase Taman Makam yang dipelihara (%)	Sosial	Dinas Sosial
29	**Penguatan Good Governance**	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TUNTUNG TULUS

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 2. Penyelenggaraan Reformasi	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Birokrasi 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat 4. TindakLanjut Rekomendasi APIP		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh PD dan Kecamatan
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Perencanaan	Bapperida

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Pembangunan Daerah			
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang IPW (%) 3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Ekonomi SDA (%)	Perencanaan	Bapperida
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Bapperida
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		PersentaseKajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
		Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Penelitian dan Pengembangan	Bapperida

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
		Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Program Redistribusi Tanah,	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)		Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%)	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%)	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
F	**BARSEL TUMBUH**					
30	**Penguatan ketahanan pangan daerah**	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TUNTUNG TULUS

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) 2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
31	**Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan**	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi (Meter)	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BARITO SELATAN

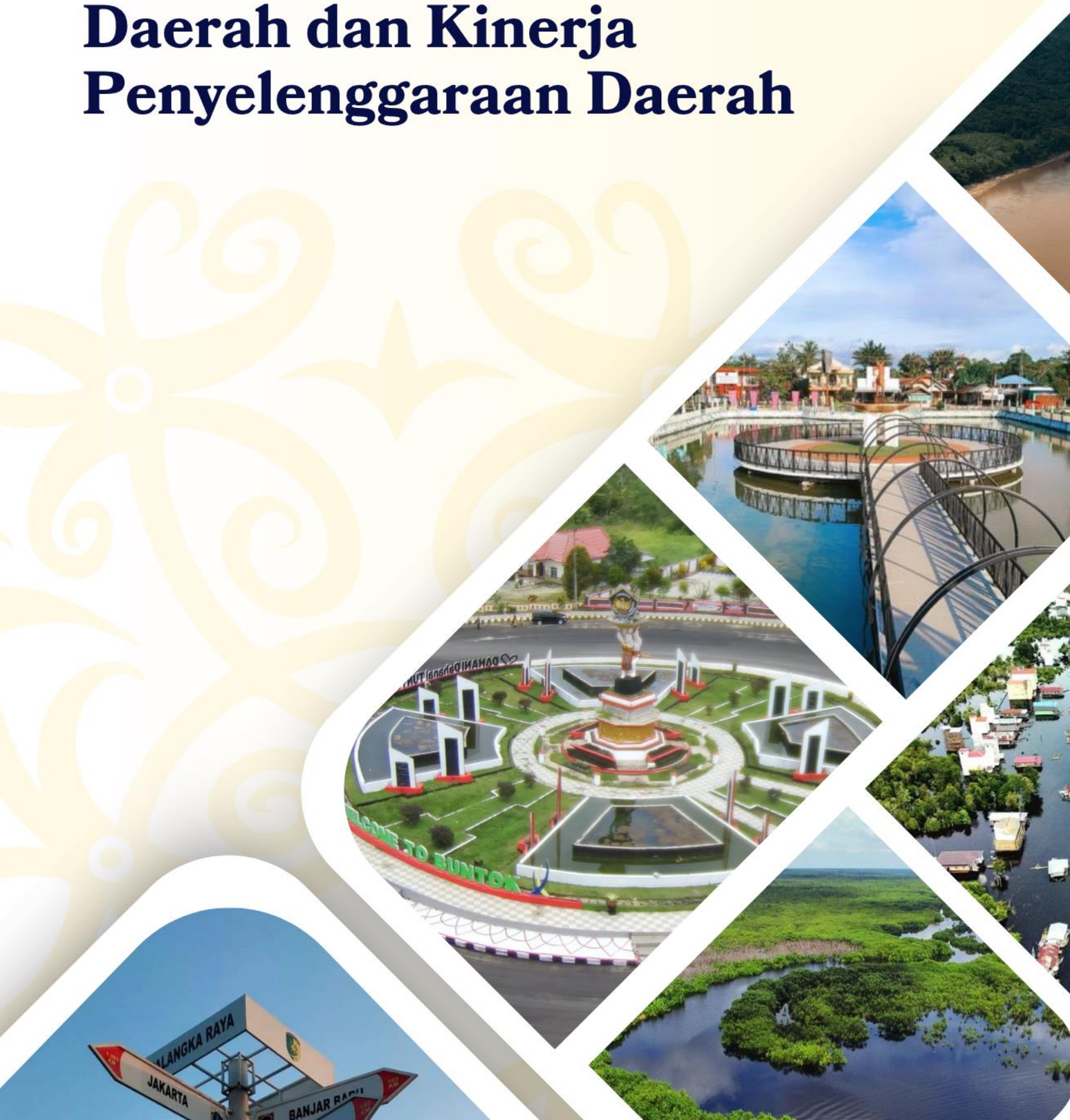
No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
32	**Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah**	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 2. Tingkat Kematangan UKBPJ 3.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan

BARITO SELATAN

No	32 PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	NOMENKLATUR PROGRAM PD	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah				
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan

BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Daerah



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah dioperasionalisasikan melalui Program Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang diturunkan dalam kegiatan dan subkegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang dirumuskan melalui pendekatan cascading berbasis *outcome*. Setiap program dipilih secara selektif guna optimalisasi kerangka alokasi anggaran belanja daerah sesuai dengan kapasitas fiskal.

Program Perangkat Daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri dari:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,** meliputi 6 (enam) urusan yakni:
   1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
   2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan;
   3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
6) Urusan pemerintahan bidang sosial.

2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:

1) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3) Urusan pemerintahan bidang pangan;
4) Urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
6) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) Urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
11) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
13) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
14) Urusan pemerintahan bidang statistik;
15) Urusan pemerintahan bidang persandian;
16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
18) Urusan pemerintahan bidang kearsipan.

3. Urusan Pilihan, meliputi 8 (delapan) urusan yakni:

1) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2) Urusan pemerintahan bidang pariwisata;
3) Urusan pemerintahan bidang pertanian;
4) Urusan pemerintahan bidang perdagangan;

5) Urusan pemerintahan bidang perindustrian;
6) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

4. **Unsur pendukung Urusan Pemerintahan,** meliputi 2 (dua) urusan yakni:
   1) Unsur Sekretariat Daerah
   2) Unsur Sekretariat DPRD
5. **Unsur penunjang urusan pemerintahan,** meliputi 5 (lima) urusan yakni:
   1) Unsur perencanaan;
   2) Unsur keuangan;
   3) Unsur kepegawaian;
   4) Unsur pendidikan dan pelatihan;
   5) Unsur penelitian dan pengembangan.
6. **Unsur pengawasan urusan pemerintahan**, yaitu Inspektorat Daerah
7. **Unsur kewilayahan**, yaitu urusan Kecamatan.
8. **Unsur pemerintahan umum**, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas:

1. **Dinas,** terdiri dari 20 (Dua Puluh) Perangkat Daerah:
   1) Dinas Pendidikan
   2) Dinas Kesehatan
   3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
   5) Satuan Polisi Pamong Praja
   6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
   7) Dinas Sosial
   8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   9) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11) Dinas Lingkungan Hidup
12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13) Dinas Perhubungan
14) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18) Dinas Perikanan
19) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

2. **Badan**, terdiri dari 6 (enam) badan:
   1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
   2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
   4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
   6) Badan Pendapatan Daerah
3. **Sekretariat Daerah**
4. **Sekretariat DPRD**
5. **Inspektorat Daerah**
6. **Kecamatan,** terdiri dari 6 (enam) kecamatan:
   1) Kecamatan Dusun Selatan
   2) Kecamatan Karau Kuala
   3) Kecamatan Dusun Hilir
   4) Kecamatan Jenamas
   5) Kecamatan Dusun Utara
   6) Kecamatan Gunung Bintang Awai

BARITO SELATAN

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					309.452.018.919		309.452.018.919		321.655.459.314		323.076.548.364		326.440.751.826
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					242.377.588.919		242.377.588.919		242.377.588.919		242.377.588.919		242.377.588.919
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	242.377.588.919	100	242.377.588.919	100	242.377.588.919	100	242.377.588.919	100	242.377.588.919
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					65.899.430.000		65.899.430.000		69.967.243.465		70.440.939.815		71.562.340.969
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	57,17	59,67	62,17	65.899.430.000	64,67	65.899.430.000	67,17	69.967.243.465	69,67	70.440.939.815	72,17	71.562.340.969
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	68,63	69,73	70,83		71,93		73,03		74,13		75,23	
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	50,89	53,79	56,69		59,59		62,49		65,39		68,29	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	61,07	62,57	64,07		65,57		67,07		68,57		70,07	
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	48,33	56,79	70,65		89,14		100		100		100	
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	53,42	45,44	46,44		47,44		48,44		49,44		50,44	
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	60,7	63,09	65,7		68,2		70,7		73,2		75,7	
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	60,69	63,09	65,49		67,89		70,29		72,69		75,09	

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	79,07	79,97	80,87		81,77		82,67		83,57		84,47	
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	74,59	76,09	77,59		79,09		80,59		82,09		83,59	
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	72,58	73,68	74,68		75,68		76,68		77,68		78,68	
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	73,53	74,53	75,53		76,53		77,53		78,53		79,53	
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	55	60	65	275.000.000	70	275.000.000	75	275.000.000	80	275.000.000	90	275.000.000
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					550.000.000		550.000.000		4.617.813.465		5.091.509.815		6.212.910.969
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,5	0,52	0,55	550.000.000	0,6	550.000.000	0,65	4.617.813.465	0,7	5.091.509.815	0,75	6.212.910.969
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	39,33	39,5	40		40,5		41		41,5		42	
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	15	16	17	0	18	0	19	0	20	0	20	0
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					350.000.000		350.000.000		4.417.813.465		4.891.509.815		6.012.910.969

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	50	55	60	350.000.000	65	350.000.000	70	4.417.813.465	75	4.891.509.815	80	6.012.910.969
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					228.286.135.628		228.286.135.628		240.489.576.023		241.910.665.073		246.274.868.535
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					151.717.063.004		151.717.063.004		165.320.503.399		166.420.503.399		170.320.503.399
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Dinkes	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	67,86	73,65	73,65	151.717.063.004	73,65	151.717.063.004	74	165.320.503.399	74,42	166.420.503.399	74,42	170.320.503.399
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	33,3	18,8	17,5		16,3		15,2		14,2		14	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					73.025.727.124		73.025.727.124		71.625.727.124		71.946.816.174		72.411.019.636
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (Angka)	71	122	109	73.025.727.124	97	73.025.727.124	86	71.625.727.124	77	71.946.816.174	70	72.411.019.636
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	33,3	18,8	17,5		16,3		15,2		14,2		14	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.091.249.000		3.091.249.000		3.091.249.000		3.091.249.000		3.091.249.000
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Dinkes	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	14,08	18	22	3.091.249.000	30	3.091.249.000	38	3.091.249.000	46	3.091.249.000	54	3.091.249.000
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					176.560.500		176.560.500		176.560.500		176.560.500		176.560.500
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	44,21	45	45,5	176.560.500	46,8	176.560.500	48,3	176.560.500	51,5	176.560.500	54	176.560.500

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					275.536.000		275.536.000		275.536.000		275.536.000		275.536.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinkes	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	275.536.000	100	275.536.000	100	275.536.000	100	275.536.000	100	275.536.000
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					570.976.690.887		594.895.809.421,29		591.301.758.227,98		594.707.142.251,57		647.080.887.098,96
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.369.906.882		24.087.480.438,03		23.979.658.902,23		24.081.820.422,94		25.653.032.768,36
Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	90	90	92	23.369.906.882	94	24.087.480.438,03	96	23.979.658.902,23	98	24.081.820.422,94	100	25.653.032.768,36
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					40.697.829.850		44.285.697.630,14		43.746.589.951,15		44.257.397.554,68		52.113.459.281,79
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	62,4	62,4	62,5	40.697.829.850	62,65	44.285.697.630,14	62,77	43.746.589.951,15	62,85	44.257.397.554,68	62,97	52.113.459.281,79
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	52,12	52,12	52,23		52,35		52,46		52,59		52,75	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	66,15	66,15	66,55		67,87		68,25		68,55		68,9	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					21.302.854.120		22.036.677.826,86		21.317.867.588,19		21.998.944.392,91		30.137.854.120
Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	75,12	76,12	77,87	21.302.854.120	78,9	22.036.677.826,86	79,97	21.317.867.588,19	80,99	21.998.944.392,91	81,97	30.137.854.120

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		1.950.000.000		1.950.000.000		1.950.000.000		2.150.000.000
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	26,07	26,07	26,5	0	27,07	1.950.000.000	28,07	1.950.000.000	29,07	1.950.000.000	30,07	2.150.000.000
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					7.412.942.000		7.812.942.000		7.812.942.000		7.812.942.000		8.812.942.000
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	79,89	79,89	80,82	7.412.942.000	81,92	7.812.942.000	82,97	7.812.942.000	83,97	7.812.942.000	83,97	8.812.942.000
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.700.000.000		4.400.000.000		4.400.000.000		4.400.000.000		5.535.839.242,39
Meningkatnya cakupan sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	23,11	23,11	24,11	2.700.000.000	25,11	4.400.000.000	26,11	4.400.000.000	27,11	4.400.000.000	28,11	5.535.839.242,39
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)	45	45	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					111.059.876.500		113.018.286.500		112.648.786.500		113.049.286.500		117.149.286.500
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	55	55	100	111.059.876.500	100	113.018.286.500	100	112.648.786.500	100	113.049.286.500	100	117.149.286.500

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	55	55	100		100		100		100		100	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					18.884.045.000		19.317.546.853,43		19.327.641.734,1		19.267.680.136,46		20.405.054.621,2
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	33	33	100	18.884.045.000	100	19.317.546.853,43	100	19.327.641.734,1	100	19.267.680.136,46	100	20.405.054.621,2
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					342.558.751.535		354.518.310.802,15		352.721.285.205,49		354.423.977.217,28		380.610.849.640,98
Meningkatnya infrastruktur jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan (Angka)	38,93	38,93	39,53	342.558.751.535	40,33	354.518.310.802,15	41,14	352.721.285.205,49	41,96	354.423.977.217,28	42,86	380.610.849.640,98
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.222.550.000		1.461.741.185,34		1.425.800.673,41		1.459.854.513,65		1.983.591.962,12
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	8,51	8,51	15	1.222.550.000	20	1.461.741.185,34	25	1.425.800.673,41	30	1.459.854.513,65	35	1.983.591.962,12
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.767.935.000		2.007.126.185,34		1.971.185.673,41		2.005.239.513,65		2.528.976.962,12
Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	1.767.935.000	100	2.007.126.185,34	100	1.971.185.673,41	100	2.005.239.513,65	100	2.528.976.962,12
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					16.947.214.769		31.307.085.901		29.150.655.163		30.571.744.213		33.935.947.676
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.428.871.032		9.428.871.032		9.428.871.032		9.428.871.032		9.428.871.032
Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					9.428.871.032		9.428.871.032		9.428.871.032		9.428.871.032		9.428.871.032

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	75	70	65		60		55		50		45	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.055.064.750		5.841.688.461		5.122.878.215		5.596.574.565		6.717.975.719
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	1.055.064.750	100	5.841.688.461	100	5.122.878.215	100	5.596.574.565	100	6.717.975.719
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					768.767.500		5.555.391.211		4.836.580.965		5.310.277.315		6.431.678.469
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	80	78	76	768.767.500	74	5.555.391.211	72	4.836.580.965	70	5.310.277.315	68	6.431.678.469
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare)	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	72	70	68	1.000.000.000	66	1.000.000.000	64	1.000.000.000	60	1.000.000.000	58	1.000.000.000
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					4.694.511.487		9.481.135.197		8.762.324.951		9.236.021.301		10.357.422.456
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	70	72	74	4.694.511.487	76	9.481.135.197	78	8.762.324.951	80	9.236.021.301	85	10.357.422.456

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0		0		0		0		0
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	45	50	54	0	56	0	58	0	60	0	70	0
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					39.094.510.417		43.881.134.128		51.297.950.812		52.719.039.861		56.940.609.123
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.328.531.717		28.328.531.717		28.328.531.717		28.328.531.717		28.328.531.717
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota BPBD	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)	94	95	95	6.198.758.671	95	6.198.758.671	95	6.198.758.671	95	6.198.758.671	95	6.198.758.671
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	1	1	1	7.678.805.254	1	7.678.805.254	1	7.678.805.254	1	7.678.805.254	1	7.678.805.254
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	1	1	1	14.450.967.792	1	14.450.967.792	1	14.450.967.792	1	14.450.967.792	1	14.450.967.792
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.816.053.400		6.602.677.111		5.883.866.865		6.357.563.215		7.478.964.369

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Nilai)	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat I	454.013.350	Tingkat II	0	Tingkat III	0	Tingkat IV	0	Tingkat IV	0
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	80	82	85	454.013.350	87	6.602.677.111	90	5.883.866.865	92	6.357.563.215	95	7.478.964.369
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	70	70	78	454.013.350	80	0	83	0	85	0	90	0
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	75	75	80	454.013.350	83	0	86	0	90	0	93	0
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.321.106.800		2.321.106.800		6.388.920.265		6.862.616.614		8.984.017.768
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	97	1.249.854.000	97	1.249.854.000	97	1.653.488.355	97	1.811.387.138	97	2.518.520.856
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	97	890.584.700	97	890.584.700	97	2.012.757.655	97	2.170.656.438	97	2.877.790.156
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	98	98	180.668.100	98	180.668.100	98	2.722.674.255	98	2.880.573.038	98	3.587.706.756
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					6.628.818.500		6.628.818.500		10.696.631.965		11.170.328.315		12.149.095.269

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					10.907.095.154		15.693.718.865		14.974.908.619		15.448.604.969		16.570.006.123
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1	1	1	142.634.200	1	142.634.200	1	142.634.200	1	142.634.200	1	142.634.200
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1	1	1	6.486.184.300	1	6.486.184.300	1	10.553.997.765	1	11.027.694.115	1	12.006.461.069
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.527.095.154		6.527.095.154		6.527.095.154		6.527.095.154		6.527.095.154
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)	71	71	72,00	6.527.095.154	73,00	6.527.095.154	74,00	6.527.095.154	75	6.527.095.154	76,00	6.527.095.154
	Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka)	74	75	76		77		78		78,75		78,85	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					700.000.000		5.486.623.711		4.767.813.465		5.241.509.815		6.362.910.969
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100	100	700.000.000	100	5.486.623.711	100	4.767.813.465	100	5.241.509.815	100	6.362.910.969
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan					0		0		0		0		0
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.830.000.000		1.830.000.000		1.830.000.000		1.830.000.000		1.830.000.000
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100	1.830.000.000	100	1.830.000.000	100	1.830.000.000	100	1.830.000.000	100	1.830.000.000
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana					0		0		0		0		0
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Prosentase Taman Makam yang dipelihara (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.997.754.928		6.997.754.928		17.823.668.973		19.770.798.208		22.018.600.516
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.097.888.778		5.097.888.778		5.798.568.778		7.082.888.778		7.123.694.420
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,1	3,1	3,2	5.097.888.778	3,5	5.097.888.778	3,7	5.798.568.778	3,9	7.082.888.778	4	7.123.694.420

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Nilai Sakip (Nilai)	71	71	72		73		74		75		76	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					53.532.000		53.532.000		330.000.000		500.000.000		400.000.000
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	53.532.000	100	53.532.000	100	330.000.000	100	500.000.000	100	400.000.000
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					221.700.500		221.700.500		4.588.833.965		4.778.210.315		6.858.805.827
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	51,32	54,35	54,35	221.700.500	57,02	221.700.500	59,4	4.588.833.965	61,53	4.778.210.315	61,53	6.858.805.827
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					95.918.000		95.918.000		1.887.526.930		2.190.959.815		2.412.360.969
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	70,31	70,31	70,31	95.918.000	71,75	95.918.000	73,67	1.887.526.930	75,35	2.190.959.815	75,35	2.412.360.969
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.528.715.650		1.528.715.650		5.218.739.300		5.218.739.300		5.223.739.300
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	10.222	12.166	12,166	1.528.715.650	13,124	1.528.715.650	14.129	5.218.739.300	14.998	5.218.739.300	14.998	5.223.739.300
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.955.455.902		9.747.079.613		9.028.269.367		9.501.965.717		10.623.366.871
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.748.255.902		4.748.255.902		4.748.255.902		4.748.255.902		4.748.255.902
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	62,3	70	75	4.748.255.902	75	4.748.255.902	75	4.748.255.902	80	4.748.255.902	80	4.748.255.902

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					30.000.000		4.821.623.711		4.102.813.465		4.576.509.815		5.697.910.969
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	6,71	2,6	3	30.000.000	3,8	4.821.623.711	4,3	4.102.813.465	5	4.576.509.815	5	5.697.910.969
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	50	50	50		65		70		75		80	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					71.200.000		71.200.000		71.200.000		71.200.000		71.200.000
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	71.200.000	100	71.200.000	100	71.200.000	100	71.200.000	100	71.200.000
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					49.000.000		49.000.000		49.000.000		49.000.000		49.000.000
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	0	100	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	31,25	40,22	42,85	6.000.000	57,14	6.000.000	71,42	6.000.000	85,71	6.000.000	100	6.000.000
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	53,73	56	60	21.000.000	68	21.000.000	73	21.000.000	82	21.000.000	85	21.000.000
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	78,43	78,5	78,55		79,01		79,57		80,12		81,01	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					21.898.607.019		21.898.607.019		34.102.047.414		35.523.136.464		38.887.339.926
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.378.607.019		20.378.607.019		20.378.607.019		20.378.607.019		20.378.607.019
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Sakip (Nilai)	0	0	0	20.378.607.019	0	20.378.607.019	0	20.378.607.019	0	20.378.607.019	0	20.378.607.019
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					200.000.000		200.000.000		4.267.813.465		4.741.509.815		5.862.910.969
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan (%)	15,95	15,95	16	200.000.000	18	200.000.000	20	4.267.813.465	22	4.741.509.815	24	5.862.910.969
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.220.000.000		1.220.000.000		5.287.813.465		5.761.509.815		6.882.910.969
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	92,4	92,4	93,3	1.220.000.000	94,5	1.220.000.000	95,01	5.287.813.465	96,21	5.761.509.815	97,3	6.882.910.969
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					70.000.000		70.000.000		4.137.813.465		4.611.509.815		5.732.910.969

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	27	27	27	70.000.000	22,73	70.000.000	18,18	4.137.813.465	18,18	4.611.509.815	13,64	5.732.910.969
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	87	87	87	30.000.000	88,2	30.000.000	90	30.000.000	92	30.000.000	94	30.000.000
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					438.390.300		5.225.014.011		4.506.203.765		4.979.900.115		5.101.301.269
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Sakip (Nilai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka)	0	0	0		0		0		0		0	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					41.020.000		41.020.000		41.020.000		41.020.000		41.020.000
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	35	40	45	41.020.000	50	41.020.000	55	41.020.000	60	41.020.000	65	41.020.000
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0		0		0		0		0
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0,2	0,2	0,5	0	0,8	0	1,5	0	2	0	4	0

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					260.997.300		260.997.300		260.997.300		260.997.300		260.997.300
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0,2	0,2	0,5	260.997.300	0,8	260.997.300	1	260.997.300	1,5	260.997.300	2	260.997.300
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					0		4.786.623.711		4.067.813.465		4.541.509.815		4.662.910.969
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	0	0,5	0,5	0	1	4.786.623.711	1,5	4.067.813.465	2	4.541.509.815	2,5	4.662.910.969
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					10.295.000		10.295.000		10.295.000		10.295.000		10.295.000
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	10	12	14	10.295.000	16	10.295.000	17	10.295.000	18	10.295.000	20	10.295.000
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					11.755.000		11.755.000		11.755.000		11.755.000		11.755.000
Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%)	1	2	3	11.755.000	4	11.755.000	5	11.755.000	6	11.755.000	7	11.755.000
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					114.323.000		114.323.000		114.323.000		114.323.000		114.323.000
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2	4	6	114.323.000	8	114.323.000	10	114.323.000	12	114.323.000	14	114.323.000
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14.488.284.011		24.061.531.433		30.759.537.871		32.654.323.271		39.139.927.887
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.011.967.600		11.963.467.600		12.999.967.600		13.182.967.600		14.609.967.600

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	7.011.967.600	100	11.963.467.600	100	12.999.967.600	100	13.182.967.600	100	14.609.967.600
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					500.000.000		1.200.000.000		600.000.000		1.500.000.000		1.700.000.000
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	1.200.000.000	100	600.000.000	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.280.000.000		2.115.000.000		2.540.000.000		3.410.000.000		4.650.000.000
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50,61	71,32	71,32	1.280.000.000	71,52	2.115.000.000	71,72	2.540.000.000	71,92	3.410.000.000	72,12	4.650.000.000
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,55	80,04	80,04		80,34		80,64		80,94		81,24	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					80.000.000		260.000.000		550.000.000		850.000.000		1.250.000.000
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	80.000.000	100	260.000.000	100	550.000.000	100	850.000.000	100	1.250.000.000
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					60.000.000		210.000.000		580.000.000		420.000.000		550.000.000
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	60.000.000	100	210.000.000	100	580.000.000	100	420.000.000	100	550.000.000
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					260.000.000		430.000.000		490.000.000		590.000.000		810.000.000

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	1	1	260.000.000	1	430.000.000	1	490.000.000	1	590.000.000	1	810.000.000
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					40.000.000		450.000.000		500.000.000		600.000.000		800.000.000
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan (%)	0	1	1	40.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	800.000.000
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					70.000.000		180.000.000		240.000.000		290.000.000		450.000.000
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	70.000.000	100	180.000.000	100	240.000.000	100	290.000.000	100	450.000.000
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.000.000		100.000.000		220.000.000		250.000.000		400.000.000
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	30.000.000	100	100.000.000	100	220.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					160.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000		480.000.000
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	80,3	83,33	83,33	160.000.000	85,71	300.000.000	87,5	400.000.000	88,88	400.000.000	90	480.000.000
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.996.316.411		6.853.063.833		11.639.570.271		11.161.355.671		13.439.960.287

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	54,13	55,5	55,5	4.996.316.411	56	6.853.063.833	56,5	11.639.570.271	57	11.161.355.671	57,5	13.439.960.287
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.175.775.220		10.962.398.931		10.243.588.685		10.717.285.035		10.838.686.189
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.853.256.960		4.853.256.960		4.853.256.960		4.853.256.960		4.853.256.960
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai)	0	0	0	4.853.256.960	0	4.853.256.960	0	4.853.256.960	0	4.853.256.960	0	4.853.256.960
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					346.662.700		346.662.700		346.662.700		346.662.700		346.662.700
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	64,28	64,5	65	346.662.700	68	346.662.700	70	346.662.700	72	346.662.700	75	346.662.700
	Perekaman KTP elektronik (%)	98,08	98,3	98,5		98,8		99		99,3		99,8	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					389.999.910		5.176.623.621		4.457.813.375		4.931.509.725		5.052.910.879
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	389.999.910	100	5.176.623.621	100	4.457.813.375	100	4.931.509.725	100	5.052.910.879
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	95,42	96	96,5		97		97,5		98		98,5	

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	56,63	57	57,3		57,8		58,3		59		60	
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (%)	62,79	63	63,2		63,4		63,7		63,9		64,2	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					500.229.150		500.229.150		500.229.150		500.229.150		500.229.150
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	3	5	7	500.229.150	9	500.229.150	11	500.229.150	13	500.229.150	15	500.229.150
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	6,51	7	8,5		10		11,5		13		15	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					85.626.500		85.626.500		85.626.500		85.626.500		85.626.500
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	1	85.626.500	1	85.626.500	1	85.626.500	1	85.626.500	1	85.626.500
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					155.663.943.579		160.450.567.289		163.799.570.508		164.746.963.208		165.989.765.516
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.682.488.595		7.682.488.595		7.682.488.595		7.682.488.595		7.682.488.595

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	84,3	87	90,5	7.682.488.595	92,7	7.682.488.595	93	7.682.488.595	93,8	7.682.488.595	95	7.682.488.595
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					1.231.483.444		1.231.483.444		1.231.483.444		1.231.483.444		1.231.483.444
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	13,95	13,95	14,5	1.231.483.444	17,5	1.231.483.444	19,5	1.231.483.444	20,5	1.231.483.444	21,5	1.231.483.444
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					131.445.000		131.445.000		4.199.258.465		4.672.954.815		5.794.355.969
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	5,81	5,9	6	131.445.000	8	131.445.000	10	4.199.258.465	12	4.672.954.815	15	5.794.355.969
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					138.548.855.040		143.335.478.750		142.616.668.504		143.090.364.854		143.211.766.008
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	34,14	34,14	17,73	138.548.855.040	15,19	143.335.478.750	12,66	142.616.668.504	10,13	143.090.364.854	10,13	143.211.766.008
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					8.069.671.500		8.069.671.500		8.069.671.500		8.069.671.500		8.069.671.500
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	0	0	30,23	8.069.671.500	23,56	8.069.671.500	17,44	8.069.671.500	17,44	8.069.671.500	11,62	8.069.671.500

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	0	0	30,23		23,56		17,44		17,44		11,62	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.078.908.239		7.865.531.950		7.146.721.704		7.620.418.054		8.741.819.208
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					0		0		0		0		0
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					213.803.000		213.803.000		213.803.000		213.803.000		213.803.000
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,17	2,16	2,15	213.803.000	2,15	213.803.000	2,11	213.803.000	2,11	213.803.000	2,1	213.803.000
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	32	31	30		28		26		25		25	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.774.780.000		1.774.780.000		1.774.780.000		1.774.780.000		1.774.780.000
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) (%)	80,71	81,5	82,51	1.774.780.000	83	1.774.780.000	83	1.774.780.000	85	1.774.780.000	85	1.774.780.000
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	93,3	95	96,47		96,47		96,5		96,8		97	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.090.325.239		5.876.948.950		5.158.138.704		5.631.835.054		6.753.236.208

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	59,4	60	60,2	1.090.325.239	60,8	5.876.948.950	61,2	5.158.138.704	61,8	5.631.835.054	62	6.753.236.208
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	83	83,2	83,6		84,2		84,8		85		85,5	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					8.891.953.531		18.465.200.953		17.027.580.461		17.974.973.161		20.217.775.469
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.230.942.631		8.230.942.631		8.230.942.631		8.230.942.631		8.230.942.631
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	8.230.942.631	100	8.230.942.631	100	8.230.942.631	100	8.230.942.631	100	8.230.942.631
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					255.592.800		5.042.216.511		4.323.406.265		4.797.102.615		5.918.503.769
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	3	3	0,3	255.592.800	0,4	5.042.216.511	0,5	4.323.406.265	0,6	4.797.102.615	0,7	5.918.503.769
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	75	75	10		15		20		25		30	
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					405.418.100		5.192.041.811		4.473.231.565		4.946.927.915		6.068.329.069
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (%)	10	10	10	405.418.100	15	5.192.041.811	20	4.473.231.565	25	4.946.927.915	30	6.068.329.069
	Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%)	55	10	10		15		20		20		30	
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					0		0		0		0		0
Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)					0		0		0		0		0

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					0		0		0		0		0
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api					0		0		0		0		0
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					20.534.071.583		30.107.319.005		28.669.698.513		29.617.091.213		32.859.893.521
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.627.292.883		14.627.292.883		14.627.292.883		14.627.292.883		14.627.292.883
Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai)	65	65	65	14.627.292.883	65	14.627.292.883	70	14.627.292.883	70	14.627.292.883	70	14.627.292.883
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.776.278.700		9.562.902.411		8.844.092.165		9.317.788.515		10.439.189.669
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	80	80	80	4.776.278.700	80	9.562.902.411	85	8.844.092.165	85	9.317.788.515	90	10.439.189.669
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	80	80	80		80		85		85		90	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.130.500.000		5.917.123.711		5.198.313.465		5.672.009.815		7.793.410.969
Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	80	80	80	1.130.500.000	80	5.917.123.711	85	5.198.313.465	85	5.672.009.815	90	7.793.410.969

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.769.749.813		7.769.749.813		23.786.765.331		24.424.343.333		32.000.658.459
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.375.377.690		6.375.377.690		9.934.714.471		8.457.201.880		11.760.024.055
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	75	85	85	6.375.377.690	85	6.375.377.690	85	9.934.714.471	85	8.457.201.880	85	11.760.024.055
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					25.000.000		25.000.000		1.804.668.391		2.106.824.190		2.717.323.183
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	100	15	15	25.000.000	30	25.000.000	25	1.804.668.391	20	2.106.824.190	20	2.717.323.183
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					37.978.200		37.978.200		1.817.646.591		2.119.802.390		2.730.301.383
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	100	25	25	37.978.200	25	37.978.200	20	1.817.646.591	20	2.119.802.390	10	2.730.301.383
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					68.016.800		68.016.800		1.847.685.191		2.149.840.990		2.760.339.983
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif (%) (%)	26	20	20	68.016.800	20	68.016.800	20	1.847.685.191	20	2.149.840.990	20	2.760.339.983
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					31.870.400		31.870.400		1.811.538.791		2.113.694.590		2.724.193.583
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	43	20	20	31.870.400	20	31.870.400	20	1.811.538.791	20	2.113.694.590	20	2.724.193.583
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					498.866.263		498.866.263		2.278.534.654		2.580.690.453		3.191.189.446

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	27	20	20	498.866.263	20	498.866.263	20	2.278.534.654	20	2.580.690.453	20	3.191.189.446
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					563.205.860		563.205.860		2.342.874.251		2.645.030.050		3.255.529.043
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	100	30,92	30,92	563.205.860	17,27	563.205.860	17,27	2.342.874.251	17,27	2.645.030.050	17,27	3.255.529.043
	Pertumbuhan Wirausaha (%)	100	15	15		20		25		20		20	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					169.434.600		169.434.600		1.949.102.991		2.251.258.790		2.861.757.783
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	4	20	20	169.434.600	20	169.434.600	20	1.949.102.991	20	2.251.258.790	20	2.861.757.783
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8.791.235.378		8.791.235.378		20.994.675.773		22.415.764.823		25.779.968.285
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.801.235.378		7.801.235.378		7.801.235.378		7.801.235.378		7.801.235.378
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					7.801.235.378		7.801.235.378		7.801.235.378		7.801.235.378		7.801.235.378
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					135.000.000		135.000.000		4.202.813.465		4.676.509.815		5.797.910.969
Meningkatnya kemudahan berinvestasi					135.000.000		135.000.000		4.202.813.465		4.676.509.815		5.797.910.969
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					380.000.000		380.000.000		4.447.813.465		4.921.509.815		6.042.910.969
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko					380.000.000		380.000.000		4.447.813.465		4.921.509.815		6.042.910.969
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					200.000.000		200.000.000		4.267.813.465		4.741.509.815		5.862.910.969
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal					200.000.000		200.000.000		4.267.813.465		4.741.509.815		5.862.910.969
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					12.350.915.219		12.350.915.219		16.418.728.684		16.892.425.034		18.013.826.188
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.892.419.182		5.892.419.182		5.892.419.182		5.892.419.182		5.892.419.182
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai)	60	65	70	5.892.419.182	75	5.892.419.182	80	5.892.419.182	85	5.892.419.182	90	5.892.419.182
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.291.099.500		2.291.099.500		6.358.912.965		6.832.609.315		7.954.010.469
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	0	56,75	57,45	2.291.099.500	58	2.291.099.500	58,7	6.358.912.965	59,25	6.832.609.315	59,94	7.954.010.469
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4.167.396.537		4.167.396.537		4.167.396.537		4.167.396.537		4.167.396.537
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi (Medali)	0,5	1	1	4.167.396.537	1	4.167.396.537	1	4.167.396.537	1	4.167.396.537	1	4.167.396.537

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas kepramukaan					0		0		0		0		0
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					210.000.000		4.996.623.711		4.277.813.465		4.751.509.815		5.872.910.969
2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	70	70	70	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	90	100.000.000
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					110.000.000		4.896.623.711		4.177.813.465		4.651.509.815		5.772.910.969
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)					0		0		0		0		0
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam Melakukan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	70	70	70	110.000.000	80	4.896.623.711	80	4.177.813.465	85	4.651.509.815	90	5.772.910.969
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					120.000.000		4.906.623.711		4.187.813.465		4.661.509.815		5.782.910.969
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					120.000.000		4.906.623.711		4.187.813.465		4.661.509.815		5.782.910.969
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	50,23	50,23	60	120.000.000	69	4.906.623.711	70	4.187.813.465	70	4.661.509.815	80	5.782.910.969
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.703.324.500		11.276.571.922		9.838.951.430		10.786.344.130		13.029.146.438

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.481.968.000		6.268.591.711		5.549.781.465		6.023.477.815		7.144.878.969
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					1.481.968.000		6.268.591.711		5.549.781.465		6.023.477.815		7.144.878.969
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					0		0		0		0		0
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional					0		0		0		0		0
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					0		0		0		0		0
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah					0		0		0		0		0
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					148.054.000		4.934.677.711		4.215.867.465		4.689.563.815		5.810.964.969
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan					148.054.000		4.934.677.711		4.215.867.465		4.689.563.815		5.810.964.969
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					73.302.500		73.302.500		73.302.500		73.302.500		73.302.500
Meningkatnya tata kelola museum					73.302.500		73.302.500		73.302.500		73.302.500		73.302.500
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.712.258.276		9.997.756.556		11.751.218.538		12.698.611.238		16.876.212.695
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.539.121.876		6.731.871.016		7.608.602.007		8.082.298.357		10.171.099.086
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,1	3,1	3,2	3.539.121.876	3,5	6.731.871.016	3,7	7.608.602.007	3,9	8.082.298.357	4	10.171.099.086
	Nilai Sakip (Nilai)	71	71	72		73		74		75		76	

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					165.636.400		2.850.885.540		3.627.616.531		4.001.312.881		5.900.113.609
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	67,04	67,71	68,39	165.636.400	69,07	2.850.885.540	69,76	3.627.616.531	70,46	4.001.312.881	71,16	5.900.113.609
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					7.500.000		415.000.000		515.000.000		615.000.000		805.000.000
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100	100	100	7.500.000	100	415.000.000	100	515.000.000	100	615.000.000	100	805.000.000
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					104.000.000		3.396.749.142		4.273.480.133		4.747.176.483		6.835.977.209
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					89.000.000		1.571.749.142		1.846.749.142		2.045.445.492		3.369.246.218
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	100	100	100	89.000.000	100	1.571.749.142	100	1.846.749.142	100	2.045.445.492	100	3.369.246.218
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					10.000.000		1.615.000.000		1.810.000.000		1.975.000.000		2.690.000.000
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	50	50	50	10.000.000	50	1.615.000.000	50	1.810.000.000	50	1.975.000.000	50	2.690.000.000
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					5.000.000		210.000.000		616.730.991		726.730.991		776.730.991
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	50	50	100	5.000.000	100	210.000.000	100	616.730.991	100	726.730.991	100	776.730.991

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.090.640.708		6.090.640.708		14.226.267.638		15.173.660.338		19.416.462.646
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.483.860.708		3.483.860.708		3.483.860.708		3.483.860.708		3.483.860.708
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	3.483.860.708	100	3.483.860.708	100	3.483.860.708	100	3.483.860.708	100	3.483.860.708
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.059.000.000		1.059.000.000		5.126.813.465		5.600.509.815		7.721.910.969
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) (Ton/Tahun)	7.105,08	7.247,18	7.392,12	1.059.000.000	7.539,96	1.059.000.000	7.690,76	5.126.813.465	7.844,57	5.600.509.815	8.001,47	7.721.910.969
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.234.500.000		1.234.500.000		5.302.313.465		5.776.009.815		7.897.410.969
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) (Ton/Tahun)	9.487	9.676,74	9.870,27	1.234.500.000	10.067,68	1.234.500.000	10.269,03	5.302.313.465	10.474,41	5.776.009.815	10.683,9	7.897.410.969
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					113.280.000		113.280.000		113.280.000		113.280.000		113.280.000
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Meter)	99.100	139.000	286.000	113.280.000	643.000	113.280.000	643.000	113.280.000	1.190.000	113.280.000	2.760.000	113.280.000
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,73	43,59	44,46	200.000.000	54,35	200.000.000	46,26	200.000.000	47,18	200.000.000	48,12	200.000.000
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					914.819.600		914.819.600		13.118.259.995		14.539.349.045		20.903.552.507
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					301.074.200		301.074.200		4.368.887.665		4.842.584.015		6.963.985.169
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata					301.074.200		301.074.200		4.368.887.665		4.842.584.015		6.963.985.169

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					541.450.500		541.450.500		541.450.500		541.450.500		541.450.500
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata					541.450.500		541.450.500		541.450.500		541.450.500		541.450.500
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					31.430.000		31.430.000		4.099.243.465		4.572.939.815		6.694.340.969
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif					31.430.000		31.430.000		4.099.243.465		4.572.939.815		6.694.340.969
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					40.864.900		40.864.900		4.108.678.365		4.582.374.715		6.703.775.869
Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif					40.864.900		40.864.900		4.108.678.365		4.582.374.715		6.703.775.869
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					7.879.013.412		7.879.013.412		16.014.640.342		16.962.033.042		21.204.835.350
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.247.073.400		3.247.073.400		7.314.886.865		7.788.583.215		9.909.984.369
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	9,7708	10,7528	10,7528	3.247.073.400	11,7349	3.247.073.400	12,7169	7.314.886.865	13,6992	7.788.583.215	14,681	9.909.984.369
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	455,81	465,64	465,64		475,48		484,32		495,16		505	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	894,308	918,931	918,931		928,122		937,56		947,58		957,6	

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.472.500.000		3.472.500.000		7.540.313.465		8.014.009.815		10.135.410.969
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	4,7645	170	170	3.472.500.000	190	3.472.500.000	230	7.540.313.465	240	8.014.009.815	267,53	10.135.410.969
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	2.633	3.000	3.000	170.000.000	3.000	170.000.000	3.100	170.000.000	3.200	170.000.000	3.400	170.000.000
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	25	25	25	20.000.000	30	20.000.000	35	20.000.000	40	20.000.000	45	20.000.000
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	0	25	25		30		35		40		45	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	80	80	80	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	90	10.000.000	95	10.000.000

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	80	80	80	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	90	10.000.000	95	10.000.000
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					959.440.012		959.440.012		959.440.012		959.440.012		959.440.012
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	20	20	959.440.012	40	959.440.012	60	959.440.012	80	959.440.012	95	959.440.012
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					0		0		0		0		0
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					0		0		0		0		0
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya					0		0		0		0		0
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.733.594.954		1.733.594.954		10.631.936.909		12.142.715.904		15.195.210.869
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					32.996.100		32.996.100		1.812.664.491		2.114.820.290		2.725.319.283
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	32.996.100	100	32.996.100	100	1.812.664.491	100	2.114.820.290	100	2.725.319.283
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					498.941.778		498.941.778		2.278.610.169		2.580.765.968		3.191.264.961
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	100	79,4	79,4	498.941.778	96,8	498.941.778	96,8	2.278.610.169	100	2.580.765.968	100	3.191.264.961
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					586.894.876		586.894.876		2.366.563.267		2.668.719.066		3.279.218.059
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	100	19,79	19,79	586.894.876	19,79	586.894.876	19,79	2.366.563.267	19,79	2.668.719.066	20,83	3.279.218.059
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0		0		0		0		0

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					208.668.200		208.668.200		1.988.336.591		2.290.492.390		2.900.991.383
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	100	208.668.200	100	208.668.200	100	1.988.336.591	100	2.290.492.390	100	2.900.991.383
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					406.094.000		406.094.000		2.185.762.391		2.487.918.190		3.098.417.183
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	20	20	406.094.000	20	406.094.000	20	2.185.762.391	20	2.487.918.190	20	3.098.417.183
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					946.954.410		946.954.410		4.506.291.192		5.110.602.785		6.331.600.776
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					84.664.800		84.664.800		1.864.333.191		2.166.488.990		2.776.987.983
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	100	17,95	17,95	84.664.800	20,51	84.664.800	20,51	1.864.333.191	20,51	2.166.488.990	20,51	2.776.987.983
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	100	9,09	9,09	0	22,73	0	22,73	0	22,73	0	22,73	0
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					862.289.610		862.289.610		2.641.958.001		2.944.113.795		3.554.612.793
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	100	9,09	9,09	862.289.610	22,73	862.289.610	22,73	2.641.958.001	22,73	2.944.113.795	22,73	3.554.612.793
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					217.098.000		217.098.000		1.594.624.350		1.068.584.165		2.184.985.319
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					193.878.000		193.878.000		1.571.404.350		1.045.364.165		2.161.765.319

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	98	98	100	193.878.000	100	193.878.000	100	1.571.404.350	100	1.045.364.165	100	2.161.765.319
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	98	98	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					23.220.000		23.220.000		23.220.000		23.220.000		23.220.000
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	90	100	100	23.220.000	100	23.220.000	100	23.220.000	100	23.220.000	100	23.220.000
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					78.470.188.060		83.256.811.771		86.605.814.990		87.553.207.690		91.796.009.998
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					55.905.664.775		55.905.664.775		55.905.664.775		55.905.664.775		55.905.664.775
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					55.905.664.775		55.905.664.775		55.905.664.775		55.905.664.775		55.905.664.775
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					20.779.111.550		25.565.735.261		24.846.925.015		25.320.621.365		27.442.022.519
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat					20.779.111.550		25.565.735.261		24.846.925.015		25.320.621.365		27.442.022.519
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.785.411.735		1.785.411.735		5.853.225.200		6.326.921.550		8.448.322.704
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan					1.785.411.735		1.785.411.735		5.853.225.200		6.326.921.550		8.448.322.704
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					43.545.258.805		48.331.882.516		47.613.072.270		48.086.768.620		50.208.169.774
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.574.058.805		23.574.058.805		23.574.058.805		23.574.058.805		23.574.058.805

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	B	B	B	23.574.058.805	B	23.574.058.805	BB	23.574.058.805	BB	23.574.058.805	A	23.574.058.805
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					19.971.200.000		24.757.823.711		24.039.013.465		24.512.709.815		26.634.110.969
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan					19.171.200.000		23.957.823.711		23.239.013.465		23.712.709.815		25.834.110.969
5.01 - PERENCANAAN					10.484.244.472		15.270.868.183		14.552.057.937		15.025.754.287		17.147.155.441
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.310.244.972		7.310.244.972		7.310.244.972		7.310.244.972		7.310.244.972
Terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional.	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	98	100	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.297.679.000		6.084.302.711		5.365.492.465		5.839.188.815		7.960.589.969
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	99	100	100	1.297.679.000	100	6.084.302.711	100	5.365.492.465	100	5.839.188.815	10	7.960.589.969
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	99	100	100		100		100		100		10	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.876.320.500		1.876.320.500		1.876.320.500		1.876.320.500		1.876.320.500

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	1.876.320.500	100	1.876.320.500	100	1.876.320.500	100	1.876.320.500	10	1.876.320.500
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100		100		100		100		10	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100		100		100		100		10	
5.02 - KEUANGAN					349.385.028.344		349.385.028.344		361.588.468.739		363.009.557.789		369.373.761.251
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					235.143.668.484		235.143.668.484		235.143.668.484		235.143.668.484		235.143.668.484
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan BPKAD					229.280.729.901		229.280.729.901		229.280.729.901		229.280.729.901		229.280.729.901
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bapenda					5.862.938.583		5.862.938.583		5.862.938.583		5.862.938.583		5.862.938.583
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					108.466.405.840		108.466.405.840		120.489.163.133		121.711.500.771		127.857.077.680

BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya tata kelola anggaran BPKAD					2.621.959.240		2.621.959.240		2.884.155.164		3.172.570.680		3.489.827.748
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan BPKAD					98.070.827.800		98.070.827.800		105.587.038.532		106.021.910.612		109.506.749.308
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan BPKAD					1.499.526.300		1.499.526.300		1.676.063.472		1.701.417.164		1.923.497.155
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan Bapenda					6.274.092.500		6.274.092.500		10.341.905.965		10.815.602.315		12.937.003.469
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.806.831.020		1.806.831.020		1.987.514.122		2.186.265.534		2.404.892.087
Meningkatnya tata kelola aset daerah BPKAD					1.806.831.020		1.806.831.020		1.987.514.122		2.186.265.534		2.404.892.087
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.968.123.000		3.968.123.000		3.968.123.000		3.968.123.000		3.968.123.000
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan					3.968.123.000		3.968.123.000		3.968.123.000		3.968.123.000		3.968.123.000
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital					0		0		0		0		0
5.03 - KEPEGAWAIAN					21.336.028.235		26.122.651.946		25.403.841.700		25.877.538.050		27.998.939.204
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.413.203.175		6.413.203.175		6.413.203.175		6.413.203.175		6.413.203.175
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	75	80	90	6.413.203.175	90	6.413.203.175	90	6.413.203.175	90	6.413.203.175	90	6.413.203.175
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					14.922.825.060		19.709.448.771		18.990.638.525		19.464.334.875		21.585.736.029
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									

BARITO SELATAN

				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	40	40	55	14.922.825.060	70	19.709.448.771	85	18.990.638.525	90	19.464.334.875	100	21.585.736.029
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	2,4	2,6	2,6		3		3,2		3,5		3,8	
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	2	2,3	2,3		2,5		2,9		3		3,2	
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	82	82,5	82,5		83		83,5		84		84,5	
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN					0		0		0		0		0
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN					0		0		0		0		0
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					0		4.786.623.711		4.067.813.465		4.541.509.815		6.662.910.969
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					0		4.786.623.711		4.067.813.465		4.541.509.815		6.662.910.969
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional					0		0		0		0		0
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	0,2	0,5	0,5	0	0,8	4.786.623.711	1	4.067.813.465	1,2	4.541.509.815	1,4	6.662.910.969
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	1,9	2	2		2,2		2,5		2,7		3	
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	0,2	0,8	0,8		1		1,4		1,5		1,8	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030

BARITO SELATAN

				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	2,4	2,5	2,5		2,7		2,9		3		3,1	
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi					0		0		0		0		0
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis					0		0		0		0		0
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.583.122.294		8.369.746.005		7.650.935.759		8.124.632.109		10.246.033.263
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan					0		0		0		0		0
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	10	0
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					0		0		0		0		0
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	100	100	100	2.648.122.294	100	2.648.122.294	100	2.648.122.294	100	2.648.122.294	100	2.648.122.294
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**									

BARITO SELATAN

				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					935.000.000		5.721.623.711		5.002.813.465		5.476.509.815		7.597.910.969
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan					935.000.000		5.721.623.711		5.002.813.465		5.476.509.815		7.597.910.969
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah					0		0		0		0		0
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					0		0		0		0		0
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah					0		0		0		0		0
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					12.281.870.536		17.068.494.247		16.349.684.001		16.823.380.351		18.944.781.505
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.639.040.536		9.639.040.536		9.639.040.536		9.639.040.536		9.639.040.536
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					9.639.040.536		9.639.040.536		9.639.040.536		9.639.040.536		9.639.040.536
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.314.090.000		2.314.090.000		2.314.090.000		2.314.090.000		2.314.090.000
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan					2.314.090.000		2.314.090.000		2.314.090.000		2.314.090.000		2.314.090.000
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					328.740.000		5.115.363.711		4.396.553.465		4.870.249.815		6.991.650.969
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi					328.740.000		5.115.363.711		4.396.553.465		4.870.249.815		6.991.650.969
7.01 - KECAMATAN					29.077.160.877		86.518.645.611		77.894.922.659		83.105.582.509		109.036.092.707
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**									

BARITO SELATAN

				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.608.729.642		24.980.206.181		25.115.206.181		25.220.206.181		25.394.706.181
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Hilir	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	10	3.264.121.987	3.625.000.000	3.619.999.798	3.670.000.000	3.701.476.337	3.700.000.000	3.696.476.337	3.718.000.000	3.686.476.337	3.720.000.000	3.705.976.337
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Selatan	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	4.993.646.374	100	4.993.646.374	100	4.993.646.374	100	4.993.646.374	100	4.993.646.374
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Utara	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	3.027.238.410	100	3.027.238.410	100	3.027.238.410	100	3.027.238.410	100	3.027.238.410
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Gunung Bintang Awai	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). ((%))	50	60	70	3.568.885.154	80	3.568.885.154	90	3.568.885.154	100	3.568.885.154	100	3.568.885.154
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jenamas	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)	85	85	87,5	2.795.868.582	90	6.085.868.582	92,5	6.225.868.582	95	6.340.868.582	97,5	6.495.868.582
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Karau Kuala	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	3.603.091.324	100	3.603.091.324	100	3.603.091.324	100	3.603.091.324	100	3.603.091.324
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					421.156.150		25.737.398.416		20.834.850.405		23.415.724.855		35.865.532.933
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Dusun Hilir	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	6	10.000.000	17.000.000	41.000.000	1.249.438.589	4.796.623.711	1.027.134.220	4.077.813.465	1.409.335.467	4.551.509.815	1.409.335.467	6.672.910.969
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Dusun Selatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	80	82	84	24.000.000	87	4.810.623.711	90	4.091.813.465	95	4.565.509.815	100	6.686.910.969
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**									

BARITO SELATAN

				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Dusun Utara	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	100	100	100	80.000.000	100	4.866.623.711	100	4.147.813.465	100	4.621.509.815	100	6.742.910.969
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Gunung Bintang Awai	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	80	80	82	65.000.000	85	3.851.623.711	90	3.132.813.465	95	3.606.509.815	100	5.727.910.969
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Jenamas	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	80	80	82	110.000.000	85	2.524.123.711	90	1.215.626.930	95	1.428.019.630	100	3.270.821.938
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Karau Kuala	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	80	80	82	101.156.150	85	4.887.779.861	90	4.168.969.615	95	4.642.665.965	100	6.764.067.119
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.914.647.650		6.914.647.650		7.414.647.650		7.142.147.650		8.380.147.650
Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Dusun Hilir	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	10	553.577.150	785.000.000	785.000.000	785.000.000	785.000.000	785.000.000	785.000.000	785.000.000	785.000.000	785.000.000	750.500.000
Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Dusun Selatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	80	80	82	2.472.000.000	85	2.472.000.000	90	2.472.000.000	95	2.472.000.000	100	2.472.000.000
Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Dusun Utara	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	931.200.000	100	931.200.000	100	931.200.000	100	931.200.000	100	931.200.000
Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Gunung Bintang Awai	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	80	80	82	177.947.650	85	177.947.650	90	177.947.650	95	177.947.650	100	177.947.650
Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Jenamas	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	80	80	82	700.000.000	85	1.700.000.000	90	2.200.000.000	95	1.927.500.000	100	3.200.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030

BARITO SELATAN

				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	80	80	82	848.500.000	85	848.500.000	90	848.500.000	95	848.500.000	100	848.500.000
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					168.976.337		26.460.242.266		21.999.067.325		24.686.352.725		36.539.554.845
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Dusun Hilir	Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	10	0	12.000.000	48.976.337	1.068.375.933	4.786.623.711	877.829.332	4.067.813.465	1.205.430.400	4.067.813.465	1.205.430.400	6.662.910.969
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Dusun Selatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)	80	80	82	15.000.000	85	4.801.623.711	90	4.082.813.465	95	4.556.509.815	100	6.677.910.969
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Dusun Utara	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100	0	100	4.786.623.711	100	4.067.813.465	100	4.541.509.815	100	6.662.910.969
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Gunung Bintang Awai	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)	80	80	82	50.000.000	85	4.836.623.711	90	4.117.813.465	95	4.591.509.815	100	6.712.910.969
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Jenamas	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)	80	80	82	50.000.000	85	2.462.123.711	90	1.595.000.000	95	2.387.500.000	100	3.160.000.000
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Karau Kuala	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)	80	80	82	5.000.000	85	4.786.623.711	90	4.067.813.465	95	4.541.509.815	100	6.662.910.969
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					451.962.000		657.962.000		762.962.000		862.962.000		1.067.962.000
Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Dusun Hilir	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	9	168.130.000	24.000.000	24.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000
Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Dusun Selatan	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan (%)	80	82	85	60.000.000	87	60.000.000	90	60.000.000	95	60.000.000	100	60.000.000
Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Dusun Utara	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	100	100	100	53.104.000	100	53.104.000	100	53.104.000	100	53.104.000	100	53.104.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030

BARITO SELATAN

				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Gunung Bintang Awai	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	80	80	82	107.250.000	85	107.250.000	90	107.250.000	95	107.250.000	100	107.250.000
Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Jenamas	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	80	80	82	120.000.000	85	320.000.000	90	420.000.000	95	520.000.000	100	720.000.000
Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Karau Kuala	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	80	80	82	87.608.000	85	87.608.000	90	87.608.000	95	87.608.000	100	87.608.000
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					511.689.098		1.768.189.098		1.768.189.098		1.778.189.098		1.788.189.098
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Gunung Bintang Awai	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%)	80	80	82	0	85	1.000.000.000	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	100	1.000.000.000
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Karau Kuala	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)	80	80	82	81.037.000	85	81.037.000	90	81.037.000	95	81.037.000	100	81.037.000
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jenamas	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)	80	80	82	45.000.000	85	300.000.000	90	300.000.000	95	300.000.000	100	300.000.000
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dusun Utara	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	100	100	100	297.152.098	100	297.152.098	100	297.152.098	100	297.152.098	100	297.152.098
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dusun Selatan	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)	80	80	82	30.000.000	85	30.000.000	90	30.000.000	95	30.000.000	100	30.000.000
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dusun Hilir	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)	81	86.847.200	58.500.000	58.500.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000	80.000.000	80.000.000
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.837.736.396		27.197.607.529		25.041.176.791		26.462.265.841		32.826.469.303
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.280.997.146		5.280.997.146		5.280.997.146		5.280.997.146		5.280.997.146
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	5.280.997.146	100	5.280.997.146	100	5.280.997.146	100	5.280.997.146	100	5.280.997.146

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030

BARITO SELATAN

				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.283.531.000		6.070.154.711		5.351.344.465		5.825.040.815		7.946.441.969
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	1.283.531.000	100	6.070.154.711	100	5.351.344.465	100	5.825.040.815	100	7.946.441.969
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.180.875.000		2.180.875.000		2.180.875.000		2.180.875.000		2.180.875.000
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100	2.180.875.000	100	2.180.875.000	100	2.180.875.000	100	2.180.875.000	100	2.180.875.000
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					3.182.785.250		7.969.408.961		7.250.598.715		7.724.295.065		9.845.696.219
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	100	100	3.182.785.250	100	7.969.408.961	100	7.250.598.715	100	7.724.295.065	100	9.845.696.219
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					267.548.000		5.054.171.711		4.335.361.465		4.809.057.815		6.930.458.969
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	267.548.000	100	5.054.171.711	100	4.335.361.465	100	4.809.057.815	100	6.930.458.969

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU

BARITO SELATAN

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					642.000.000		642.000.000		642.000.000		642.000.000		642.000.000
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	642.000.000	100	642.000.000	100	642.000.000	100	642.000.000	100	642.000.000
TOTAL KESELURUHAN					2.032.331.052.375		2.266.873.614.393,29		2.394.366.450.975,98		2.436.525.426.188,57		2.625.330.128.847,96

4.2. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Capaian ini menggambarkan kondisi pembangunan, khususnya pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan pendekatan SMART-C dengan mempertimbangkan hasil analisis faktor eksternal dan internal pemerintahan daerah. SMART-C merupakan akronim yang berasal dari 6 (enam) kriteria, yaitu *Specific* (spesifik terhadap isu strategis dan sesuai NSPK Perangkat Daerah), *Measurable* (dapat diukur secara valid dan reliabel), *Achievable* (realistis untuk dicapai sesuai kapasitas dan kebutuhan), *Relevant* (selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan), *Time Bound* (selaras dengan periode perencanaan), serta *Continuous Improvement* (dapat disempurnakan secara berkelanjutan sesuai dinamika pembangunan).

Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun dengan memperhatikan hirarki level kinerja yang terdiri atas *strategic objectives*, *tactical objectives*, dan *operational objectives*. Setiap level memiliki keluaran yang berbeda, dimulai dari *operational objectives* melalui *output* di tingkat kegiatan dan subkegiatan; *tactical objectives* melalui *immediate outcome* di tingkat program dan *intermediate otucome* di tingkat tujuan/sasaran Perangkat Daerah; dan *final/ultimate outcomes* yang menggambarkan capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Target IKU, IKD, dan IKK ditetapkan untuk periode 2025–2030. Capaian tahun 2030 berfungsi sebagai indikator transisi yang menjadi tanggung jawab awal kepala daerah berikutnya, sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan lintas periode.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan informasi berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, dan membuat tindakan korektif secara dini. Kinerja juga berperan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penentuan indikator kinerja, proses *cacscading* juga dilakukan untuk menurunkan mandat kinerja daerah baik dari level pemerintahan maupun dokumen perencanaan. Indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 memperhatikan indikator dari RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselarasan sasaran pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan. Adapun rincian *cascading* indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Komparasi Target Capaian untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Barito Selatan

Target Capaian Nasional untuk Pulau Kalimantan				Target Capaian Provinsi Kalimantan Tengah				Target Capaian Kabupaten Barito Selatan			
RPJMN Tahun 2025-2029				*RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029*				*RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029*			
No	Indikator	Target		No	Indikator	Target		No	Indikator	Target	
		2025	2029			2025	2029			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,30	8,20	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	7,30	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	7,30
2	PDRB per Kapita	114,7	167,5	2	PDRB per Kapita (Rp)	85,30	124,00	2	PDRB per Kapita (Rp)	85,30	124,00
3	Kontribusi PDRB Pulau	8,6	9,0	3	Kontribusi PDRB Provinsi	1,0	1,0	3	Kontribusi PDRB Kabupaten	11,37	13,32
4	Tingkat Kemiskinan	4,24 - 5,24	2,52 - 3,52	4	Tingkat Kemiskinan	4,61	2,93	4	Tingkat Kemiskinan	4,61	2,93
				5	Rasio Gini	0,311	0,242	5	Rasio Gini	0,29	0,242
				6	Indeks Modal Manusia	0,55	0,59	6	Indeks Pembangunan Manusia	75,29	77,59
				7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	76,00	79,20	7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	47,87	60,9025
				8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,34	77,01	8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,74	77,59
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23 - 4,58	3,45 - 4,25	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,91	3,61	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,24	2,93

Tabel 4.3 Cascading Mandat Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 dengan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029

Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045				*RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029*				Letak
No	Indikator	2025	2029	No	Indikator	2025	2029	
1	**Peningkatan Pendapatan Per Kapita**							
	PDRB per Kapita (RP Juta)	67,94	79,725	**1**	PDRB per Kapita (RP Juta)	85,30	124,00	IKU
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	5,57	5,7875	**2**	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	5,66	5,92	IKD
2	**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**							
	Tingkat Kemiskinan	4,24	3,54	**3**	Tingkat Kemiskinan	4,61	2,93	IKU
	Rasio Gini (Indeks)	0,29	0,304	**4**	Rasio Gini (Indeks)	0,29	0,242	IKU
	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota	11,37	13,32	**5**	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota	11,37	13,32	IKD
3	**Kepemimpinan Berintegritas**							
	Rata-Rata Wilayah Skor Monitoring Centre for Prevention	84	87	**6**	Rata-Rata Wilayah Skor Monitoring Centre for Prevention	75,00	78,75	IKD
4	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**							
	Indeks Pembangunan Manusia	71,01	74,41	**7**	Indeks Pembangunan Manusia	75,29	77,59	IKU
5	**Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission**							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,98	73.01	**8**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,74	77,59	IKU

Tabel 4.4 Cascading Mandat Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 dengan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029

RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045				*RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029*				
Nomor	**Indikator Utama Pembangunan**	**Target**		**Nomor**	**Indikator Kinerja**	**Target**		**Letak**
		2025	**2029**			**2025**	**2029**	
	BS1. Kesehatan untuk Semua							
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,04	70,80	**1**	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,04	70,80	IKD
2	Angka Kematian Ibu	121	95	**2**	Angka Kematian Ibu	122	77	IKK
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10,05	8,79	**3**	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,8	14,2	IKK
3	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	58,95	69,21	**4**	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	58,95	69,21	IKD
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	94,85	96,13	**5**	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	94,85	96,13	IKD
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	99,5	99,5	**6**	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	99,5	99,5	IKD
	BS2. Pendidikan Berkualitas yang Merata							
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	33,85	43,29	**7**	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	53	55	IKD

RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045				RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029				
Nomor	Indikator Utama Pembangunan	Target		Nomor	Indikator Kinerja	Target		Letak
		2025	2029			2025	2029	
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	29,03	37,17	**8**	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	53	55	IKD
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	74,27	80,97	**9**	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	64,82	70,19	IKD
	Rata-Rata lama sekolah	9,32	9,99	**10**	Rata-Rata lama sekolah	9,25	9,99	IKD
	Harapan Lama Sekolah	12,99	13,35	**11**	Harapan Lama Sekolah	13,01	13,35	IKD
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,66	12,78	**12**	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,665	12,78	IKD
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	28,50	42,62	**13**	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	28,50	42,62	IKD
	BS3. Perlindungan sosial yang adaptif							
8	Tingkat Kemiskinan	5,08	3,95	**14**	Tingkat Kemiskinan	4,61	2,93	IKU
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	43,97	56,00	**15**	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	43,97	56,00	IKD
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	31,63	43,72	**16**	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	31,63	43,72	IKD
	BS4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	5,66	5,92	**17**	Rasio PDRB Industri Pengolahan	5,66	5,92	IKD

RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045				RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029				
Nomor	Indikator Utama Pembangunan	Target		Nomor	Indikator Kinerja	Target		Letak
		2025	2029			2025	2029	
12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,93	2,05	**18**	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,93	2,05	IKD
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	100	3.495	**19**	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	100	3.495	IKD
13	Indeks Daya Saing Daerah	2,93	3,54	**20**	Indeks Daya Saing Daerah	2,93	3,54	IKD
14	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	15,19	13,5	**21**	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	15,19	13,50	IKD
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	1,90	2,45	**22**	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	1,90	2,45	IKD
	Rasio Kewirausahaan Daerah	3,33	4,80	**23**	Rasio Kewirausahaan Daerah	3,33	4,80	IKD
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,76	3,19	**24**	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	8,82	11,53	IKD
	Return on Aset (ROA) BUMD	1,89	2,72	**25**	Return on Aset (ROA) BUMD	1,89	2,72	IKD
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,24	2,93	**26**	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,24	2,93	IKU
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	55,41	58,06	**27**	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	55,41	58,06	IKD
17	Indeks Kapabilitas Inovasi	0,82	1,34	**28**	Indeks Kapabilitas Inovasi	0,82	1,35	IKD
	BS5. Penerapan Ekonomi Hijau							
18	Indeks Ekonomi Hijau				Indeks Ekonomi Hijau			
	a. Produktivitas Sektor Pertanian	35,00	42,06	**29**	a. Produktivitas Sektor Pertanian	35,00	42,06	IKD
	b. Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	61,00	64,07	**30**	b. Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	61,00	64,07	IKD
	c. Produktivitas Sektor Tersier	62,00	84,37	**31**	c. Produktivitas Sektor Tersier	62,00	84,37	IKD

RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045				RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029				
Nomor	Indikator Utama Pembangunan	Target		Nomor	Indikator Kinerja	Target		Letak
		2025	2029			2025	2029	
	d. Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Tersier	31,00	33,48	**32**	d. Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Tersier	31,00	33,48	IKD
	e. Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian	4,00	3,98	**33**	e. Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian	4,00	3,98	IKD
	BS6. Transformasi Digital							
19	Proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet Telepon Seluler/Handphone dengan kondisi "Sinyal Sangat Kuat"	16,20	26,88	**34**	Proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet Telepon Seluler/Handphone dengan kondisi "Sinyal Sangat Kuat"	16,20	26,88	IKD
	BS7. Integarasi Ekonomi Daerah							
20	PDRB Deflator Barito Selatan di antara Simpangan Baku Deflator Kota/Kabupaten Antar Wilayah	Ya	Ya	**35**	PDRB Deflator Barito Selatan di antara Simpangan Baku Deflator Kota/Kabupaten Antar Wilayah	Ya	Ya	IKD
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,5	38,7	**36**	Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,5	38,7	IKD
22	Ekspor Barang dan Jasa	45,6	46,0	**37**	Ekspor Barang dan Jasa	45,6	46,0	IKD
	BS8. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
23	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	54,99	66,24	**38**	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	54,99	66,24	IKD
	Persentase Desa Mandiri	15,00	23,75	**39**	Persentase Desa Mandiri	15,00	23,75	IKD
	BS9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif							

RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045				RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029				
Nomor	Indikator Utama Pembangunan	Target		Nomor	Indikator Kinerja	Target		Letak
		2025	2029			2025	2029	
24	Indeks Reformasi Hukum	72,0	76,5	**40**	Indeks Reformasi Hukum	86,67	93,33	IKD
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,1	3,4	**41**	Indeks Pemerintahan Digital	Baik	Sangat Baik	IKD
26	Indeks Pelayanan Publik	2,5	3,0	**42**	Indeks Pelayanan Publik	2,5	3,0	IKU
27	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	75,00	78,75	**43**	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	75,00	78,75	IKD
	BS10. Hukum Berkedilan, Keamanan, Daerah Tanggguh dan Demokraso Substansial							
28	Indeks Maturiras SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Berkembang	Berkembang	**44**	Indeks Maturiras SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	3,1	3,9	IKD
29	Indeks Kejahatan (Crime Index)	1,00	0,82	**45**	Indeks Kejahatan (Crime Index)	1,00	0,82	IKD
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60 - 80)	Sedang (60 - 80)	**46**	Indeks Demokrasi Indonesia	70	75	IKD
	BS11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,80	0,85	**47**	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,80	0,875	IKD
32	Deflator PDRB	1,92	1,87	**48**	Deflator PDRB	1,92	1,87	IKD
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	23,19	33,10	**49**	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	23,19	33,10	IKD
34	Inklusi Keuangan	87,74	91,00	**50**	Indeks Akses Keuangan Daerah	3,9	4,00	IKD
	BS12. Birokrasi Ideal							
35	Indeks Reformasi Birokrasi	65	71	**51**	Indeks Reformasi Birokrasi	65,00	71,00	IKU

RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045				RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029				
Nomor	Indikator Utama Pembangunan	Target		Nomor	Indikator Kinerja	Target		Letak
		2025	2029			2025	2029	
36	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71	75	**52**	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71,00	75,00	IKD
	BS13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju							
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,53	60,00	**53**	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,53	60,00	IKD
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,4	82,0	**54**	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,4	82,0	IKD
	BS14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif							
39	Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga)	70,00	75,25	**55**	Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga)	70,00	75,25	IKD
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,52	0,45	**56**	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,529	0,45	IKD
	BS15.Lingkungan Hidup Berkualitas							
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,584	**57**	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,584	IKD
42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,03	82,36	**58**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,74	77,59	IKU
	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	3,26	14,94	**59**	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	3,26	14,945	IKD
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	13,69	31,51	**60**	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	13,69	31,51	IKD
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	37,76	53,32	**61**	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	37,76	53,32	IKD

RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045				RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029				
Nomor	Indikator Utama Pembangunan	Target		Nomor	Indikator Kinerja	Target		Letak
		2025	2029			2025	2029	
	BS16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan							
43	Konsumsi Listrik Per Kapita	718	1.000	**62**	Konsumsi Listrik Per Kapita	718	1.000	IKD
	Intensitas Energi Primer	183	170	**63**	Intensitas Energi Primer	183	170	IKD
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	14,65	11,65	**64**	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	14,65	11,65	IKD
	Kapasitas Air Baku	1,52	2,00	**65**	Kapasitas Air Baku	1,52	2,00	IKD
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	35,34	51,50	**66**	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	35,34	51,50	IKD
	BS17. Reseliensi Terhadap Bencana							
44	Indeks Risiko Bencana	111,54	100,83	**67**	Indeks Risiko Bencana	111,54	100,83	IKD
45	Persentase Penurunan Emisi GRK				Persentase Penurunan Emisi GRK			
	a. Kumulatif	27,61	36,78	**68**	a. Kumulatif	27,61	36,7875	IKU
	b. Tahunan	47,87	60,90	**69**	b. Tahunan	47,87	60,90	IKU

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai instrumen pengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang terseleksi. IKU berada pada level indikator *final/ultimate outcomes*. IKU dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah yang diselaraskan terhadap isu strategis dan janji politis Kepala Daerah. Indikator ini menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,29	75,86	76,44	77,01	77,59	78,17
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,74	76,95	77,17	77,38	77,59	77,81
3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,93	3,08	3,24	3,39	3,54	3,69
4	PDRB per Kapita	Rp Juta	85,30	94,98	104,65	114,33	124,00	133,68
5	Indeks Gini	angka	0,290	0,278	0,266	0,254	0,242	0,230
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60	6,03	6,45	6,88	7,30	7,73
7	Tingkat Kemiskinan	%	4,61	4,19	3,77	3,35	2,93	2,51
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,24	3,16	3,09	3,01	2,93	2,85
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	53.88	54.23	55.29	56.54	57.38	58.40
10	Indeks Harmoni	Indeks	6,59	6,60	6,65	6,67	6,70	6,72
11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,25	93,50	93.85	94,15	95,00	95,55
12	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,50	2,63	2,75	2,88	3,00	3,13
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,00	66,50	68,00	69,50	71,00	72,50
14	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	68,00	69,08	70,01	71,81	73,11	75,14
15	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,00	20,25	23,50	26,75	30,00	33,25

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung ketercapaian kinerja daerah, provinsi, dan nasional. IKD dimandatkan dari sasaran visi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045; indikator makro/sasaran provinsi dalam RPJMN Tahun 2025–2029; IKU dan IKD RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029; serta indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang tidak dijadikan sebagai IKU. IKD merupakan indikator yang berada di level *intermediate outcomes* dan disajikan berdasarkan aspek demografi dan geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan. Lebih lanjut, IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah, meliputi urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. IKK ini merupakan indikator di level *immediate outcomes* di tingkat program. Adapun IKD dan IKK dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Kabupaten Barito Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	95,20	95,59	95,99	96,38	96,77	97,16
3	Nilai Tukar Petani	Nilai	123,36	124,97	126,58	128,19	129,8	131,41
4	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	330,00	262,5	268,75	275	281,25	287,5
5	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Nilai	340,00	346,67	353,33	360	366,67	373,33
6	Intensitas Energi Primer	(SBM/Miliar)	183,00	179,75	176,50	173,25	170,00	166,75
7	Proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet Telepon Seluler/Handphone dengan kondisi "Sinyal Sangat Kuat"	%	16,20	18,87	21,54	24,21	26,88	29,55
8	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	%	3,26	6,18	9,10	12,02	14,95	17,87
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	13,69	18,15	22,60	27,06	31,51	35,97
10	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	37,76	41,65	45,54	49,43	53,32	57,21
11	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	14,65	13,90	13,15	12,40	11,65	10,90
12	Kapasitas Air Baku	Liter/detik	1,52	1,64	1,76	1,88	2,00	2,12
13	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	35,34	39,38	43,42	47,46	51,50	55,54
14	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,54	108,86	106,19	103,51	100,83	98,15
15	Persentase Penurunan Emisi GRK							
	a. Kumulatif	%	27,61	29,90	32,20	34,49	36,79	39,08
	b. Tahunan	%	47,87	51,13	54,39	57,64	60,90	64,16
16	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,557	0,564	0,571	0,577	0,584	0,591
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,77	0,68	0,62	0,56	0,52	0,46
18	Rasio Penduduk	Nilai	104,08	103,98	103,89	103,80	103,73	103,64

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
19	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	15,58	15,69	15,78	15,87	15,95	16,04
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	13,10	13,18	13,27	13,35	13,44
2	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	56,00
3	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	56,00
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,25	9,44	9,62	9,81	9,99	10,18
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	64,82	66,14	67,46	68,81	70,19	71,59
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,05	68,73	69,42	70,11	70,80	71,49
7	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Maju	Maju	Maju	Inklusif	Inklusif	Inklusif
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,75	57,45	58,00	58,70	59,25	59,94
9	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	2,75	3,00	3,35	3,85	4,00	4,25
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	86,40	86,43	86,47	86,50	86,53	86,56
11	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,53	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43
12	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,45	65,00	65,55	66,12	66,85	67,55
13	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,00	62,05	62,10	63,00	63,85	64,12
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	58,95	61,52	64,08	66,65	69,21	71,78
15	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	94,85	95,17	95,49	95,81	96,13	96,45
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,67	12,69	12,72	12,75	12,78	12,81

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
18	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	28,50	32,03	35,56	39,09	42,62	46,15
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	43,97	46,98	49,99	52,99	56,00	59,01
20	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	31,63	34,65	37,68	40,70	43,72	46,74
21	Indeks Kejahatan (Crime Index)	%	1,00	0,96	0,91	0,87	0,82	0,78
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	80,40	80,80	81,20	81,60	82,00	82,40
23	Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga)	Indeks	70,00	71,31	72,63	73,94	75,25	76,56
24	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	52,00	54,38	56,75	59,13	61,50	63,88
25	Angka Kelahiran Total	Angka	2,05	2,01	1,97	1,93	1,89	1,85
26	Jumlah Kematian Ibu	Angka	10,00	9,00	8,00	7,00	7,00	6,00
27	Jumlah Kematian Balita	Angka	200,00	188,00	176,00	166,00	156,00	147,00
28	Pravelensi Stunting	%	18,80	17,50	16,30	15,20	14,20	14,00
29	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	100	100	100	100	100	100
30	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	100	100	100	100	100	100
31	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100	100	100	100	100	100
32	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
33	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	64,00	64,70	65,40	66,10	66,80	67,50
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,93	1,96	1,99	2,02	2,05	2,08
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,33	3,70	4,07	4,43	4,80	5,17
3	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	8,82	9,62	10,34	10,98	11,53	12,00
4	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,720	0,729	0,762	0,778	0,781	0,798

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
5	Pendapatan per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Rupiah	0,00	33.875.000	35.575.000	36.375.000	37.675.000	38.750.000
6	Pertumbuhan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,23	0,27	0,32	0,37	0,42	0,48
7	Deflator PDRB	%	1,916	1,905	1,893	1,882	1,870	1,859
8	Persentase Peningkatan Investasi	%	87,00	90,00	93,00	94,00	95,00	97,00
9	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	3,60	3,70	3,80	3,91	4,01	4,11
10	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	5,66	5,69	5,75	5,82	5,91	6,02
11	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,90	3,92	3,95	3,98	4,00	4,02
12	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	54,99	57,80	60,62	63,43	66,24	69,05
13	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	718,00	788,50	859,00	929,50	1000,00	1070,50
14	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	5,66	5,73	5,79	5,86	5,92	5,99
15	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota	%	11,37	11,86	12,35	12,83	13,32	13,81
16	Jumlah Tamu Wisatawan							
	a. Mancanegara	Orang	100	949	1.798	2.646	3.495	4.344
	b. Nusantara	Orang	95.000	103.750	112.500	121.250	130.000	138.750
17	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	15,19	14,77	14,35	13,92	13,50	13,08
18	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	1,90	2,04	2,18	2,31	2,45	2,59
19	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,76	2,12	2,48	2,84	3,20	3,55
20	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,89	2,10	2,31	2,51	2,72	2,93
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,41	56,07	56,74	57,40	58,06	58,72
22	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	0,82	0,95	1,08	1,21	1,35	1,48
23	Indeks Ekonomi Hijau							
	a. Produktivitas Sektor Pertanian	Juta Rp	35,00	36,77	38,53	40,30	42,06	43,83
	b. Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	Juta Rp	61,00	61,77	62,54	63,30	64,07	64,84
	c. Produktivitas Sektor Tersier	%	62,00	67,59	73,19	78,78	84,37	89,96
	d. Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Tersier	%	31,00	31,62	32,24	32,86	33,48	34,10

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	e. Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	4,00	4,00	3,99	3,99	3,98	3,98
24	PDRB Deflator Barito Selatan di antara Simpangan Baku Deflator Kota/Kabupaten Antar Wilayah	Nilai	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
25	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	38,50	38,55	38,60	38,65	38,70	38,75
26	Ekspor Barang dan Jasa	%	45,60	45,70	45,80	45,90	46,00	46,10
27	Persentase Desa Mandiri	%	15,00	17,19	19,38	21,56	23,75	25,94
28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,80	0,82	0,84	0,86	0,875	0,89
29	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	23,19	25,67	28,15	30,62	33,10	35,58
30	Total Kredit/PDRB	%	21,80	24,23	26,65	29,08	31,50	33,93
31	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	21,4	27,5	33,6	40	46,9	54,3
32	Angka Ketergantungan	%	42,83	43,09	43,31	43,51	43,68	43,89
33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,60	70,30	71,00	71,80	72,50	73,30
34	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	38,50	38,55	38,60	38,65	38,70	38,75
35	Rasio desa berlistrik	%	98,73	98,98	99,23	99,48	99,73	100,00
36	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan Perda	%	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
37	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Jumlah	466	480	494	509	524	540
38	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,42	0,45	0,49	0,53	0,57	0,62
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Rasio Konektivitas	%	0,55:0,58	0,56:0,59	0,57:0,60	0,58:0,61	0,59:0,62	0,60:0,63
2	Indeks Harmoni	Indeks	6,59	6,60	6,65	6,67	6,70	6,72
3	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	Indeks	95	95	95	95	95	95
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	58,53	58,90	59,27	59,63	60,00	60,37
5	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	78,50	80,13	81,75	83,38	85,00	86,63
7	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,90	2,93	2,95	2,98	3,00	3,03

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
8	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Nilai	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat IV
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	A	A	A	A	A	A
10	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,10	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00
11	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	29,75	30,47	31,23	32,01	32,82	33,64
12	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	75,00	76,50	78,00	79,50	81,00	82,50
13	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,50	77,00	77,50	77,80	80,00	80,30
15	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	11,40	11,40	11,60	12,00	12,40	12,80
16	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00
17	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
18	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Persen	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
19	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,67	88,33	90,00	91,67	93,33	95,00
20	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	Nilai	75,00	75,94	76,88	77,81	78,75	79,69
21	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
22	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25
23	Persentase Penegakan Perda	%	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50
24	Indeks Kepatuhan Daerah	Indeks	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)							
	Pendidikan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,79	99,04	99,29	99,54	99,79	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	98,79	99,04	99,29	99,54	99,79	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	12,34	13,61	14,87	16,14	17,40	18,67
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	58,67-59,67	61,17-62,17	63,67-64,67	66,17-67,17	68,67-69,67	71,17-72,17
5	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,73	70,83	71,93	73,03	74,13	75,23
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	53,79	56,69	59,59	62,49	65,39	68,29
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,57	64,07	65,57	67,07	68,57	70,07
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	56,79	70,65	89,14	100	100	100
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	45,44	46,44	47,44	48,44	49,44	50,44
10	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	63,09	65,70	68,20	70,70	73,20	75,70
11	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	63,09	65,49	67,89	70,29	72,69	75,09
12	Iklim Keamanan SD	Nilai	79,97	80,87	81,77	82,67	83,57	84,47
13	Iklim Keamanan SMP	Nilai	76,09	77,59	79,09	80,59	82,09	83,59
14	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	73,68	74,68	75,68	76,68	77,68	78,68
15	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	74,53	75,53	76,53	77,53	78,53	79,53

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
16	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00
17	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	0,52	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
18	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	39,50	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00
19	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
20	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
	Kesehatan							
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	122,00	109,00	97,00	86,00	77,00	70,00
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ()	%	18,80	17,50	16,30	15,20	14,20	14,00
3	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	18,00	22,00	30,00	38,00	46,00	54,00
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	%	45,00	45,50	46,80	48,30	51,50	54,00
5	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	62,40	62,50	62,65	62,77	62,85	62,97
2	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	%	52,12	52,23	52,35	52,46	52,59	52,75
3	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	66,15	66,55	67,87	68,25	68,55	68,90

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	75,12	76,87	78,55	80,20	81,90	83,64
5	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	26,07	26,50	27,07	28,07	29,07	30,07
6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	79,89	80,82	81,92	82,97	83,97	83,97
7	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	23,11	24,11	25,11	26,11	27,11	28,11
8	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	45	100	100	100	100	100
9	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	55	100	100	100	100	100
10	Tingkat Kemantapan Jalan	Angka	38,93	39,53	40,33	41,14	41,96	42,86
11	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	8,51	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
12	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analisis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	75	150	225	300	375	450
13	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	70	65	60	55	50	45

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	78	76	74	72	70	68
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	70	68	66	64	60	58
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	72	74	76	78	80	85
6	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	50	54	56	58	60	70
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Nilai	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat IV
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	82	85	87	90	92	95
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	70	78	80	83	85	90
4	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	75	80	83	86	90	93
5	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	97	97	97	97	97
6	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	97	97	97	97	97
7	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	98	98	98	98	98	98
8	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
	Sosial							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase Taman Makam yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	100
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)							
	Tenaga Kerja							
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	54,35	54,35	57,02	59,4	61,53	61,53
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	70,31	70,31	71,75	73,67	75,35	75,35
4	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	12.166	12.166	13.124	14.129	14.998	14.998
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	2,60	3,00	3,80	4,30	5,00	5,00
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	50	50	65	70	75	80

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	40,22	42,85	57,14	71,42	85,71	100
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	56	60	68	73	82	85
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	78,50	78,55	79,01	79,57	80,12	81,01
	Pangan							
1	Persentase cadangan pangan	%	15,95	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	92,40	93,30	94,50	95,01	96,21	97,30
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	27,00	27,00	22,73	18,18	18,18	13,64
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	87	87	88	90	92	94
	Pertanahan							
1	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	40	45	50	55	60	65
2	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,20	0,50	0,80	1,50	2,00	4,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,20	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00
4	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	0,50	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
5	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%	12	14	16	17	18	20
6	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	2	3	4	5	6	7
7	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	4	6	8	10	12	14
	Lingkungan Hidup							
1	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,32	71,32	71,52	71,72	71,92	72,12
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,04	80,04	80,34	80,64	80,94	81,24
4	Persentase RTH	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
10	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	83,33	83,33	85,71	87,50	88,88	90,00
11	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	55,50	55,50	56,00	56,50	57,00	57,50
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	64,50	65,00	68,00	70,00	72,00	75,00
2	Perekaman KTP elektronik	%	98,30	98,50	98,80	99,00	99,30	99,80
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50
5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	57,00	57,30	57,80	58,30	59,00	60,00
6	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	63,00	63,20	63,40	63,70	63,90	64,20
7	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	%	5	7	9	11	13	15
8	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	15,00
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	13,95	14,50	17,50	19,50	20,50	21,50
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	5,90	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	34,14	17,73	15,19	12,66	10,13	10,13

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0	30,23	23,56	17,44	17,44	11,62
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	0	30,23	23,56	17,44	17,44	11,62
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,16	2,15	2,15	2,11	2,11	2,10
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	31	30	28	26	25	25
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR)	%	81,50	82,51	83,00	83,00	85,00	85,00
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	95,00	96,47	96,47	96,50	96,80	97,00
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	60,00	60,20	60,80	61,20	61,80	62,00
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	83,20	83,60	84,20	84,80	85,00	85,50
	Perhubungan							
1	Konektivitas Darat	%	3,0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	75	10	15	20	25	30
3	Konektivitas Laut	%	10	10	15	20	25	30
4	Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik	%	10	10	15	20	20	30
	Komunikasi dan Informatika							
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	79	79	80	80	80	85
2	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	3,14	2,63	2,75	2,88	3,00	3,13
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	15	15	30	25	20	20
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	25	25	25	20	20	10
3	Persentase koperasi aktif	%	20	20	20	20	20	20
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	20	20	20	20	20	20
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	20	20	20	20	20	20
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	30,92	30,92	17,27	17,27	17,27	17,27
7	Pertumbuhan Wirausaha	%	15	15	20	25	20	20
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	20	20	20	20	20	20
	Penanaman Modal							
1	Realisasi Total terhadap Target	%	90	90	95	96	97	98
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	90	90	95	96	97	98
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95,5	95,5	96,0	96,5	97,0	98,0
	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	0	3	3	3	3	4
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	Medali	1	1	1	1	1	1
	Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,90	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00
	Persandian							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Nilai	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat IV
	Kebudayaan							
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	80	80	90	90	100	100
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	80	80	90	90	100	100
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	80	80	90	90	100	100
4	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	3	3	3	3	3	3
	Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67,71	68,39	69,07	69,76	70,46	71,16
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	100	100	100	100	100	100
	Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	50	50	50	50	50	50
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	50	100	100	100	100	100
	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan							
	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan tangkap	Ton/Tahun	7.247,18	7.392,12	7.539,96	7.690,76	7.844,57	8.001,47
2	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	9.676,74	9.870,27	10.067,68	10.269,03	10.474,41	10.683,90
3	Luasan Kawasan Konservasi	Meter	139.000	286.000	643.000	643.000	1.190.000	2.760.000

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	43,59	44,46	54,35	46,26	47,18	48,12
	Pariwisata							
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	8	8	15	20	30	40
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	75	75	80	85	90	95
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	43	43	43	45	50	50
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi"	%	40	40	50	60	70	70
	Pertanian							
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	10,75	10,75	11,73	12,72	13,70	14,68
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	465,64	465,64	475,48	484,32	495,16	505,00
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	918,93	918,93	928,12	937,56	947,58	957,60
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	170,00	170,00	190,00	230,00	240,00	267,53
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	25	25	30	35	40	45
8	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	25	25	30	35	40	45
9	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	80	80	85	85	90	95

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
10	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	20	20	40	60	80	95
	Perdagangan							
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	79,40	79,40	96,80	96,80	100	100
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	20,83
4	Nilai Ekspor Barang	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	20	20	20	20	20	20
	Perindustrian							
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	17,95	17,95	20,51	20,51	20,51	20,51
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	9,09	9,09	22,73	22,73	22,73	22,73
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	9,09	9,09	22,73	22,73	22,73	22,73
	Transmigrasi							
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	%	98	100	100	100	100	100
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	98	100	100	100	100	100
3	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pendukung Pemerintahan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Sekretariat Daerah							
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan	Dokumen	530	530	550	550	560	580
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Kematangan UKBPJ	%	68	68	76	84	92	100
7	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
	Sekretarariat DPRD							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	85	85	85	85	85	85
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	95	95	95	95	95	95
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	90	90	90	90	90	90
	Urusan Penunjang Pemerintahan							
	Perencanaan							
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Keuangan							
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	8,50	8,50	7,50	7,00	6,50	6,00
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40	40	40	40	40	40
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	28,90	28,90	29,00	30,00	31,00	32,00
4	Persentase Penurunan SILPA	%	6,05	6,05	6,00	5,15	5,09	5,00
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	8,50	8,50	7,50	7,00	6,50	6,00
7	Persentase Penurunan SILPA	%	6,05	6,05	6,00	5,15	5,09	5,00
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	22	22	23	24	25	26
9	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	22	22	23	24	25	26
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	80	85	90	95	100	100
11	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	80	85	90	95	100	100
12	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	80	85	90	95	100	100
	Kepegawaian							
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	40	55	70	85	90	100
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	2,60	2,60	3,00	3,20	3,50	3,80
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	2,30	2,30	2,50	2,90	3,00	3,20
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	82,50	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
	Pendidikan dan Pelatihan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	0,50	0,50	0,80	1,00	1,20	1,40
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	2,00	2,00	2,20	2,50	2,70	3,00
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	0,80	0,80	1,00	1,40	1,50	1,80
4	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	2,50	2,50	2,70	2,90	3,00	3,10
	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Urusan Pengawasan Pemerintahan							
	Inspektorat							
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	80	80	82	85	88	90
2	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4	TindakLanjut Rekomendasi APIP	%	45	45	55	60	65	70
5	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,20	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00
6	Manajemen Risiko (MR)	Indeks	3,20	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00
7	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3,20	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00
	Unsur Kewilayahan							
	Kecamatan Dusun Hilir							
1	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100
4	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
5	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Dusun Selatan							
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	10	10	10	15	15	25
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	80	82	85	90	95	100
3	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	%	2	2	2	2	2	2
4	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	%	80	86	85	90	95	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
5	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	80	82	85	90	95	100
	Kecamatan Dusun Utara							
1	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100
5	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Gunung Bintang Awai							
1	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	%	80	82	85	90	95	100
2	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	80	82	85	90	95	100
3	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	%	80	82	85	90	95	100
4	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	80	82	85	90	95	100
5	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	%	80	82	85	90	95	100
	Kecamatan Jenamas							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	%	80	82	85	90	95	100
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	80	82	85	90	95	100
3	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	%	80	82	85	90	95	100
4	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	80	82	85	90	95	100
5	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	80	82	85	90	95	100
	Kecamatan Karau Kuala							
1	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	%	80	82	85	90	95	100
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	80	82	85	90	95	100
3	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	%	80	82	85	90	95	100
4	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	80	82	85	90	95	100
5	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	80	82	85	90	95	100
	Urusan Pemerintahan Umum							
	Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

4.2.3 Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimum menjadi instrumen utama dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan publik yang setara, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jenis Pelayanan pada SPM mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai wujud komiten dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan target pencapaian SPM sebesar 100 persen untuk seluruh urusan pelayanan dasar mulai dari tahun 2025 hingga 2030. Target ini ditetapkan secara tegas sebagai kewajiban yang bersifat absolut dan tidak dapat ditawar (*non-negotiable),* mengingat SPM merupakan instrumen dasar dalam memastikan setiap warga negara memperoleh layanan publik yang layak, merata, dan bermutu. Capaian 100 persen SPM Mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi mandat konstitusional serta amanat regulasi nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Oleh karena itu , seluruh perangkat daerah terkait diarahkan untuk menyusun strategi yang terukur dan terintegrasi guna memastikan seluruh indikator SPM dapat dicapai secara penuh dalam rentang waktu lima tahun. Berikut merupakan target dari SPM tahun 2025-2030:

Tabel 4.7 Target Realisasi Capaian SPM (%), 2025-2030

Urusan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendidikan	100	100	100	100	100	100
Kesehatan	100	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum	100	100	100	100	100	100
Perumahan Rakyat	100	100	100	100	100	100
Trantibumlinmas	100	100	100	100	100	100
Sosial	100	100	100	100	100	100

Berikut merupakan penjabaran terperinci mengenai jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021:

Tabel 4.8 Target Realisasi Capaian SPM setiap Urusan (%), 2025-2030

Program	2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN PENDIDIKAN						
Pengelolaan Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pendidikan Kesetraan	100	100	100	100	100	100
URUSAN KESEHATAN						
Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	100	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEKERJAAN UMUM						
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	100	100	100	100	100	100
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT						
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bahi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
URUSAN TRANTIBUMLINMAS						

Program	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100	100	100	100
URUSAN SOSIAL						
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100	100
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana	100	100	100	100	100	100

Sebagai upaya penyelarasan SPM Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan sebagai upaya pemenuhan capaian standar pelayanan minimum. Target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan mengacu pada Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025. Berikut merupakan penjabaran dari target indikator tersebut.

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan, 2025-2030

Indikator		Jenjang	Capaian 2024	Adjusted Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SD	57,17	59,67	62,17	64,67	67,17	69,67	72,17
2	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	68,63	69,73	70,83	71,93	73,03	74,13	75,23
3	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	50,89	53,79	56,69	59,59	62,49	65,39	68,29
4	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	61,07	62,57	64,07	65,57	67,07	68,57	70,07
5	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	91,99	94,54	97,08	99,63	100	100	100
6	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	98,54	98,79	99,04	99,29	99,54	99,79	100
7	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Kesetaraan	11,08	12,34	13,61	14,87	16,14	17,4	18,67
8	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	48,33	56,79	70,65	89,14	100	100	100
9	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	53,42	45,44	46,44	47,44	48,44	49,44	50,44
10	D.10 Iklim Inklusivitas	SD	60,7	63,2	65,7	68,2	70,7	73,2	75,7
11	D.10 Iklim Inklusivitas	SMP	60,69	63,09	65,49	67,89	70,29	72,69	75,09
12	D.4 Iklim Keamanan	SD	79,07	79,97	80,87	81,77	82,67	83,57	84,47
13	D.4 Iklim Keamanan	SMP	74,59	76,09	77,59	79,09	80,59	82,09	83,59
14	D.8 Iklim Kebinekaan	SD	72,68	73,68	74,68	75,68	76,68	77,68	78,68
15	D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	73,53	74,53	75,53	76,53	77,53	78,53	79,53

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Sebagai bentuk penyelarasan program kesehatan nasional dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), telah juga ditententukan indikator kinerja kesehatan sebagai upaya mendukung pemenuhan capaian SPM Urusan Kesehatan. Target Indikator Kinerja Urusan Kesehatan mengacu pada Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025. Berikut merupakan penjabaran dari target indikator tersebut.

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan, 2025-2030

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kabupaten/Kota	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Usia harapan hidup	68,73	69,42	70,11	70,80	71,49
	Total Fertility Rate (Angka kelahitan total)	2,01	1,97	1,93	1,89	1,85
	Jumlah kematian ibu	9,00	8,00	7,00	7,00	6,00
	Jumlah kematian balita	188,00	176,00	166,00	156,00	147,00
	Prevalensi stunting	17,50	16,30	15,20	14,20	14,00
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	100	100	100	100	100
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	100	100	100	100	100
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	100	100	100	100	100
	Angka keberhasilan pengobatan TB	95,17	95,49	95,81	96,13	96,45
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	64,70	65,40	66,10	66,80	67,50

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

BAB V
Penutup



BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai salah satu *output* dalam rangkaian proses tahapan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Barito Selatan. Sesuai amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan dokumen RPJMD merupakan penyempurnaan dari rancangan awal RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih beserta masukan substantif dari rancangan teknokratik.

Dokumen ini menjadi landasan awal dalam mewujudkan cita-cita "*Barito Selatan Maju Baramaan 2045*" sebagaimana tercantum dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045. Tahap pertama dalam periodisasi RPJPD ini berfokus pada "Transposisi pondasi pembangunan" sebagai langkah membangun dasar-dasar strategis yang kokoh guna mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Perwujudan pondasi pembangunan kemudian diterjemahkan melalui visi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, yaitu "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara".

Dengan *tagline* pembangunan "*Bekerja Bersama, Merangkul Semua*" dan enam misi yang secara konkret menjawab isu strategis daerah beserta tujuan dan sasaran pembangunannya, diharapkan seluruh strategi dan arah kebijakan dapat terlaksana secara sistematis, responsif terhadap kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah. Sebagai langkah konkret, RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 telah merumuskan 32 program prioritas yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, guna memastikan konsistensi perencanaan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 mengedepankan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Hal ini diterapkan bukan hanya untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif secara substantif, namun agar operasionalisasi teknis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan penekanan terhadap skema pelaksanaan dokumen ini, yaitu:

a) Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerah, termasuk dalam merealisasikan program prioritas;
b) Arah kebijakan pembangunan dalam dokumen ini disusun secara *cascading*, dengan memperhatikan keterpaduan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2014–2034, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029;
c) Penguatan basis data pembangunan yang terintegrasi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan *evidence-based policy*. Sinergi antar instansi diperlukan untuk memastikan ketersediaan data indikator yang valid, terukur, dan dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah; dan
d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu, dan berbasis bukti, sebagai instrumen utama dalam memastikan arah pembangunan tetap berada dalam koridor tujuan dan target yang telah ditetapkan.

5.2. Skema Monitoring dan Evaluasi

RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirancang untuk meminimalkan hambatan dan potensi ancaman pembangunan melalui penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko dalam seluruh siklus pembangunan. Melalui evaluasi berkala, pemerintah daerah dapat memantau capaian program prioritas, mendeteksi deviasi dari target, dan menyusun rekomendasi perbaikan segera. Monitoring dan evaluasi mencakup indikator kinerja beserta data pendukung dan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam proses transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dengan sistem SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) atau SILPPD (Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) berbasis SIG, daerah akan lebih proaktif merespons perubahan regulasi, gangguan eksternal, atau efisiensi anggaran, sehingga pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan resilien menghadapi berbagai potensi hambatan.

Skema pemantauan, peninjauan kembali, dan evaluasi menjadi hal penting untuk mencapai proses pembangunan yang adil, beretika, dan demokratis. Pemantauan adalah cara untuk mengidentifikasi apakah pembangunan sesuai dengan arah kebijakan; peninjauan kembali adalah cara untuk menata kembali proses pembangunan ketika terjadi *force majeure* pada periode berjalan; dan evaluasi adalah cara untuk menilai keberhasilan proses pembangunan. Ketiga proses tersebut juga ditujukan untuk menyelaraskan perencanaan tahunan pemerintah daerah di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD. Adapun secara detail ketiga proses tersebut diuraikan pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

BARITO SELATAN

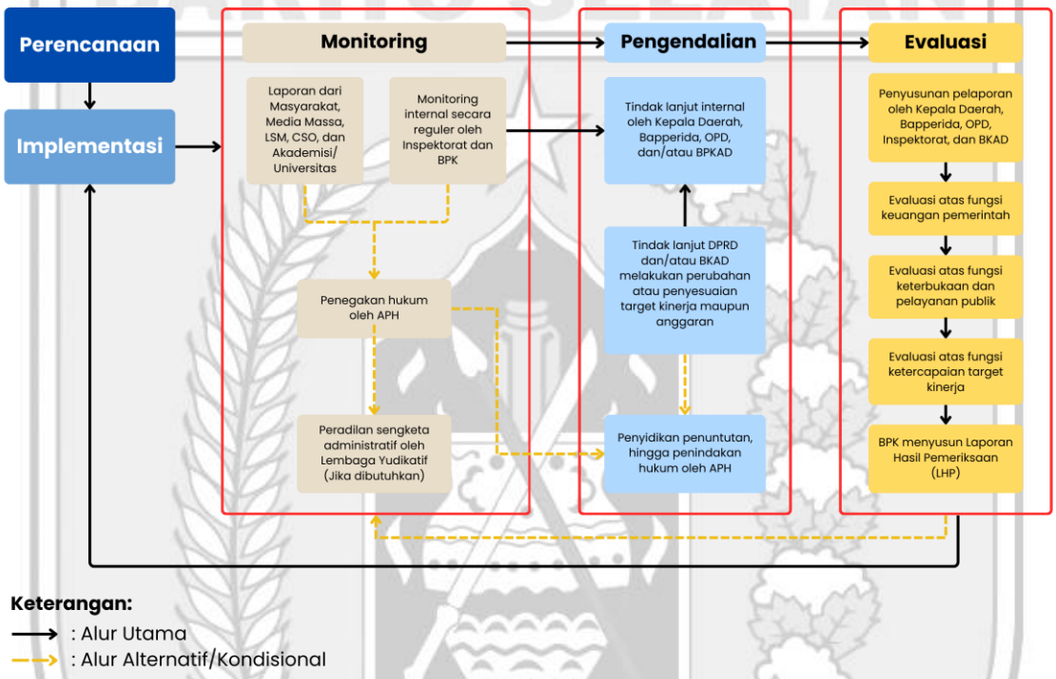
Tabel 5.1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029

No	Jenis	Waktu					Target	Pelaksanaan		
		2025	2026	2027	2028	2029		Forum Pelaksanaan	Pelaksana	Luaran
1	Pemantauan	V	V	V	V		Penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dengan RKPD; beserta pemantauan proses pembangunan dan capaian indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD	Forum Pemantauan Lintas Perangkat Daerah	Internal Pemerintah Daerah Antar-PD	Laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
								Forum Pengendalian Pembangunan Daerah	Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait	Diseminasi dan publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta masukan untuk tindak lanjut proses pembangunan
2	Peninjauan Kembali (jika diperlukan)		V	V	V		Review terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan jika terjadi kondisi *force majeure* yang tidak bisa terhindarkan pada periode berjalan.	Forum Mitigasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Internal Pemerintah Daerah Antar-PD serta Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait	Laporan peninjauan dan tindak lanjut penyesuaian di dalam dokumen RPJMD dan RKPD atas *force majeure* yang terjadi

BARITO SELATAN

No	Jenis	Waktu					Target	Pelaksanaan		
		2025	2026	2027	2028	2029		Forum Pelaksanaan	Pelaksana	Luaran
3	Evaluasi					V	Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target di dalam kebijakan dan arah pembangunan serta pencapaian target indikator pembangunan, sebelum proses perencanaan RPJMD periode selanjutnya dilaksanakan.	Forum Evaluasi Lintas Perangkat Daerah	Internal Pemerintah Daerah Antar-PD	Laporan evaluasi atas proses dan capaian pembangunan mengacu pada RPJMD
								Forum Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait	Diseminasi dan publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta masukan untuk tindak lanjut RPJMD selanjutnya

Berdasarkan Tabel 5.1, maka monitoring, pengendalian, dan evaluasi akan dilaksanakan sebagai sebuah rangkaian terpadu. Ketiganya akan berjalan dalam siklus berulang dengan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pengendalian pada periode berikutnya. Keterpaduan ini tidak hanya menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.



Gambar 5.1 Siklus Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi

Monitoring diawali oleh mekanisme pengawasan dan pelaporan. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK yang berperan dalam menilai kinerja pelayanan publik, fungsi keuangan pemerintah, serta ketercapaian kinerja pelayanan pemerintah. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit, review, hingga observasi lapangan. Secara paralel, peran pentahelix dari masyarakat, media massa, LSM, CSO, dan akademisi dihadirkan untuk menyampaikan aspirasi berupa keluhan, kritik, indikasi penyimpangan, atau riset terkait efektivitas maupun inovasi pelaksanaan program. Kedua mekanisme ini membentuk rantai deteksi awal yang saling memperkuat, laporan publik dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh Inspektorat atau BPK, dan sebaliknya hasil audit dapat mendorong keterlibatan publik.

Apabila hasil monitoring mengindikasikan pelanggaran atau penyimpangan, proses berlanjut pada tahap penegakan hukum awal oleh Aparat Penegak Hukum (APH), baik berdasarkan laporan resmi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun investigasi dari sumber lain. Jika terjadi sengketa adminsistratif atau hukum terkait hasil monitoring, penyelesaiannya memerlukan lembaga yudikatif sebagai penyedia ruang penyelesaian secara formal untuk mengatasi perselisihan antara pemerintah dan pihak terkait.

Tahap pengendalian dilakukan setelah temuan hasil monitoring teridentifikasi, dengan tujuan mencegah, memperbaiki, dan menindaklanjuti permasalahan. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, dan BKAD bertanggung jawab menindaklanjuti hasil monitoring internal secara berkala yang dilaksanakan oleh Inspektorat maupun BPK, termasuk melakukan penyesuaian pada pelayanan publik, keterbukaan informasi, fungsi keuangan, capaian kinerja, serta arah pelaksanaan program/kegiatan sesuai rekomendasi dan masukan yang diterima. Selanjutnya, DPRD bersama BKAD melakukan penyesuaian atau penundaan alokasi anggaran terhadap program/kegiatan yang bermasalah, serta melakukan koreksi target kinerja. DPRD memanfaatkan temuan monitoring untuk mendorong perbaikan dalam siklus anggaran berjalan maupun berikutnya. Apabila teridentifikasi pelanggaran serius seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya, APH akan melanjutkan proses ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga penindakan hukum. Proses ini dapat berlangsung secara paralel atau menjadi kelanjutan langsung dari temuan monitoring, khususnya jika terkait indikasi tindak pidana.

Evaluasi dilaksanakan setelah berakhirnya periode pelaksanaan program atau kegiatan, baik secara triwulan, tahunan, maupun pada akhir periode perencanaan, dengan mengacu pada hasil monitoring rutin serta temuan lembaga pengawas. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, Inspektorat, dan BKAD akan menyusun laporan evaluasi internal secara berkala yang memuat analisis ketercapaian target kinerja, pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik. Di sisi lain, lembaga pengawas yang berwenang juga dapat melakukan

evaluasi terhadap indikator yang sama untuk memastikan objektivitas hasil. Secara reguler, BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai instrumen akuntabilitas kepada DPR/DPRD. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pada periode berikutnya, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan program. Apabila ditemukan pelanggaran atau kegagalan kinerja, hasil evaluasi akan masuk kembali ke siklus monitoring dan pengendalian sehingga menciptakan mekanisme serta siklus perbaikan berkelanjutan. Sebaliknya, jika tidak terdapat pelanggaran, hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan perencanaan dan/atau implementasi perencanan berikutnya.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

INDONESIA EMAS 2045

KALTENG TANGGUH 2045

KALTENG BERKAH
KALTENG MAJU



BAPPERIDA
KABUPATEN BARITO SELATAN

Jl. Pahlawan KM. 06 Buntok, Kabupaten Barito Selatan,
Kalimantan Tengah (0525) 21504